

Editor: Raudatul Ulum

MEMAHAMI REALITAS SOSIAL KEAGAMAAN

Tim Penulis:

Yohanes Budiarto, Izzatin Kamala, Aam Slamet Rusydiana,
Mukhibat, I Made Arsana Dwiputra



**Kementerian Agama RI
Badan Litbang dan Diklat
Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Jakarta, 2015**

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Memahami Realitas Sosial Keagamaan

ISBN : 978-602-8739-42-9

xxii + 380 hlm; 15 x 21 cm.

Cetakan ke-1 November 2015

Hak cipta pada Penerbit

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah dari penerbit.

Penulis: Yohanes Budiarto, Izzatin Kamala, Aam Slamet Rusydiana,
Mukhibat, I Made Arsana Dwiputra

Editor: Raudatul Ulum

Desain cover dan Layout oleh : Suka, SE

Penerbit:

Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Badan Litbang dan Diklat

Kementerian Agama RI

Jl. M. H. Thamrin No.6 Jakarta 10340

Telp./Fax. (021) 3920425 - 3920421

<http://puslitbang1.kemenag.go.id>

KATA PENGANTAR

KEPALA PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN

Alhamdulillah, kami pandatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang memberikan jalan dan kemudahan kepada kami dalam hal menerbitkan buku **Memahami Realitas Sosial Keagamaan**. Buku ini adalah kompilasi dari berbagai tema hasil penelitian kompetitif pada tahun anggaran 2014 yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Penerbitan buku ini adalah upaya untuk menyebarluaskan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, sebagai wujud tanggungjawab kami untuk melakukan transformasi pengetahuan kepada masyarakat khususnya tentang kehidupan keagamaan. Buku ini diharapkan bisa meningkatkan kapasitas ruang pengetahuan dan informasi di tengah-tengah masyarakat.

Pada penerbitan kali ini, kami menghadirkan ke dalam buku sebanyak 5 (lima) naskah. Naskah-naskah hasil penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

- 1) Skema Keagamaan dan Fundamentalisme Agama: Tinjauan Psikologi
- 2) Transformasi Pelayanan Administrasi Pernikahan-Kependudukan: KUA Gondomanan Kota Yogyakarta
- 3) Masih Perlukah FKUB?

- 4) Rekonstruksi Spirit Harmoni Berbasis Masjid (*Studi Kasus KPM Tematik Posdaya di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*),
- 5) *Dharma Wacana, Pedharma Wacana dan Ajeg Bali di Bali Pasca Reformasi.*

Lima tema yang diterbitkan semoga dapat memberikan suatu pengalaman membaca bagi pembaca sekalian, serta dapat menjadi acuan bagi pihak yang sedang menyusun tulisan, dan dapat berfungsi sebagai data dan informasi yang melengkapi informasi keagamaan. Tidak mudah untuk menghadirkan suatu naskah hasil penelitian menjadi suatu bacaan yang mengalir karena aspek originalitas masih dipertahankan pada buku ini.

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang berperan penting dalam penerbitan ini:

- 1) Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama atas arahan dan dorongannya sehingga Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan dapat menyelesaikan penerbitan sesuai dengan yang direncanakan.
- 2) Prof. Dr Imam Suprayogo yang telah memberikan prolog pada buku ini sedemikian apik dan mencerahkan.
- 3) Penulis buku, peneliti yang telah terlibat pada Penelitian Kompetitif Tahun 2014.
- 4) Tim Editor atas kerja dan tanggungjawabnya untuk mengedit dan merapikan naskah buku ini sebaik-baiknya.
- 5) Tim pelaksana teknis yang telah melaksanakan rangkaian kegiatan hingga naskah buku bisa terbit.

- 6) Pihak lain yang memberikan bantuan teknis dan berkontribusi aktif dalam hal saran dan mutualisme buku ini sendiri.

Akhir kata, kami sadari buku ini memiliki banyak kekurangan dan kelemahan terutama dalam hal penulisan baik secara teknik maupun materi. Tentunya sumbangsih saran dan masukan dari pembaca kita terima sebaik-baiknya untuk perbaikan pada penerbitan berikutnya. Selanjutnya semoga buku ini bermanfaat.

Jakarta , November 2015
Kepala,

H. Muharram Marzuki, Ph.D
NIP. 19630204 199403 1 002

SAMBUTAN KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Menghadirkan agama ke ruang publik merupakan hal yang selalu menarik dan menantang. Agama yang merupakan sistem tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan cenderung bersifat pribadi, harus mengalami transformasi saat bersinggungan dengan pergaulan antarmanusia dan lingkungan yang lebih terbuka.

Kementerian Agama adalah manifestasi dari bagaimana Agama “dilembagakan”, berfungsi fasilitatif terhadap berbagai kepentingan umat beragama. Kementerian sebagai institusi pemerintahan diharuskan menjadi pelayan bagi seluruh penganut agama, diharapkan menjadi rumah bagi seluruh agama baik itu “besar” maupun “kecil”, bahkan berlaku karib dengan “agama lokal”. Ke depan, Kementerian Agama tidak hanya dituntut untuk mewadahi, memfasilitasi dan melindungi para penganut agama di Indonesia, tetapi dituntut dapat menghadirkan nuansa keagamaan dalam kebijakan publik.

Saat ini, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama memiliki tanggungjawab untuk memahami bagaimana masyarakat menjalankan kewajiban agama yang dapat seiring sejalan dengan kebijakan negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Data dan informasi yang diperoleh ditujukan untuk menyusun kebijakan yang rasional, berpihak dan ramah bagi seluruh penganut agama, tidak hanya menyangkut tentang agama *an sich*, namun dapat juga digunakan untuk berbagai kebijakan lain terutama

menyangkut sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan.

Sehubungan dengan tuntutan agar Kementerian Agama membuat kebijakan yang “mengayomi” seluruh umat beragama di Indonesia, maka posisi Badan Litbang dan Diklat berada pada garis proses yang sama sekali tak bisa diabaikan. Hanya saja, acapkali hasil penelitian itu tidak serta-merta dapat menjadi kebijakan secara praktis, diperlukan suatu pengembangan yang berproses menjadi suatu bahan kebijakan yang handal.

Telah banyak upaya yang dihadirkan untuk memberikan masukan kepada para eksekutor kebijakan di Kementerian Agama, satu diantaranya adalah hasil penelitian tentang kerukunan umat beragama yang menghasilkan kebijakan pembuatan Forum Komunikasi Umat Beragama untuk mengendalikan gesekan horizontal antarumat beragama. Penelitian lainnya yang menjadi kebijakan strategis adalah kualitas layanan keagamaan di Indonesia, yang melahirkan kebijakan pemilihan program prioritas Kementerian Agama berupa Quick-Wins yang membuahkan penilaian pelayanan haji di Indonesia menjadi yang terbaik di dunia (versi World Hajj and Umrra Convention (WHUC)), kemudian pelayanan nikah yang juga menyusul perbaikannya dengan angka indeks pelayanan, serta indeks biaya pelayanan nikah di KUA. Meskipun dari aspek kepuasan pelayanan masih jauh dari yang diharapkan, akan tetapi hal tersebut dapat mengukur bagaimana hasil penelitian bekerja untuk membuat kebijakan yang berhasil dan berdayaguna.

Dalam rangka mengoptimalkan penyediaan hasil-hasil penelitian yang dapat dibaca oleh masyarakat terutama *stakeholders*, selain pengguna langsung yang menjadikannya

sebagai bahan perumusan kebijakan di lingkungan Kementerian, maka pada Tahun Anggaran 2015 Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat kembali menyajikan hasil penelitian yang telah diseminarkan. Buku yang hadir merupakan hasil dari *event* Penelitian Kompetitif Kehidupan Keagamaan Puslitbang Kehidupan Keagamaan Tahun 2014. Penelitian yang telah dilakukan seluruhnya bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan di Kementerian Agama dan *stakeholders*, serta diharapkan dapat menjadi bacaan bagi masyarakat luas.

Semoga buku ini dapat berfungsi selayaknya sumber pengetahuan dan bermanfaat untuk semua pihak.

Jakarta, November 2015

Kepala Badan Litbang dan Diklat

Prof. H. Abdurahman Mas'ud, Ph.D
NIP. 19600416 198903 1 005

PROLOG

MEMAHAMI REALITAS SOSIAL KEAGAMAAN

Prof. Dr. Imam Suprayogo

Dalam realitas kehidupan, apa yang dipikirkan oleh seseorang dan juga bahkan oleh banyak orang ternyata tidak selalu sama dengan yang terjadi. Pikiran dan harapan seseorang sedemikian indah, tetapi keindahan yang digambarkan itu tidak selalu menjadi kenyataan. Peraturan dan bahkan undang-undang berhasil dirumuskan, tetapi implementasinya tidak selalu mudah dilakukan. Pikiran-pikiran ideal selalu saja berjarak dari kenyataan yang ada.

Hal tersebut tidak terkecuali dalam agama. Bahkan kadang paradoks. Agama mengajarkan agar antarsesama saling mengenal atau *ta'aruf*, saling memahami atau *tafahum*, saling menghargai atau *tadhammun*, saling menyayangi atau *tarakhum*, dan berujung agar menjadi saling tolong menolong atau *ta'awun*, namun ternyata dalam kehidupan yang sebenarnya justru sebaliknya. Sekalipun perbedaan diciptakan setidaknya agar saling kenal mengenal, tetapi tidak jarang yang terjadinya adalah justru saling menjauh, konflik atau menjadi pembatas dalam kehidupan bermasyarakat.

Menyangkut ajaran berbagai agama, apa yang dapat dibaca dari teks atau kitab suci ternyata berbeda dari apa yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Jarak itu kadangkala terlalu jauh. Agama mengajarkan kasih sayang, kelembutan, toleransi, dan saling menghormati, tetapi ternyata tidak jarang penganutnya saling menjauh, berperilaku kasar, dan bahkan saling menyinggung dan

menyakiti dianggap hal biasa. Kasus-kasus seperti yang dimaksudkan itu tidak sulit dicarikan buktinya.

Memang tidak sedikit ajaran agama yang berhasil diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pada ajaran agama, masyarakat menjadi hidup damai, tenteram, dan saling menjalin kasih sayang, dan tolong-menolong di antara sesama. Akan tetapi, gambaran ideal itu tidak selalu bisa dilihat pada setiap waktu dan tempat. Munculnya berbagai kekerasan atas nama agama merupakan bukti bahwa apa yang terasa ideal pada kitab suci atau ajaran agama ternyata belum tentu berhasil dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan yang terjadi seringkali berlawanan dengan gambaran ideal itu.

Kenyataan tersebut kiranya bisa dicari akar penyebabnya. Mungkin ajaran agama yang ideal itu tidak dipahami hingga ruh atau substansinya, melainkan baru sebatas aspek luar atau simbol-simbolnya belaka sehingga pengertian yang diperoleh tidak sampai mendalam dan menyeluruh. Selain itu juga sangat mungkin, ajaran agama dimaksud, baik disengaja atau tidak, digunakan untuk kepentingan tertentu, misalnya ekonomi, politik, atau lainnya. Berbicara agama ketika dikaitkan dengan kehidupan sosial akan selalu menjadi melebar, meluas, dan bahkan juga sebaliknya, menyempit. Itulah sebabnya, antara teks dan konteks agama menjadi berbeda.

Sebagai contoh sederhana, Islam mengajarkan tentang kerukunan, kebersamaan dan persatuan. Disebutkan di dalam kitab suci bahwa umat manusia adalah umat yang satu, atau *ummatan wahidah*, sehingga seharusnya mereka itu tidak bercerai berai. Namun pada kenyataannya, perpecahan atau perbedaan dianggap sebagai sesuatu yang wajar, lazim, dan

niscaya. Bahkan, perbedaan yang nyata-nyata melahirkan kelemahan dan ketidak-berdayaan umat, justru dipandang sebagai sesuatu yang menguntungkan. Hal demikian itu, mungkin saja agama belum dilihat dari aspek yang lebih mendasar dan substantif, melainkan hanya dipahami dari salah satu sudut yang dangkal.

Berangkat dari kenyataan tersebut, Kementerian Agama melalui Badan Litbang dan Diklat, melakukan kajian agama dari aspek kehidupan sosialnya. Upaya dimaksud sebenarnya tidak selalu mudah dilakukan. Sekalipun telah menggunakan berbagai piranti ilmu-ilmu sosial, seperti sejarah, sosiologi, psikologi, dan antropologi hasilnya ternyata tidak selalu memuaskan. Hasil kajian tersebut tidak selalu berhasil memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Hal demikian itu terjadi, disamping karena keterbatasan metodologi juga pada kenyataannya. Masyarakat selalu tumbuh dan berkembang, cenderung mengalami perubahan yang cepat. Sebab lainnya, ajaran agama sering dimaknai dan ditafsirkan sesuai dengan perkembangan pemikiran para tokoh dan pemeluknya.

Buku yang diberi judul Memahami Realitas Sosial Keagamaan yang merupakan kompilasi hasil penelitian kompetitif pada Tahun 2014, sebagai hasil karya Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama ini sesungguhnya cukup menarik. Berbagai bab dalam buku ini sepiantas tidak terasa ada kaitannya antara satu dengan lainnya. Hal demikian itu bisa dimengerti oleh karena, sebagaimana dijelaskan, adalah merupakan himpunan hasil penelitian yang memiliki obyek dan fokus berbeda-beda. Namun dari lima jenis laporan penelitian itu sebenarnya masih dapat dilihat

benang merah, kaitan antara hasil penelitian satu dengan lainnya, sehingga pantas dihimpun ke dalam satu buku ini.

Benang merah yang dimaksud, di antaranya adalah menyangkut kebaruan dan relevansinya dengan isu-isu keagamaan yang berkembang pada akhir-akhir ini. Misalnya, apa yang diteliti oleh Yohanes Budianto terkait kepribadian, skema keagamaan, dan fondamentalisme, ternyata mendapatkan kesimpulan yang tergolong baru dan menarik. Ia membedakan antara fondamentalisme agama dan skema keagamaan antara remaja laki-laki dan perempuan. Remaja perempuan ternyata lebih terbuka dan toleran. Kesimpulan ini penting untuk memperoleh perhatian terutama terkait dalam merumuskan strategi pembinaan kehidupan keagamaan.

Hal lain yang tampaknya sederhana tetapi memiliki arti penting dalam memberikan pelayanan terhadap kehidupan beragama, adalah tentang transformasi pelayanan administrasi pernikahan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Dharma Wacana di Bali. Tidak sedikit problem sosial berawal dari pernikahan. Sementara itu, pelayanan pernikahan belum berjalan sebagaimana semestinya hanya disebabkan oleh karena faktor manajemen yang dikembangkan. Melalui penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa problem itu bisa diatasi dengan cara sederhana, yaitu lewat kebersamaan dalam menyediakan data.

Hasil penelitian tentang peran FKUB cukup menarik, dijelaskan bagaimana forum tersebut yang sedemikian penting tetapi baru dijalankan secara sambilan, dana terbatas, dan bersifat formalitas. Hasil penelitian ini mengingatkan tentang betapa pentingnya pembinaan kerukunan umat beragama pada masyarakat majemuk. Penyelesaian persoalan dimaksud tidak boleh terlambat, yakni menunggu tatkala

persoalannya sudah serius. Hal menarik lainnya, yang juga dihimpun dalam buku hasil penelitian ini adalah Dharma Wacana. Penelitian ini mengingatkan secara jelas tentang konten yang seharusnya dijadikan topik dalam kegiatan Dharma Wacana, yaitu hendaknya tidak menyangkut hal rutin yang sudah dimengerti oleh masyarakat. Kegiatan dimaksud akan menjadi lebih bermakna jika materi yang disajikan relevan dengan persoalan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Penelitian tentang Pemberdayaan Masyarakat oleh mahasiswa di Sekitar Masjid itu juga memberikan nuansa informasi yang unik. Terutama menyangkut program KKN. Kegiatan pengabdian masyarakat berupa Kuliah Kerja Nyata atau KKN dianggap sudah pada saatnya diperbaharui. Fokus kegiatan mahasiswa bukan lagi pada kantor desa, tetapi diubah ke masyarakat di sekitar Masjid. Tempat ibadah dijadikan konsentrasi kegiatan pengabdian para mahasiswa. Tentu realitas yang direkam melalui kegiatan penelitian ilmiah terhadap kegiatan mahasiswa melalui pendekatan dimaksud akan sekaligus menghasilkan pengetahuan baru yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Akhirnya, membaca buku kumpulan hasil penelitian ini akan menjadi semakin jelas, bahwa apa yang ada pada pikiran dan bahkan teks agama tidak selalu sama dengan realitasnya, dan oleh karena itu tidak pernah final dan selalu menarik. *Wallahu a'lam*

PRAKATA EDITOR

Menggambarkan kehidupan beragama melalui alam kognisi, menjadikannya logik saat metodologi penelitian mengiris-iris dalam variabel dan indikator adalah suatu pengalaman tersendiri. Pada suatu waktu kelindan agama dan empirisme dirasa sangat penting karena suatu kepentingan perumusan kebijakan, sehingga tugas penelitian hadir sebagai panggilan tak terelakkan.

Penelitian dilakukan dengan berbagai cara, berbagai hal penting menyangkut berapa besar manfaat, berapa derajat pemahaman suatu umat pemeluk agama dalam kehidupan sosial, seberapa penting sebuah layanan sipil berperspektif agama dan keagamaan mewujud dalam topik-topik penting yang hadir dalam ruang publik. Melalui sudut pandang seperti ini, agama tidak hanya bersifat privat tetapi masuk dalam ruang publik, untuk itu diperlukan suatu aturan dan regulasi menyangkut kehadirannya dari ruang privat ke ruang publik. Demi sebuah alasan perumusan kebijakan publik yang berkaitan dengan kehidupan agama, maka proses penelitian dan pengembangan kehidupan keagamaan menjadi sebuah syarat.

Jawaban terstruktur tentang berbagai hal menyangkut kehidupan keagamaan kami coba kemukakan pada buku kompilasi hasil penelitian ini, yang memuat hasil-hasil Penelitian Kompetitif Kehidupan Keagamaan Puslitbang Kehidupan Keagamaan Tahun 2014. Kesan yang tampak dari

isi buku ini adalah campuran, hal tersebut karena pemenang kompetisi mengajukan topik berdasarkan kompetensi masing-masing pada tiga bidang garapan Puslitbang Kehidupan Keagamaan yaitu Pelayanan Keagamaan, Aliran Keagamaan, Hubungan Antarumat Beragama. Namun, setidaknya topik-topik yang dihadirkan merupakan jawaban terhadap berbagai isu aktual menyangkut kehidupan keagamaan.

Dinamika kehidupan keagamaan di Indonesia dengan berbagai entitas serta persoalan yang datang saling berganti, cukup menjadi suatu alasan tentang kehadiran Kementerian Agama di Indonesia. Isu kerukunan beragama, pelayanan keagamaan, serta munculnya gerakan keagamaan disamping menciptakan menciptakan bangsa yang berkarakter, namun acapkali menimbulkan polemik saat muncul gerakan-gerakan keagamaan baru yang cenderung anti *mainstream*. Walhasil, suatu kajian dan penelitian diperlukan untuk mengumpulkan informasi, melakukan analisis, membuat alternatif kebijakan dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan.

Buku ini menghadirkan lima tulisan hasil penelitian, 1) **Skema Keagamaan dan Fundamentalisme Agama: Tinjauan Psikologi** yang dilakukan oleh Yohanes Budiarto, 2) **Transformasi Pelayanan Administrasi Pernikahan-Kependudukan: KUA Gondomanan Kota Yogyakarta**, oleh Izzatin Kamala, 3) **Masih Perlukah FKUB?**, oleh Aam Slamet Rusydiana, 4) **Rekonstruksi Spirit Harmoni Berbasis Masjid (Studi Kasus KPM Tematik Posdaya di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)**, oleh Mukhibat, 5) **Dharma Wacana, Pedharma Wacana dan Ajeg Bali di Bali Pasca Reformasi**.

Sebagai hasil penelitian kompetitif, satu sama lain tulisan tidak langsung saling berhubungan, tetapi bersinggungan terhadap satu hal, yaitu realitas sosial keagamaan. Masing-masing penelitian ini memiliki ruang dan segmen sendiri terutama dalam hal menghadirkan data, informasi, analisis yang juga berbeda. Begitu juga dengan metodologi yang digunakan, hampir tidak ada kesamaan metode dan sistem berpikirnya.

Buku ini lebih tepat dikatakan sebagai suatu kompilasi, meskipun diberi judul pada tema tertentu. Setidaknya berbagai aspek yang selama ini menjadi garapan Puslitbang Kehidupan Keagamaan cukup terwakili oleh kelima tulisan tersebut. Selebihnya editor menyampaikan selamat membaca kompilasi penelitian ini, semoga bermanfaat.

Jakarta, November 2015

Raudatul Ulum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KEPALA PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN	iii
SAMBUTAN KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI	vii
PROLOG	xi
PRAKATA EDITOR	xvii
DAFTAR ISI	xxi
 1. Kepribadian, Skema Keagamaan dan Funda- mentalisme Agama: Tinjauan Psikologi. Oleh: Yohanes Budiarto	 1
2. Transformasi Pelayanan Administrasi Pernikah- an-Kependudukan Oleh KUA Gondomanan Kota Yogyakarta. Oleh: Izzatin Kamala, S.Pd., M.Pd	 57
3. Identifikasi Masalah Dan Strategi Pengembang- an Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Oleh: Aam Slamet Rusydiana	 141
4. Rekonstruksi Spirit Harmoni Berbasis Masjid. Oleh: Dr. Mukhibat	 185
5. <i>Dharma Wacana, Pedharma Wacana Dan Ajeg Bali</i> <i>Di Bali Pasca Reformasi.</i> Oleh: I Made Arsana Dwiputra	 285
INDEKS	377

KEPRIBADIAN, SKEMA KEAGAMAAN DAN FUNDAMENTALISME AGAMA: TINJAUAN PSIKOLOGI

Yohanes Budiarto

Dosen Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara Jakarta

email: yohanesb@fpsi.untar.ac.id

Abstract

As of today, there is limited notion on subjects related to personality characteristics and the religious schemata of fundamentalists. This study targets to identify the relationship between Openness to Experience, Religious Schemata, and Religious Fundamentalism, specifically in the age group of teenagers to young adults in Jakarta, Tangerang, and Banyumas. Deploying the quantitative non-experimental design, 734 participants were asked to complete three sets of questionnaires for all three aspects. The data set was analyzed using the Spearman correlation method and indicates a strong correlation between the three variables aforementioned.

Keywords: openness to experience, religious schemata and religious fundamentalism

Pendahuluan

Agama telah diyakini memiliki kekuatan yang dapat menggerakkan, memotivasi, dan mengarahkan kognisi, afeksi dan perilaku manusia. Dalam hubungan interpersonal, agama dapat menjadi bahan referensi dalam mempersepsi orang lain.

Agama sebagai identitas sosial dapat berfungsi sebagai “perekat sosial” ketika identitas keagamaan tersebut dipersepsi sama. Namun demikian, efek sebaliknya juga dapat dengan mudah dirasakan saat seseorang berinteraksi dengan orang lain yang berbeda secara identitas keagamaan. Fenomena ini didasarkan pada kondisi psikologis sosial “*in-group out-group*” seseorang ketika menjadikan identitas agama sebagai satu satunya referensi dalam mempersepsi orang lain.

Fenomena belakangan ini, identitas keagamaan semakin sering muncul dalam bentuk yang lebih dimunculkan dalam perilaku terhadap orang lain yang memiliki keyakinan berbeda. Berbagai peristiwa sosial di dunia ini seringkali berhubungan dengan identitas keagamaan. Persinggungan antara nilai-nilai hidup modern yang cenderung sekuler dan nilai tradisional keagamaan seringkali berakhir dengan jalan kekerasan (Emerson dan Hartman, 2006).

Gerakan fundamentalisme agama terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Menurut penelitian oleh Almond, Appleby, dan Sivan (2003) fundamentalisme agama dapat dijumpai di Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, Amerika Utara, dan Asia. Gerakan-gerakan tersebut dapat dijumpai pada berbagai agama termasuk Yudaisme, Hindu, Islam, Kristen, Sikh, Neo-Konfusianisme, dan Budha. Dari kesemua gerakan fundamentalisme agama tersebut, yang sering kita dengar melalui media adalah bahwa fundamentalisme agama berhubungan dengan kekerasan.

Salah satu aspek dalam agama yang harus dilindungi dari pendekatan naturalistik dalam teologi adalah kisah-kisah mistik yang bersifat supra rasional (Stark & Finke, 2000). Fundamentalisme agama akan menolak kegerakan ilmiah postmodernisme dan materialisme. Selain itu, nilai nilai

sekularisme yang muncul seiring perkembangan teknologi modern semakin membuka jalan bagi fundamentalis untuk mempertahankan sistem keyakinannya.

Perkembangan fundamentalisme keagamaan akhirnya merambah ke luar wilayah Protestanisme di Amerika Serikat. Konsep fundamentalisme agama semakin dirasakan penting dalam mempertahankan konsep *in group-out group*. Semakin individu bersifat fundamentalis semakin individu merasakan perbedaan *in group-out group* (Altemeyer & Hunsberger, 1992). Penolakan terhadap keragaman interpretasi peristiwa sosial ataupun ajaran keagamaan merupakan hasil dari fundamentalisme keagamaan yang lebih pro kepada *in group* dan menolak *out group* (Emerson & Hartman, 2006).

Menguatnya “Kekamian” dalam identitas keagamaan tidak terlepas dari pemaknaan atas agama yang diyakini. Pemaknaan ini tidak terlepas dari bagaimana (*how*) cara seseorang meyakini agamanya, bukan pada apa yang seseorang yakini dalam agamanya. Streib, Hood, dan Klein (2009) menyatakan bahwa skemata agama seseorang berdampak pada seberapa dirinya dapat menjadi seorang fundamentalis. Skemata agama menurut Streib, Hood, dan Klein terdiri dari tiga bentuk yaitu TTT (*Truth, Text* dan *Teaching*), FTR (*Fairness, Tolerance*, dan *Rational Choice*), dan Xenos (*Xenosophia*, Dialog antar Religi). Secara spesifik, skemata agama TTT (*Truth, Text* dan *Teaching*) berkorelasi positif dengan fundamentalisme agama di Jerman dan Amerika Serikat. Hal ini berarti bahwa semakin individu dalam kelompok agama “terjebak” dalam skema absolutisme, eksklusif, dan memiliki pemahaman literal atas teks kitab suci yang diyakininya, semakin meningkat fundamentalisme

individu tersebut. TTT juga diduga berkorelasi positif dengan konsep etnosentris agama dari Allport.

Pemikiran mengenai fundamentalisme agama seakan lahir kembali setelah peristiwa pemboman terhadap *World Trade Center* (WTC), Amerika Serikat, pada 11 September 2001, pemboman pusat hiburan di Legian Bali Indonesia, penculikan terhadap ratusan perempuan muda Kristen di Nigeria oleh Boko Haram dan yang terakhir adalah munculnya ISIS (*Islam State of Iraq Suriah*) merupakan rangkaian lanjutan sejarah kemunculan fundamentalisme agama. Terkait dengan ISIS, fundamentalisme di Irak terasa sangat masif (“Polisi Pantau Pergerakan ISIS di Indonesia”, 22 Juli 2014) sehingga menarik perhatian Kapolri untuk memantau pergerakan organisasi ISIS (*Islam State of Iraq Suriah*) yang dinilai sudah masuk ke Indonesia.

Khelmy Pribadi, Aktivistis *Ma'arif Institute*, menyatakan bahwa fundamentalisme agama di Indonesia sedang menunjukkan peningkatan kegiatan. Gerakan gerakan Islam fundamentalis di Indonesia dapat diwakili oleh fenomena Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan FPI. Selain itu fundamentalisme juga muncul dalam Perda yang bersifat syariah, agamaisasi ruang publik dan maraknya aksi intoleransi (Gusti, 2013).

Fundamentalisme agama juga muncul dalam bentuk doktrinisasi kampus di Indonesia oleh HTI. Menurut Wakil Ketua GP Ansor Riau, Purwaji, apa yang dilakukan oleh HTI di UIR adalah suatu upaya yang menginginkan NKRI bubar (Khoiron, M, 2014). Masih menurut Purwaji, kampus di Indonesia harus memantau gerakan seperti HTI dan gerakan fundamentalisme agama lainnya.

Benturan antara gerakan fundamentalisme agama dan gerakan yang dipandang sekuler di Indonesia terjadi beberapa kali. Seperti dicatat dalam berita “Sekertariat FPI Purwokerto Diserbu Warga”, yang ditulis oleh Andrianto (2008) telah terjadi gerakan yang menolak fundamentalisme agama yang berlebihan yang tidak menerima fakta keberagaman dalam masyarakat. Fundamentalisme agama dapat terjadi oleh karena pemikiran eksklusivisme agama yang sempit, yang mengklaim agama yang dianutnya sebagai satu satunya kebenaran. Dampak dari fundamentalisme agama yang sangat kuat tersebut adalah tertutupnya dialog antar pemeluk agama yang berbeda (Wibisono, 2013).

Masih terkait dengan gerakan fundamentalisme agama di Indonesia, salah satunya adalah fundamentalisme Kristen. Kelstedt and Smidt (1991) menyatakan bahwa Kristen fundamental adalah sub kelompok evangelisme yang salah satunya adalah memiliki komitmen tinggi untuk menyebarkan dan mewartakan kabar baik pada mereka yang belum mengenal Kristus. Di Indonesia, baru baru ini terjadi suatu peristiwa yang dipersepsi sebagai bentuk kristenisasi di tengah acara *Car Free Day* di Jakarta. Peristiwa tersebut juga diunggah ke *youtube* dan di muat ke dalam situs berita online. Apapun bentuknya, fundamentalisme agama dapat menyebabkan konflik horisontal antar pemeluk agama di Indonesia.

Kajian mengenai fundamentalisme dan kekerasan agama tentunya tidak dapat dilepas dari perspektif kepribadian individu. Salah satu dimensi kepribadian yang diteliti dalam kaitannya dengan fundamentalisme adalah *openness to experience*. *Openness to experience* merupakan kesiapan individu untuk menerima ide ide baru, pendekatan dan pengalaman

baru (McCrae&Costa,1990). Individu dengan *trait* terbuka memiliki keingin-tahuan yang kuat, minat yang luas, kreatif, original, tidak tradisional, dan imajinatif. Selain itu individu dengan *trait* terbuka memiliki ketertarikan kepada seni, mengenal kondisi emosi diri dengan baik, dan memiliki kesiapan untuk menguji nilai-nilai sosial, politik dan agama yang dianutnya.

Rumusan

Berangkat dari pemikiran atas ketiga variabel di atas maka dijabarkan beberapa pertanyaan penelitian terkait kepribadian, skema keagamaan dan fundamentalisme agama yakni: Bagaimanakah gambaran kepribadian terbuka, skema keagamaan dan fundamentalisme agama pada penelitian ini?; Apakah terdapat korelasi antara kepribadian terbuka, skema keagamaan dan fundamentalisme agama?

Berangkat dari perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kepribadian terbuka, skema keagamaan dan fundamentalisme agama partisipan, serta menguji hubungan antara kepribadian terbuka, skema keagamaan dan fundamentalisme agama.

Kepribadian Terbuka (*Openness to experience*)

Kepribadian *Openness to experience* merupakan salah satu *trait* atau ciri kepribadian dari konsep kepribadian *Big Five* yang dikemukakan oleh Goldberg (McCrae & Costa, 1996; dan John & Soto, 2007). *Openness* atau *openness to experience*, untuk selanjutnya disebut secara bergantian dengan 'keterbukaan'. *Trait* ini menggambarkan keterbukaan wawasan dan

orisinalitas ide. Individu yang terbuka siap menerima berbagai rangsang sosial yang muncul dengan sudut pandang yang terbuka karena wawasan individu tersebut bersifat luas dan mendalam.

Keterbukaan individu meliputi beberapa aspek yaitu imajinasi yang aktif, sensitivitas terhadap seni, pengenalan terhadap emosi diri, ketertarikan terhadap keberagaman, dan ketertarikan terhadap hal baru (Goldberg L. R. (1993).

Menurut McRae (2004) kepribadian terbuka memiliki dua dimensi yaitu dimensi motivasi dan dimensi struktur. Individu dengan kepribadian terbuka memiliki motivasi untuk mencari pengalaman pengalaman baru dan aktif dalam melakukan refleksi diri. Secara struktur, kepribadian terbuka memiliki struktur kesadaran yang “cair” dan fleksibel.

Ciri kepribadian ini menjelaskan dimensi gaya kognitif yang membedakan imajinasi, orang-orang kreatif, sederhana dan orang-orang yang konvensional. Orang yang terbuka secara intelektual memiliki rasa ingin tahu, menghargai seni, dan peka terhadap keindahan. Mereka cenderung lebih mengetahui perasaan mereka dibandingkan orang dengan karakteristik tertutup, berpikir dan bertindak secara individualis dan cara yang selalu disesuaikan dengan aturan (kaku).

Individu yang memiliki nilai rendah pada ciri kepribadian terbuka pada pengalaman baru, cenderung picik dan membatasi diri. Mereka lebih suka hal-hal yang sederhana, terus terang, dan sukar mengerti terhadap situasi yang kompleks dan ambigu. Gaya intelektual pada orang yang terbuka dapat melayani orang lain dengan baik.

Individu yang memiliki skor rendah pada keterbukaan dipandang memiliki ketertutupan terhadap pengalaman baru. Individu seperti ini cenderung memiliki pola pikir dan perilaku yang cenderung tradisional dan konvensional (McCrae dan John, 1992). Saroglou (2002) menyatakan bahwa individu dengan skor keterbukaan yang rendah cenderung memiliki fundamentalisme agama yang tinggi. Individu dengan religiusitas yang dewasa cenderung memiliki kepribadian terbuka yang tinggi.

Fundamentalisme Agama

Fundamentalisme agama dalam konteks agama Kristen didefinisikan sebagai sub kelompok penginjilan yang menerima otoritas Alkitab, keselamatan melalui Kristus, dan komitmen untuk menyebarkan keyakinan tersebut secara taat (Kelstedt and Smidt, 1991). Sejumlah penelitian menyimpulkan bahwa kaum fundamentalis berkarakter pikiran yang sempit, tidak mau mengkaji ulang keyakinannya, dan menolak perbedaan sudut pandang terhadap sesuatu (English 1996; Hunsberger, Alisat, Pancer, and Pratt 1996; Hunsberger, Pratt, and Pancer 1994; McFarland and Warren 1992; Richards 1994).

Gerakan fundamentalisme agama dalam konteks kekristenan didasarkan pada keyakinan – keyakinan mendasar seperti: keyakinan bahwa kitab suci tidak memiliki kesalahan, Yesus yang akan kembali datang ke dunia, Yesus terlahir dari perawan Maria, pengorbanan Yesus yang menebus dosa dunia, dan dosa asal.

Konsep fundamentalisme agama pada awalnya ditujukan kepada gerakan Protestan dalam agama Kristen. Pada awalnya fundamentalisme ditujukan kepada doktrin

Kristen yang tidak mengizinkan gerakan gereja-gereja Kristen liberal (Bosch,1999). Dengan meluasnya konsep fundamentalisme ini, koalisi kekuatan Kristen Amerika konservatif berusaha untuk menolak pendekatan naturalistik dan evolusioner dalam mempelajari Alkitab.

Individu dengan fundamentalisme agama yang tinggi cenderung memiliki sikap yang kaku dan menolak untuk kompromi terhadap ajaran keyakinan lainnya. Rosidah (2012) menyatakan bahwa tingginya fundamentalisme agama akan menggerakkan individu untuk mengklaim kebenaran. Klaim klaim tersebut pada gilirannya dapat melahirkan pembenaran penggunaan berbagai cara termasuk kekerasan terhadap berbagai pihak yang tidak sejalan dengannya.

Ketika banyak orang memiliki kerangka pikir yang fundamentalis seperti disebutkan di atas maka dengan mudah dapat dikatakan bahwa setiap agama memiliki pengikut yang fundamentalis. Secara makro, penyebab munculnya fundamentalisme agama adalah situasi politik di semua tingkat, baik lokal maupun internasional.

Skema Keagamaan

Skema keagamaan (*Religious schemata*) didefinisikan sebagai pembeda pola hidup keagamaan oleh Streib et, al. (2009). Streib menjelaskan bahwa meskipun skema berfungsi sebagai pembeda, namun pemaknaannya tidak dapat dibatasi sebagai konsep yang rigid atau kaku namun dapat bersifat tahapan. Dalam hal ini, skema keagamaan selain bersifat pembeda namun juga bersifat berkelanjutan (*continuous*).

Skema keagamaan diformulasikan berdasarkan konsep rentang dari toleransi hingga fundamentalisme, atau dari

rentang pluralisme hingga eksklusivisme. Salah satu kekhasan konsep skema keagamaan berkaitan dengan konsep *xenosophia* yaitu sikap mau berdialog. *Xenosophia* merupakan rentang yang paling toleran dalam skema keagamaan. Skema keagamaan lainnya adalah FTR (*faith, tolerance, dan rational choice*). Individu dengan skema ini memiliki pilihan rasional terhadap agamanya, bersifat toleran dan memiliki iman atau kepercayaan yang tinggi terhadap agamanya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan individu dengan skema tersebut menggunakan rasionya untuk menyadari keberadaan agama agama lainnya. Skema keagamaan terakhir adalah TTT (*truth of text and teachings*). Individu dengan skema keagamaan TTT memiliki keyakinan yang absolut mengenai kebenaran ajaran agamanya sehingga individu ini cenderung memiliki mekanisme pertahanan diri yang lebih kuat.

Kerangka Berpikir

Kepribadian dipahami sebagai pola unik individu dalam merasakan berpikir, dan bertindak laku yang cenderung stabil sehingga kepribadian dapat memprediksi beberapa perilaku tertentu. Dalam konteks perilaku keagamaan, riset membuktikan beberapa sifat kepribadian seperti kepribadian otoriter (*right wing-authoritarian*) yang bertanggung jawab pada ekstrimisme agama dan ras, kepribadian *neuroticism* yang berkorelasi positif dengan fundamentalisme agama (Streyfeller & McNally, 1997) dan kepribadian terbuka yang berkorelasi negatif dengan fundamentalisme agama berarti bahwa semakin seseorang memiliki kepribadian beroperasi di dalam diri seseorang dan menjadi predisposisi seseorang untuk berperilaku.

Menurut Lewin, perilaku individu merupakan fungsi dari kepribadian dan lingkungan. Oleh karena itu dalam memahami perilaku perlu juga memperhatikan aspek kepribadian. Perilaku individu tidak saja berupa perilaku yang *overt* atau nampak namun juga perilaku yang bersifat *covert* (tidak nampak). Perilaku *covert* ini muncul dalam kognisi dan emosi individu.

Skema merupakan bentuk hasil dari aktivitas kognitif. Skema terbentuk berdasarkan informasi yang ada di lingkungan individu. Ketika individu tumbuh berkembang di dalam pola asuh yang penuh toleransi dalam pluralisme maka akan dihasilkan kepribadian yang terbuka. Selain itu skema keagamaan yang muncul dapat bersifat *xenosophia* dan penuh toleransi. Dengan kata lain, berangkat dari skema keagamaan yang terbentuk akan dapat diprediksi fundamentalisme agama seseorang.

Hipotesis

- H₁ Kepribadian terbuka berhubungan negatif dengan skema keagamaan TTT
- H₂ Kepribadian terbuka berhubungan positif dengan skema keagamaan *xenosophia* dan FTR
- H₃ Kepribadian terbuka berhubungan negatif dengan fundamentalisme keagamaan
- H₄ Skema keagamaan TTT berhubungan positif dengan fundamentalisme keagamaan
- H₅ Skema keagamaan FTR berhubungan negatif dengan fundamentalisme keagamaan
- H₆ Skema keagamaan *xenosophia* berhubungan negatif dengan fundamentalisme keagamaan

Desain

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif non-eksperimental, yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kepribadian yang terbuka (*openness to experience*), skema keagamaan, dan fundamentalisme keagamaan pada remaja di Kabupaten Tangerang, Jakarta, dan Kabupaten Banyumas.

Partisipan penelitian ini adalah 734 remaja (baik laki-laki ataupun perempuan, beragama sesuai dengan konstitusi Indonesia, tinggal di Jakarta, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Tangerang. Pemilihan remaja didasarkan atas pertimbangan bahwa mereka adalah kelompok dengan rentang usia yang akan menjadi pemegang berbagai kebijakan di Negara ini kelak. Dengan mengetahui dini aspek psikologis sosial remaja terkait dengan variabel penelitian maka pemerintah dapat mengambil kebijakan kebijakan sosial berdasarkan temuan penelitian ini kelak.

Dasar pemilihan Jakarta sebagai wilayah sampel adalah kondisi sosial ekonomi yang sangat modern yang dapat mempengaruhi karakteristik sampel. Modernitas seringkali menjadi suatu kondisi yang paling bertolak belakang dengan fundamentalisme.

Pemilihan Banyumas sebagai wilayah sampling didasari oleh kriteria kerukunan umat beragama di Banyumas yang dapat menjadi contoh di Jawa Tengah oleh Mantan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Sementara wilayah Kabupaten Tangerang yang berdekatan dengan wilayah Jakarta dianggap memiliki nilai modernitas yang hampir setara dengan Jakarta.

Sampel dipilih secara *convenience* sehingga prinsip keterwakilan tidak perlu dipenuhi. Namun demikian untuk

dapat dilakukan analisis secara inferensial maka dilakukan suatu teknik statistik yaitu *self-weighting samples*. Hal ini dilakukan untuk mengurangi variansi (*variance*) dan ketangguhan data. Selain itu, *weighting samples* juga berfungsi untuk meningkatkan keterpilihan secara probabilitas dan mengurangi bias pemilihan sampel. Penentuan jumlah sampel penelitian didasarkan pada Tabel Krejcie dan Morgan dengan *margin error* 5%.

Gambaran aspek demografis partisipan dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1.
Gambaran Aspek Demografis Partisipan Penelitian

No	Aspek Demografis	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Jumlah Sampel per Wilayah	Kab. Banyumas	269	36.7
		Kab. Tangerang	231	31.5
		Jakarta	233	31.8
2	Jenis Kelamin	Laki-laki	400	54.6
		Perempuan	333	45.4
3	Agama	Islam	346	47.1
		Katolik	138	18.9
		Kristen	209	28.5
		Budha	30	4.0
4	Tingkat Pendidikan	Kong Hucu	10	1.4
		SMP	269	36.7
		SMA	206	28.0
		S1	259	35.3
5	Keterlibatan dalam kegiatan organisasi keagamaan	Ya	43	5.9
		Tidak	690	94.1

Pengukuran / Instrumentasi

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakan skala pengukuran *Likert* yang dimodifikasi menjadi empat respon jawaban. Keempat respon jawaban tersebut terdiri dari: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS).

Pada pernyataan yang bersifat *favourable*, respon STS memiliki skor 1, respon TS memiliki skor 2, respon S memiliki skor 3 dan respon SS memiliki skor 4. Pada pernyataan yang bersifat *unfavourable*, respon STS memiliki skor 4, respon TS memiliki skor 3, respon S memiliki skor 2 dan respon SS memiliki skor 1.

Religious Schema Scale (Streib, et.al., 2009), *Openness to Experience Scale* (John, O. P., & Srivastava, S., 1999), dan *Revised Religious Fundamentalism Scale* (Altemeyer, B. & Hunsberger, B. (2004) adalah tiga instrumen psikologis yang digunakan dalam penelitian ini.

Instrumen dalam penelitian ini dipilih berdasarkan tinjauan literatur yang relevan. Instrumen yang diberikan kepada partisipan mencakup: (a) pengantar kuesioner, yang berisi pengenalan peneliti dan tujuan penelitian; (b) lembar persetujuan dan data diri subjek; (c) *Religious Schema Scale* (Streib, et.al., 2009), *Openness to Experience Scale* (John, O. P., & Srivastava, S., 1999), dan *Revised Religious Fundamentalism Scale* (Altemeyer, B. & Hunsberger, B. (2004). Berikut ini adalah informasi psikometris skala pengukuran dalam penelitian ini.

Skala Fundamentalisme Agama

Pada alat ukur Skala Fundamentalisme Agama ditemukan 11 butir yang reliabel dan 1 butir yang tidak reliabel. Butir tersebut dinyatakan tidak reliabel dikarenakan nilai yang terdapat pada *Corrected Item-Total Correlation* berada di bawah 0.2 atau bertanda negatif (-).

Koefisien *Alpha Cronbach* dari butir-butir yang reliabel dari Skala Fundamentalisme Agama adalah sebesar 0.795. Berikut ini adalah ringkasan uji reliabilitas Skala Fundamentalisme Agama.

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas Alat Ukur Skala
Fundamentalisme Agama

Variabel	Reliabilitas		Banyak Butir		Butir yang reliabel
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
<i>Fundamentalisme Agama</i>	0.775	0.795	12	11	1, 2, 3,4, 5, 6,7,8,9,10,12
Jumlah Butir Keseluruhan			2	1	

Skala Skema Keagamaan

Pada skala skema keagamaan, dimensi *truth of texts & teachings* ditemukan seluruh butir reliabel. Keseluruhan *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari 0.2 atau bertanda positif (+). Koefisien *Alpha Cronbach* dari butir-butir

yang reliabel dari Skala Fundamentalisme Agama adalah sebesar 0.803.

Skala skema keagamaan dimensi *fairness, tolerance & rational choice* memiliki seluruh butir yang reliabel. Keseluruhan *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari 0.2 atau bertanda positif (+). Koefisien *Alpha Cronbach* dari butir-butir yang reliabel dari skala skema keagamaan dimensi *fairness, tolerance & rational choice* adalah sebesar 0.726.

Skala skema keagamaan dimensi *xenosophia* memiliki seluruh butir yang reliabel karena keseluruhan *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari 0.2 atau bertanda positif (+). Koefisien *Alpha Cronbach* dari butir-butir yang reliabel dari skala skema keagamaan dimensi *xenosophia* adalah sebesar 0.623.

Berikut ini adalah ringkasan uji reliabilitas Skala Skema Keagamaan.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas Skala Skema Keagamaan

Variabel	Reliabilitas		Banyak Butir		Butir yang Reliabel
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
Skema Keagamaan <i>truth of texts & teachings</i>	0.803	0.803	5	5	1, 2, 3,4, 5
Skema Keagamaan <i>fairness, tolerance & rational choice</i>	0.726	0.726	5	5	1, 2, 3,4, 5
Skema Keagamaan <i>xenosophia</i>	0.623	0.623	5	5	1,2,3,4,5
Jumlah Butir Keseluruhan			5	5	

Skala Kepribadian Terbuka

Skala kepribadian terbuka memiliki 8 butir yang reliabel dari 10 butir yang diujikan. Dua butir tersebut dinyatakan tidak reliabel dikarenakan angka yang terdapat pada *Corrected Item-Total Correlation* berada di bawah 0.2 atau bertanda negatif (-). Koefisien *Alpha Cronbach* dari butir-butir yang reliabel dari Skala kepribadian terbuka adalah sebesar 0.666.

Berikut ini adalah ringkasan uji reliabilitas Skala kepribadian terbuka

Tabel 4

Hasil Uji Reliabilitas Skala Kepribadian Terbuka

Variabel	Reliabilitas		Banyak Butir		Butir yang reliabel
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
<i>Kepribadian Terbuka</i>	0.637	0.666	10	8	1, 2, 3,4, 5, 6,9,10,12
Jumlah Butir Keseluruhan			10	8	

Fundamentalisme Agama

Skala Fundamentalisme agama memiliki rentang skor 1-4, diperoleh nilai titik tengah sebesar 2.5. Setelah dilakukan perhitungan secara statistik deskriptif diperoleh skor minimum empirik sebesar 1.45 dan skor maksimum empirik sebesar 4.00 dengan rerata empirik sebesar 34.55 (SD=6.22).

Rerata hipotetik skala Fundamentalisme Agama diperoleh berdasarkan rumus $\mu = \frac{1}{2} (i_{\max} + i_{\min}) \sum k$ sehingga diperoleh rerata hipotesis sebesar 27.5.

Deviasi standar hipotetik diperoleh sebesar $1/6 * (44-4) = 6.66$. Setelah itu dilakukan kategorisasi skor menjadi tiga kategori yaitu kategori rendah dengan rumus: $X < (\mu - 1. \sigma)$; kategori sedang dengan rumus $(\mu - 1. \sigma) \leq X \leq (\mu + 1. \sigma)$, dan kategori tinggi dengan rumus $X > (\mu + 1. \sigma)$.

Berdasarkan kategorisasi tersebut maka kategori rendah adalah partisipan dengan skor $X < 20.84$, kategori sedang

adalah partisipan dengan rentang skor antara $20.84 \leq X \leq 34.16$ dan kategori tinggi adalah partisipan dengan skor $X > 34.16$. Berikut adalah gambaran frekuensi kategorisasi fundamentalisme agama partisipan.

Tabel 5
Frekuensi Kategorisasi Fundamentalisme Agama

Kategori	Frekuensi	Persentase
Rendah	4	5
Sedang	358	48.9
Tinggi	372	50.7
Total	734	100.0

Tabel 5. menunjukkan bahwa tingkat fundamentalisme agama partisipan sebagian besar tinggi yaitu sebanyak 372 orang atau sebesar 50.7% dari populasi.

Kepribadian Terbuka

Skala kepribadian terbuka memiliki rentang skor 1 - 4, diperoleh nilai titik tengah sebesar 2.5. Setelah dilakukan perhitungan secara statistik deskriptif diperoleh skor minimum empirik sebesar 16 dan skor maksimum empirik sebesar 32 dengan rerata empirik sebesar 22.63 (SD=2.99).

Rerata hipotetik kepribadian terbuka diperoleh berdasarkan rumus $\mu = \frac{1}{2} (i_{\max} + i_{\min})$ sehingga diperoleh rerata hipotesis sebesar 20. Deviasi standar hipotetik diperoleh sebesar $\frac{1}{6} * (32-4) = 4.66$. Setelah itu dilakukan kategorisasi

skor menjadi tiga kategori yaitu kategori rendah dengan rumus: $X < (\mu - 1. \sigma)$; kategori sedang dengan rumus $(\mu - 1. \sigma) \leq X \leq (\mu + 1. \sigma)$, dan kategori tinggi dengan rumus $X > (\mu + 1. \sigma)$.

Berdasarkan kategorisasi tersebut maka kategori rendah adalah partisipan dengan skor $X < 15.34$, kategori sedang adalah partisipan dengan rentang skor antara $15.35 \leq X \leq 24.16$ dan kategori tinggi adalah partisipan dengan skor $X \geq 24.17$. Frekuensi kategori kepribadian terbuka partisipan dirangkum pada tabel di bawah ini.

Tabel 6
Frekuensi kategorisasi kepribadian terbuka

Kategori	Frekuensi	Persentase
Sedang	600	81.8
Tinggi	133	18.2
Total	734	100.0

Sebagian besar partisipan memiliki tingkat kepribadian terbuka yang sedang yaitu sebanyak 589 partisipan atau sebanyak 69% dari seluruh sampel.

Skema Keagamaan *truth of texts & teachings*

Skala Skema Keagamaan *truth of texts & teachings* memiliki rentang skor 1 - 4, diperoleh nilai titik tengah sebesar 2.5. Setelah dilakukan perhitungan secara statistik deskriptif diperoleh skor minimum empiric sebesar 2.00 dan skor maksimum empiric sebesar 4.00 dengan rerata empirik sebesar 17.58 (SD=2.52). Rerata hipotetik skala Skema Keagamaan

truth of texts & teachings diperoleh berdasarkan rumus $\mu = \frac{1}{2} (imax + imin) \Sigma k$, dengan:

μ : Rerata Hipotetik

$imax$: Skor maksimal item

$imin$: Skor minimal item

Σk : jumlah item

sehingga diperoleh rerata hipotesis sebesar 12.5. Langkah selanjutnya adalah menentukan Standar Deviasi hipotetik (σ) dengan rumus $\sigma = 1/6 (X_{\max} - X_{\min})$ dengan:

σ : Standar Deviasi Hipotetik

$X_{\max}$: Skor maksimal Subjek

$X_{\min}$: Skor minimal Subjek

sehingga diperoleh deviasi standar hipotetik sebesar $1/6 * (20-5) = 2.5$. Setelah itu dilakukan kategorisasi skor menjadi tiga kategori yaitu kategori rendah dengan rumus: $X < (\mu - 1. \sigma)$; kategori sedang dengan rumus $(\mu - 1. \sigma) \leq X \leq (\mu + 1. \sigma)$, dan kategori tinggi dengan rumus $X > (\mu + 1. \sigma)$. Berdasarkan kategorisasi tersebut maka kategori rendah adalah partisipan dengan skor $X < 10$, kategori sedang adalah partisipan dengan rentang skor antara $10 \leq X \leq 15$ dan kategori tinggi adalah partisipan dengan skor $X \geq 16$. Frekuensi kategorisasi Skema Keagamaan *truth of texts & teachings* dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7
Frekuensi kategorisasi Kategori Skema Keagamaan TTT

Kategori	Frekuensi	Persentase
Rendah	1	.1
Sedang	187	25.5
Tinggi	546	74.4
Total	852	100.0

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat skema keagamaan *truth of texts & teachings* partisipan mayoritas berada pada tingkat tinggi yaitu 591 orang (69%).

Skema Keagamaan *fairness, tolerance & rational choice*

Skala skema keagamaan *fairness, tolerance dan rational choice* memiliki 5 butir dengan rentang skor 1 - 4, diperoleh nilai titik tengah sebesar 2.5. Setelah dilakukan perhitungan secara statistik deskriptif diperoleh skor minimum sebesar 10.00 dan skor maksimum sebesar 20.00 dengan rerata empirik sebesar 16.42 (SD=2.26).

Rerata hipotetik skala Skema Keagamaan *fairness, tolerance dan rational choice* diperoleh berdasarkan rumus $\mu = \frac{1}{2} (i_{\max} + i_{\min}) \sum k$ sehingga diperoleh rerata hipotesis sebesar 12.5. Deviasi standar hipotetik diperoleh sebesar $1/6 * (20-5) = 2.5$. Setelah itu dilakukan kategorisasi skor menjadi tiga kategori yaitu kategori rendah dengan rumus: $X < (\mu - 1. \sigma)$; kategori sedang dengan rumus $(\mu - 1. \sigma) \leq X \leq (\mu + 1. \sigma)$, dan kategori tinggi dengan rumus $X > (\mu + 1. \sigma)$. Berdasarkan kategorisasi tersebut maka kategori rendah adalah partisipan dengan skor $X < 10$, kategori sedang adalah partisipan dengan rentang skor

antara $10 \leq X \leq 15$ dan kategori tinggi adalah partisipan dengan skor $X \geq 16$.

Tabel 8
 Frekuensi kategorisasi Kategori Skema Keagamaan
fairness, tolerance dan rational choice

Kategori	Frekuensi	Persentase
Rendah	1	.2
Sedang	361	49.3
Tinggi	371	50.5
Total	734	100.0

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas tingkat skema keagamaan *fairness, tolerance dan rational choice* partisipan berada pada tingkat tinggi yaitu 371 orang (50.5%).

Skema Keagamaan *Xenosophia*

Skala Skema Keagamaan *Xenosophia* memiliki 5 butir dengan rentang skor 1 - 4, diperoleh nilai titik tengah sebesar 2.5. Setelah dilakukan perhitungan secara statistik deskriptif diperoleh skor minimum sebesar 10.00 dan skor maksimum sebesar 20.00 dengan rerata empirik sebesar 16.42 (SD=2.26). Rerata hipotetik skala Skema Keagamaan *Xenosophia* diperoleh berdasarkan rumus $\mu = \frac{1}{2} (i_{\max} + i_{\min})$ sehingga diperoleh rerata hipotesis sebesar 12.5. Deviasi standar hipotetik diperoleh sebesar $\frac{1}{6} * (20-5) = 2.5$. Setelah itu dilakukan kategorisasi skor menjadi tiga kategori yaitu kategori rendah dengan rumus: $X < (\mu - 1. \sigma)$; kategori sedang dengan rumus

$(\mu - 1. \sigma) X \leq (\mu - 1. \sigma)$, dan kategori tinggi dengan rumus $X > (\mu + 1. \sigma)$. Berdasarkan kategorisasi tersebut maka kategori rendah adalah partisipan dengan skor $X < 10$, kategori sedang adalah partisipan dengan rentang skor antara $10 \leq X \leq 15$ dan kategori tinggi adalah partisipan dengan skor $X \geq 16$.

Tabel 9
 Frekuensi kategorisasi Kategori Skema Keagamaan
Xenosophia

Kategori	Frekuensi	Persentase
Rendah	284	38.8
Sedang	281	38.3
Tinggi	168	22.9
Total	734	100.0

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas skema keagamaan *xenosophia* partisipan berada pada kategori tinggi yaitu sebanyak 307 orang (36%).

Analisis Data dan Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan analisis korelasi *Spearman* diperoleh hasil bahwa kepribadian terbuka berhubungan negatif dengan skema keagamaan *truth of texts & teachings*, $r = -.151$, $p < 0.01$. Selain itu, kepribadian terbuka berhubungan secara positif dengan skema keagamaan *fairness, tolerance dan rational choice*, $r = .466$, $p < 0.01$ dan skema keagamaan *xenosophia*, $r = .294$, $p < 0.01$

Hasil pengujian hipotesis penelitian lainnya menunjukkan bahwa kepribadian terbuka berhubungan

negatif dengan fundamentalisme agama, $r = -.217$, $p < 0.01$. Hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa skema keagamaan *truth of texts & teachings* berhubungan positif dengan fundamentalisme agama juga tidak dapat ditolak, $r = .778$, $p < 0.01$. Demikian juga dengan hipotesis penelitian yang menyatakan terdapat hubungan negatif antara skema keagamaan *fairness, tolerance dan rational choice* dan fundamentalisme agama tidak dapat ditolak, $r = -.420$, $p < 0.01$. Terakhir, skema keagamaan *xenosophia* terbukti berhubungan negatif dengan fundamentalisme agama, $r = -.689$, $p < 0.01$. Mengacu kepada temuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa seluruh hipotesis penelitian ini tidak dapat ditolak. Berikut adalah tabel rangkuman matriks korelasi antar variabel penelitian.

Tabel 10
Matriks Korelasi Antar Variabel Penelitian

Variabel		1	2	3	4	5
Kepribadian Terbuka	Pearson					
	Correlation					
	Sig. (2-tailed)					
	N					
Skema Keagamaan Text Truth &Teaching	Pearson	-.151**				
	Correlation					
	Sig. (2-tailed)	.000				
	N	710				
Skema Keagamaan FTR	Pearson	.466**	-.221**			
	Correlation					
	Sig. (2-tailed)	.000	.000			
	N	710	710			
Skema Keagamaan Xenosophia	Pearson	.331**	-.545**	.517**		
	Correlation					
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		
	N	710	710	710		

Fundamenta lisme Agama	Pearson	-.223**	.749**	-	-
	Correlation			.385**	.647*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000
	N	710	710	710	710

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Penelitian ini membuktikan bahwa kepribadian terbuka (*openness to experience*) berhubungan secara negatif dengan skema keagamaan *truth of texts & teachings*. Hal ini berarti semakin memiliki keterbukaan dalam kepribadiannya, individu akan cenderung tidak begitu saja menerima kebenaran tradisi keagamaannya dan juga teks keagamaan yang membentuk tradisi keagamaannya secara absolut. Individu yang memiliki skema keagamaan yang sangat meyakini kebenaran absolut teks kitab sucinya dan pengajarannya cenderung memiliki kepribadian yang lebih tertutup terhadap kemungkinan untuk reinterpetasi pemahaman akan kebenaran ajaran agamanya. Individu dengan skema keagamaan *truth of texts & teachings* (TTT) yang sangat kuat lebih tertutup untuk berbagai dialog.

Dalam penelitiannya Streib, Hood, dan Klein (2009) mendapatkan bahwa dari berbagai tipe kepribadian hanya kepribadian terbuka terhadap pengalaman (*openness to experience*) yang memiliki hubungan negatif dengan skema keagamaan *truth of texts & teachings*. Saroglou (2002) menyatakan bahwa keterbukaan terhadap pengalaman baru merupakan dimensi kepribadian yang paling berhubungan secara negatif dengan absolutisme dan fundamentalisme agama namun berhubungan secara positif dengan keterbukaan spiritual dan kedewasaan rohani (*religious maturity*).

McCrae & Sutin (2009) menyatakan bahwa individu dengan dimensi kepribadian terbuka memiliki kerinduan atau keinginan yang mendalam untuk mengenali dan memahami sesuatu yang masih baru baginya. Selain itu individu tersebut juga memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam berperilaku, memiliki imajinasi yang beragam, selalu memiliki keingintahuan dan memiliki nilai-nilai liberal. Oleh karena itu dalam penelitian ini ditemukan bahwa dimensi kepribadian terbuka berhubungan positif dengan skema keagamaan yang penuh toleransi terhadap perbedaan keyakinan (FTR). Semakin individu memiliki keterbukaan dalam kepribadiannya, semakin kuat orientasi keagamaan yang bersifat toleran dan berkeadilan, semakin terbuka individu pada keyakinan yang dipersepsi asing dan memiliki keinginan untuk dialog antar agama (*xenosophia*).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa individu dengan kepribadian terbuka memiliki kecenderungan fundamentalisme agama yang rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Streyfeller dan McNally (1998) menunjukkan bahwa kelompok yang memiliki tingkat fundamentalisme agama yang tinggi memiliki kepribadian yang tidak terbuka terhadap pengalaman baru. Selain itu Streib, Hood, dan Klein (2009) menemukan bahwa semakin individu bersifat fundamentalis semakin tertutup individu tersebut terhadap keterbukaan.

Dari tiga skema keagamaan yang diteliti, hanya skema keagamaan *truth of texts & teachings* yang berhubungan secara positif dengan fundamentalisme agama. Semakin kuat skema keagamaan *truth of texts & teachings* individu semakin eksklusif kehidupan keagamaannya (Streib, et.al, 2009).

Dari dua skema keagamaan lainnya, skema keagamaan *xenosophia* memiliki hubungan negatif yang lebih kuat dengan fundamentalisme agama dibandingkan hubungan antara skema keagamaan *fairness*, *tolerance* dan *rational choice* dan fundamentalisme agama.

Individu dengan skema keagamaan *xenosophia* memiliki sikap terbuka terhadap dialog antar keyakinan dan juga penghormatan terhadap keyakinan yang berbeda dan hal ini berujung pada rendahnya fundamentalisme agama.

Temuan penelitian lainnya adalah bahwa jenis kelamin (laki-laki atau perempuan) membedakan kualitas kepribadian terbuka, skema keagamaan dan fundamentalisme agama. Dengan menggunakan analisis *Mann Whitney U* diperoleh hasil bahwa laki-laki lebih memiliki skema keagamaan *truth of texts & teachings* yang lebih kuat dibandingkan perempuan, $Z = -4.555$, $p < 0.01$. Pada tabel 11 di bawah ini diketahui bahwa *mean rank* Skema Keagamaan TTT remaja laki-laki sebesar 401.66, lebih besar dari *mean rank* Skema Keagamaan TTT remaja perempuan sebesar 330.88.

Tabel 11
Mean Rank Skema Keagamaan TTT

		Ranks		
	Jenis_Kelamin	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Skema_Keagam	laki-laki	247	401.66	99209.50
aan_Text_Truth	perempu	463	330.88	153195.50
_Teaching	an			
	Total	710		

Perbedaan mean rank Skema Keagamaan TTT antara remaja laki-laki dan perempuan adalah signifikan karena asymp. Sig. (2 tailed) lebih kecil dari 0.05.

Tabel 12
 Nilai Z dan Nilai Signifikansi Perbedaan

	Skema_Keagamaan_Text_Tr uth_Teaching
Mann-Whitney U	45779.500
Wilcoxon W	153195.500
Z	-4.555
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000
a. Grouping Variable: Jenis_Kelamin	

Pada skema keagamaan *fairness, tolerance dan rational choice*, perempuan lebih memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan laki-laki, $Z = -3.197$, $p < 0.01$. Dengan menggunakan analisis *Mann Whitney U* diperoleh hasil bahwa remaja perempuan lebih memiliki skema keagamaan *fairness, tolerance dan rational choice* yang lebih kuat dibandingkan remaja laki-laki. Pada tabel 13 di bawah ini diketahui bahwa *mean rank* Skema Keagamaan *fairness, tolerance dan rational choice* (FTR) remaja laki-laki sebesar 322.38, lebih kecil dari *mean rank* Skema Keagamaan *fairness, tolerance dan rational choice* (FTR) remaja perempuan sebesar 373.17.

Tabel 13
 Mean Rank Skema Keagamaan *fairness, tolerance dan rational choice*

	Jenis Kelamin	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Skema	laki-laki	247	322.38	79627.00
Keagamaan	perempuan	463	373.17	172778.00
FTR	Total	710		

Perbedaan *mean rank* Skema Keagamaan *fairness, tolerance* dan *rational choice* (FTR) antara remaja laki-laki dan perempuan adalah signifikan karena asymp. Sig. (2 tailed) lebih kecil dari 0.05. Tabel 14 menunjukkan nilai signifikansi perbedaan tersebut.

Tabel 14
 Nilai Z dan Nilai Signifikansi Perbedaan

	Skema_Keagamaan_FTR
Mann-Whitney U	48999.000
Wilcoxon W	79627.000
Z	-3.197
Asymp. Sig. (2-tailed)	.001

a. Grouping Variable: Jenis_Kelamin

Remaja perempuan juga memiliki nilai yang lebih besar pada skema keagamaan *xenosophia* dibandingkan laki-laki $Z = -4.688$, $p < 0.01$. Dengan menggunakan analisis *Mann Whitney U* diperoleh hasil bahwa remaja perempuan lebih memiliki skema keagamaan *xenosophia* yang lebih kuat dibandingkan remaja laki-laki. Pada tabel 15 di bawah ini diketahui bahwa *mean rank* Skema Keagamaan *xenosophia* remaja laki-laki sebesar 306.47, lebih kecil dari *mean rank* Skema Keagamaan *xenosophia* remaja perempuan sebesar 381.65

Tabel 15
Mean Rank Skema Keagamaan *Xenosophia*

Jenis Kelamin		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Skema Keagamaan <i>Xenosophia</i>	laki-laki	247	306.47	75699.00
	perempuan	463	381.65	176706.00
	Total	710		

Perbedaan *mean rank* Skema Keagamaan *Xenosophia* antara remaja laki-laki dan perempuan adalah signifikan karena asymp. Sig. (2 tailed) lebih kecil dari 0.01. Tabel 16 menunjukkan nilai signifikansi perbedaan tersebut.

Tabel 16
Nilai Z dan Nilai Signifikansi Perbedaan

Skema_Keagamaan_Xenosophia	
Mann-Whitney U	45071.000
Wilcoxon W	75699.000
Z	-4.688
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Grouping Variable: Jenis_Kelamin

Remaja perempuan juga memiliki kepribadian yang jauh lebih terbuka terhadap pengalaman baru dibandingkan laki-laki, $Z = -5.340$, $p < 0.01$. . Dengan menggunakan analisis *Mann Whitney U* diperoleh hasil bahwa remaja perempuan lebih memiliki kepribadian yang lebih terbuka dibandingkan remaja laki-laki. Pada tabel 17 di bawah ini diketahui bahwa

mean rank Kepribadian Terbuka remaja laki-laki sebesar 299.72, lebih kecil dari *mean rank* Kepribadian Terbuka remaja perempuan sebesar 385.26.

Tabel 17
Mean Rank Kepribadian Terbuka

	Jenis Kelamin	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Kepribadian Terbuka	laki-laki	247	299.72	74031.50
	perempuan	463	385.26	178373.50
	Total	710		

Perbedaan *mean rank* Kepribadian Terbuka antara remaja laki-laki dan perempuan adalah signifikan karena asymp. Sig. (2 tailed) lebih kecil dari 0.01. Tabel 18 menunjukkan nilai signifikansi perbedaan tersebut.

Tabel 18
Nilai Z dan Nilai Signifikansi Perbedaan

	Kepribadian_Terbuka
Mann-Whitney U	43403.500
Wilcoxon W	74031.500
Z	-5.340
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000
a. Grouping Variable: Jenis_Kelamin	

Terakhir, berkaitan dengan fundamentalisme agama, laki-laki jauh lebih fundamentalis dibandingkan perempuan, Z = -5.046, p<0.01.Dengan menggunakan analisis *Mann Whitney U* diperoleh hasil bahwa remaja laki laki lebih

memiliki fundamentalisme agama yang lebih tinggi dibandingkan remaja perempuan. Pada tabel 19 di bawah ini diketahui bahwa *mean rank* fundamentalisme agama remaja laki-laki sebesar 412.31, lebih kecil dari *mean rank* fundamentalisme agama remaja perempuan sebesar 325.19.

Tabel 19

Mean Rank Fundamentalisme Agama				
	Jenis Kelamin	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Fundament alisme Agama	laki-laki	247	412.31	101841.50
	perempuan	463	325.19	150563.50
	Total	710		

Perbedaan *mean rank* Fundamentalisme Agama antara remaja laki-laki dan perempuan adalah signifikan karena asymp. Sig. (2 tailed) lebih kecil dari 0.01. Tabel 20 menunjukkan nilai signifikansi perbedaan tersebut.

Tabel 20

Nilai Z dan Nilai Signifikansi Perbedaan

Fundamentalisme Agama	
Mann-Whitney U	43147.500
Wilcoxon W	150563.500
Z	-5.406
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000
a. Grouping Variable: Jenis_Kelamin	

Berdasarkan temuan, secara umum ditemukan bahwa perempuan jauh lebih tidak fundamentalis secara agama dibandingkan remaja laki-laki. Dalam perspektif agama monotheis / abrahamis, laki-laki dituntut memiliki peran yang lebih dalam kehidupan beragama dalam keluarga dan masyarakat dibandingkan perempuan.

Dalam perspektif Kristiani diperoleh pengajaran oleh Rasul Paulus dalam Kitab Efesus 5:22 yang menyatakan bahwa suami adalah pemimpin dalam keluarga. Oleh karena suami berperan sebagai pemimpin keluarga maka dasar dasar kehidupan religius menjadi perhatian yang lebih besar oleh kaum laki-laki. Oleh karena itu laki-laki cenderung akan mengambil peran lebih dalam hal keagamaan sehingga mereka lebih bersifat fundamentalis dalam kehidupan keagamaannya.

Fundamentalisme agama seringkali berhubungan dengan karakteristik yang bersifat patriarkal. Oleh karena itu peranan laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan dalam fundamentalisme agama. Hallahmi (2004) menyatakan bahwa laki laki lebih memiliki fundamentalisme agama yang lebih kuat dibandingkan perempuan dikarenakan terjadinya perubahan sosial politik dan ekonomi dunia. Semakin banyaknya gerakan kebebasan berekspresi, demonstrasi persamaan hak antara laki dan perempuan semakin kuat juga gerakkan fundamentalisme agama di kalangan laki-laki. Selain itu peran perempuan yang “dikonstruksikan” hanya sebagai peran domestik membuat membuat kaum perempuan lebih jarang bersinggungan dengan informasi dari luar. Peran laki laki adalah melindungi tradisi keagamaan dari luar seperti misalnya gangguan dari desakralisasi simbol simbol agama.

Dari perspektif kepribadian, ditemukan bahwa kepribadian yang lebih terbuka terhadap pengalaman baru lebih tidak memiliki fundamentalisme agama yang tinggi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa perempuan lebih memiliki keterbukaan terhadap pengalaman baru sehingga berdampak pada fundamentalisme agama mereka yang lebih lemah dibandingkan fundamentalisme agama laki-laki.

Secara umum, remaja perempuan dalam penelitian ini lebih menunjukkan skema keagamaan yang lebih toleran (FTR) dan mau berdialog dengan individu dengan keyakinan lainnya (*xenosophia*) dibandingkan remaja laki-laki.

Berdasarkan kategori tingkat pendidikan diperoleh perbedaan yang nyata antara partisipan dengan latar belakang pendidikan SMP, SMA dan S1 pada variabel penelitian. Dengan menggunakan uji beda *Kruskal Wallis* ditemukan bahwa keseluruhan variabel penelitian memiliki nilai $p < 0.01$. Tabel 21 di bawah ini menggambarkan perbedaan tingkat kepribadian, fundamentalisme agama, dan skema agama antara siswa SMP, SMA dan S1.

Tabel 21

Signifikansi Perbedaan Variabel Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan					
	Skema Keagamaan TTT	Skema Keagamaan FTR	Skema Keagamaan Xenosophia	Fundamentalisme Agama	Kepribadian Terbuka
Chi-square	400.335	201.683	438.066	452.439	43.253
Df	2	2	2	2	2
Asymp. Sig.	.000	.000	.000	.000	.000
a. Kruskal Wallis Test					
b. Grouping Variable: Tingkat_Pendidikan					

Secara lebih spesifik, berikut adalah tabel yang merangkum *mean rank* dari setiap variabel penelitian pada tingkat pendidikan partisipan.

Tabel 22

Mean Rank Variabel Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

	Tingkat Pendidikan	Mean Rank
Skema	SMP	234
Keagamaan	1 SMA	213
Text Truth	S1	263
Teaching	Total	710
Skema	SMP	234
Keagamaan	n1 SMA	213
FTR	S1	263
	Total	710
Skema	SMP	234
Keagamaan	SMA	213
Xenosophia	S1	263
	Total	710
Fundamentalisme Agama	SMP	234
	SMA	213
	S1	263
	Total	710
Kepribadian	SMP	234
Terbuka	SMA	213
	S1	263
	Total	710

Dari tabel 22 di atas nampak bahwa partisipan dengan latar belakang pendidikan SMP memiliki skor *mean rank*

tertinggi dalam skema keagamaan *scriptural* / TTT dan fundamentalisme agama.

Pembuktian terhadap teori perkembangan psiko sosial, usia remaja dalam rentang pendidikan SMP berada pada tahap krisis identitas (*identity crisis*). Menurut Erikson (dalam Gross, 1987), tahap krisis identitas banyak dialami usia pelajar menengah pertama dikarenakan dalam tahap ini mereka dihadapkan pada pembentukan peran sosial yang harus sesuai dengan harapan masyarakat. Salah satu identitas sosial yang dibentuk oleh pelajar menengah pertama adalah identitas agama.

Dalam tahap ini individu berusaha untuk mencari afiliasi dengan kelompok keagamaan. Dalam tahap ini mereka mulai memahami siapa diri mereka, dan ke mana hidup mereka akan diarahkan. Oleh karena itu dapat dipahami apabila pelajar menengah pertama memiliki skema keagamaan *Truth of Text and Teaching* yang bersifat skriptural.

Skema keagamaan ini bersifat absolut, eksklusif, dan bersifat literal dalam memahami ayat ayat suci dalam kitab sucinya. Pelajar menengah pertama akan memiliki skema keagamaan dengan ciri di atas sebagai dasar pembentukan identitas sosial dirinya dan juga peran sosial dirinya. Selain itu mereka juga menghindari banyak informasi keagamaan agar menghindari ambiguitas identitas keagamaan dirinya sehingga memiliki gaya pemahaman agama yang bersifat literal dan skripturalis. Dengan gaya skema keagamaan seperti ini pada akhirnya terbentuklah fundamentalisme agama yang tinggi juga pada remaja di tingkat pendidikan menengah pertama.

Untuk melihat perbedaan variabel penelitian di antara tingkat pendidikan langkah selanjutnya adalah membandingkan tiap kelompok tingkat pendidikan dengan menggunakan uji *Mann Whitney U*. Terdapat perbedaan yang signifikan pada variabel penelitian antara partisipan SMP dan partisipan SMA. Siswa SMP lebih memiliki orientasi keagamaan *truth of texts & teachings* dan fundamentalisme agama yang lebih kuat dibandingkan siswa SMA, $p < 0.01$. Tabel 23 di bawah ini menunjukkan angka statistik perbedaan tersebut.

Tabel 23
Gambaran *mean rank* Variabel Penelitian

	Tingkat Pendidikan	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Skema	SMP	234	317.91	74391.00
Keagamaan	SMA	213	120.83	25737.00
Text Truth Teaching	Total	447		
Fundament	SMP	234	328.29	76820.00
alisme	SMA	213	109.43	23308.00
Agama	Total	447		

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa *mean rank* skema keagamaan *Text, Truth and Teaching* siswa SMP lebih besar daripada *mean rank* skema keagamaan *Text, Truth and Teaching* siswa SMA. Demikian juga dengan variabel fundamentalisme agama yakni siswa SMP memiliki *mean rank* yang lebih besar dibanding siswa/i SMA.

Sementara itu, siswa SMA lebih memiliki orientasi keagamaan *fairness, tolerance dan rational choice*, skema

keagamaan *xenosophia* dan kepribadian yang lebih terbuka terhadap pengalaman baru, $p < 0.01$. Tabel 24 di bawah ini menunjukkan signifikansi perbedaan *mean rank* variabel penelitian tersebut.

Tabel 24
Signifikansi Uji Beda Variabel Penelitian

Skema		Skema	Skema	Fundame	Kepribadian
Keagamaan		Keagamaan	Keagamaan	ntalisme	Terbuka
Text Truth		FTR	Xenosophia	Agama	Terbuka
Teaching		9330.000	1315.500	517.000	16096.500
Mann-Whitney U	2946.000				
Wilcoxon W	25737.000	36825.000	28810.500	23308.000	43591.500
Z	-17.969	-11.698	-17.624	-18.030	-6.556
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000

a. Grouping Variable: Tingkat_Pendidikan

Analisis yang sama terhadap siswa SMP dan mahasiswa S1 memperoleh simpulan yang sama. Terdapat perbedaan yang signifikan pada variabel penelitian antara partisipan SMP dan partisipan S1. Siswa SMP lebih memiliki orientasi keagamaan *truth of texts & teachings* dan fundamentalisme agama yang lebih kuat dibandingkan siswa S1, $p < 0.01$. Sementara itu, mahasiswa/i S1 lebih memiliki orientasi keagamaan *fairness, tolerance dan rational choice*, skema keagamaan *xenosophia* dan kepribadian terbuka terhadap pengalaman baru, $p < 0.01$.

Tabel 25 di bawah ini menunjukkan angka *statistik mean rank* tersebut.

Tabel 25
Gambaran *mean rank* Variabel Penelitian

	Tingkat Pendidikan	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Skema	SMP	234	365.86	85611.00
Keagamaan	S1	263	145.03	38142.00
Text Truth Teaching	Total	497		
Skema	SMP	234	163.30	38211.50
Keagamaan	S1	263	325.25	85541.50
FTR	Total	497		
Skema	SMP	234	121.95	28536.00
Keagamaan	S1	263	362.04	95217.00
Xenosophia	Total	497		
Fundamenta	SMP	234	377.57	88351.50
lisme	S1	263	134.61	35401.50
Agama	Total	497		
Kepribadian	SMP	234	220.15	51515.00
Terbuka	S1	263	274.67	72238.00

Tabel 25
Gambaran *mean rank* Variabel Penelitian

	Tingkat Pendidikan	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Skema	SMP	234	365.86	85611.00
Keagamaan	S1	263	145.03	38142.00
Text Truth Teaching	Total	497		
Skema	SMP	234	163.30	38211.50
Keagamaan	S1	263	325.25	85541.50
FTR	Total	497		
Skema	SMP	234	121.95	28536.00
Keagamaan	S1	263	362.04	95217.00
Xenosophia	Total	497		
Fundamenta	SMP	234	377.57	88351.50
lisme	S1	263	134.61	35401.50
Agama	Total	497		
Kepribadian	SMP	234	220.15	51515.00
Terbuka	S1	263	274.67	72238.00
	Total	497		

Tabel 26 di bawah ini menunjukkan angka statistik perbedaan tersebut.

Tabel 26

Siginifikansi Uji Beda Variabel Penelitian

	Skema				Fundamenta lisme Agama	Kepribadian Terbuka
	Keagamaan Text Truth Teaching	Skema Keagamaan FTR	Skema Keagamaan Xenosophia			
Mann-Whitney U	3426.000	10716.500	1041.000	685.500	24020.000	
Wilcoxon W	38142.000	38211.500	28536.000	35401.500	51515.000	
Z	-18.568	-12.772	-18.879	-18.935	-4.282	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	

a. Grouping Variable: Tingkat_Pendidikan

Berdasarkan uji beda variabel penelitian antara siswa SMA dan S1 ditemukan bahwa hanya variabel orientasi keagamaan *fairness, tolerance dan rational choice* dan kepribadian terbuka terhadap pengalaman baru, $p < 0.01$ yang memiliki perbedaan yang signifikan. Siswa SMA lebih memiliki orientasi keagamaan *fairness, tolerance dan rational choice* dan kepribadian terbuka terhadap pengalaman baru yang lebih kuat dibandingkan mahasiswa S1.

Tabel 27 di bawah ini menunjukkan signifikansi perbedaan *mean rank* variabel penelitian tersebut.

Tabel 27

Gambaran *mean rank* Variabel Penelitian

	Tingkat Pendidikan	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Skema	SMA	213	225.13	47953.00
Keagamaan	S1	263	249.33	65573.00
Text Truth Teaching	Total	476		
Skema	SMA	213	224.13	47740.00
Keagamaan	S1	263	250.14	65786.00
FTR	Total	476		
Skema	SMA	213	245.59	52310.50
Keagamaan	S1	263	232.76	61215.50
Xenosophia	Total	476		
Fundamenta	SMA	213	235.65	50194.00
lisme Agama	S1	263	240.81	63332.00
	Total	476		
Kepribadian	SMA	213	254.80	54273.00
Terbuka	S1	263	225.30	59253.00

Gambaran *mean rank* Variabel Penelitian

	Tingkat Pendidikan	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Skema	SMA	213	225.13	47953.00
Keagamaan	S1	263	249.33	65573.00
Text Truth Teaching	Total	476		
Skema	SMA	213	224.13	47740.00
Keagamaan	S1	263	250.14	65786.00
FTR	Total	476		
Skema	SMA	213	245.59	52310.50
Keagamaan	S1	263	232.76	61215.50
Xenosophia	Total	476		
Fundamenta	SMA	213	235.65	50194.00
lisme Agama	S1	263	240.81	63332.00
	Total	476		
Kepribadian	SMA	213	254.80	54273.00
Terbuka	S1	263	225.30	59253.00
	Total	476		

Simpulan

Hubungan antara kepribadian terbuka, skema keagamaan dan fundamentalisme agama pada remaja di Jakarta, Banyumas dan Tangerang terbukti dengan sangat signifikan dalam penelitian ini. Hal ini berarti kerangka pikir teoretis penelitian ini sudah dengan tepat dirumuskan. Selain itu, semua alat ukur penelitian ini memiliki koefisien Alpha Cronbach yang baik. Hal ini menunjukkan alat ukur penelitian dalam penelitian ini memiliki reliabilitas yang baik atau

dengan kata lain dapat dipercaya untuk penelitian di waktu yang berbeda.

Remaja laki-laki memiliki fundamentalisme agama dan skema keagamaan *truth of texts & teachings* yang lebih tinggi dibandingkan remaja perempuan. Hal ini berarti mereka lebih bersifat tertutup terhadap kemungkinan untuk berdialog bahkan mempelajari agama/ keyakinan lainnya. Sebaliknya remaja perempuan lebih menunjukkan skema keagamaan yang lebih toleran dan sikap mau berdialog terhadap individu yang memiliki keyakinan yang berbeda.

Jenjang pendidikan menengah pertama merupakan jenjang pendidikan ketika fundamentalisme agama dan skema kehidupan agama yang skriptualis sangat tinggi.

Saran

Saran penelitian yang dapat diberikan pada penelitian dengan tema fundamentalisme agama adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan instrumen psikologis mengenai sikap terhadap gaya hidup modern dan cara hidup tradisional serta sekularisme dipandang perlu dikarenakan fundamentalisme seringkali dipandang bertolak belakang dengan modernitas dan sekulerisme.
- b. Penggunaan metode penelitian *mixed-method* agar pemahaman atas fenomena yang diteliti lebih eksploratif mendalam.
- c. Pemilihan rentang usia yang lebih variatif sehingga dapat diperoleh data yang lebih kaya.

Rekomendasi

- a. Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan tingkatan pendidikan yang memiliki nilai fundamentalisme agama dan skema keagamaan *truth of texts & teachings* yang tertinggi dibandingkan SMA dan S1. Oleh karenanya pada tahap perkembangan usia siswa/i SMP yang rentan terhadap informasi yang masuk ke dalam pemahaman siswa/i SMP, diperlukan guru-guru agama yang toleran dan bersifat *xenosophia*, mau berdialog dan menghormati keyakinan lain tanpa harus kehilangan identitas agama pribadinya. Pemberian model toleransi oleh guru agama, baik melalui perilaku, perkataan dan materi pelajaran agama akan dapat ditiru oleh siswa/i SMP dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Perempuan memiliki toleransi agama yang jauh lebih besar dibandingkan laki-laki. Selain itu perempuan juga memiliki kepribadian yang lebih terbuka dibandingkan laki-laki. Untuk itu perlu suatu program khusus yang dapat dirancang kementerian agama RI untuk lebih melibatkan perempuan dalam berbagai kegiatan keagamaan dan pendidikan di keluarga, sekolah dan masyarakat luas.
- c. Dari penelitian ditemukan bahwa kepribadian yang memiliki keterbukaan terhadap pengalaman baru menciptakan skema keagamaan yang toleran dan dialogis bagi individu tersebut. Oleh karena itu pendidikan agama di rumah harus mempertimbangkan pola asuh dari orangtua yang dapat membentuk kepribadian terbuka

pada anak-anak mereka sehingga anak-anak dapat tumbuh kembang dalam lingkungan yang toleran terhadap perbedaan. Dalam hal ini kementerian agama dapat bekerja sama dengan kementerian / lembaga sosial pendidikan yang memiliki kajian / kebijakan mengenai pola asuh yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond G.A, Appleby R.S., Sivan E. 2003. *Strong Religion: The Rise of Fundamentalisms Around the World*. Chicago: Univ. Chicago Press.
- Altemeyer, B., & Hunsberger, B. (1992). Authoritarianism, religious fundamentalism, quest, and prejudice. *International Journal for the Psychology of Religion*, 2(2), 113-133. doi: 10.1207/s15327582ijpr0202_5
- Altemeyer, B. & Hunsberger, B. (2004). A revised Religious Fundamentalism Scale: The short and sweet of it. *International Journal for the Psychology of Religion*, 14, 47-54.
- Andrianto, A. (2008). Sekretariat FPI Purwokerto Diserbu Warga.
<http://www.tempo.co/read/news/2008/06/03/058124280/Sekertariat-FPI-Purwokerto-Diserbu-Warga>. Diakses tanggal 15 Oktober 2014.
- Dornyei, Z. (2007). *Research methods in applied linguistics*. New York: Oxford University Press.
- Duckitt, J. & Farre, B. (1994). Right-wing authoritarianism and political intolerance among Whites in the future majority-rule South Africa. *Journal of Social Psychology*, 134, 735-741.
- English, F. 1996. The lure of fundamentalism. *Transactional Analysis Journal*. 26:23-30.
- Emerson, M.O. dan Hartman, D. (2006). The Rise of religious fundamentalism. *Annu.Rev.Sociol.*32:127–44 doi:10.1146

- Goldberg L. R. (1993). The structure of phenotypic personality traits. *American Psychologist*. 48 (1): 26–34. doi:10.1037/0003-066X.48.1.26
- Gross, F. L. (1987). *Introducing Erik Erikson: An invitation to his thinking*. Lanham, MD: University Press of America.
- Gusti, B. (16 Desember, 2013). *Fundamentalisme agama di Indonesia semakin menguat*. Diunduh dari <http://www.suarakita.org/2013/12/fundamentalisme-agama-di-indonesia-semakin-menguat/> diunduh 22 Juli 2014
- Hallahmi, B.B. (2004). The Return of Martyrdom: Honour, Death and Immortality. In: Weinberg, L. and Pedahzur, A., eds. *Religious Fundamentalism and Political Extremism*. London: Frank Cass Publishers. Pp. 11-35.
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/07/22/n93hic-polisi-pantau-pergerakan-isis-di-indonesia>. diunduh 22 Juli 2014
- Hunsberger, Bruce, M. Pratt, and S. Pancer. 1994. Religious fundamentalism and integrative complexity of thought: A relationship for existential content only? *Journal for the Scientific Study of Religion*. 33:335-46.
- Hunsberger, Bruce, S. Alisat, S. Pancer, and M. Pratt. 1996. Religious fundamentalism and religious doubts: Content, connections, and complexity of thinking. *International Journal for the Psychology of Religion*. 6:201-220.
- John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big-Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. In L. A. Pervin & O. P. John (Eds.),

Handbook of personality: Theory and research(Vol. 2, pp. 102–138). New York: Guilford Press.

John, O. P., & Soto, C. J. (2007). The importance of being valid: Reliability and the process of construct validation. In R. W. Robins, R. C. Fraley, & R. F. Krueger (Eds.), *Handbook of research methods in personality psychology* (pp. 461-494). New York, NY: Cambridge University Press.

Khoiron, M. (17 Oktober 2014). *GP Ansor Riau Ingatkan Kampus Jaga NKRI dari HTI*. Diunduh dari <http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,55164-lang,id-c,nasional,GP+Ansor+Riau+Ingatkan+Kampus+Jaga+NKRI+dari+HTI-.phpx>.

Kish L [1987], *Statistical Design for Research*, New York: Wiley.

Kellstedt, Lyman, and C. Smidt, 1991. Measuring Fundamentalism: An Analysis of Different Operational Strategies.*Journal for the Scientific Study of Religion*. 30:259-78.

Liht, J., Gideon, L., Savage, C.S., White, W., dan O'Neill, K.A. (2011). Religious Fundamentalism: An Empirically Derived Construct and Measurement Scale. *Psychology of Religion*. 33 (2011) 1-25.

McFarland, S., and J. Warren. (1992). Religious orientations and selective exposure among fundamentalist Christians.*Journal for the Scientific Study of Religion*. 31:163-74.

- McCrae, R.R., & Costa, P.T. (1990). *Personality in adulthood*. New York: Guilford.
- McCrae R. R., John O. P. (1992). "An introduction to the Five-Factor Model and its applications". *Journal of Personality*. 60 (2): 175–215. doi: 10.1111/j.1467-6494.1992.tb00970
- McCrae, R.R., & Costa, P.T. Jr. (1996). Toward a new generation of personality theories: Theoretical contexts for the Five-Factor model. In J.S. Wiggins (Ed.), *The five-factor model of personality: Theoretical perspectives* (pp. 51-87). New York: Guilford Press.
- McCrae, R. R., & Sutin, A.R. (2009). Openness to Experience. In M. R. Leary and R. H.
- Hoyle (Eds.), *Handbook of Individual Differences in Social Behavior* (pp. 257-273). New York: Guilford.
- McRae, R.R., dan Tobert R. (2004). "Openness to Experience" *Encyclopedia of Applied Psychology* 2. Elsevier.
- Richards, P. 1994. Religious devoutness, impression management, and personality functioning in college students. *Journal of Research in Personality*. 28:14-26.
- Rosidah, N. (2012). Fundamentalisme Agama. *Walisono*. Vol. 20 no.12
- Santrok, J. W. (2003). *Adolescence (Perkembangan Remaja)*. Terjemahan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Saroglou, V. (2002). "Religion and the five-factors of personality: A meta-analytic review". *Personality and Individual Differences* 32: 15–25. doi:10.1016/S0191-8869(00)00233-6

- Stark, R., & Finke, R. (2000). *Acts of faith: Explaining the human side of religion*. Berkley and Los Angeles: University of California.
- Streib, H., Hood, R.W., Klein, C. (2009). *The Religious Schema Scale: Construction and Initial Validation of a Quantitative Measure for Religious Styles*. CIRRuS Working Papers, No.5.
- Streyfeller, L.L., & McNally, R.J. (1997). Fundamentalists and liberals: personality characteristics of Protestant Christians. *Person. individ. Diff.* Vol. 24. No. 4. pp. 579-580.
- Wibisono, N.S. *Fanatik terhadap Agama Penyebab Konflik Bangsa ini*. Minggu, 28 Juli 2013. <http://nurdinsw.blogspot.com/2013/07/fanatik-terhadap-agama-penyebab-konflik.html>.

TRANSFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI PERNIKAHAN-KEPENDUDUKAN OLEH KUA GANDOMANAN KOTA YOGYAKARTA

Izzatin Kamala, S.Pd., M.Pd

Pendahuluan

Di Indonesia terdapat pemisahan pelayanan administrasi pernikahan dan kependudukan bagi Warga Negara Indonesia beragama Islam. Pelayanan administrasi pernikahan diperoleh melalui KUA¹ (sebagai pelaksanaan UU 22/1946, UU 32/1954 dan UU 1/1974), sementara pelayanan administrasi kependudukan di bawah kendali Didukcapil² (sebagai pelaksanaan UU 23/2006 dan UU 24/2013). KUA berperan dalam mengelola data perubahan status perkawinan dari status belum kawin menjadi status kawin. Sementara itu, Didukcapil memegang kendali³ pencatatan perubahan status tersebut dalam suatu identitas kependudukan, seperti KTP dan KK. Pembidangan seperti ini sebenarnya bertujuan untuk membangun sistem penataan identitas warga negara yang kuat. Namun dalam prakteknya, pemisahan seperti ini ternyata rentan menimbulkan masalah.

1 Singkatan dari Kantor Urusan Agama. Selanjutnya selalu disingkat KUA.

2 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selanjutnya selalu disingkat Didukcapil.

3 Penggunaan istilah “kendali” membawa pesan bahwa pelayanan teknis administrasi kependudukan tidak hanya dilaksanakan Didukcapil tetapi juga Pemerintah Kecamatan sebagai pembantu dari Didukcapil.

Sistem yang berlaku saat ini memberi kesempatan bagi pasangan menikah untuk langsung mendapatkan buku kutipan akta nikah sesaat setelah prosesi akad nikah selesai dilangsungkan tanpa harus terlebih dahulu mengubah status identitasnya di KTP dan KK. Keberadaan sistem seperti ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Sebagai contoh, laki-laki yang berkeinginan melakukan poligami. Karena menghindari pemenuhan syarat administrasi, yakni izin tertulis dari istri sebelumnya, dia bisa melakukan pemalsuan identitas status. Pemalsuan bisa lolos kalau pihak KUA tidak melakukan verifikasi dan validasi data secara langsung dengan Dukcapil setempat⁴.

Oleh sebab itu, untuk membangun sistem administrasi yang diharapkan mampu menjamin akurasi data pernikahan-kependudukan, Ditjen Bimas Islam⁵ dan Ditjen Dukcapil⁶ perlu melakukan kerjasama untuk melakukan integrasi data. Sampai saat ini, Ditjen Bimas Islam dan Ditjen Dukcapil belum

4 Pemalsuan status yang sempat terpantau ditemukan dalam beberapa putusan pengadilan berikut ini: Putusan PA Jakarta Timur No. 1852/Pdt.G/2009/PA.JT., PA Batang No. 742/Pdt.G/2005/PA.Btg, PA Semarang No. 1447/Pdt.G/2011/PA.Sm, PA Kab. Malang No. 1321/Pdt.G/2012.PA.Kab.Mlg, PA Sleman No. 28/Pdt.G/2006/PA.Smn. Menurut salinannya, majelis hakim membatalkan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas status. Tidak hanya itu, kasus serupa melibatkan Djoko Susilo. Perwira Polri ini telah menikahi tiga perempuan. Uniknya, saat menikahi tiga perempuan tersebut secara berurutan, statusnya selalu masih jejak karena memalsukan identitas status. Mereka bertiga adalah Suratmi, Mahdiana, dan Dipta Anindita. (<http://www.lihat.co.id/2013/04/5-hal-yang-dipalsukan-oleh-irjen-djoko.html#axzz37YH4Lzii> diakses 15 Juli 2014 Pukul 20.00 WIB).

5 Singkatan dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, yang membawahi Unit Pelayanan Teknis Kantor Urusan Agama di tingkat kecamatan seluruh Indonesia.

6 Singkatan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang membawahi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tingkat Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

berhasil menyelesaikan dan memutuskan draft yang bisa dijadikan pedoman secara nasional untuk merealisasikan integrasi pelayanan administrasi pernikahan-kependudukan. Informasi terakhir seperti dilaporkan dalam website resmi Ditjen Bimas Islam pada 7 Mei 2014, rencana tersebut baru pada tahap penyusunan.

Sebenarnya pada Tahun 2003, telah lahir Surat Keputusan Bersama Antara Kementerian Agama dengan Kementerian Dalam Negeri tentang perlunya tukar data NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk). Namun, SKB tersebut tidak berjalan baik. Oleh sebab itu, draft pedoman pelaksanaan teknis harus segera direalisasikan untuk mengintegrasikan Sistem Informasi Nikah dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. (<http://bimasislam.kemenag.go.id>).

Di tengah kebutuhan untuk merealisasikan solusi atas problematika sistem administrasi kependudukan di atas, ternyata Indonesia telah memiliki pengalaman keberhasilan di bidang transformasi pelayanan administrasi pernikahan-kependudukan, yaitu transformasi yang dilaksanakan KUA Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Didukcapil Kota Yogyakarta. Transformasi pelayanan oleh KUA Gondomanan bekerjasama dengan Didukcapil Kota Yogyakarta berlangsung atas dasar MoU antara Kantor Kemenag Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta. Meskipun MoU tersebut sebenarnya berlaku bagi seluruh KUA Kota Yogyakarta, tetapi keberhasilan pelayanan tersebut sangat bergantung kepada kemampuan KUA untuk menyusun sistem pelayanannya dan untuk melaksanakannya sesuai standar inovasi pelayanan publik. (<http://www.gondomanan.kuadiy.org>).

Berdasarkan evaluasi selama 2012 dan 2013, Kantor Kemenag Wilayah DIY memberikan penghargaan kepada KUA Gondomanan sebagai KUA Teladan DIY 2013. Selanjutnya, KUA Gondomanan terpilih sebagai wakil dari DIY dalam kompetisi KUA Teladan Nasional 2013. Sebagai hasilnya, KUA Gondomanan berhasil mendapatkan penghargaan sebagai KUA Teladan Nasional 2013 dari Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan program unggulannya adalah integrasi pelayanan administrasi pernikahan-kependudukan. (<http://www.gondomanan.kuadiy.org>).

Prestasi di atas menunjukkan bahwa KUA Gondomanan layak menjadi contoh bagi KUA-KUA lain seluruh Indonesia yang ingin meniru pelaksanaan pelayanan integrasi administrasi pernikahan-kependudukan. Selain itu, pengalaman keberhasilan (*best practice*) dari KUA Gondomanan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menerapkan kebijakan pelayanan integrasi administrasi pernikahan-kependudukan secara nasional, yang saat ini tengah disusun Ditjen Bimas Islam bersama Ditjen Dukcapil. Mengingat begitu berharganya pengalaman keberhasilan KUA Gondomanan, penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap dua faktor penting yang menopang kesuksesan penyelenggaraan transformasi pelayanan tersebut. Dua hal tersebut adalah tersedianya standar pelayanan dan realisasi pelayanan berstandar inovatif. Dua hal ini pulalah yang menjadi elemen penting yang harus dipenuhi jika KUA lain ingin menirunya atau jika Ditjen Bimas Islam ingin menjadikannya percontohan nasional.

Rumusan

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana sistem pelayanan yang dibangun KUA Gondomanan untuk melaksanakan transformasi pelayanan administrasi pernikahan-kependudukan?; Bagaimana penyelenggaraan transformasi pelayanan tersebut ditinjau dari pemenuhan standar inovasi pelayanan publik? Bagaimana keberlanjutan transformasi pelayanan tersebut di KUA Gondomanan dan respon KUA se-Kota Yogyakarta untuk mereplikasinya?

Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: Mengeksplorasi sistem transformasi pelayanan administrasi pernikahan-kependudukan yang telah disusun KUA Gondomanan bekerjasama dengan Didukcapil Kota Yogyakarta; Mengeksplorasi standar inovasi pelayanan publik yang telah dipenuhi dalam melaksanakan transformasi pelayanan administrasi pernikahan-kependudukan; Mengeksplorasi keberlanjutan program di KUA Gondomanan dan respon seluruh KUA se-Kota Yogyakarta.

Manfaat yang diharapkan

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut: Bagi dunia pendidikan, penelitian ini akan memperkaya strategi peningkatan kapasitas pelayanan di KUA. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan perbendaharaan pengetahuan lapangan yang amat bermanfaat bagi proses pembelajaran tentang upaya membangun perbaikan pelayanan KUA yang berangkat dari program integrasi pelayanan administrasi pernikahan-kependudukan.

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi dan mendorong lahirnya penyelenggaraan program transformasi pelayanan administrasi pernikahan-kependudukan di KUA-KUA baru seluruh Indonesia, terutama bagi KUA yang belum menyelenggarakannya.

Bagi KUA dan Didukcapil Kabupaten/Kota, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meniru penyelenggaraan transformasi pelayanan administrasi pernikahan-kependudukan di wilayah kerja geografisnya masing-masing.

Bagi Ditjen Bimas Islam dan Ditjen Dukcapil, penelitian ini berguna untuk menjadi alternatif model pelaksanaan kebijakan transformasi pelayanan administrasi pernikahan-kependudukan secara nasional. Penelitian ini meskipun baru teruji dalam lingkup satu kecamatan, tetapi sebenarnya mengandung pelajaran berharga (*lesson learned*) yang dapat dikembangkan untuk diaplikasikan di tingkat nasional.

Bagi Pemerintah Daerah (baik Bupati/Wali Kota, Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, maupun DPRD Kabupaten/Kota), penelitian ini bisa menjadi rujukan untuk melahirkan inspirasi maupun inisiatif dalam menyelenggarakan inovasi transformasi pelayanan administrasi pernikahan-kependudukan di wilayah geografisnya masing-masing.

Bagi Presiden, DPR, Kementerian Dalam Negeri RI selaku pemegang otorisasi administrasi kependudukan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI selaku pengawas pelayanan publik, dan

khususnya bagi Kementerian Agama RI selaku pemegang otoritas administrasi pernikahan; penelitian ini berguna untuk menjadi dorongan bagi mereka semua untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan yang ada agar transformasi pelayanan administrasi pernikahan-kependudukan mendapatkan payung hukum nasional. Di antara produk hukum setingkat undang-undang adalah UU 22/1946, UU 32/1954, UU 1/1974, UU 24/2013 dan UU 25/2009. Di antara produk hukum setingkat di bawah undang-undang adalah Peraturan Pemerintah 9/1975, Peraturan Pemerintah 37/2007, Peraturan Presiden 91/201, Peraturan Menteri Agama 39/2012, Keputusan Menteri Agama 477/2004, dan Surat Edaran Dirjen BIPH No. DJ.1/1/PW.01/1478/2005.

Tinjauan Pustaka

Penelitian yang relevan dengan fokus masalah penelitian ini adalah “Manipulasi Identitas dalam Perkawinan; Studi Kasus pada KUA Kecamatan Kadungede, Kuningan-Jawa Barat” (Zulkarnain, 2010), “Pembatalan Perkawinan karena Adanya Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan Poligami; Studi terhadap Putusan No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg” (Aryani, 2012), “Pemalsuan Identitas sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan; Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1852/Pdt.G/2009/PA.JT” (M. Muslih, 2011), “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami; Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1447/Pdt.G/2011/PA.Sm” (Ana Listiana, 2013), “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami; Studi Putusan PA Sleman Nomor 28/Pdt.G/2006/PA.Smn” (Tugimin, 2008). Beberapa penelitian tersebut menggarisbawahi akan peran vital yang

seharusnya dilaksanakan KUA dalam mencegah pemalsuan identitas status. Ketika KUA lengah, maka pemalsuan identitas status terjadi hingga merugikan salah satu pasangan. Akhirnya, jalur pengadilan menjadi solusi terakhir.

Kerangka Konseptual

Penelitian ini memanfaatkan satu konsep kunci yaitu transformasi pelayanan administrasi pernikahan-kependudukan. Transformasi pelayanan dimaksudkan sebagai upaya pembaharuan pelayanan administrasi pernikahan dari model lama menuju model baru. Sebagai contoh, apabila sebelumnya antara KUA dan Didukcapil tidak bisa tukar data secara *on line*, melalui transformasi pelayanan, *cross check* akurasi data secara *on line* bisa dilaksanakan.

Transformasi pelayanan merupakan jasa yang telah diselenggarakan oleh KUA Gondomanan sebagai hasil kerjasama dengan Didukcapil Kota Yogyakarta. Keberhasilan penyelenggaraannya diasumsikan sangat ditentukan dengan ketersediaan sistem pelayanannya yang sesuai dengan standar pelayanan publik.

1. Administrasi Pernikahan dan Kependudukan

Yang dimaksud dengan administrasi pernikahan adalah segala proses administrasi yang harus dipenuhi oleh pasangan calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tata cara, prosedur atau mekanisme pengurusan pernikahan yang berlaku di Indonesia meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman nikah, penasehatan nikah, prosesi akad nikah, pencatatan nikah dan pembayaran biaya nikah (Sutarmadi, 2006: 16).

Keputusan Menteri Agama 477/2004 ttg Pengumuman Kehendak Nikah menyatakan bahwa setiap orang yang akan melaksanakan pernikahan harus memberitahukan kehendak nikah kepada penghulu atau pembantu penghulu yang mewilayahi tempat pelaksanaan akad nikah. Pemberitahuan tersebut dilakukan secara tertulis oleh calon mempelai atau oleh wali atau wakilnya paling lambat 10 hari kerja sebelum akad nikah.

Pemberitahuan kehendak tersebut diawali dengan mekanisme calon pengantin menghadap ke kantor desa/kelurahan domisinya sesuai KTP. Calon pengantin pria akan bertemu dengan bagian kesejahteraan masyarakat (*modin-jawa*) untuk mendapatkan beberapa formulir. Beberapa dokumen yang harus diisi adalah formulir pemberitahuan kehendak nikah (N-7), keterangan untuk nikah (N-1), fotokopi akta kelahiran (N-2), persetujuan mempelai (N-30), keterangan tentang orang tua (N-4), keterangan asal-usul, surat kematian suami/istri (bagi duda atau janda), surat keterangan tidak mampu membayar (bagi calon pengantin yang tidak sanggup membayar) dan identitas diri seperti KTP, kartu keluarga, ijazah, dst (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005: 4).

Beberapa isian formulir tersebut dibawa ke KUA calon pengantin pria. Di tempat tersebut, calon pengantin pria meminta surat pengantar dan rekomendasi pelaksanaan akad nikah di KUA yang mewilayahi tempat tinggal calon pengantin perempuan. Bersamaan dengan itu, calon pengantin perempuan melakukan imunisasi ke puskesmas. Hasil pemeriksaan dari puskesmas tersebut dikumpulkan menjadi satu dengan dokumen dari calon pengantin pria. Kemudian, dokumen tersebut diserahkan kepada KUA

sekaligus penetapan jam, tanggal dan lokasi akad nikah. Sebelum proses tersebut menghasilkan kesepakatan pengumuman nikah, penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kehendak nikah (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005: 5).

Sesuai Surat Edaran Dirjen BIPH No. DJ.1/1/PW.01/1478/2005 ttg Petunjuk Pengisian Formulir dan Pemeriksaan Kehendak Nikah, pemeriksaan tersebut dilakukan melalui wawancara dengan mereka yang bersangkutan, meneliti surat-surat keterangan yang ada dan melakukan pengecekan ulang. Dalam pemeriksaan nikah inilah Pegawai Pencatat Nikah harus sangat teliti dalam memeriksa data-data yang diajukan, agar tidak ada data-data yang dipalsukan. Namun pada prakteknya, proses wawancara tersebut jarang sekali dilakukan. Pengalaman yang terjadi di lapangan adalah dokumen tersebut diserahkan begitu saja kepada KUA dan bahkan pelaksanaan penyerahannya menggunakan jasa pihak ketiga (biasanya *modin* desa).

Akurasi identitas kependudukan merupakan bagian yang vital dalam prosesi pernikahan. Beberapa administrasi kependudukan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari administrasi pernikahan adalah KTP dan Kartu Keluarga⁷. Ironi yang sering terjadi berkaitan dengan pemakaian administrasi kependudukan adalah pihak KUA tidak melakukan *cross check* terhadap akurasi identitas status calon pengantin ke Didukcapil. Selanjutnya, setelah petugas KUA mengesahkan akad nikah dan memberikan buku nikah kepada pasangan pengantin baru; secara hukum, KUA juga

⁷ Sebenarnya administrasi kependudukan masih banyak. Untuk lebih jelasnya lihat UU 23/2006 dan UU 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.

tidak bisa menginstruksikan Didukcapil mengubah identitas status KTP dan KK milik pasangan pengantin baru tersebut. Apabila pasangan pengantin baru tidak mengajukan perubahan identitas status KTP dan KK ke Didukcapil, maka status identitas akan tetap sama sebagaimana sebelum pernikahan. Inilah yang menjadi persoalan. Keberadaan seperti ini tentunya rentan untuk dimanfaatkan sebagai bahan pemalsuan identitas. Bagi laki-laki yang ingin melakukan poligami namun enggan mengurus pemenuhan syarat administrasi yang berupa izin tertulis dari istri sebelumnya bisa melakukan pemalsuan identitas dengan mengaku masih sebagai jejak.

2. Transformasi Pelayanan Administrasi Pernikahan-Kependudukan oleh KUA Gondomanan

Transformasi pelayanan dimaksudkan sebagai upaya pembaharuan pelayanan administrasi pernikahan dari model lama menuju model baru (Kurniawan, 2005). Sebagai contoh, apabila sebelumnya antara KUA dan Didukcapil tidak bisa tukar data secara *on line*, melalui transformasi pelayanan, *cross check* akurasi data secara *on line* bisa dilaksanakan. Program ini terlaksana akibat MoU antara Kantor Kemenag Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta. Melalui program ini diperoleh kemudahan pengurusan administrasi kependudukan bersamaan dengan administrasi pernikahan berikut ini (<http://www.gondomanan.kuadiy.org>):

- Data calon pengantin dapat dilakukan verifikasi dan validasi dengan data yang terdapat pada data base Didukcapil secara *on line* sehingga meminimalisir pemalsuan status.

- Pengantin langsung mendapatkan KTP dan kartu Keluarga (KK) baru dengan status yang telah berubah segera setelah selesai ijab dan qabul.

3. Penyusunan Sistem Transformasi Pelayanan

Transformasi pelayanan administrasi pernikahan-kependudukan merupakan bagian dari pelayanan publik. Di Indonesia, konsep pelayanan administrasi seringkali digunakan secara bersama-sama atau dipakai sebagai sinonim dari konsep pelayanan perijinan dan pelayanan umum, serta pelayanan publik. Keempat istilah tersebut dipakai sebagai terjemahan dari *public service*. Hal ini dapat dilihat dalam dokumen-dokumen pemerintah sebagaimana dipakai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Ratminto, 2005: 4). Adapun pelayanan umum lebih sesuai jika dipakai untuk menerjemahkan konsep *public service*. Istilah pelayanan umum ini dapat disejajarkan atau dipadankan dengan istilah pelayanan publik.

Salah satu upaya untuk mengefektifkan peningkatan kualitas sistem pelayanan publik adalah melalui penyusunan standar pelayanan publik. Standar tersebut wajib dimiliki oleh setiap unit pelayanan untuk digunakan sebagai pedoman, baik bagi pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan (Wasistiono, 2003: 48). Adapun ruang lingkup pedoman penyusunan standar pelayanan publik ini meliputi prinsip penyusunan standar pelayanan, komponen standar pelayanan, langkah-langkah penyusunan standar pelayanan, pemantauan dan pengendalian kualitas pelayanan.

Prinsip penyusunan sistem pelayanan meliputi adanya konsensus, berisikan aturan yang sederhana, bersifat konkrit,

mudah diukur, terbuka atas saran-masukan, terjangkau, dapat dipertanggungjawabkan, mempunyai batas waktu pencapaian, dan berkesinambungan. Komponen standar pelayanan publik meliputi jenis pelayanan, dasar hukum pelayanan, persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, mekanisme penanganan pengaduan, kompetensi petugas pemberi pelayanan, dan mekanisme pengawasan. Langkah-langkah penyusunan standar pelayanan publik meliputi inventarisasi tugas dan fungsi, inventarisasi pengguna layanan, survey harapan masyarakat, analisis prosedur pelayanan, analisis persyaratan pelayanan, analisis waktu penyelesaian pelayanan, analisis biaya pelayanan, analisis sarana dan prasarana pelayanan, analisis personalia, analisis pengawasan, dan analisis penanganan pengaduan. Indikator terakhir adalah pemantauan dan pengendalian kualitas pelayanan. (Lis Febrianda, 2009: 228-234)

Berdasarkan beberapa indikator ruang lingkup penyusunan pelayanan publik di atas, penelitian ini akan menanyakan prinsip-prinsip apa saja yang dipakai KUA Gondomanan dalam merumuskan sistem pelaksanaan transformasi pelayanan administrasi pernikahan-kependudukan, komponen-komponen apa saja yang dipakai dalam merumuskan sistem, langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh untuk merumuskan sistem, serta bagaimana pemantauan dan pengendalian yang harus dirumuskan untuk menjaga kualitas pelayanan.

4. Inovasi Kinerja KUA-Didukcapil

Inovasi di bidang pelayanan publik merupakan ide kreatif teknologi pelayanan, atau upaya memperbarui

teknologi yang sudah ada, atau sekedar menciptakan terobosan atau penyederhanaan prosedur pelayanan yang manfaat *outputnya* mempunyai nilai tambah baik dari segi kualitas maupun kuantitas pelayanan (Deputi Pelayanan Publik, Kemenpan RB, 2013: 5). Di beberapa literatur terdapat variasi pemikiran mengenai inovasi. Dwiyanto dkk. (2003 : 30-59) menyatakan suatu pelayanan dikatakan mengandung inovasi apabila memenuhi beberapa indikator, yakni: keadilan (*fairness* akses), efisiensi biaya dan waktu, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat dan akuntabilitas aktivitas birokrasi. Selain itu, Caiden sebagaimana dikutip Warsito (2006: 54), menguraikan unsur inovasi adalah berikut ini: *reliability* (ketepatan pemberian jenis pelayanan), *responsiveness* (kecepatan respon pada konsumen), *assurance* (keramahan kepada konsumen), *empaty* (toleransi kepada konsumen), dan *tangibles* (kelengkapan pegawai dan fasilitas fisik).

Dalam praktek kebirokrasian di Indonesia, panduan penilaian inovasi pulik telah dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB (Deputi Pelayanan Publik, Kemenpan RB, 2013: 5). Inovasi pelayanan publik dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu inovasi karena adanya: 1) pencegahan penyalahgunaan kewenangan; (2) peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur; dan (3) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kategori pertama mempunyai dua indikator yakni integritas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, dalam penelitian nantinya akan mempertanyakan bagaimana integritas dan transparansi pegawai dalam memberikan pelayanan administrasi pernikahan-kependudukan. Integritas meliputi kejujuran dan taat terhadap peraturan yang ada. Transparansi pengelolaan

keuangan publik seperti tidak meminta *tips* terhadap pelayanan dan pungutan liar.

Kategori kedua mempunyai tiga indikator, yakni kapasitas aparatur, kinerja aparatur, dan akuntabilitas aparatur. Kapasitas aparatur meliputi pelatihan pengembangan keahlian aparatur dalam menyederhakan prosedur, melakukan pengukuran kinerja unit dan individu, serta akuntabilitas meliputi keterbukaan informasi publik atas target dan capaian kinerja dalam melayani pelayanan.

Peningkatan kualitas pelayanan, yang meliputi: konsistensi melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan, menjamin pelayanannya sekarang lebih hemat (*efisiensi*), selalu tanggap dengan segala konsultasi maupun pengaduan atas pelayanan (*responsivitas*), pelibatan publik dalam pengawasan pelayanan melalui mekanisme inovatif seperti *e-participation* (partisipasi), pelibatan peran organisasi masyarakat madani dan sektor swasta dalam desain perencanaan dan implementasi (*partnership*), realisasi akses pelayanan khusus terhadap kelompok rentan (aksesibilitas). Berdasarkan indikator di atas, penelitian ini akan mempertanyakan apakah pelayanan benar-benar telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip inovasi pelayanan publik di atas.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan memahami fenomena adanya penyelenggaraan transformasi pelayanan administrasi pernikahan-kependudukan di KUA Gondomanan melalui kerjasama dengan Didukcapil Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metode ini

dimaksudkan untuk menghasilkan data naratif dan gambar yang –meminjam istilahnya SJ Taylor and R Bogdan (1984, 16) – akan mengungkap sikap perilaku subjek penelitian, yang dalam hal ini adalah pegawai KUA Gondomanan dan Didukcapil Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara program dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Pilihan atas pendekatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dalam mengungkap hubungan ketersediaan standar pelayanan dengan kesuksesan inovasi penyelenggaraan pelayanan secara intensif dan mendalam (Narbuko Cholid; 2003,164) serta dengan karakteristik holistik dan bermakna (Robert K. Yin, 2011, 54).

Subjek

Pihak yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah KUA Gondomanan, KUA se-Kota Yogyakarta, Didukcapil Kota Yogyakarta, Kantor Kemenag Kota Yogyakarta dan masyarakat yang memperoleh manfaat. Isu yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah transformasi pelayanan administrasi pernikahan-kependudukan.

Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari data yang langsung diambil melalui kegiatan lapangan penelitian seperti observasi atas keadaan lapangan penyelenggaraan transformasi pelayanan administrasi pernikahan-kependudukan dan wawancara mendalam (*In depth interview*) dengan pihak yang berkompeten. Sedangkan data

sekunder diperoleh dengan mendokumentasikan informasi naratif dan gambar seperti laporan maupun berita tentang pelaksanaan program, perangkat hukum yang menjadi dasar pelaksanaan program dan literatur lain tentang pelayanan publik pada umumnya dan tentang transformasi pelayanan administrasi pernikahan-kependudukan secara khususnya. Literatur seperti ini diperoleh dari Jurnal, buku maupun sumber kepustakaan lain.

Teknik Pengambilan Data

Pengambilan data dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam. Pelaksanaan dokumentasi memanfaatkan jasa pihak-pihak yang mempunyai informasi naratif dan gambar terkait transformasi pelayanan, baik data yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah maupun media massa. Data pemerintah seperti dari laporan pelaksanaan. Sedangkan sumber media massa seperti berita di koran atau tulisan artikel dari internet. Selain itu, penulis juga mendokumentasikan literatur mengenai pelayanan dalam pelayanan publik.

Peneliti juga melakukan observasi di kantor KUA dan Didukcapil untuk menghasilkan data naratif maupun gambar yang bisa mendeskripsikan proses bekerjanya transformasi pelayanan administrasi pernikahan-kependudukan. Pelaksanaan observasi tidak hanya pengamatan sederhana, tetapi pengamatan, pemotretan dan pencatatan dengan sistematis (Sutrisno Hadi, 1984, 136). Sebelumnya peneliti juga telah melakukan observasi. Observasi yang telah dilakukan adalah pada awal penelitian dalam penyusunan proposal penelitian dan kajian awal. Hasil observasi pertama

dipakai sebagai pintu gerbang untuk melihat permasalahan di lapangan. Observasi berikutnya akan dilakukan pada saat pengumpulan data.

Metode wawancara mendalam digunakan sebagai sarana mengambil informasi dari: *Pegawai Kantor Kemenag Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, KUA Gondomanan, KUA se-Kota Yogyakarta pegawai Didukcapil Kota Yogyakarta, masyarakat yang memperoleh manfaat, dan akademisi-tokoh agama yang mempunyai kompetensi di bidang penelitian ini.* Pemilihan informan dalam penelitian ini dilaksanakan secara *purposive* di mana penentuan informan akan dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2013: 216).

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif yang akan dilaksanakan peneliti meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (MB. Miles dan AM Huberman, 1992, 54). Dalam reduksi data, peneliti menyederhanakan dan mentransformasi data kasar yang diberikan informan terkait penyelenggaraan transformasi pelayanan administrasi pernikahan-kependudukan. Dalam hal ini, peneliti melakukan identifikasi semua hasil dari observasi dan wawancara bersama informan. Hal ini dilakukan guna menyeleksi data-data yang terkadang tidak diperlukan.

Dalam menyajikan data, peneliti akan menyusun sekumpulan informasi, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dari penyelenggaraan transformasi pelayanan di sini adalah teks naratif, gambar,

matriks, grafik, tabel dan bagan. Dalam tahap penyajian, hal yang dilakukan adalah membuat deskripsi data kualitatif dalam laporan. Peneliti juga menggunakan triangulasi untuk mengklafikisasi data (NK. Denzin, 1978, 43.) Data yang sudah dikumpulkan akan diolah menggunakan prinsip triangulasi, dimana data yang diperoleh dari informan akan di *crosscheck* kepada informan lain untuk memperoleh data yang telah terklarifikasi.

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti setelah penyajian data. Selain itu, kesimpulan tidak semata-mata menyuguhkan ringkasan dan teoritisasi pengetahuan, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan strategi-strategi baru sebagai bahan rekomendasi bagi para pihak yang menjadi *stake holder* atas subjek dan objek penelitian.

Lokasi

KUA Gondomanan

Secara umum pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) bagi umat Islam di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1946 dan UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sebagai pelaksana undang-undang tersebut, KUA Kecamatan Godomanan berdiri secara definitif pada tahun 1947. Pada waktu itu belum bernama KUA Kecamatan Godomanan, akan tetapi bernama *KUA Kemantren Polisi Pamong Praja Gondomanan (Kem. PP) Kota Pradja Jogjakarta*. Baru setelah tahun 1974, sesuai dengan Undang-undang Pemerintah

Daerah, sebutanya berubah menjadi KUA Kecamatan Godomanan hingga saat ini.⁸

Sejak berdiri tahun 1947 hingga tahun 2011, KUA Kecamatan Godomanan belum memiliki tanah dan kantor sendiri. KUA menggunakan tanah dan bangunan milik Kraton Yogyakarta Hadiningrat. Baru sekitar Tahun 2012, KUA Kecamatan Gondomanan menempati gedung baru. Saat ini KUA Kecamatan Gondomanan berada di Jl. Ireda Prawirodirjan GM II/1218 YK, tepatnya di RT 41 RW XIII Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta. Status tanah dan bangunan KUA Gondomanan adalah milik Kementerian Agama RI. Peresmian gedung baru KUA tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 9 Rabiul Awal 1433 H/ 3 Januari 2012 atau bertepatan dengan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke 66. Peresmian dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DIY Drs. H. Maskul Haji, M.Pd.I dengan menandatangani *Prasasti Penyelesaian Pembangunan Gedung Baru KUA Kecamatan Gondomanan*⁹.

Pada tahun 2013, struktur organisasi dan personalia KUA Kecamatan Gondomanan terdiri atas 1 orang Kepala, 1 orang Penghulu, 3 orang Pengadministrasi dan 2 orang Penyuluh Agama Islam Fungsional, yang tersusun dalam struktur sebagai berikut:¹⁰

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1. Kepala KUA | : Abd. Su'ud. MSI. |
| 2. Penghulu | : Suardi, S.Ag. |

8 Profil KUA Gondomanan Tahun 2013 dan penjelasan Imam Bukhori tanggal 13 Oktober 2014.

9 Ibid.

10 Ibid.

3. Pengolah Data dan Produk Halal : Lipursari, SE
4. Pengad. Kel. Sakinah, Bimb, Haji & K. Umat : Entis Sutisna
5. Pengad. Jidzawa dan Pembinaan Syari'ah : Imam Bukhori
6. Penyuluh Fungsional : Janti Ristiani, S.Ag
7. Penyuluh Fungsional : Eman Suherman, S.Pd.I

Pada tahun 2014, jumlah struktur organisasi dan personalia KUA Kecamatan Gondomanan masih sama dengan pada tahun 2013, hanya saja terjadi perbedaan, yakni Kepala KUA adalah Handri Kusuma, S.Ag., MSI dan Penghulu adalah Imam Bukhori¹¹. Di samping itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, KUA Kecamatan Gondomanan dibantu oleh 2 orang Pembantu Penghulu atau P3N, yaitu :

1. Kelurahan Ngupasan : Drs. Suhardi
2. Kelurahan Prawirodirjan : Sugiman

Adapun Lembaga-lembaga Agama yang melekat dan memiliki sekretariat di KUA Gondomanan serta lembaga non struktural yang menjadi mitra kerja KUA Gondomanan antara lain¹²:

1. MUI : Drs. H. Ruchani
2. DMI : Surachman
3. IPHI : H. Edi Yanto
4. UPZ : H. M. Asyhadi

¹¹ Wawancara dengan Imam Bukhori (Penghulu KUA Gondomanan) tanggal 13 Oktober 2014.

¹² Profil KUA Gondomanan Tahun 2013 dan penjelasan Imam Bukhori (Penghulu KUA Gondomanan) tanggal 13 Oktober 2014.

- | | |
|---------|-------------------------|
| 5. LP2A | : Sugiman |
| 6. BP4 | : Ibu. Hj. Wiji Lestari |
| 7. LPTQ | : Drs. Jumari |
| 8. ANWI | : Drs. Muslim |

Di samping lembaga-lembaga Agama diatas, KUA Gondomanan juga menjalin komunikasi, bekerjasama dan bersinergi dalam kegiatan pembinaan masyarakat dalam rangka pembangunan bidang agama dengan Organisasi-organisasi Keagamaan, antara lain¹³:

1. Pimpinan Cabang Muhamadiyah
2. Majelis Wakil Cabang NU
3. Pimpinan Cabang Aisyiyah
4. Badko TPA
5. Tim Penggerak DBKS Ngupasan
6. Tim Penggerak DBKS Prawirodirjan
7. Satgas Gemar Mengaji

Visi, Misi dan Motto Pelayanan

Visi KUA Kecamatan Gondomanan adalah *Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Gondomanan yang Agamis dan Berbudaya*. Mengingat tugas pokok KUA sebagaimana di tetapkan dalam PMA Nomor 39/2012 adalah melaksanakan sebagian tugas dari Kantor Kemenag Kota, maka visi KUA Gondomanan tersebut telah selaras dengan visi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Pada dasarnya tidak mungkin dalam satu kesatuan, visi KUA berbeda dengan Kankemenag. Di samping itu, visi yang dimiliki oleh sebuah lembaga atau institusi merupakan suatu cita-cita tentang keadaan di masa datang yang diinginkan untuk terwujud oleh

¹³ Ibid.

seluruh organ lembaga atau institusi dimaksud, mulai dari jenjang yang paling atas sampai yang paling bawah. Pada sisi lain, visi KUA di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen rencana strategis KUA Kecamatan Gondomanan¹⁴.

Misi KUA Kecamatan Gondomanan sebagai berikut¹⁵:

1. Meningkatkan pelayanan nikah rujuk melalui aplikasi teknologi informasi (IT) yang handal dan optimal.
2. Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah.
3. Meningkatkan pelayanan bidang kemasjidan dan zakat, wakaf dan ibadah sosial.
4. Meningkatkan pelayanan bimbingan ibadah haji.
5. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga agama dalam pengetahuan, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama.
6. Menjadikan KUA sebagai rumah kedua bagi segenap karyawan dan masyarakat Kecamatan Gondomanan.

Berikut akan dipaparkan secara singkat tentang misi KUA Gondomanan dalam upaya mewujudkan visi KUA di atas.

1. Meningkatkan pelayanan nikah rujuk melalui aplikasi teknologi informasi yang handal dan optimal.
Pelayanan berbasis IT sekarang sudah menjadi standar dalam pelayanan kepada pelanggan/pengguna jasa baik pada perusahaan ataupun pada instansi pemerintah, termasuk di dalamnya KUA Kecamatan. Bagi KUA

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

Kecamatan Gondomanan, penggunaan IT dalam pelayanan nikah/rujuk sudah menjadi satu keniscayaan, karena pelayanan di bidang nikah/rujuk adalah pelayan pokok di KUA. Hal ini terjadi karena KUA Gondomanan berada pada pusat perkotaan, di mana penggunaan internet telah menjadi gaya hidup dan kebutuhan hampir semua komponen masyarakat, baik melalui *mobile phone*, *personal computer*, *laptop* dan lain-lain. Mengingat mobilitas masyarakat yang sangat tinggi dibandingkan dengan masyarakat di pedesaan, memang penggunaan internet merupakan suatu keniscayaan.

Dalam rangka merealisasikan sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang handal, KUA Gondomanan melalui IT akan mengoptimalkan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Nikah (Aplikasi SIMKAH) yang dapat beroperasi tidak hanya sebatas entri data calon pengantin dengan output, cetak NB, cetak NC, cetak buku nikah, cetak akta nikah, cetak duplikat buku nikah dan laporan bulanan. Aplikasi SIMKAH juga ditingkatkan kapasitasnya dengan beberapa inovasi untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, efisien, akurat dan murah. Adapun output dari misi ini adalah implementasi predikat nol kilometer pada pelayanan KUA. Sesuai dengan predikat Gondomanan yang memiliki titik nol (0) kilometer, pelayanan nikah/rujuk di KUA Gondomanan didesain menjadi:

- a) Nol (0) kilometer, karena tidak ada jarak yang harus tempuh.
- b) Nol (0) jam, karena tidak ada jarak maka tidak waktu yang terbuang.

- c) Nol (0) rupiah, karena tidak ada jarak dan waktu yang terbuang maka tidak ada biaya yang harus keluar¹⁶.

2. Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah.

Salah satu barometer keberhasilan KUA dalam pembangunan di bidang agama adalah keberhasilannya dalam pengembangan gerakan keluarga sakinah. Misi ini sangat fundamental dan penting untuk direalisasikan mengingat:

- a) Gerakan Keluarga Sakinah telah menjadi gerakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam PMA Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah sehingga semua unsur Kemenag dari pusat sampai daerah memiliki kewajiban untuk mengawalinya.
- b) Misi ini berkaitan erat dengan strategi pencapaian visi KUA Gondomanan yaitu Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Gondomanan yang Agamis.
- c) Dalam suasana kebatinan seperti itulah misi ini mendapatkan tempat berpijak. Pengembangan keluarga sakinah tidak mungkin dapat dilakukan secara mandiri oleh KUA. KUA harus membuat rencana, koordinasi, sinergi dan bekerja sama dengan komponen yang ada dalam masyarakat, seperti instansi terkait (baik pemerintah maupun swasta), organisasi sosial agama, lembaga dakwah, lembaga pendidikan, pondok pesantren, majelis taklim dan takmir masjid.

¹⁶ Wawancara dengan Imam Bukhori (Penghulu KUA Gondomanan) tanggal 13 Oktober 2014.

3. Meningkatkan pelayanan bidang kemasjidan dan zakat, wakaf dan ibadah sosial. Masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya adalah potensi luar biasa apabila dapat dioptimalkan dan diberdayakan secara maksimal untuk menopang kegiatan pembangunan masyarakat, baik pembangunan fisik maupun mental spiritual menuju tatanan kehidupan yang makmur di bawah ridho Allah. Anggaran negara tidak akan mampu membiayai semua kebutuhan pembangunan. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk melengkapi kekurangan tersebut. Pada titik temu inilah KUA Gondomanan sebagai motivator sekaligus fasilitator pembangunan, khususnya bidang agama, akan menempatkan peran dan fungsinya mengoptimalkan fungsi masjid dan peningkatan kesadaran serta pendayagunaan zakat, wakaf sekaligus ibadah sosial¹⁷.
4. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga agama dalam pengetahuan, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama. Beberapa lembaga agama di wilayah Kecamatan Gondomanan seperti BAZ, IPHI, LP2A, DMI, MUI, BP4, LPTQ, ANWI, semuanya adalah patner KUA dalam pembangunan dan pelayanan kepada msyarakat. Mereka mempunyai andil yang signifikan dalam mengantarkan terwujudnya masyarakat yang agamis, sejahtera dan partisipatif. KUA dalam hal ini berupaya memfasilitasi dengan menggerakkan roda organisasi dan kepengurusannya agar peran serta fungsi lembaga-lembaga dakwah tersebut dapat semakin baik sehingga kiprahnya di masyarakat bisa semakin dirasakan¹⁸.

17 Penjelasan dari Imam Bukhori (Penghulu KUA Gondomanan) tanggal 13 Oktober 2014.

18 Ibid.

5. Menjadikan KUA sebagai rumah kedua bagi segenap karyawan dan masyarakat Kecamatan Gondomanan. Ini adalah misi spesial dari KUA Gondomanan. Misi ini sebagai simbol kebersamaan dan persatuan antara KUA dengan semua elemen masyarakat. Dalam bahasa lain bisa diistilahkan dengan "*manunggaling kawulo-gusti*". Misi ini juga dapat dimaknai sebagai strategi KUA Gondomanan untuk dapat berhasil dalam setiap kegiatannya. Dengan misi ini KUA di harapkan menjadi rumah besar bagi semua warga masyarakat Gondomanan. Kapanpun dia bisa datang dan duduk bersama di KUA bahkan dapat menggunakan KUA untuk kemakmuran, kesejahteraan wilayah Gondomanan¹⁹.

Dengan berpegang pada motto "Ikhlās Beramal" yang merupakan motto Kementerian Agama dengan serta pada *tessa* tersebut diatas, KUA Kecamatan Gondomanan menetapkan motto pelayanannya adalah :

"Satu H  ti untuk Melayani"

Motto tersebut menggambarkan komitmen dan totalitas semua pegawai KUA Kecamatan Gondomanan dalam bekerja dan berkarya. Jenis pekerjaan dan beban tugas boleh berbeda, namun hatinya tetap satu warna yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui sapa, *service* dan senyum²⁰.

Sapa : Setiap tamu yang datang ke kantor pertama-tama mesti di sapa dengan ramah dan sopan

¹⁹Ibid.

²⁰ Ibid.

- Service* : Setiap tamu yang datang harus terlayani dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan
- Senyum* : Adalah tanda kepuasan klien atas layanan KUA sekaligus sebagai tanda persahabatan dan kedekatan KUA dengan masyarakat

Transformasi Pelayanan

Yang dimaksud dengan transformasi pelayanan di sini adalah upaya pembaharuan pelayanan administrasi pernikahan dari model lama menuju model baru (Kurniawan; 2005, 45). Pembaharuan pelayanan di KUA Gondomanan tersebut terletak pada adanya sistem integrasi data administrasi pernikahan-kependudukan sebagai akibat adanya transformasi pelayanan. Sebelumnya, pelayanan di KUA Gondomanan tidak menyelenggarakan integrasi data. Yang dimaksud dengan integrasi data adalah suatu proses menggabungkan menyatukan data yang berasal dari sumber yang berbeda dan mendukung pengguna untuk melihat kesatuan data (Lenzerini; 2002, 66).

Transformasi pelayanan tersebut ditandai dengan disahkannya Kesepakatan Bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2013 dan Nomor 06/NKB.YK/2013 tentang Kerjasama Integrasi Data Kependudukan di Wilayah Kota Yogyakarta. Menurut Abd Su'ud, mantan kepala KUA Gondomanan 2013 yang sekarang telah promosi di Kanwil Kemenag DIY, kesepakatan bersama

tersebut adalah murni ide yang telah dipikirkannya sejak dia menjadi kepala KUA Pakualaman pada tahun 2011.²¹



**Gambar 1 Suasana Wawancara dengan Abd Su'ud
Dokumentasi Penulis, 2014**

Untuk lebih jelasnya, berikut ini diperjelas mengenai sistem pelaksanaan transformasi pelayanan.

Sistem Penyelenggaraan Transformasi Pelayanan

Sistem penyelenggaraannya adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan Personalia

KUA Godomanan menetapkan unit kepenghuluan untuk bertanggungjawab melaksanakan program rangkaian transformasi pelayanan. Analisis personalia terkait transformasi pelayanan telah dilakukan dengan mengidentifikasi jumlah beban kerja, jenis kegiatan, tingkat kesulitan, ketersediaan sarana dan prasarana agar diperoleh pemberi pelayanan yang mampu melaksanakan tugas pelayanan dengan baik dan benar. Berdasarkan

21 Wawancara dengan Abd Su'ud di rumah pada Tanggal 4 Nopember 2014.

pengamatan terhadap dokumen kerja dan pelayanan di lapangan, peneliti menemukan bahwa analisis personalia di KUA Gondomanan telah diperhatikan antara lain:

- 1) Jumlah beban kerja dikaitkan dengan formasi personil yang ada. Perbandingan antara jumlah personil yang terdapat di KUA Gondomanan disesuaikan dengan beban kerjanya;
- 2) Jenis kegiatan dikaitkan dengan kualifikasi pendidikan pegawai. Kualifikasi pendidikan sarjana hukum Islam tepat untuk mengurus masalah ini;
- 3) Tingkat kesulitan proses pelayanan dikaitkan dengan keahlian dan keterampilan;
- 4) Ketersediaan sarana dan prasarana dikaitkan dengan sifat dan jenis pelayanan.
- 5) Penghulu di KUA Gondomanan menguasai teknologi informasi.

Penyiapan personalia sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi seperti di KUA Gondomanan. Dikatakan oleh Susanto (1997: 13), aset organisasi yang paling penting dan harus diperhatikan adalah manusia (sumber daya manusia atau *human resources*). Hal ini bermuara pada kenyataan bahwa manusia merupakan elemen yang selalu ada dalam setiap organisasi. Manusia membuat tujuan-tujuan, inovasi, dan mencapai tujuan organisasi.

Logika pentingnya manusia dalam organisasi perusahaan juga berlaku dalam organisasi KUA. Manusia merupakan satu-satunya sumber daya penting yang dapat membuat sumber daya lain yang dimiliki KUA bekerja dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat

yang dilayani. KUA hanyalah merupakan satu wadah organisasi untuk mencapai tujuan dan manusia/pegawai yang akan membawa organisasi tersebut mencapai tujuannya.

Adapun menurut Notoatmojo, sebagaimana dikutip Kurniawan (2005: 91-92), melihat sumber daya manusia dari dua aspek:

- a) Mutu dan kualitas yang diukur melalui kemampuan fisik seperti kesehatan jasmani, kekuatan untuk bekerja dan kemampuan non fisik misalnya kecerdasan dan mental.;
- b) Jumlah atau kuantitas yaitu banyaknya sumber daya sebagai tenaga kerja dalam suatu organisasi.

Berdasarkan logika yang dibangun Notoatmojo akan pentingnya manusia dalam organisasi, logika tersebut juga berlaku untuk melihat pentingnya penghulu dalam KUA. Fasilitas yang canggih dan lengkap dalam KUA belum merupakan jaminan akan keberhasilan KUA, tanpa diimbangi kualitas dari penghulu yang akan memanfaatkan fasilitas itu. Sumber daya manusia sebagai harta paling penting yang dimiliki suatu organisasi, penghulu juga merupakan harta yang paling penting bagi KUA.

2. Penetapan Lingkup Transformasi Pelayanan dan Payung Hukum

Lingkup transformasi pelayanan dibahas bersama dengan pihak-pihak terkait yang mempunyai kepentingan dalam pelaksanaannya. Lingkup transformasi pelayanan tersebut dituangkan dalam sebuah produk hukum bernama Kesepakatan Bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta Nomor 23

Tahun 2013 dan Nomor 06/NKB.YK/2013 tentang Kerjasama Integrasi Data Kependudukan di Wilayah Kota Yogyakarta. Pengesahan kesepakatan bersama tersebut melibatkan Kantor Kemenag Kota Yogyakarta, Didukcapil Kota Yogyakarta, Walikota Yogyakarta dan KUA Gondomanan sebagai inisiator.

Berikut adalah suasana pembahasannya.



Gambar 2 Suasana Pembahasan Kesepakatan Bersama Dokumentasi KUA Gondomanan, 2013

Untuk lebih jelasnya mengenai lingkup transformasi pelayanan adalah sebagai berikut:

a) Pendaftaran Nikah *On Line*

Untuk memperbarui sistem pelayanan administrasi pernikahan, pertama-tama yang diperbarui adalah pendaftaran nikah. Sebelumnya pendaftaran nikah dilakukan secara manual, yakni pihak yang

berkepentingan mendatangi KUA. Dengan sistem yang baru, KUA menyediakan pendaftaran nikah *on line*²². Adapapun proses dan prosedur pendaftaran nikah *on line* adalah sebagai berikut:

- 1) Catin²³ dapat membuka Website KUA Gondomanan kemudian membuka konten pendaftaran nikah dan mengisi aplikasi pendaftaran tersebut secara lengkap.



**Gambar 3 Tampilan Pendaftaran Nikah *on line*
Dokumentasi KUA Gondomanan, 2013.**

Pada akhir pengisian aplikasi, pendaftar akan mendapatkan nomor PIN yang harus dicatat dan disimpan.

²² Meskipun begitu, KUA Gondomanan juga tetap melayani pendaftaran nikah secara manual.

²³ Istilah untuk pasangan yang terdiri dari dua orang (Laki-Laki dan Wanita) beragama Islam yang berkehendak untuk menikah dengan mendaftarkan rencana pernikahannya di KUA. Selanjutnya selalu disingkat Catin.

- 2) Bagi Catin yang belum melengkapi persyaratan admintratif pernikahan dari Kelurahan, setelah melakukan pendaftaran secara *on line*, hendaknya segera mengurus persyaratan tersebut.
- 3) Catin dan kedua calon wali pada saat yang lain harus datang ke KUA Gondomanan untuk dilakukan verifikasi data dan pemeriksaan dengan menyerahkan nomor PIN dan persyaratan admintratif pernikahan. Dengan telah dilakukan verifikasi data oleh KUA maka Catin telah resmi mendaftarkan pernikahannya.
- 4) Catin yang mendaftar berikutnya harus mengambil waktu yang berbeda dari jadwal Catin pendaftar sebelumnya.
- 5) Sambil menunggu hari pelaksanaan akad nikah, Catin dapat menyelesaikan proses selanjutnya, misalnya mengikuti pendidikan pranikah imunisasi TT dan lain-lain.

Dengan pendaftaran nikah secara *on line*, banyak keuntungan yang akan di dapat melalui aplikasi layanan ini :

- 1) Pendaftaran nikah *on line* belum diperlukan syarat administrasi apapun, sehingga akan lebih ringan dan simpel;
- 2) Pendaftaran dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun Catin berada, sehingga akan lebih cepat, efektif dan efisien;
- 3) Pendaftaran *on line* langsung terkoneksi dengan Aplikasi SIMKAH KUA Gondomanan sehingga langsung tercatat dalam jadwal sementara pelaksanaan pernikahan pada tanggal, bulan

dan tahun sesuai yang diinginkan oleh Catin yang bersangkutan.

b) Validasi Data Calon Pengantin dan Wali

Tahapan selanjutnya dari transformasi pelayanan tersebut adalah tahap validasi data. Tahapan ini sebelumnya dilakukan secara manual, yakni KUA hanya menerima keterangan kependudukan Catin dari desa/kelurahan.

Dengan sistem baru di KUA Gondomanan ini, validasi dilakukan secara *on line* dengan data base kependudukan yang disediakan Didukcapil Kota Yogyakarta.

Lingkup validasi biodata Catin dan wali adalah menyangkut ejaan nama, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua, status pernikahan, pekerjaan dan alamat. Validasi ini penting dilakukan mengingat sering sekali ada pihak yang tidak bertanggungjawab mencoba memalsukan identitas atau juga menghindari terjadinya perbedaan biodata Catin antara satu surat dengan surat yang lainnya. Program ini akan menghasilkan data yang valid dan sinkron untuk penulisan Akta Nikah, Kutipan Akta Nikah dan dokumen nikah lainnya.

Tahapan proses validasi data antara lain sebagai berikut :²⁴

- 1) KUA meminta validasi data kepada Didukcapil melalui server Didukcapil/*website* bersama dan

24 Pasal 8 Kesepakatan Bersama.

atau lewat *e-mail* dalam program Sistem Informasi Manajemen Nikah (Aplikasi SIMKAH) yang berada dalam website KUA Gondomanan.

- 2) Didukcapil melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan sebagaimana yang diminta KUA.
- 3) Verifikasi data dari Dindukcapil dikirimkan kepada KUA Gondomanan melalui *website* bersama dan atau lewat *e-mail* KUA.

Dalam praktiknya, petugas KUA melakukan validasi dengan membuka IP yang telah disediakan khusus oleh Didukcapil. Validasi *on line* tersebut bisa dilakukan langsung di Kantor setiap KUA baik dengan menggunakan komputer KUA maupun *lap top* pribadi dengan syarat mengetahui IP-nya.



Gambar 4 Validasi Data *On Line*.

Dokumentasi Peneliti, 2014

Tata cara melakukan validasi data *on line* adalah Petugas memasukan NIK calon pengantin dan

walinya untuk memperoleh data yang bersangkutan. Secara umum, hal ini menjadi solusi yang bisa membawa perbaikan, baik dalam efisiensi birokrasi, kemudahan layanan, perbaikan sistem administrasi yang berdampak pada peningkatan kemampuan untuk mensejahterakan masyarakat²⁵.

c) Akselerasi Perubahan Status Perkawinan.

Sebagaimana dinyatakan di bab pendahuluan bahwa pada beberapa kasus pada Warga Negara yang statusnya telah berubah (sebagai contoh dari jejak menjadi status kawin) tidak segera melaporkan perubahan status tersebut ke Didukcapil Kota/Kabupaten setempat.

Hal ini mengakibatkan status pernikahan yang tercantum dalam *database* kependudukan tidak sesuai dengan status pernikahan sebenarnya dari orang yang bersangkutan. Hal ini tentu banyak mengandung kerawanan penyalahgunaan biodata. Oleh sebab itu, KUA Gondomanan membuat kesepakatan dengan Didukcapil mengenai akselerasi perubahan status.

Perubahan status pernikahan yang termasuk dalam lingkup kerjasama integrasi data antara KUA dengan Didukcapil meliputi perubahan status dari jejak/perawan menjadi kawin, dari kawin menjadi duda/janda, dan dari duda/janda menjadi kawin. Kerjasama Integrasi data ini meliputi kegiatan²⁶ :

25 Penjelasan dari Imam Bukhori (Penghulu KUA Gondomanan) tanggal 13 Oktober 2014 dan Ita Rustanti (Sekretaris Didukcapil Kota Yogyakarta) pada 15 Oktober 2014.

26 Pasal 9 Kesepakatan Bersama.

- 1) Berdasarkan laporan bulanan tentang peristiwa pernikahan dan perceraian dari KUA Gondomanan, Didukcapil kemudian memberikan catatan atau *warning* pada data base kependudukan atas nama penduduk terlapor.
- 2) *Warning* sebagaimana dimaksud dapat berupa pemblokiran untuk pelayanan perpanjangan KTP atau kepentingan yang lainnya, sehingga dilakukan perubahan status oleh yang bersangkutan.
- 3) Dalam masa *warning* tersebut, pihak Didukcapil dapat melakukan perubahan data kependudukan secara *off line*, dan akan aktif sesaat segera setelah berkas perubahan status diterima dan diolah oleh Didukcapil.

Pelayanan akselerasi perubahan status dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat proses perubahan status kependudukan dalam rangka tertib admintrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dikehendaki oleh UU Administrasi Kependudukan.

Dalam pelaksanaanya, pelayanan akselerasi perubahan status dimulai ketika Catin meminta surat pengantar kehendak nikah di Kantor Kelurahan sekaligus mengisi blangko perubahan status pada Kartu Keluarga dan KTP.

Berkas perubahan status tersebut di dibawa ke KUA bersamaan dengan penyerahan berkas nikah pada waktu mendaftarkan pernikahan dan/atau pada

waktu penyerahan berkas bila pendaftaran nikah melalui pendaftaran *on line*.

KUA Gondomanan menyimpan blangko perubahan status pada Kartu Keluarga dan KTP tersebut dalam satu bendel dengan syarat administrasi lainnya.

Setelah selesai rangkaian prosesi akad nikah, KUA Gondomanan memberikan catatan pada blangko perubahan status berupa hari dan tanggal pernikahan, nomor akta pernikahan dan stempel KUA.

Blangko perubahan status yang telah diberi catatan oleh KUA digunakan untuk proses perubahan status di Kecamatan.²⁷

Sembari melakukan perubahan status di Kecamatan tersebut, KUA Gondomanan hanya memberikan buku Kutipan Akta Nikah yang berwarna hijau kepada mempelai Pria, sedangkan buku Kutipan Akta Nikah yang berwarna merah (pasanganya) belum diserahkan kepada mempelai wanita (istri) ditahan sebagai jaminan bahwa kedua mempelai akan komitmen melakukan perubahan status sesegara mungkin setelah akad nikah.

Setelah kedua pengantin menunjukkan perubahan status baru pada KTP mereka yang baru dan KK baru dengan status keluarga mereka yang baru, baru kemudian KUA Gondomanan memberikan buku Kutipan Akta Nikah berwarna hijau yang sebelumnya

27 Wawancara dengan Imam Bukhori (Penghulu KUA Gondomanan) tanggal 13 Oktober 2014 dan diperkuat oleh Abd Su'ud dari interview pada Tanggal 6 Nopember 2014.

ditahan.²⁸ Berikut ini adalah proses pemberian buku nikah pasca pernikahan.



**Gambar 5 Pemberian Salah Satu Buku Nikah
Dokumenatasi Peneliti,2014**

Sementara itu, standar operasional prosedur pelaksanaan akselerasi perubahan juga tertuang dalam bentuk kesepakatan antara KUA Gondomanan dan Kecamatan Gondomanan. Berikut adalah gambar standar pelayanan akselerasi perubahan.

²⁸ Ibid.

**SOP AKSELERASI PERUBAHAN STATUS PERKAWINAN
KERJASAMA KECAMATAN GONDOMANAN DAN KUA GONDOMANAN**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Buku			
		Pratags Loket	Operator SIMDUK	KUA	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Menerima berkas permohonan untuk melaksanakan pernikahan, meneliti, mencatat dalam register.				• Buku register Nikah • Berkas Permohonan (FC KTP, KK dan Akta Kelahiran, Foto 3x4, N1, N2 dan N4)	10 menit	Register perkawinan	
2.	Memeriksa berkas, dikoreksi dan menerbitkan Biodata permohonan				• Berkas Permohonan	10 menit	Biodata Permohonan	
3.	Memberikan Nomor Register Akta Nikah, dengan menyalipkan FC Buku Nikah atau Surat Keterangan.				• Berkas Permohonan	1 hari	Jadwal Nikah	
4.	Menerima berkas permohonan untuk perubahan status perkawinan, meneliti, mencatat dalam register				• Berkas Permohonan (F1.03, F1.06, F3.07) • Buku register KTP • Buku register KK	10 menit	Register KTP dan KK	
5.	Memproses perubahan status, menerbitkan KTP dan KK baru.				• Berkas Permohonan	1 hari	KTP dan KK Baru	
6.	Menyerahkan KTP dan KK setelah perubahan status kepada pemohon				• Buku register KTP • Buku register KK	5 menit	Tanda terima pengambilan KK dan KTP	
7.	Menyerahkan buku nikah kepada pemohon				• Buku Nikah	10 menit	Tanda terima pengambilan Buku Nikah	



Gambar 6 SOP Akselerasi Perubahan di Kecamatan Gondomanan, Dokumentasi KUA Gondomanan, 2014

d) Pelaporan Peristiwa NTCR

Sebagaimana diatur dalam UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, KUA mempunyai kewajiban melaporkan peristiwa NTCR kepada Instansi Pelaksana yakni Didukcapil. Melalui kerjasama ini, pelaporan data dilakukan secara *on line/langsung*. Pelaporan Data NTCR dari KUA ke Didukcapil merupakan operasi standar yang rutin. Kesepakatan bersama tersebut hanya bertugas untuk mempertegas saja. Pada umumnya pelaporan NTCR dilakukan menggunakan *hardcopy*. Tetapi di sini, ada inovasi terbaru yakni menggunakan *soft copy*. Mekanismenya adalah sebagai berikut:

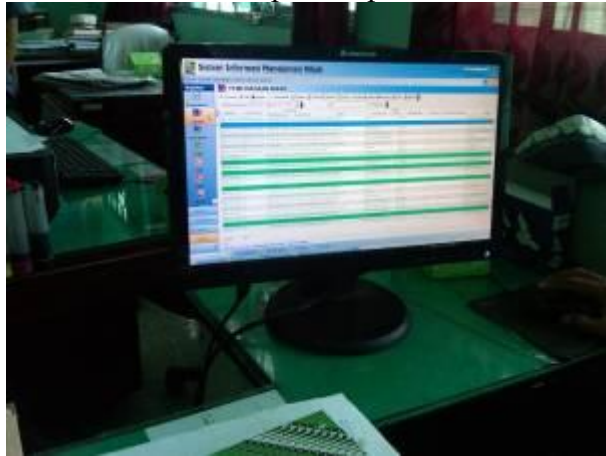
- 1) KUA Gondomanan mengirimkan laporan peristiwa NTCR ke *Server/Website* bersama atau melalui e-mail

yang berada dalam *Website* KUA melalui Aplikasi SIMKAH.

- 2) Kemudian Kantor Didukcapil Kota Yogyakarta dapat mengambil laporan peristiwa pernikahan dan perceraian tersebut melalui *Server/Website* atau melalui Website KUA.
- 3) Format Laporan peristiwa NTCR sebagaimana yang tertera dalam lampiran surat dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 477/4717 tanggal 30 November 2012 perihal Laporan Pencatatan NTCR.
- 4) Sementara itu, pengiriman laporan peristiwa NTCR dalam bentuk *hard copy* dari KUA kepada Didukcapil dilakukan setelah terpenuhinya ketentuan di atas dan proses ini hanya bersifat sebagai pelengkap²⁹ saja.

²⁹ Pasal 7 Kesepakatan Bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2013 dan Nomor 06/NKB.YK/2013.

Berikut adalah tampilan Aplikasi SIMKAH.



Gambar 7 Tampilan Aplikasi SIMKAH
Dokumentasi Peneliti, 2014

3. Penetapan Persyaratan, Waktu dan Biaya Pelayanan

Menyusun persyaratan pelayanan dilakukan analisis dengan cara mengidentifikasi seluruh persyaratan pelayanan yang ada dan mengkaji persyaratan baru yang diperlukan pada setiap aktivitas dan/atau tahapan aktivitas pelayanan yang berkaitan langsung dengan substansi produk pelayanan.

Penetapan waktu penyelesaian pelayanan yang baru ini dilakukan dengan mengidentifikasi pengalaman, harapan penerimaan pelayanan dan kemampuan internal. Proses identifikasi dapat dilakukan melalui survey dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi dan tingkat produktivitas. Penetapan biaya pelayanan dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan yang berlaku tentang penetapan tarif penyelenggaraan pernikahan. Penetapan biaya pelayanan perlu memperhatikan antara lain :

- a) Besaran biaya yang layak;
- b) Kemampuan ekonomi masyarakat setempat;
- c) Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Penetapan sarana dan prasarana pelayanan di KUA Gondomanan dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan penerima dan pemberi pelayanan sesuai aktivitas pelayanan, baik berupa sarana utama maupun sarana pendukung. Sarana atau fasilitas pendukung di KUA Gondomanan juga telah memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi suatu birokrasi pemerintahan sebagaimana dinyatakan Sa'id (2007: 109) yakni fasilitas pendukung operasional kerja, insentif kerja dan administrasi kerja.

- a) Fasilitas pendukung operasional kerja seperti gedung kantor, peralatan kantor, komputer, kendaraan dinas bagi pegawai KUA. Pada intinya fasilitas ini adalah fasilitas berupa barang atau mesin untuk mendukung operasional kerja sehari-hari dari pegawai KUA Gondomanan. Fasilitas seperti ini juga sudah tersedia bagi KUA Gondomanan.
- b) Fasilitas pendukung insentif kerja seperti gaji, tunjangan pensiun dan sebagainya. Bagi pegawai KUA, fasilitas pendukung ini sangat mendukung semangat dan loyalitas kerja dari pegawai KUA. Penerapan gaji di KUA Gondomanan juga sudah sesuai dengan ketentuan secara ideal gaji pegawai dan sistemnya yang memenuhi tiga unsur yaitu: adil, cukup dan merangsang serta berorientasi pada prestasi kerja. Oleh karena menjadi

pegawai negeri diharapkan merupakan suatu karier dalam hidup, maka perlu kiranya gaji yang wajar dihubungkan dengan beratnya beban tugas, tanggung jawab, kualifikasi, prestasi kerja, lamanya menjabat dan tingkat biaya hidup.

- c) KUA Gondomanan juga menyediakan fasilitas pendukung administrasi kerja seperti sistem akuntansi, sistem pengawasan, sistem pelaporan dan sebagainya. Pada intinya, fasilitas ini berupa sistem yang bisa menjadi alat ukur dan alat kontrol objektif yang bisa membantu pegawai KUA untuk menilai dan mengawasi kerja dan kinerja secara keseluruhan sebagai aparatur birokrasi.

Dalam hal sarana atau fasilitas pendukung, KUA Gondomanan telah menggunakan sistem komputerisasi. Oleh sebab itu, sistem komputerisasi sangat membantu meningkatkan efisiensi administrasi KUA Gondomanan. Dengan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, persepsi tentang birokrasi KUA pada umumnya dan pada khususnya KUA Gondomanan berkenaan dengan kinerja yang lambat, berbelit-belit, berproduktivitas rendah dapat berubah menjadi fleksibel, berproduktivitas tinggi, dan memiliki tingkat responsifitas yang dapat diandalkan. KUA Gondomanan telah berubah dari *street level bureaucrats* yang banyak bersentuhan langsung dengan rakyat menjadi *system level bureaucrats* yang bekerja dalam sistem komputer yang terintegrasi. Kontak antara petugas KUA tidak lagi terjadi pada jalan, ruangan atau loket pelayanan, melainkan pada kamera, modem, website atau *e-mail* (Sa'id, 2007: 109).

Transformasi Pelayanan sebagai Inovasi Pelayanan Publik

Transformasi pelayanan pernikahan-kependudukan di KUA Gondomanan tersebut merupakan salah satu inovasi pelayanan publik. Beberapa indikator yang telah dipenuhinya sebagai pelayanan publik sebagai berikut (Deputi Pelayanan Publik, Kemenpan RB, 2013: 5):

1. Mengedepankan Integritas dan Transparansi Pelayanan

KUA Gondomanan bisa mengawal konsistensi integritas dan transparansi pelayanan. KUA Gondomanan tidak menghadapi masalah keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang sering menyebabkan alasan mahalnya biaya pernikahan. KUA Gondomanan juga tidak menghadapi masalah jumlah pegawainya yang belum memadai, tidak terlayannya pengawasan nikah, dan jauhnya jarak antar kelurahan. Oleh sebab itu, KUA Gondomanan tidak menghadapi adanya kasus keterpaksaan honor/upah/gaji yang diterima P3N terpaksa diambil dari biaya pernikahan yang dibayar oleh Catin³⁰.

Dengan jarak demografis yang relatif pendek tidak terjadi masalah apabila ada masyarakat menghendaki pelayanan di luar dari waktu yang sudah ditentukan mereka sendiri. KUA Gondomanan siap memberikan pelayanan dalam hal pencatatan pernikahan sering kali pada hari Sabtu dan Minggu dengan jam yang sudah ditentukan keluarga Catin bahkan sering terjadi pelaksanaan pencatatan dilaksanakan pada malam hari di kediaman mempelai. Kondisi tersebut dimungkinkan

30 Wawancara dengan Abd Su'ud di rumah pada Tanggal 4 Nopember 2014.

terjadi karena memang terdapat ketentuan yang mengatur sebagaimana termaktub dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi : “atas permintaan calon pengantin dan persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA”³¹.

Walaupun memberikan pelayanan di luar jam kerja dan di luar kantor, KUA Gondomanan tetap berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 yang menentukan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan dipertegas dengan Edaran Irjen Kemenag RI Nomor : IJ/1261/2012 tanggal 13 Desember 2012 butir (3) yang berbunyi agar tidak menerima biaya pencatatan nikah lebih dari Rp. 30.000,- sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pasal 12 B ayat (1) yang membahas tentang gratifikasi semakin mempersempit ruang gerak KUA³².

Dalam kondisi seperti itu, Kepala KUA telah membuat pakta integritas yang ditandatangani dengan diketahui Kepala Kantor Kemenag Kota, Kepala Bidang Bimas Islam Kantor Kemenag Kota Yogyakarta dan Kepala Kanwil Kementerian Agama DIY.³³

31 Ibid.

32 Ibid.

33 Ibid..

PAKTA INTEGRITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

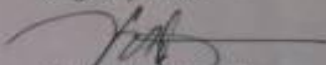
Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : **Abd. Su'ud, S.Ag.M.S.I.**
 NIP : **197105031996031001**
 Jabatan : **Kepala KUA Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta**

Bahwa untuk mendukung reformasi birokrasi Kementerian Agama Republik Indonesia, menyatakan dengan sesungguhnya, saya tidak akan memungut biaya pencatatan Nikah dan Rujuk di luar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku, apabila terbukti saya melakukan pungutan di luar ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 19 April 2013
 Yang menyatakan,

Abd. Su'ud, S.Ag.M.S.I.
 NIP. 197105031996031001

Saksi-saksi:

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Yogyakarta


Drs. H. Fathony, MA
 NIP. 19572271966031001

Kepala Bidang Urusan Agama Islam
Kanselir Kemenag Provinsi DIY


Drs. H. Zainal Abidin, MPd.I.
 NIP. 195906201986031004

Mengetahui,
 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta


Drs. H. Maskul Haji, MPd.I.
 NIP. 195903271988031001

**Gambar 8 Pakta Integritas Kepala KUA Gondomanan
 Dokumentasi KUA Gondomanan, 2013**

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama, KUA

Gondomanan semakin senang lagi dengan mekanisme pembayaran biaya nikah. Hal ini sudah diperjelas bahwa pernikahan yang dilakukan di Kantor KUA pada jam kerja adalah nol (0) rupiah alias gratis. Sedangkan pernikahan di luar Kantor KUA atau di luar jam kerja adalah 600.000.

Mengenai transparansi pelayanan, KUA Gondomanan selalu memasang secara jelas mekanisme pelayanan dan biayanya pada poster di gedung KUA Gondomanan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui sendiri. Saat dasar hukum biaya pernikahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004, bentuk transparansi biaya pernikahan adalah menempel poster besar berupa Pakta integritas sebagaimana gambar di atas dan memasang *Banner* berikut ini.



The banner is green with a white border. At the top center is the KUA logo. Below it, the title reads: "STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN KUA KECAMATAN GONDOMANAN KOTA YOGYAKARTA". Below the title is a table with 5 columns: NO, JENIS PELAYANAN, PETUGAS, WAKTU, and BIAYA. The table contains two rows of data. Below the table, there is a signature and the text: "Yogyakarta, 25 April 2011 Kepala ABD. SU'UD NIP. 19710503 199603 1 001".

NO	JENIS PELAYANAN	PETUGAS	WAKTU	BIAYA
1	PENDAFTARAN NIKAH/RUJUK	PPN / PENGHULU	20 Menit	RP. 30.000
2	DUPLIKAT AKTA NIKAH	PPN / PENGHULU	10 Menit	-

Yogyakarta, 25 April 2011
Kepala
ABD. SU'UD
NIP. 19710503 199603 1 001

**Gambar 9 Transparansi Biaya
Dokumentasi KUA Gondomanan, 2013**

Sementara itu, setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014, transparansi dinyatakan dalam bentuk poster berikut ini:



**Gambar 10 Transparansi Biaya
Dokumentasi KUA Gondomanan, 2014**

2. Profesionalitas Petugas

Kultur baru yang lahir di KUA Gondomanan adalah terpenuhinya kriteria profesional, bersih dan akuntabel. Ketiganya menjadi kata kunci perbaikan layanan di KUA Gondomanan. Profesional berasal dari Bahasa Inggris (*proffession*) berarti pencaharian. Profesional berarti bermata pencaharian dari suatu keahlian. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, profesional diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan profesi dan/atau memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya; sedangkan profesionalisme adalah mutu, kualitas dan tidak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional.

Profesional artinya menurut pada keahlian jabatannya. Menurut Robert G. Murdick dan Joel Ross (2005: 10) profesionalisme didasarkan pada kriteria: *knowledge* (pengetahuan), *competent application* (aplikasi

kecakapan), *social responsibility* (tanggung jawab sosial), *self control* (pengendalian diri) dan *community sanction* (sanksi masyarakat atau sosial). Dengan demikian, profesionalisme berarti kemampuan, keahlian dan keterampilan serta pengetahuan seseorang yang cukup tinggi untuk keberhasilan bidang tugas dan kegiatan tertentu.

Profesionalisme yang dilaksanakan KUA Gondomanan tersebut dilakukan dengan prinsip Islam. Sikap dan sifat profesional KUA Gondomanan didasarkan pada prinsip dan norma-norma kenabian (*prophetic mission values*) yang dicontohkan Rasulullah S.A.W. dalam menunjukkan integritas seseorang, yaitu: *shiddiq* (keyakinan dan kepercayaan diri), *amanah* (terpercaya, kredibel), *tablig* (komunikatif dan informatif), serta *fathanah* (kompetensi dan intelegensi). Profesionalitas KUA Gondomanan telah dilekatkan dengan standar profesionalitas selama ini. Peningkatan mutu profesionalisme penghulu dilakukan dengan memperhatikan kompetensi dan kecakapan penghulu yang meliputi³⁴:

- a) Latar belakang pendidikan penghulu yang terpilih sesuai dengan kompetensi sebagai penghulu;
- b) Penghulu dan pegawai lainnya di KUA memahami peraturan perundang-undangan tentang tugas pokok dan fungsinya, terutama dalam hukum materiil perundang-undangan, peraturan pelaksana, petunjuk pelaksanaan dan

34 Wawancara dengan Imam Bukhori (penghulu KUA Gondomanan) tanggal 13 Oktober 2014.

petunjuk teknisnya, kepegawaian, penganggaran dan sebagainya;

- c) Keaktifan penghulu mengikuti program bimbingan dan peningkatan kemampuan teknis penghulu dan pegawai lain yang disediakan Kementerian Agama atau lembaga lain yang kredibel.
- d) Pro aktif dalam pembinaan karir penghulu;
- e) Kemahiran penghulu mengoperasikan perangkat keras dan lunak dari teknologi informasi yang menunjang sistem pencatatan pernikahan.

Setelah itu, profesionalisme peran yang dilakukan penghulu di KUA Gondomanan dalam layanan nikah ini bila dirinci adalah sebagai berikut³⁵:

- a) Sebagai administrator pencatat nikah dan rujuk;
- b) Sebagai pelaksana layanan nikah berdasarkan Agama Islam;
- c) Sebagai penasihat dan konsultan nikah, hukum keluarga dan masalah rumah tangga;
- d) Sebagai pemantau pelanggaran ketentuan nikah dan Undang-undang Pernikahan;
- e) Sebagai pemberi fatwa hukum munakahat dan bimbingan mu'amalah;
- f) Sebagai pembina keluarga sakinah; dan
- g) Sebagai pihak yang berperan dalam mensosialisasikan keberadaan Pengadilan Agama sebagai mediator dalam penyelesaian masalah cerai dan rujuk serta pelanggaran ketentuan nikah lainnya.

³⁵ Wawancara dengan Imam Bukhori (penghulu KUA Gondomanan) pada tanggal 13 Oktober 2014.

3. Pelayanan Prima dan Indeks Kepuasan Masyarakat

Sebagai model pelaksanaan inovasi pelayanan publik, pelayanan administrasi pernikahan di KUA Gondomanan mendeklarasikan diri sebagai model pelayanan prima. Pelayanan Prima adalah terjemahan dari *Excellent Service* yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik, atau pelayanan yang terbaik. Pelayanan prima dikembangkan berdasarkan konsep A3, yaitu *Attitude* (sikap), *Attention* (perhatian), *Action* (tindakan) (Sutopo dan Suryanto Adi, 2003).

Hal-hal perlu diperhatikan, berkaitan dengan konsep Pelayanan Prima adalah sebagai berikut (Sutopo dan Suryanto Adi, 2003):

- a) Apabila dikaitkan dengan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maka Pelayanan Prima adalah pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada masyarakat;
- b) Pelayanan Prima didasarkan pada standar pelayanan yang terbaik;
- c) Untuk instansi yang sudah mempunyai standar pelayanan maka Pelayanan Prima adalah pelayanan yang memenuhi standar;
- d) Apabila pelayanan selama ini sudah memenuhi standar maka pelayanan prima berarti adanya terobosan baru, yaitu pelayanan yang melebihi standarnya;
- e) Untuk instansi yang belum mempunyai standar pelayanan maka Pelayanan Prima adalah pelayanan yang terbaik dari instansi yang bersangkutan. Usaha selanjutnya adalah menyusun standar pelayanan.

Untuk memperkuat pelayanan prima tersebut, KUA Gondomanan melegalisasikannya dalam sebuah dokumen janji pelayanan. Bunyi janji pelayanan prima adalah sebagai berikut:



**Gambar 11 Pernyataan Janji Pelayanan
Dokumentasi KUA Gondomanan, 2013**

Janji pelayanan adalah pernyataan tertulis dari penyelenggara layanan KUA Gondomanan yang berisi butir-butir janji penyelenggara untuk menjamin bahwa pelayanan

yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan serta dipublikasikan secara luas, dengan tujuan untuk meningkatkan responsivitas petugas KUA Gondomanan kepada masyarakat yang dilayani, meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna jasa layanan, meningkatkan kinerja dan kualitas layanan secara menyeluruh.

Selain kepatuhan terhadap janji, pegawai KUA juga mematuhi atas kode etik. Kode etik dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Berkaitan dengan itu, kode etik KUA Kecamatan Gondomanan selaras dengan kode etik pegawai Kementerian Agama, sebagaimana diatur dalam Keputusan **Menteri Agama Nomor 421 Tahun 2010** Kode Etik Pegawai Kementerian Agama RI, **yaitu**³⁶:

Kami Pegawai Kementerian Agama yang Beriman dan Bertakwa Kepada Tuhan yang Maha Esa :

1. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat;
3. Bekerja dengan jujur, adil dan amanah;
4. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional dan inovatif;
5. Setiakawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan korps.

36 Profil KUA Gondomanan Tahun 2013 dan penjelasan Imam Bukhori tanggal 13 Oktober 2014.

Sepanjang tahun 2013, KUA Gondomanan melakukan survey untuk mengukur indeks kepuasan terhadap 180 responden masyarakat terhadap layanan KUA Gondomanan dengan hasil sebagai berikut³⁷:

Tabel 1:
Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indek Kepuasan Masyarakat Indonesia	Angka	Keterangan
1	Kesederhanaan prosedur pelayanan	3,82	Sangat Baik
2	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,82	Sangat Baik
3	Kejelasan petugas pelayanan	3,82	Sangat Baik
4	Kedisiplinan petugas pelayanan	3,77	Sangat Baik
5	Kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas pelayanan	3,79	Sangat Baik
6	Keahlian dan ketrampilan petugas pelayanan	3,83	Sangat Baik
7	Kecepatan pelayanan	3,74	Sangat Baik
8	Keadilan mendapatkan pelayanan	3,77	Sangat Baik
9	Kesopanan dan keramahan petugas	3,77	Sangat Baik
10	Kewajaran biaya pelayanan	3,82	Sangat Baik

³⁷ Profil KUA Gondomanan 2013. Naskah tidak dipublikasikan.

11	Kepastian biaya pelayanan	3,79	Sangat Baik
12	Kepastian jadwal pelayanan	3,82	Sangat Baik
13	Kenyamanan lingkungan	3,83	Sangat Baik
14	Keamanan pelayanan	3,77	Sangat Baik

Keberlanjutan dan Respon

1. Keberlanjutan

Dalam pasal 11 Kesepakatan Bersama antara Kantor Kemenag Kota Yogyakarta dan Walikota Yogyakarta mengatur tentang jangka waktu pelaksanaan integrasi data pernikahan-kependudukan³⁸, jangka waktu kerjasama integrasi data kependudukan berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan selama para pihak menghendaki demi kepentingan peningkatan pelayanan kepada masyarakat terhitung sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani. Pelaksanaan kerjasama integrasi data kependudukan akan melalui dua tahap.

- a) Pertama, uji coba dengan KUA Kecamatan Gondomanan sebagai *pilot project* berlaku antara bulan Maret 2013 sampai Juni 2013.
- b) Kedua, pengembangan kerjasama dengan 13 KUA Kecamatan di Kota Yogyakarta pada bulan Juni 2013.

Selanjutnya, kesepakatan bersama juga mengatakan bahwa kerjasama integrasi data kependudukan ini akan ditinjau kembali untuk diperbarui dan/atau

³⁸ Pasal 11 Kesepakatan Bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2013 dan Nomor 06/NKB.YK/2013

dimusyawarahkan kembali oleh kedua belah pihak apabila dikehendaki.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan integrasi data pernikahan-kependudukan di KUA Gondomanan masih memerlukan masa uji coba selama empat bulan pada tahun 2013 (Maret s.d. Juni). Akan tetapi, tampaknya keberlanjutan program integrasi data pernikahan-kependudukan di KUA Gondomanan juga mengalami kendala. Salah satu penurunan pelaksanaannya adalah matinya *server website* KUA Gondomanan.

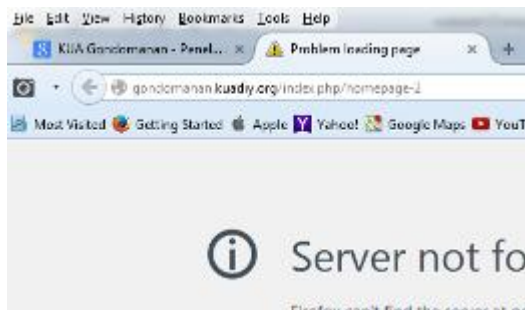
Matinya *website* KUA Gondomanan tentunya menyebabkan informasi pernikahan tidak bisa diakses publik. Alih-alih diakses oleh publik, Didukcapil saja tidak bisa melihat siapa saja warganya yang sedang akan melangsungkan pernikahan melalui Aplikasi SIMKAH yang berada dalam website KUA Gondomanan.

Meskipun tukar data dan pelaporan NTCR dapat dilakukan lewat e-mail KUA atau e-mail Didukcapil dan validasi dapat dilakukan melalui IP, tetapi pelaksanaannya akan lebih rumit dibanding dengan dilangsungkan melalui Aplikasi SIMKAH. Matinya *server* KUA Gondomanan juga menyebabkan pendaftaran nikah secara *online* tidak dilaksanakan. Berikut adalah gambar fasilitas websitenya KUA Gondomanan sebelum hilang.



**Gambar 12 Layanan Pendaftaran Nikah On Line
Dokumentasi KUA Gondomanan, 2013**

Namun sekarang ketika diakses lagi tampilannya adalah sebagai berikut:



**Gambar 13 Web site tidak lagi aktif
Dokumentasi Peneliti, 2013.**

2. Respon KUA se-Kota Yogyakarta

Dalam merespon untuk mereplikasi integrasi data kependudukan-pernikahan seperti yang telah dilaksanakan KUA Gondomanan, respon KUA lain di seluruh Kota Yogyakarta dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori:

- a) KUA yang sudah mencoba melaksanakan tetapi tidak maksimal. KUA Kraton adalah kategori kelompok ini. Sebagai perwakilan KUA Teladan dari Kota Yogyakarta yang dikirim dalam nominasi KUA Teladan Daerah Istimewa Yogyakarta 2014, KUA Kraton telah berusaha melaksanakan program integrasi data pernikahan-kependudukan. KUA tersebut hanya berhasil pada tingkatan pelaporan data NTCR dan validasi data. Akan tetapi, KUA Kraton tidak melakukan akselerasi perubahan data. Hal ini disebabkan karena KUA Kraton tidak membuat peraturan teknis di kecamatan.³⁹



**Gambar 14 Wawancara dengan Kepala KUA
Dokumentasi Peneliti, 2013**

- b) KUA yang sedang merintis melaksanakan. Kelompok ini dibagi lagi menjadi dua kategori, yakni karena akan lomba dan karena kebetulan kepala KUA-nya adalah penghulu yang bertugas di KUA

³⁹ Wawancara dengan Suparno (Kepala KUA Kraton) pada tanggal 23 Oktober 2014.

Gondomanan pada Tahun 2013. Kategori pertama adalah KUA Pakualaman yang telah dipilih oleh Kantor Kemenag Kota Yogyakarta untuk mewakili Kota Yogyakarta dalam nominasi KUA teladan se-DIY. Kategori kedua adalah KUA Jetis. Kepala KUA Jetis sejak Januari 2014 adalah Suardi yang dahulunya adalah Penghulu di KUA Gondomanan pada Tahun 2013.

- c) Belum berpikir untuk melaksanakannya. Ini adalah mayoritas KUA di Kota Yogyakarta selain tiga KUA di atas. Kendala mereka bervariasi. Di antaranya adalah:

1) Lamanya waktu *loading* untuk mengakses data kependudukan di data base Didukcapil Kota Yogyakarta melalui IP khusus yang diberikan. Menurut Penghulu KUA Kotagede, setelah NIK Catin dimasukkan ke dalam kolom yang disediakan melalui IP Didukcapil, identitas kependudukannya tidak serta merta langsung keluar melainkan menunggu waktu beberapa puluh menit. Kadangkala justru sistem di Didukcapil memberi konfirmasi *error* terhadap NIK yang dimasukkan. Oleh sebab itu, KUA Kotagede lebih memilih mencukupkan diri atas data *hard copy* yang dibawa oleh Catin⁴⁰.

40 Wawancara dengan Kholis Asy'ari (Penghulu KUA Kotagede Kota Yogyakarta) pada tanggal 17 Oktober 2014.



Gambar 15
Wawancara dengan Penghulu KUA Kotagede
Dokumentasi Penulis, 2013

- 2) Perangkat komputer yang belum mumpuni. Menurut Kepala KUA Wirobrajan, Kantor Kemenag Kota belum memberikan realisasi perangkat yang memadai. Beberapa komputer yang sekarang tersedia tidak mempunyai *memori kecepatan* yang memadai untuk program semacam itu⁴¹.

⁴¹ Wawancara dengan Lukmanul Hakim (Kepala KUA Wirobrajan Kota Yogyakarta) pada tanggal 20 Oktober 2014.



Gambar 16 Wawancara dengan Kepala KUA Wirobrajan
Dokumentasi Peneliti, 2014

- 3) Belum tersosialisasikannya dan terdistribusikannya Kesepakatan bersama tersebut secara merata kepada seluruh KUA di Kota Yogyakarta. Kepala KUA Mergangsaan, saat ditemui di kantornya, mengatakan tidak tahu-menahu dengan Kesepakatan bersama integrasi data tersebut⁴².

⁴² Wawancara dengan Yusron (Kepala KUA Mergangsaan Kota Yogyakarta) pada tanggal 20 Oktober 2014.



- 4) Senada dengan KUA Mergangsari, KUA Gondokusuman juga belum menerima salinan bagaimana bentuknya Kesepakatan bersama tersebut.⁴³ Kepala KUA Umbulharjo juga mengatakan bahwa program integrasi data pernikahan-kependudukan tersebut belum merupakan sebuah instruksi. Jadi, pelaksanaannya di KUA juga tidak mengikat. Dia menyatakan belum melaksanakan Kesepakatan bersama tersebut. Menurutnya, kalau ini merupakan sebuah instruksi tentunya mengharuskan Kantor Kemenag Kota Yogyakarta memberikan realisasi perangkat. Sementara selama ini, Kemenag kota tidak memberikan komputer baru, maka KUA Umbulharjo tidak melaksanakannya. Kalau

⁴³ Wawancara dengan Suparman (Kepala KUA Gondokusuman Kota Yogyakarta) pada tanggal 22 Oktober 2014.

dilihat dari salinan Kesepakatan bersama, tidak terdistribusikannya salinan Kesepakatan bersama memang sebagai konsekuensi logis. Salinan Kesepakatan bersama tersebut memang tidak ada tembusan untuk seluruh KUA Kota Yogyakarta. Aneh memang. Sebuah Kesepakatan bersama yang pelaksana teknisnya adalah KUA, tetapi justru dokumen KUA tidak berbunyi wajib disebarluaskan ke KUA⁴⁴.



**Gambar 17 Wawancara dengan Kepala KUA Umbulharjo
Dokumentasi Peneliti, 2014**

Dengan demikian rekapitulasi keberlanjutan integrasi data adalah sebagai berikut:

44 Wawancara dengan Muklis (Kepala KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta) pada tanggal 22 Oktober 2014.

Tabel 2:
Posisi Integrasi Data

No	Nama KUA	Status	Sebab	Informan
1	Gondomanan	Melaksanakan	Fasilitas dan SDM mumpuni, bertepatan momentum lomba 2013	Imam Bukhori, S.Ag (Penghulu) Dan Drs. Abd Su'ud, MSI (Mantan Kepala)
2	Kraton	Melaksanakan belum maksimal	Tidak membuat pelaksanaan teknis dengan kecamatan, bertepatan momentum lomba 2014	Drs. Suparno (Kepala KUA)
3	Pakualaman	Masih merintis	Persiapan lomba 2015	Ghufron, S.Ag (Kepala KUA)
4	Jetis	Masih merintis	Kepala KUA dahulunya (2013) adalah penghulu di Gondomanan	Suardi, S.Ag (Kepala KUA)
5	Kotagede	Belum melaksanakan	Alasan lamanya waktu <i>loading</i>	Kholis Asy'ari, S.Ag (Penghulu)

6	Wirobrajan	Belum melaksanakan	Alasan perangkat komputer yang belum mumpuni	Drs. Lukman Hakim, MA (Kepala)
7	Gedongtengen	Belum melaksanakan	Lamanya waktu <i>loading</i> dan belum mendapatkan sosialisasi SKB	Drs. Syakur (Kepala KUA)
8	Tegalrejo	Belum melaksanakan		Saeful Anwar, S.Ag., MSI (Kepala)
9	Gondokusuman	Belum melaksanakan		Drs. Suparman (Kepala)
10	Mantrijeron	Belum melaksanakan		Drs. Maskur Ashari, MA (Kepala)
11	Mergangsan	Belum melaksanakan		Drs. Yusron (Kepala)
12	Umbulharjo	Belum melaksanakan		Drs. Muklis (Kepala)
13	Danurejan	Belum melaksanakan		M. Sulton, S.Th.I (Penghulu)
14	Ngampilan	Belum melaksanakan		Drs. Sumanggiyo Usadi, MA (Kepala)

Problematika di Sekitar Keberlanjutan dan Respon atas Transformasi Pelayanan Administrasi Pernikahan-Kependudukan

Beberapa problematika yang muncul terkait upaya keberlanjutan program dan peningkatan respon KUA di wilayah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

a. Kepadatan (*crowded*) lalu lintas validasi data secara *online*

Selama ini memang telah terjalin kerjasama tukar data antara Didukcapil dengan KUA. Mekanismenya adalah Didukcapil kota Yogyakarta menyediakan data seluruh warganya melalui satu IP yang telah disepakati bersama-sama antara Didukcapil dengan Kemenag Kota. Kemudian IP tersebut hanya bisa diakses oleh operator (penghulu) melalui Aplikasi SIMKAH masing-masing KUA.

Saat ditanya mengenai keluhan beratnya mengakses data tersebut, Sekretaris Didukcapil Kota Yogyakarta mengaku tidak mengetahui perihal kendala lemahnya koneksi yang dialami KUA kecamatan untuk mengaksesnya.

Sekretaris Didukcapil Kota Yogyakarta mengusulkan bahwa seharusnya kerjasama tukar data tersebut dapat dilakukan hanya melalui Aplikasi SIMKAH. Jadi, Didukcapil bisa mengakses Aplikasi SIMKAH setiap KUA di Kota Yogyakarta untuk mengetahui sebenarnya siapa saja warga Kota Yogyakarta yang akan menikah.

Kemudian, operator di Didukcapil akan merespon informasi dari Aplikasi SIMKAH tersebut untuk

menyeleksi data pihak yang mau menikah (Catin), kemudian data kependudukan yang di-*daring* hanyalah data penduduk yang mau menikah saja serta pihak-pihak terkait yang menjadi walinya.

Dengan mekanisme sebagaimana tersebut di atas, maka akses terhadap IP akan menjadi ringan. Namun yang terjadi saat ini adalah Didukcapil harus menyediakan secara *online* data kependudukan seluruh masyarakat Kota Yogyakarta sehingga akses oleh semua operator KUA menjadi *overload*.



Gambar 18 Wawancara dengan Sekretaris Didukcapil

Dokumentasi Penulis, 2014

Berdasarkan UU Administrasi Kependudukan, Disdukcapil memiliki data kependudukan berupa nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, alamat dan agama⁴⁵ data ini bersifat *privat dan confidential*. Keamanan

⁴⁵ Interview dengan sekretaris Disdukcapil Kota Yogyakarta Ita Rustanti pada 15 Oktober 2014.

data kependudukan menjadi tanggungjawab Disdukcapil, oleh karenanya Sekretaris Disdukcapil Kota Yogyakarta menilai bahwa pelaksanaan data-sharing tentang pernikahan-kependudukan ini harus dilakukan dengan tertib dan bertanggungjawab oleh operator yang tersumpah, karena data ini sangat rentan untuk disalahgunakan – pemalsuan identitas.

- b. Penyusunan peraturan bersama tidak cukup dibahas oleh instansi pengarah saja karena pada pelaksanaannya membutuhkan juga peran instansi teknis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Disdukcapil Kota Yogyakarta didapatkan keterangan bahwa proses pembuatan Kesepakatan bersama tersebut terkesan terburu-buru dan pihak Disdukcapil tidak dilibatkan pada seluruh proses penyusunan peraturan bersama tersebut (hanya sebagian proses saja).

Beliau menemukan sebenarnya masih banyak unsur kerjasama yang harus disempurnakan, di antaranya mengenai aturan pelaksanaan teknis⁴⁶.

Beberapa KUA di wilayah Kota Yogyakarta juga menilai bahwa integrasi tersebut hanyalah program KUA Gondomanan dalam rangka menghadapi lomba. Dan memang inisiasi awal dari ide integrasi data tersebut muncul dari KUA Gondomanan. Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Bimas Islam Kantor Kemenag Kota Yogyakarta, Moh Jazih, munculnya Kesepakatan

46 Interview dengan sekretaris Disdukcapil Kota Yogyakarta Ita Rustanti pada 15 Oktober 2014.

bersama tersebut adalah komitmen Kepala Kantor Kemenag Kota Yogyakarta untuk memfasilitasi landasan yuridis inovasi program yang diluncurkan oleh KUA Gondomanan.

Secara yuridis, tidak mungkin seorang Kepala KUA akan membuat Kesepakatan bersama dengan seorang Walikota karena terbentur hirarki jabatan. Oleh sebab itu, Kepala Kankemenag Kota yang mewakilinya⁴⁷.



**Gambar 19 Wawancara dengan Bimas Islam Kankemenag Kota YK
Dokumentasi Peneliti, 2014**

Dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Kepala Kankemenag secara hierarki kebijakan seharusnya berlaku untuk seluruh KUA di wilayah Kota Yogyakarta. SKB ini dapat digunakan oleh

⁴⁷ Interview dengan Kepala Bimas Islam Kantor Kemenag Kota Yogyakarta.

seluruh KUA yang lain di wilayah Kota Yogyakarta untuk melakukan kerjasama tukar data pernikahan-kependudukan bekerjasama dengan Didukcapil.

Namun, inisiatif baik seperti ini kenyataannya tidak mudah dikomunikasikan kepada KUA-KUA lain di Kota Yogyakarta. Oleh sebab itu, agar terjadi kesadaran bersama KUA se-Kota Yogyakarta dan Didukcapil, Walikota Yogyakarta beserta Kepala Kantor Kemenag Kota Yogyakarta harus mengajak bersama instansi teknis di bawahnya masing-masing untuk menyempurnakan pelaksanaan Kesepakatan bersama tersebut.

- c. Dirjen Bimas Islam belum memperhatikan pendanaan Aplikasi SIMKAH.

Urgensi pentingnya Aplikasi SIMKAH tidak hanya berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Aplikasi SIMKAH pada KUA Kecamatan, tetapi juga sesuai dengan bunyi rekomendasi pertama.

Akan tetapi, kenyataannya di lapangan, ternyata pembiayaan Aplikasi SIMKAH menjadi keluhan oleh berbagai KUA. Memang untuk instalasi awal, setiap KUA di Kota Yogyakarta bisa mendapatkan *software* Aplikasi SIMKAH secara gratis. *Software* Aplikasi SIMKAH yang gratis tersebut adalah versi dasar. Seiring perjalanannya waktu, pihak yang menyediakan *software* Aplikasi SIMKAH (yakni pihak swasta) selalu memperbarui fitur Aplikasi SIMKAHnya dengan versi yang selalu baru.

Namun kendalanya versi pembaharuan tersebut adalah aplikasi berbayar, setiap versi yang baru yang akan dipasang membutuhkan dana lagi untuk membelinya. Keluhan tersebut dinyatakan oleh kepala KUA Pakualaman dalam wawancara penelitian ini.

Menurutnya Pemerintah dalam hal ini Ditjen Bimas Islam harus segera membuat regulasi pembelian hak paten Aplikasi SIMKAH dari vendor penyedia, sehingga seluruh aplikasi pembaharuan atau pengayaan fitur dalam aplikasi tersebut dapat diunduh oleh KUA pengguna secara gratis. Tidak seperti sekarang, pihak KUA harus membeli sendiri setiap *software* Aplikasi SIMKAH versi terbaru. Pembelian *software* terbaru itupun tidak diperbolehkan menggunakan dana rutin KUA yang harus dilaporkan kepada Negara⁴⁸

Dengan kebijakan seperti saat ini, penyediaan *software* Aplikasi SIMKAH hanya akan menguntungkan pihak swasta/vendor penyedia namun sulit diterapkan oleh pengguna (KUA).

⁴⁸ Wawancara dengan Ghufon Su'udi (Kepala KUA Pakualaman) pada tanggal 15 Oktober 2014.



**Gambar 20 Interview dengan Kepala KUA Pakualaman
Dokumentasi Peneliti, 2014**

Keluhan serupa juga dinyatakan kepala KUA Ngampilan. Menurutnya, seharusnya tugas KUA dalam menerapkan Aplikasi SIMKAH selayaknya seperti fungsi petugas *Teller* di Bank. Mereka hanya berfungsi sebagai “*user*” atau pengguna aplikasi. Semua pembaharuan *software* sudah menjadi tanggungjawab pemilik/komisaris bank tersebut.⁴⁹

⁴⁹ Interview dengan Sumanggiyo Usadi (Kepala KUA Ngampilan) Pada tanggal 24 Oktober 2014.



**Gambar 21 Interview dengan Kepala KUA Ngampilan
Dokumentasi Peneliti, 2014**

Memang selama ini, menurut kepala KUA Jetis, komunitas KUA di Kota Yogyakarta biasa menyiasati pembelian *software* Aplikasi SIMKAH yang baru dengan melakukan *patungan* uang pribadi dari beberapa perwakilan KUA. Selain untuk membeli *software* baru, iuran tersebut juga digunakan untuk mengundang pembuat *software* untuk memberikan pelatihan keahlian bagi para perwakilan KUA.⁵⁰

Akuisisi kepemilikan hak paten atas Aplikasi SIMKAH tersebut harus menjadi catatan penting bagi Dirjen Bimas Islam. Isu ini hanya akan menjadi *bom waktu* bagi KUA apabila tidak segera diselesaikan secara bijak.

50 Interview dengan Suardi (Kepala KUA Jetis) pada tanggal 24 Oktober 2014.



**Gambar 22 Interview dengan Kepala KUA Jetis
Dokumentasi Peneliti, 2014**

Simpulan

Sistem transformasi pelayanan administrasi pernikahan-kependudukan yang telah ditetapkan KUA Gondomanan bekerjasama dengan Didukcapil Kota Yogyakarta dengan lahirnya Kesepakatan Bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2013 dan Nomor 06/NKB.YK/2013 tentang Kerjasama Integrasi Data Kependudukan di Wilayah Kota Yogyakarta dan Standar operasional pelayanan akselerasi perubahan status pernikahan kerjasama Kecamatan Gondomanan dan KUA Gondomanan telah menghasilkan transformasi bagi sejarah pelaksanaan sinkronisasi administrasi pernikahan-kependudukan.

Alasan disebut transformasi disebabkan tidak adanya integrasi data sebelum adanya Kesepakatan Bersama. Kesepakatan Bersama tersebut menjadi landasan melakukan

integrasi data dengan ruang lingkup mencakup validasi data online, pelaporan NTCR dan akselerasi perubahan status.

Penyelenggaraan transformasi pelayanan administrasi pernikahan-kependudukan oleh KUA Gondomanan tersebut telah memenuhi standar inovasi pelayanan publik. I

Indiator dimaksud berupa adanya sistem untuk menjamin pelaksanaan integritas dan transparansi pelayanan, profesionalitas petugas, janji pelayanan prima dan survei atas indeks kepuasan masyarakat.

Keberlanjutan program tersebut tidak lepas dari kendala di KUA Gondomanan. Kendala yang dialami adalah matinya *server* KUA Gondomanan. Kendala ini menghentikan pendaftaran nikah secara *on line* meskipun validasi data kependudukan, pelaporan NTCR dan akselerasi perubahan masih tetap bisa dilaksanakan.

Sementara itu, respon KUA lain di wilayah Kemenag Kota Yogyakarta atas terbitnya SKB transformasi pelayanan administrasi pernikahan-kependudukan dibagi menjadi tiga kategori yakni: melaksanakan tapi belum maksimal; akan melaksanakan namun terkendaa alat; dan belum berniat melaksanakan. Kendala KUA yang tidak melaksanakannya adalah berkuat sekitar kendala jaringan internet, ketersediaan sarana-prasarana dan sosialisasi-penyebaran mekanisme integrasi data.

Rekomendasi

Berdasarkan problematika yang dirangkum dari hasil penelitian dengan judul “Transformasi Pelayanan Administrasi Pernikahan-Kependudukan oleh KUA Gondomanan” ini maka peneliti merekomendasikan tiga hal sebagai berikut:

Pertama, Ditjen Bimas Islam harus menganggarkan pembiayaan Aplikasi SIMKAH. Ditjen Bimas Islam harus segera membuat regulasi pembelian hak paten Aplikasi SIMKAH dari vendor penyedia, sehingga seluruh aplikasi pembaharuan atau pengayaan fitur dalam aplikasi tersebut dapat diunduh oleh KUA pengguna secara gratis, terstandar dan terbaru.

Kedua, Kepala Kemenag Kota Yogyakarta harus menyebarluaskan dokumen Kesepakatan Bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2013 dan Nomor 06/NKB.YK/2013 tentang Kerjasama Integrasi Data Kependudukan di Wilayah Kota Yogyakarta kepada seluruh KUA di wilayah Kota Yogyakarta.

Ketiga, Kankemenag Kota Yogyakarta harus menyiapkan sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk memperlanjar program integrasi data sebagai prasyarat transformasi pelayanan seperti di KUA Gondomanan.

Ke empat, setiap KUA harus mempunyai budaya dan etos kerja yang profesional. Artinya, pelaksanaan inovasi seperti integrasi data sebagai prasyarat transformasi pelayanan tidak semata-mata untuk mengikuti kompetisi lomba. Akan tetapi, seharusnya merupakan kesadaran dan kebutuhan untuk melayani masyarakat setiap saat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Listiana, *Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami “Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1447/Pdt.G/2011/PA.Sm”* (Semarang: Fakultas Hukum UNNES, 2013).
- Annisa Lutfi Aryani, *Pembatalan Perkawinan karena Adanya Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan Poligami “Studi terhadap Putusan No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg”* (Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2012).
- Cholid, Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Semarang: Bumi Aksara, 2003).
- Denzin, NK. *The Research Act: A Theoretical Introduction in Sociological Methods* (New York: McGraw-Hills, 1978).
- Deputi Pelayanan Publik, *Pedoman Teknis Inovasi Pelayanan Publik* (Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2013).
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tata Cara dan Mekanisme Pengurusan Perkawinan dan Rujuk di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005).
- Dwiyanto, Agus, dkk, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2003).
- Dwiyanto, Agus, dkk, *Teladan dan Pantangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Galang Printika, 2003).

- Febrianda, Lis, *Rekonstruksi Regulasi Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Oleh Birokrasi Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara* (Semarang: Undip, 2009).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research 2* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984).
- Kurniawan, Agung, *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta : Pembaharuan, 2005).
- Lenzerini, Maurizio, *Data Integration: A Theoretical Perspective* (Roma: PODS, 2002).
- M. Muslih, *Pemalsuan Identitas sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan "Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1852/Pdt.G/2009/PA.JT"* (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011).
- Miles, MB. dan AM Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, (SAGE: Beverly Hills, 1992).
- Murdick, Robert G. dan Joel E. Ross, *Sistem Informasi Untuk Manajemen Modern* (Jakarta: Erlangga, 2005).
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan ; Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Said, M. Mas'ud, *Birokrasi di Negara Birokratis* (Malang: UMM Press, 2007).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013).

- Susanto, *Budaya Perusahaan*, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 1997).
- Sutarmadi dan Mesraini, *Administrasi Perkawinan dan Manajemen Keluarga* (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2006)
- Sutopo dan Suryanto Adi, *Pelayanan Prima*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2003).
- Taylor, SJ and R Bogdan, *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meanings*, Second Edition (Toronto: John Willey and Sons, 1984).
- Tim Penulis, *Profil KUA Gondomanan 2013* (Gondomanan: KUA Gondomanan, 2013). Naskah tidak dipublikasikan.
- Tim Reformasi Pelayanan Publik Airpd-Logica, *Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2008).
- Tugimin, *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami "Studi Putusan PA Sleman Nomor 28/Pdt.G/2006/PA.Smn"* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008).
- Utomo Warsito, *Administrasi Publik Baru di Indonesia: Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Wasistiono, Sadu, *Kapita Selekta Penyelenggara Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Fokusmedia, 2003).
- Yin, Robert K., *Studi Kasus: Desain & Metode*, Cetakan Ke-10 (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

Zulkarnain, *Manipulasi Identitas dalam Perkawinan “Studi Kasus pada KUA Kecamatan Kadugede, Kuningan-Jawa Barat”* (Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Agama 477/2004 ttg Pengumuman Kehendak Nikah.

Keputusan **Menteri Agama Nomor 421 Tahun 2010** Kode Etik Pegawai Kementerian Agama RI

Kesepakatan Bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2013 dan Nomor 06/NKB.YK/2013 tentang Kerjasama Integrasi Data Kependudukan di Wilayah Kota Yogyakarta.

Peraturan Menteri Agama 39/2012 ttg Organisasi dan Tata Kerja KUA

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Peraturan Pemerintah 37/2007 tentang Pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah 9/1975 ttg Pelaksanaan UU 1/1974

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama

Peraturan Presiden 47/2009 ttg Pembentukan dan Organisasi Kemenag.

Peraturan Presiden 91/2011 ttg Perubahan Atas Peraturan Presiden 47/2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kemenag.

Surat Edaran Dirjen BIPH No. DJ.1/1/PW.01/1478/2005 ttg Petunjuk Pengisian Formulir dan Pemeriksaan Kehendak Nikah.

Surat Edaran Irjen Kemenag RI Nomor : IJ/1261/2012 tanggal 13 Desember 2012.

UU 1/1974 tentang Pokok Perkawinan.

UU 22/1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.

UU 24/2013 tentang perubahan atas UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.

UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik

UU 32/1954 tentang Penetapan UU 22/1946 di seluruh Luar Jawa dan Madura.

Sumber Internet

(<http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/integrasi-data-pernikahan-perceraian-dan-kelahiran-segera-terwujud-dalam-waktu-dekat> diakses pada tanggal 15 Juli 2014 Pukul 20.00 Wib).

(<http://www.gondomanan.kuadiy.org/index.php/2013-07-14-17-52-01/125-kua-kecamatan-gondomanan-juara-i-kua-teladan-tingkat-nasional-tahun-2013> diakses pada 15 Juli 2014 pkl 20.00 Wib)

(<http://www.gondomanan.kuadiy.org/index.php/2013-07-14-17-52-01/125-kua-kecamatan-gondomanan-juara-i-kua-teladan-tingkat-nasional-tahun-2013> diakses pada 15 Juli 2014 pkl 20.00 Wib).

(<http://www.lihat.co.id/2013/04/5-hal-yang-dipalsukan-oleh-irjen-djoko.html#axzz37YH4Izii> diakses 15 Juli 2014 Pukul 20.00 Wib).

IDENTIFIKASI MASALAH DAN STRATEGI PENGEMBANGAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DI JAWA BARAT: PENDEKATAN METODE *ANALYTIC NETWORK PROCESS (ANP)*

Aam Slamet Rusydiana

Pendahuluan

Salah satu kebijakan penting yang ditetapkan Pemerintah pada tahun 2006 terkait dengan masalah kehidupan beragama adalah penerbitan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat.

Ada tiga masalah utama yang diatur dalam PBM yaitu: (1) pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama; (2) pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama; (3) pendirian rumah ibadat. Tulisan di bawah ini secara khusus menggambarkan hasil penelitian terhadap salah satu substansi yang dimuat dalam PBM yaitu peranan FKUB dalam pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10.

FKUB adalah suatu forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.⁵¹ FKUB memiliki mandat resmi dari pemerintah untuk mengurus persoalan kerukunan umat beragama, tentu saja tanpa mengabaikan peran kelompok sipil lainnya. FKUB juga berperan untuk membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Tidak hanya mengurus kerukunan umat, melainkan juga pemberdayaan untuk kesejahteraan.

FKUB yang menurut data Kementerian Agama kini telah ada di 33 provinsi dan 428 kabupaten/kota⁵² memang sangat strategis sebagai garda terdepan pemeliharaan kerukunan. Sesuai tugasnya, forum ini melakukan dialog secara berkala dengan masyarakat, menyerap aspirasi dan menyampaikannya pada pihak terkait, dan turut menyosialisasikan kebijakan bidang kerukunan. Lalu, forum ini juga berperan aktif dalam memfasilitasi dan menyelesaikan kasus-kasus antarumat beragama, termasuk kasus rumah ibadah. Tak salah jika sekarang ini peran FKUB semakin diharapkan banyak pihak.

51 Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 No.6 (Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008 :37)

52 Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia 2013. Hal 16. Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama

Tabel 1.
Perkembangan Jumlah FKUB 2007-2013

Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FKUB Provinsi	10	29	31	33	33	33	33
FKUB Kab/Kota	36	274	306	402	409	420	428

Harapan besar pada FKUB itu kini mulai mendapat dukungan sewajarnya dari sejumlah Pemda. Di banyak daerah, telah ada alokasi anggaran dari APBD untuk menunjang operasional FKUB, meski dengan jumlah yang bervariasi antardaerah.

Namun di sisi lain, optimalitas peran FKUB masih harus ditingkatkan. Masih banyak masalah baik yang sifatnya internal maupun eksternal yang dihadapi oleh FKUB. Hal ini misalnya ditunjukkan hasil penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan yang dilakukan pada 2009 terhadap 6 FKUB provinsi dan 6 FKUB kabupaten/kota di 6 provinsi. Temuan riset ini antara lain menunjukkan bahwa meski FKUB-FKUB telah melakukan tugas-tugasnya namun belum optimal karena keterbatasan anggaran; banyak anggota FKUB dan anggota masyarakat yang belum memahami PBM; dan dinamika politik lokal mengganggu kinerja FKUB. Sejumlah problem lain juga ditemukan baik dari hasil kajian maupun dari *depth interview* dengan para pengurus FKUB di daerah-daerah. Berbagai perbaikan terus dilakukan oleh berbagai pihak agar FKUB dapat berjalan lebih optimal dan bermanfaat banyak bagi kerukunan umat.

Dengan alasan itu, maka penelitian terkait identifikasi masalah dan strategi pengelolaan dan pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ini memiliki nilai manfaat yang signifikan.

Rumusan

Berdasarkan latar belakang di atas, nampak bahwa eksistensi FKUB belum diikuti optimalitas kualitas perannya dan perlu ditingkatkan manfaatnya. Padahal, tantangan tugasnya ke depan cenderung semakin meningkat seiring problematika dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini hendak mencoba memotret secara utuh dan menstrukturisasi masalah kelembagaan FKUB. Tentu saja, tujuan akhirnya diharapkan agar solusi dan strategi prioritas dapat ditemukan, dalam bingkai pemeliharaan kerukunan umat beragama di Republik Indonesia.

Penulisan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi hal-hal yang menjadi masalah dalam pengelolaan dan pengembangan lembaga Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di Jawa Barat, kemudian untuk dapat dipakai sebagai landasan dalam memberikan berbagai alternatif pemecahan dan strategi kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

Tujuannya adalah untuk memberikan masukan-masukan kepada *stakeholder* terkait, khususnya Kementerian Agama sebagai wakil pemerintah yang mengurus kerukunan hidup umat beragama dalam mengambil *policy action* yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan agar kita mampu mengidentifikasi hal-hal yang menjadi problem dalam pengelolaan dan pengembangan FKUB di Jawa Barat, kemudian untuk dapat dipakai sebagai landasan dalam memberikan alternatif pemecahan dan strategi kebijakan yang tepat. Sehingga kehidupan beragama menjadi aman, damai dan harmonis.

Kegunaan

Penelitian ini secara umum memiliki manfaat dan kegunaan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh FKUB dan mencari prioritas strategi yang mungkin dilakukan dalam kerangka penciptaan kerukunan umat beragama. Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan, yakni pimpinan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan instansi terkait, dalam upaya pemberdayaan FKUB dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama mendatang.

Tinjauan Pustaka

Beberapa masalah yang berhasil diinventarisir dari riset-riset sebelumnya dalam hal identifikasi masalah dan strategi pengembangan FKUB sehingga berimplikasi tidak maksimalnya proses komunikasi dan harmonisasi antarumat beragama di Indonesia. Kustini (2010) umpamanya memaparkan hal-hal yang secara umum menjadi problem yang dihadapi FKUB di daerah, yakni: masalah PBM 2 menteri yang belum sepenuhnya dipahami secara utuh oleh seluruh komponen masyarakat, kurangnya mediator dan inisiator

yang dapat diterima semua pihak dalam menyelesaikan masalah-masalah kerukunan umat beragama, hingga lemahnya dukungan pemerintah dan fasilitas yang memadai untuk FKUB daerah.

Berikut ini merupakan landasan teori untuk dasar penelitian lebih lanjut. Terdapat beberapa problem pengelolaan dan pengembangan FKUB yang berhasil dihimpun dari berbagai literatur. Problem-problem ini secara umum terbagi menjadi dua bagian: pertama terkait internal lembaga FKUB, kedua berhubungan dengan masalah eksternal. Berikut ini adalah identifikasi masalah pengembangan FKUB di Indonesia.

Tabel 2:
Faktor Eksternal dan Internal

NO	PERMASALAHAN	SUMBER
INTERNAL		
1	Sebagian anggota FKUB terkadang masih berwawasan sempit dan kurang memahami substansi PBM (Kurang nya wawasan keagamaan yang berkebangsaan dan multikultur)	FGD (2014), M. Maftuh Basyuni (2013), Puslitbang (2013), Nuhri son M. Nuh & Akmal S. Ruhana (2010)
2	Sebagian anggota FKUB masih merangkap jabatan sebagai aktivis politik/parpol	Basyuni (2013), M. Yusuf Asry & Reza Perwira (2010), Sjuhada Abduh & Ibnu H. Mukhtar (2010)
3	Minimnya pendanaan untuk operasionalisasi FKUB	Puslitbang (2014), Kustini, ed (2010), Nuh &

		Ruhana (2010), Abduh & Mukhtar (2010), Haidlor A. Ahmad (2010), Khalikin (2010)
4	Dewan penasihat yang belum berfungsi optimal	FGD (2014), Kustini (2010)
5	FKUB tidak memiliki tenaga kesekretariatan	Kustini (2010)
6	Kurangnya intensitas dialog , penampungan dan penyaluran aspirasi umat oleh FKUB	Kustini (2010)
7	Masalah tertib anggaran/ pertanggungjawaban penggunaan anggaran Negara memerlukan keahlian tertentu yang belum tentu dimiliki oleh para pemuka agama (pengurus) di FKUB	Nuh & Ruhana (2010)
8	Pengurus FKUB yang bekerja part time (second job)	Nuh & Ruhana (2010)
9	Fungsi pemberdayaan yang belum maksimal dan belum jelas ruang lingkupnya	Asry (2010), Nuh & Ruhana (2010)
10	Sebagian FKUB belum memiliki job description yang jelas bagi para pengurusnya	Nuh & Ruhana (2010)
11	Adanya perbedaan pandangan di antara sesama pengurus FKUB yang menyebabkan kinerja FKUB kurang maksimal	Asry & Perwira (2010)
12	Belum ada aturan baku dalam penyusunan laporan kinerja FKUB, baik mekanisme maupun substansi yang dilaporkan	Asry & Perwira (2010)
13	Lemahnya koordinasi antara FKUB dengan pihak terkait, misal Kesbangpolinmas	Ahmad (2010)
14	FKUB Kab/Kota memandang laporan kepada FKUB Provinsi hukumnya tidak wajib, karena hubungannya hanya sebatas koordinatif	Ahmad (2010)

15	Kurang harmonisnya relasi antara Pemda dengan pengurus FKUB karena misal problem interest politik	Abduh & Mukhtar (2010)
16	Penataan kelembagaan , peningkatan kapasitas dan kebutuhan anggaran tidak mendapat perhatian memadai	Puslitbang (2013)
17	Secara struktural, antara FKUB di tingkat provinsi dan kab/kota memang tidak memiliki garis koordinasi yang tegas	Puslitbang (2013)
18	FKUB tidak memiliki organisasi di tingkat pusat	Puslitbang (2013)
19	Posisi dewan penasihat yang harus diketuai Wagub dan Wabup menjadikan FKUB sering dianggap tidak bisa mandiri secara organisasi (supra atau infra struktur politik)	Puslitbang (2013)
20	Pemahaman yang lemah mengenai konflik, manajemen dan penanganan konflik para pengurus FKUB	Puslitbang (2013)
21	Tidak adanya kontrol dan evaluasi untuk mengukur sukses atau tidaknya FKUB dalam menjalankan tugasnya	Puslitbang (2013)
22	Penyalahgunaan FKUB untuk mempersulit / mempermudah pendirian rumah ibadah bagi umat agama tertentu	Ruhana (2009)
23	Keanggotaan sebagian pengurus FKUB ditempati oleh orang yang bukan pemuka agama , seperti pejabat pemerintah atau orang yang tidak diusulkan oleh majelis agamanya	Ruhana (2009)
24	Tidak adanya sistemkaderisasi pengurus	Interview FKUB Provinsi Jawa Barat (2014)
25	Potensi distrust antarpengurus FKUB	Interview FKUB Provinsi Jawa Barat (2014)

26	Pola dan mekanisme rekrutmen pengurus yang kurang aspiratif dan representatif	FGD (2014), Interview FKUB Provinsi Jawa Barat (2014)
27	Peran penasihat yang minimal	Interview FKUB Provinsi Jawa Barat (2014)
28	Dominasi laki-laki dalam kepengurusan FKUB (bias gender)	Interview FKUB Provinsi Jawa Barat (2014)
29	Belum adanya metode evaluasi kinerja FKUB, termasuk di dalamnya kepuasan masyarakat terhadap FKUB untuk kemudian dapat disimpulkan berhasil/tidaknya lembaga	Interview FKUB Provinsi Jawa Barat (2014)
30	Transparansi FKUB dalam pelaksanaan kegiatan dan keuangan masih rendah	Rusydiana (2014)
31	Lemahnya keterampilan individu pengurus FKUB yang profesional	Rusydiana (2014)
32	Kurang sigapnya FKUB dalam melayani masyarakat	Rusydiana (2014)
33	Masih rendahnya kemudahan aksesmendapat informasi terkait FKUB	Rusydiana (2014)
34	Pemberian pelayanan oleh FKUB terhadap masyarakat dinilai kurang adil	Rusydiana (2014)
35	Cara FKUB dalam menangani konflik dan melakukan dialog dengan masyarakat terbilang lemah	Rusydiana (2014)
36	Cara FKUB mensosialisasikan regulasi di bidang kerukunan & pemberdayaan masyarakat	Rusydiana (2014)
37	Masih adanya FKUB yang belum memiliki visi-misi (38,89%)	Puslitbang (2014)
38	Dominannya unsur PNS/pemerintah dalam	Puslitbang (2014)

	struktur pengurus FKUB (66,67%)	
39	Sebagian FKUB masih belum memiliki inovasi dan kreativitas dalam hal pencukupan pendanaan untuk program kerja (22%). Misalnya dengan melakukan MoU/kerjasama dengan pihak lain	Puslitbang (2014)
40	Banyaknya FKUB yang tidak membuat laporan tahunan evaluasi program kerja (33%)	Puslitbang (2014)
41	Relatif lemahnya kapasitas lembaga (55,27%) dan efisiensi kinerja (58,76%) FKUB	Puslitbang (2014)
42	Relatif lemahnya sumber daya lembaga FKUB (53,33%)	Puslitbang (2014)
43	Output /hasil berupa rekomendasi pendirian rumah ibadat relatif rendah (53,54%)	Puslitbang (2014)
EKSTERNAL		
1	Kurangnya sosialisasi PBM , baik berupa pertemuan nasional, diklat, diskusi maupun buku saku, khususnya terkait pendirian rumah ibadat	FGD (2014), Basyuni (2013), Suhanah (2010)
2	Sebagian kelompok masyarakat belum memahami secara utuh isi PBM	Basyuni (2013), Kustini (2010)
3	Terdapat kelemahan dalam PBM yakni tidak adanya ancaman sanksi bagi para pelanggarnya	Basyuni (2013)
4	Masa kerja pengurus FKUB belum pasti	Kustini (2010)
5	Pergub yang disusun masih kurang mengakomodir kepentingan FKUB	Kustini (2010)
6	Peristiwa politik lokal/pilkada yang mengganggu	Nuh & Ruhana (2010)
7	Sedikitnya masyarakat yang mengadukan masalahnya kepada FKUB	Nuh & Ruhana (2010)
8	Perhatian (atensi) masyarakat dan pemerintah masih sangat kurang	Nuh & Ruhana (2010), Ahmad (2010)

9	Berdasarkan data nasional terakhir (2013), masih banyak kab/kota yang belum memiliki FKUB , yakni 16,25% (83 kab/kota)	Puslitbang (2014a)
10	Anggapan sinis bahwa FKUB adalah berarti “birokratisasi kerukunan”	Nuh & Ruhana (2010)
11	Kurang tanggapnya pemerintah khususnya level pejabat teknis terhadap kepentingan FKUB	Ahmad (2010)
12	Adanya forum yang sama (nomenklatur dan fungsinya) namun kontraproduktif untuk perkembangan FKUB (baca: dualisme organisasi FKUB)	Ahmad (2010)
13	FKUB sebagai tunggangan/kendaraan politik	Puslitbang (2013), Abduh & Mukhtar (2010), Ruhana (2009)
14	Lemahnya transparansi keuangan FKUB oleh sekretariat KesbangLinmas	Abduh & Mukhtar (2010)
15	Kurangnya mediator dan inisiator yang dapat diterima semua pihak dalam menyelesaikan masalah-masalah kerukunan umat beragama	Kustini (2010)
16	Beberapa daerah memiliki potensi konflik yang tinggi sehingga masalah yang dihadapi FKUB di daerah tersebut semakin kompleks	Kustini (2010)
17	Dari sisi dukungan kelembagaan & infrastruktur, meski FKUB sering diposisikan sebagai “polisi kerukunan” yang amat dibutuhkan, namun ia kurang diperhatikan oleh Pemda dan DPRD	Puslitbang (2013)
18	Problematisasi bernuansa agama semakin kompleks , bahkan disertai kekerasan, baik antarpemeluk maupun intern pemeluk agama	Puslitbang (2013)
19	Sikap curiga & prasangka yang buruk terkait pendirian rumah ibadat baru dari sebagian masyarakat (dinamika kultural)	Puslitbang (2013)

20	Keterlambatan kepala daerah dalam menerbitkan peraturan tentang pembentukan FKUB di daerah, sehingga sejumlah kab/kota sampai saat ini belum mempunyai FKUB	Ruhana (2009)
21	Keberadaan Forum Kerukunan yang telah ada dan berperan sebelum lahirnya PBM, menimbulkan keengganan bagi sebagian daerah untuk menggantinya dengan FKUB	Ruhana (2009)
22	Penciutan pandangan yang mengesankan seolah-olah tugas FKUB adalah hanya memberikan rekomendasi bagi pendirian rumah ibadah	Ruhana (2009)
23	Kecenderungan melemparkan semua persoalan/beban kerukunan umat beragama kepada FKUB, sedangkan FKUB sendiri bukanlah suatu lembaga yang para anggotanya bekerja secara penuh waktu	Ruhana (2009)
24	Sebagian pasal PBM yang masih multiinterpretatif dan rentan penyalahgunaan (pasal 14 ayat 3 kata memfasilitasi; pasal 14 ayat 2 huruf b; tentang rekomendasi siapa yang lebih dulu antara kemenag dan FKUB)	FGD (2014), Interview FKUB Bandung (2014)
25	Rendahnya citra positif FKUB di masyarakat	Rusydiana (2014)
26	Status hukum PBM dianggap kurang memiliki kekuatan seperti Perpres atau UU	FGD Puslitbang (2014)
27	Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait (Kepolisian, pengadilan, dinas tata kota, dan lain-lain)	FGD (2014)
28	Posisi FKUB yang tidak jelas dalam struktur pemerintahan	FGD (2014)
29	Belum ada FKUB di tingkat nasional	FGD (2014)
30	Tokoh adat belum didayagunakan maksimal oleh FKUB	FGD (2014)
31	Belum adanya kerjasama FKUB dan LSM pd	FGD (2014)

	bidang terkait	
32	Belum adanya pendidikan toleransi di semua level	FGD (2014)
33	Merosotnya solidaritas kebangsaan dilihat dari segi toleransi beragama	FGD (2014)
34	Belum adanya mapping wilayah potensi konflik agama.	FGD (2014)
35	Belum ada crisis center atau lembaga mediasi pusat untuk menangani kasus-kasus konflik agama	FGD (2014)
36	Adanya isu-isu pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional tentang kehidupan keagamaan di Indonesia	FGD (2014)

Metodologi

Dalam metodologi *Analytic Network Process* (ANP), data yang digunakan merupakan data primer yang didapat dari hasil wawancara (*indepth interview*) dengan pakar, praktisi, dan regulator, yang memiliki pemahaman tentang permasalahan yang dibahas. Dilanjutkan dengan pengisian kuesioner pada pertemuan kedua dengan responden. Data siap olah dalam ANP adalah variabel-variabel penilaian responden terhadap masalah yang menjadi objek penelitian dalam skala numerik (Saaty, 2006).

Pemilihan responden pada penelitian ini dilakukan secara *purposive sample* (sengaja) dengan mempertimbangkan pemahaman responden tersebut terhadap permasalahan dalam pengembangan institusi FKUB di Jawa Barat. Jumlah responden dalam penelitian ini terdiri dari lima orang, dengan pertimbangan bahwa mereka cukup berkompeten dalam mewakili keseluruhan populasi. Dalam analisis ANP jumlah sampel/responden tidak digunakan sebagai patokan validitas.

Syarat responden yang valid dalam ANP adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Oleh karena itu, responden yang dipilih dalam survei ini adalah para pakar kerukunan beragama, dan pengurus FKUB daerah. Adapun para responden dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1. Responden Pakar

No	Nama	Kepakaran
1	KH. Iyep Nashiruddin Tho'at	Sekretaris FKUB Kota Cimahi (8 tahun), Ketua MUI Cimahi, Pengurus PP Muhammadiyah Cimahi
2	Ubaidillah Hidayat	Sekretaris FKUB Kota Bandung (8 tahun), Pengurus PCNU Bandung, Pengurus PP Daaruttaubah Bandung
3	H. Ade Syarmili	Sekretaris FKUB Kota Bogor (8 tahun), Ketua DMI Bogor
4	H. Asep Bariah, M.Pd	Pengurus FKUB Kota Tasikmalaya (8 tahun), Pengurus NU Tasikmalaya, Kandidat Doktor UIN Bandung
5	KH M. Sukarta	Ketua FKUB Kab Bogor, Pengurus MUI Kab Bogor

Pertanyaan dalam kuesioner ANP berupa *pairwise comparison* (pembandingan pasangan) antar elemen dalam cluster untuk mengetahui mana diantara keduanya yang lebih besar pengaruhnya (lebih dominan) dan seberapa besar perbedaannya dilihat dari satu sisi. Skala numerik 1-9 yang

digunakan merupakan terjemahan dari penilaian verbal dari para *expert* (pakar).

Pengisian kuesioner oleh responden harus didampingi peneliti untuk menjaga konsistensi dari jawaban yang diberikan. Pada umumnya, pertanyaan pada kuesioner ANP sangat banyak jumlahnya. Sehingga faktor-faktor non teknis dapat menyebabkan tingginya tingkat inkonsistensi.

Data yang didapatkan dari penelitian akan dianalisa dengan metode ANP yang merupakan metode yang dapat digunakan dalam berbagai studi kualitatif yang beragam, seperti pengambilan keputusan, *forecasting*, evaluasi, *mapping*, *strategizing*, alokasi sumber daya, dan lain sebagainya.

Penelitian ini merupakan penelitian analisis kualitatif-kuantitatif dimana bertujuan untuk menangkap suatu nilai atau pandangan yang diwakili para pakar dan praktisi tentang masalah pengembangan FKUB di Jawa Barat. Alat analisis yang digunakan adalah metode ANP dan diolah dengan menggunakan software "*Super Decision*".

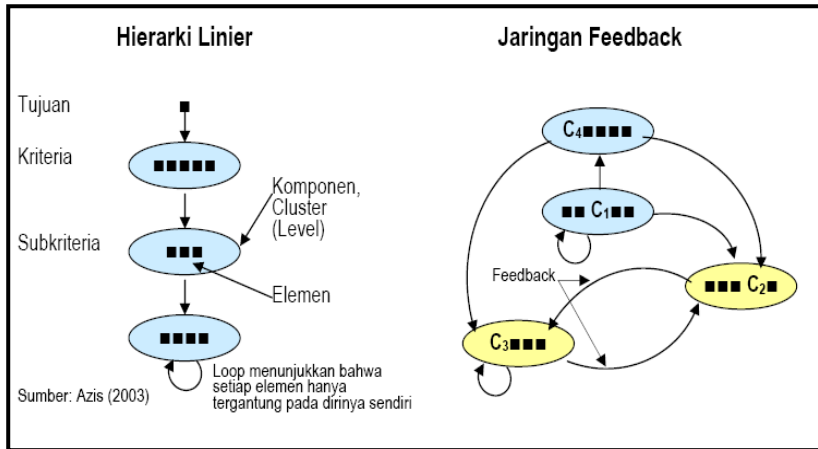
Metode ANP

Analytic Network Process atau ANP merupakan pendekatan baru metode kualitatif. Diperkenalkan Profesor Thomas Saaty pakar riset dari Pittsburgh University, dimaksudkan untuk "menggantikan" metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)*. Kelebihan ANP dari metodologi yang lain adalah kemampuannya melakukan pengukuran dan sintesis sejumlah faktor-faktor dalam hierarki atau jaringan. Tidak ada metodologi lain yang mempunyai fasilitas sintesis seperti metodologi ANP.

Menurut Saaty (2001) ANP digunakan untuk menurunkan rasio prioritas komposit dari skala rasio individu yang mencerminkan pengukuran relatif dari pengaruh elemen-elemen yang saling berinteraksi berkenaan dengan kriteria kontrol. ANP merupakan teori matematika yang memungkinkan seseorang untuk memperlakukan *dependence* dan *feedback* secara sistematis yang dapat menangkap dan mengkombinasi faktor-faktor *tangible* dan *intangible*.

ANP merupakan pendekatan baru dalam proses pengambilan keputusan yang memberikan kerangka kerja umum dalam memperlakukan keputusan-keputusan tanpa membuat asumsi-asumsi tentang independensi elemen-elemen pada level yang lebih tinggi dari elemen-elemen pada level yang lebih rendah dan tentang independensi elemen-elemen dalam suatu level. Berbeda dengan *Analytic Hierarchy Process* (AHP), ANP dapat menggunakan jaringan tanpa harus menetapkan level seperti pada hierarki yang digunakan dalam AHP. Konsep utama dalam ANP adalah *influence* ‘pengaruh’, sementara konsep utama dalam AHP adalah *preference* ‘preferensi’. AHP dengan asumsi-asumsi dependensinya tentang *cluster* dan elemen merupakan kasus khusus dari ANP. (Ascarya, 2005)

Pada jaringan AHP terdapat level tujuan, kriteria, subkriteria, dan alternatif, dimana masing-masing level memiliki elemen. Sementara itu, pada jaringan ANP, level dalam AHP disebut cluster yang dapat memiliki kriteria dan alternatif di dalamnya, yang sekarang disebut simpul (baca gambar 3.1).



Sumber: Ascarya (2005)

Gambar 3.1. Perbandingan Hierarki Linier dan Jaringan Feedback

Dengan *feedback*, alternatif-alternatif dapat bergantung/terikat pada kriteria seperti pada hierarki tetapi dapat juga bergantung/terikat pada sesama alternatif. Lebih jauh lagi, kriteria-kriteria itu sendiri dapat tergantung pada alternatif-alternatif dan pada sesama kriteria. Sementara itu, *feedback* meningkatkan prioritas yang diturunkan dari *judgements* dan membuat prediksi menjadi lebih akurat. Oleh karena itu, hasil dari ANP diperkirakan akan lebih stabil. Dari jaringan *feedback* pada gambar 3.1 dapat dilihat bahwa simpul atau elemen utama dan simpul-simpul yang akan dibandingkan dapat berada pada *cluster-cluster* yang berbeda. Sebagai contoh, ada hubungan langsung dari simpul utama C4 ke cluster lain (C2 dan C3), yang merupakan *outer dependence*. Sementara itu, ada simpul utama dan simpul-simpul yang akan dibandingkan berada pada cluster yang sama, sehingga cluster ini terhubung dengan dirinya sendiri

dan membentuk hubungan *loop*. Hal ini disebut *inner dependence*.

Dalam suatu jaringan, elemen dalam suatu komponen/*cluster* bisa saja berupa orang dan elemen dalam komponen/*cluster* yang lain bisa saja juga berupa orang. Elemen dalam suatu komponen/*cluster* dapat mempengaruhi elemen lain dalam komponen/*cluster* yang sama (*inner dependence*), dan dapat pula mempengaruhi elemen pada *cluster* yang lain (*outer dependence*) dengan memperhatikan setiap kriteria. Yang diinginkan dalam ANP adalah mengetahui keseluruhan pengaruh dari semua elemen. Oleh karena itu, semua kriteria harus diatur dan dibuat prioritas dalam suatu kerangka kerja hierarki kontrol atau jaringan, melakukan perbandingan dan sintesis untuk mendapat urutan prioritas dari sekumpulan kriteria ini. Kemudian kita turunkan pengaruh dari elemen dalam *feedback* dengan memperhatikan masing-masing kriteria. Akhirnya, hasil dari pengaruh ini dibobot dengan tingkat kepentingan dari kriteria, dan ditambahkan untuk memperoleh pengaruh keseluruhan dari tiap elemen (Ascarya, 2005)

Landasan ANP

ANP memiliki empat aksioma yang menjadi landasan teori, antara lain⁵³:

1. Resiprokal; aksioma ini menyatakan bahwa jika PC (EA,EB) adalah nilai perbandingan pasangan dari elemen A dan B, dilihat dari elemen induknya C, yang

53 Saaty, Thomas L and Vargas, Louis G. 2006, Decision Making with the Analitic Network Process. Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks. Springer. RWS Publication, Pittsburgh.

menunjukkan berapa kali lebih banyak elemen A memiliki apa yang dimiliki elemen B, maka $PC(EB,EA) = 1/P_c(EA,EB)$. Misalkan, jika A lima kali lebih besar dari B, maka B besarnya 1/5 dari besar A.

2. Homogenitas; menyatakan bahwa elemen-elemen yang dibandingkan dalam struktur kerangka ANP sebaiknya tidak memiliki perbedaan terlalu besar, yang dapat menyebabkan lebih besarnya kesalahan dalam menentukan penilaian elemen pendukung yang mempengaruhi keputusan.

Tabel 3.2 Definisi Skala Penilaian dan Skala Numerik

Definition	Intensity of Importance
Equal Importance	1
Weak	2
Moderate importance	3
Moderate plus	4
Strong importance	5
Strong Plus	6
Very strong or demonstrated importance	7
Very,very strong	8
Extreme importance	9

Sumber : Saaty, 2006

3. Prioritas; yaitu pembobotan secara absolut dengan menggunakan skala interval [0.1] dan sebagai ukuran dominasi relatif.

4. *Dependence condition*; diasumsikan bahwa susunan dapat dikomposisikan ke dalam komponen-komponen yang membentuk bagian berupa cluster.

Fungsi Utama ANP

Metodologi ANP memiliki tiga fungsi utama sebagai berikut :

1. Melakukan strukturisasi pada kompleksitas

Dalam penelitiannya, Saaty menemukan adanya pola-pola yang sama dalam sejumlah contoh tentang bagaimana manusia memecahkan sebuah kompleksitas dari masa ke masa. Dimana kompleksitas distruktur secara hierarkis ke dalam cluster-cluster yang homogen dari faktor-faktor.

2. Pengukuran ke dalam skala rasio.

Metodologi pengambilan keputusan yang terdahulu pada umumnya menggunakan pengukuran level rendah (pengukuran ordinal atau interval), sedangkan metodologi ANP menggunakan pengukuran skala rasio yang diyakini paling akurat dalam mengukur faktor-faktor yang membentuk hierarki. Level pengukuran dari terendah ke tertinggi adalah nominal, ordinal, interval, dan rasio. Setiap level pengukuran memiliki semua arti yang dimiliki level yang lebih rendah dengan tambahan arti yang baru. Pengukuran interval tidak memiliki arti rasio, namun memiliki arti interval, ordinal, dan nominal. Pengukuran rasio diperlukan untuk mencerminkan proporsi. Untuk menjaga kesederhanaan metodologi, Saaty mengusulkan penggunaan penilaian rasio dari setiap pasang faktor dalam hierarki untuk mendapatkan (tidak secara

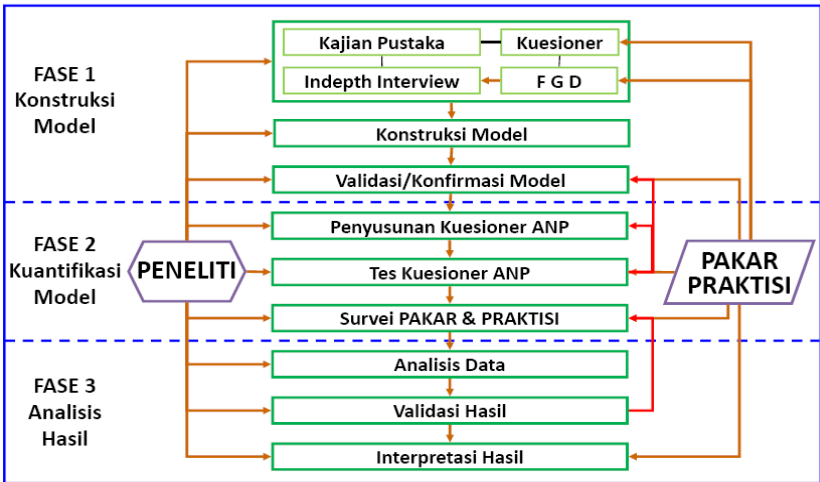
langsung memberikan nilai) pengukuran skala rasio. Setiap metodologi dengan struktur hierarki harus menggunakan prioritas skala rasio untuk elemen diatas level terendah dari hierarki. Hal ini penting karena prioritas (atau bobot) dari elemen di level manapun dari hierarki ditentukan dengan mengalikan prioritas dari elemen pada level dengan prioritas dari elemen induknya. Karena hasil perkalian dari dua pengukuran level interval secara matematis tidak memiliki arti, skala rasio diperlukan untuk perkalian ini. AHP/ANP menggunakan skala rasio pada semua level terendah dari hierarki/jaringan, termasuk level terendah (alternatif dalam model pilihan). Skala rasio ini menjadi semakin penting jika prioritas tidak hanya digunakan untuk aplikasi pilihan, namun untuk aplikasi-aplikasi lain, seperti untuk aplikasi alokasi sumber daya.

3. Sintesis.

Sintesis merupakan kebalikan dari analisis. Kalau analisis berarti mengurai entitas material atau abstrak ke dalam elemen-elemennya, maka sintesis berarti menyatukan semua bagian menjadi satu kesatuan. Karena kompleksitas, situasi keputusan penting, atau prakiraan, atau alokasi sumber daya, sering melibatkan terlalu banyak dimensi bagi manusia untuk dapat melakukan sintesis secara intuitif, kita memerlukan suatu cara untuk melakukan sintesis dari banyak dimensi. Meskipun ANP memfasilitasi analisis, fungsi yang lebih penting lagi dalam ANP adalah kemampuannya untuk membantu kita dalam melakukan pengukuran dan sintesis sejumlah faktor-faktor dalam hierarki atau jaringan.

3.3. Tahapan Penelitian

Tahapan pada metode ANP antara lain:



Sumber: (Ascarya, 2010)

Gambar 3.2 Tahapan Penelitian

a. Konstruksi Model

Konstruksi model ANP disusun berdasarkan *literature review* secara teori maupun empiris dan memberikan pertanyaan pada pakar dan praktisi FKUB serta melalui *indepth interview* untuk mengkaji informasi secara lebih dalam untuk memperoleh permasalahan yang sebenarnya.

b. Kuantifikasi Model

Tahap kuantifikasi model menggunakan pertanyaan dalam kuesioner ANP berupa *pairwise comparison* (perbandingan pasangan) antar elemen dalam cluster untuk mengetahui mana diantara keduanya yang lebih besar pengaruhnya

(lebih dominan) dan seberapa besar perbedaannya melalui skala numerik 1-9. Data hasil penilaian kemudian dikumpulkan dan diinput melalui software super decision untuk diproses sehingga menghasilkan output berbentuk prioritas dan supermatriks. Hasil dari setiap responden akan diinput pada jaringan ANP tersendiri⁵⁴.

c. Sintesis dan Analisis

1. Geometric Mean

Untuk mengetahui hasil penilaian individu dari para responden dan menentukan hasil pendapat pada satu kelompok dilakukan penilaian dengan menghitung *geometric mean*⁵⁵. Pertanyaan berupa perbandingan (*Pairwise comparison*) dari responden akan dikombinasikan sehingga membentuk suatu konsensus. Geometric mean merupakan jenis penghitungan rata-rata yang menunjukkan tendensi atau nilai tertentu dimana memiliki formula sebagai berikut⁵⁶:

$$(\prod_i^n = 1 a_i)^{1/n} = \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \quad (3.1)$$

2. Rater Agreement

Rater agreement adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian (persetujuan) para responden (R1-Rn) terhadap suatu masalah dalam satu cluster. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur *rater agreement*

54 Ascarya, 2011, "The Persistence of Low Profit and Loss Sharing Financing in Islamic Banking: The Case of Indonesia" review of Indonesian economic and business studies vol.1 LIPI economic research center.

55 Saaty, Thomas L and Vargas, Louis G. 2006, *Decision Making with the Analitic Network Process. Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks*. Springer. RWS Publication, Pittsburgh.

56 Ascarya, 2011, idem

adalah *Kendall's Coefficient of Concordance* ($W; 0 < W \leq 1$). $W=1$ menunjukkan kesesuaian yang sempurna⁵⁷.

Untuk menghitung Kendall's (W), yang pertama adalah dengan memberikan ranking pada setiap jawaban kemudian menjumlahkannya.

$$R_i = \sum_j^m = 1r_{i,j} \quad (3.2)$$

Nilai rata-rata dari total ranking adalah:

$$R = \frac{1}{2} m(n + 1) \quad (3.3)$$

Jumlah kuadrat deviasi (S), dihitung dengan formula:

$$S = \sum_i^n 1(R_i - \bar{R})^2 \quad (3.4)$$

Sehingga diperoleh Kendall's W , yaitu:

$$W = \frac{12S}{m^2(n^3 - n)} \quad (3.5)$$

Jika nilai pengujian W sebesar 1 ($W=1$), dapat disimpulkan bahwa penilaian atau pendapat dari para responden memiliki kesesuaian yang sempurna. Sedangkan ketika nilai W sebesar 0 atau semakin mendekati 0, maka menunjukkan adanya ketidaksesuaian antar jawaban responden atau jawaban bervariasi⁵⁸.

Hasil Dan Analisis Dekomposisi

Permasalahan dalam hal pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jawa Barat dapat dibagi menjadi 2 aspek utama: Internal dan Eksternal. Aspek internal dibagi menjadi 6 aspek yang terdiri dari: aspek

⁵⁷ Idem

⁵⁸ Ascarya, 2011, Idem

sumber daya manusia (SDM), Sistem, Kelembagaan, Relasional, Kultural dan aspek Teknis. Sementara itu aspek eksternal dibagi menjadi 6 aspek yang terdiri dari: aspek Komunal, Regulasi, Sistem, Sosiopolitik, Pemerintah dan aspek Relasional. Aspek secara keseluruhan dikelompokkan menjadi cluster problem, baik internal maupun eksternal.

Untuk aspek internal, berikut ini dijelaskan secara terperinci masalah-masalah yang telah didekomposisi, hasil *depth interview* dengan para responden pakar.

a. Problem Sumber Daya Manusia (SDM)

- 1) Sebagian anggota FKUB ditengarai masih berwawasan sempit (kurangnya wawasan kebangsaan-multikultur),
- 2) Sebagian anggota masih merangkap jabatan sebagai aktivis politik/parpol, Pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara memerlukan keahlian tertentu yang belum tentu dimiliki para pemuka agama di FKUB
- 3) Pemahaman yang lemah mengenai konflik, manajemen dan penanganan konflik para pengurus FKUB,
- 4) Relatif lemahnya sumber daya lembaga FKUB,
- 5) Kurangnya inovasi dan kreativitas pengurus dalam pengelolaan lembaga (misal dengan melakukan MoU dengan pihak lain),
- 6) Rendahnya kesiapan pengurus dalam melayani umat.

b. Problem Sistem

- 1) Tidak adanya sistem kaderisasi pengurus,
- 2) Tidak ada sistem kontrol terhadap jalannya FKUB,
- 3) Mekanisme rekrutmen pengurus apa adanya,
- 4) Belum adanya metode evaluasi kinerja FKUB (termasuk kepuasan masyarakat terhadap FKUB),

- 5) Belum adanya aturan baku dalam hal pelaporan kinerja periodik, baik mekanisme maupun secara substansi.

c. Problem Kelembagaan/Struktural

- 1) Minimnya pendanaan untuk operasional lembaga,
- 2) Relatif lemahnya kapasitas lembaga dan efisiensi kinerja FKUB,
- 3) Posisi dewan penasihat yang adalah Wagub/Wabup menjadikan FKUB sering dianggap tidak mandiri secara organisasi (supra/infra struktur pemerintah),
- 4) Dewan penasihat belum optimal peranannya,
- 5) Fungsi pemberdayaan FKUB belum optimal dan belum jelas ruang lingkupnya,
- 6) Dominannya unsur PNS/pemerintah dalam struktur pengurus FKUB,
- 7) Output/hasil berupa rekomendasi pendirian rumah ibadah masih relatif rendah (54%).

d. Problem Relasional

- 1) Lemahnya koordinasi antara FKUB dengan pihak terkait, misal Badan Kesbangpol-Linmas,
- 2) Secara struktur, antara FKUB di tingkat Kab/Kota dengan FKUB Provinsi memang tidak memiliki garis koordinasi yang tegas,
- 3) Kurang harmonisnya relasi antara Pemda dengan pengurus FKUB karena misal problem interest politik,
- 4) Lemahnya relasi dengan majelis agama sehingga sebagian anggota FKUB ditempati oleh orang yang bukan pemuka agama seperti pejabat pemerintahan,

- 5) Minimnya intensitas dialog, penampungan, penyaluran aspirasi serta sosialisasi peraturan oleh FKUB dengan masyarakat/umat.

e. Problem Kultural

- 1) Adanya perbedaan pandangan sesama pengurus sehingga kinerja FKUB menjadi tidak maksimal,
- 2) Potensi *distrust* antarpengurus,
- 3) Dominasi laki-laki dalam kepengurusan (bias gender),
- 4) Penyalahgunaan FKUB oleh sebagian pengurus dengan maksud untuk mempermudah/mempersulit izin pendirian rumah ibadat.

f. Problem Teknis

- 1) FKUB tidak memiliki tenaga kesekretariatan,
- 2) Tidak ada *job description* yang jelas untuk masing-masing pengurus,
- 3) Masih adanya FKUB yang belum memiliki visi-misi (39%),
- 4) Pengurus FKUB yang bekerja *part-time*,
- 5) Kemudahan mendapatkan informasi tentang FKUB relatif rendah.

Sementara itu untuk aspek eksternal, berikut ini dijelaskan secara terperinci masalah-masalah yang telah didekomposisi, berdasarkan hasil *depth interview* dengan para responden pakar.

a. Problem Komunal

- 1) Sebagian kelompok masyarakat belum memahami secara utuh isi PBM,
- 2) Atensi masyarakat rendah. Terbukti dengan sedikitnya **masyarakat** yang **mengadukan** masalahnya kepada FKUB,
- 3) Anggapan sinis bahwa FKUB adalah berarti **“birokratisasi kerukunan”**,
- 4) Sikap curiga & prasangka yang buruk terkait pendirian rumah ibadat baru dari sebagian masyarakat (dinamika kultural),
- 5) **Rendahnya citra positif** FKUB di masyarakat,
- 6) Mispersepsi masyarakat terhadap FKUB. Umpamanya, penciutan pandangan yang mengesankan seolah-olah tugas FKUB adalah hanya memberikan rekomendasi bagi pendirian rumah ibadat. Juga kecenderungan melemparkan semua persoalan/beban kerukunan umat beragama kepada FKUB,
- 7) **Kurangnya mediator dan inisiator** yang dapat diterima semua pihak dalam menyelesaikan masalah-masalah kerukunan umat beragama.

b. Problem Regulasi

- 1) Terdapat kelemahan dalam PBM yakni tidak adanya **ancaman sanksi** bagi para pelanggarnya,
- 2) **Peraturan gubernur** yang disusun masih kurang mengakomodir kepentingan FKUB,
- 3) Keterlambatan penerbitan peraturan oleh kepala daerah sehingga masih banyak kab/kota yang **belum memiliki FKUB**, yakni 16,25% (83 kab/kota),
- 4) Sebagian **pasal** PBM yang masih **multiinterpretatif** dan rentan penyalahgunaan (pasal 14 ayat 3 kata

memfasilitasi; pasal 14 ayat 2 huruf b; tentang rekomendasi siapa yang lebih dulu antara kemenag & FKUB),

- 5) Status hukum PBM dianggap kurang memiliki kekuatan seperti Perpres atau UU.

c. Problem Sistem

- 1) **Kurangnya sosialisasi PBM**, baik berupa pertemuan nasional, diklat, diskusi maupun buku saku, khususnya terkait pendirian rumah ibadat,
- 2) **Masa kerja pengurus FKUB** belum pasti,
- 3) **Lemahnya transparansi keuangan FKUB** oleh sekretariat KesbangLinmas,
- 4) Belum ada FKUB di tingkat nasional sebagai *crisis center* atau lembaga mediasi pusat untuk menangani kasus-kasus konflik agama,
- 5) Belum adanya pendidikan toleransi yang tersistem di semua level,
- 6) Belum adanya mapping wilayah potensi konflik agama.

d. Problem Sosiopolitik

- 1) Peristiwa **politik lokal/pilkada** yang mengganggu,
- 2) FKUB sebagai **tunggangan/kendaraan politik**,
- 3) Beberapa daerah memiliki **potensi konflik yang tinggi** sehingga masalah yang dihadapi FKUB di daerah tersebut semakin kompleks,
- 4) **Problematika** bernuansa **agama semakin kompleks**, bahkan disertai kekerasan, baik antarpemeluk maupun intern pemeluk agama,

- 5) **Adanya forum yang sama** (nomenklatur dan fungsinya) namun kontraproduktif untuk perkembangan FKUB (baca: dualisme organisasi FKUB),
- 6) Adanya isu-isu pada tingkat lokal, nasional, regional dan global tentang kehidupan keagamaan di Indonesia.

e. Problem Pemerintah

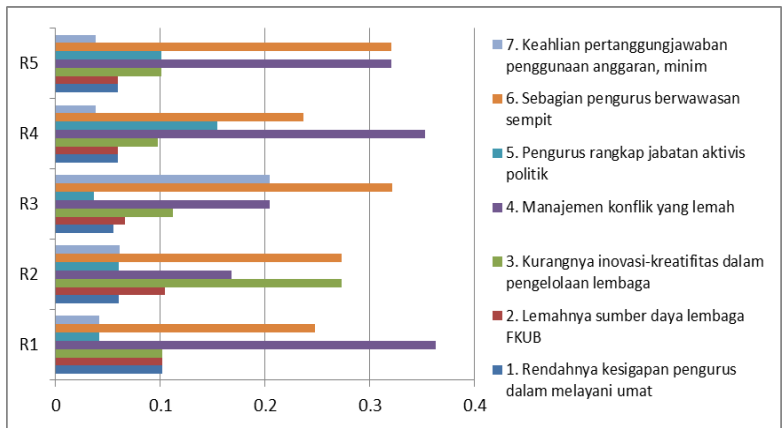
- 1) Perhatian (atensi) pemerintah masih sangat kurang,
- 2) Kurang tanggapnya pemerintah khususnya level pejabat teknis terhadap kepentingan FKUB,
- 3) Dari sisi dukungan kelembagaan & infrastruktur, meski FKUB sering diposisikan sebagai “polisi kerukunan” yang amat dibutuhkan, namun ia kurang diperhatikan oleh Pemda dan DPRD,
- 4) Posisi FKUB yang tidak jelas dalam struktur pemerintahan.

f. Problem Relasional

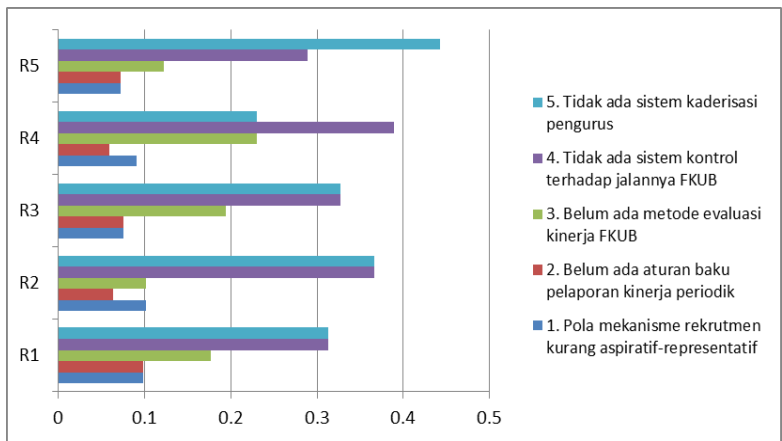
- 1) Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait (Kepolisian, pengadilan, dinas tata kota, dan lain-lain), 2.)
- 2) Masih sedikitnya kerjasama FKUB dengan LSM dalam bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, 3.)
- 3) Tokoh adat belum didayagunakan secara maksimal oleh FKUB, 4.)
- 4) Merosotnya solidaritas kebangsaan dilihat dari segi toleransi beragama.

4.2. Hasil Penelitian

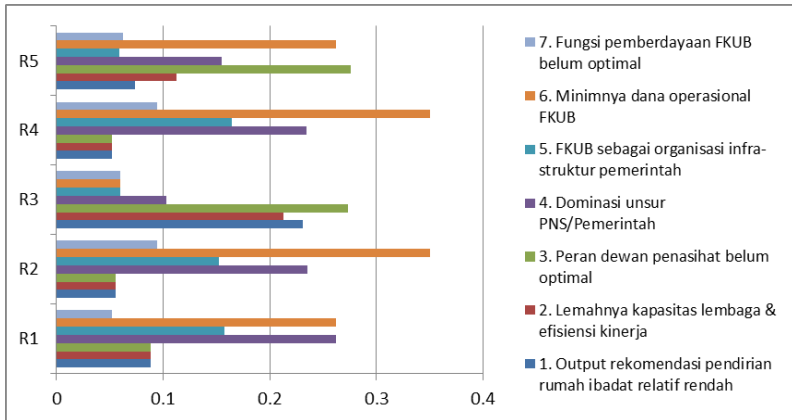
Berikut ini adalah hasil penghitungan bobot dari masing-masing masalah dalam setiap cluster pada sisi internal.



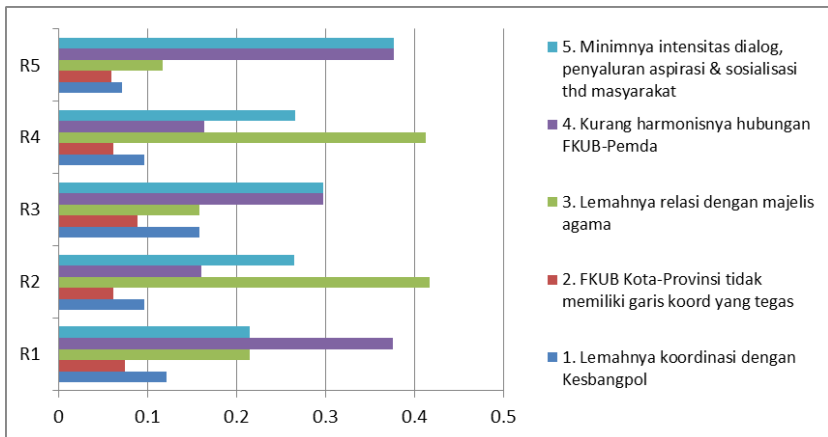
Gambar 3.3 ANP 1



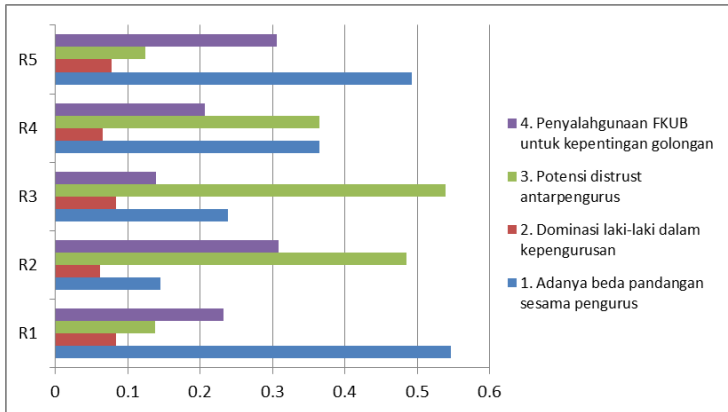
Gambar 3.4. ANP 2



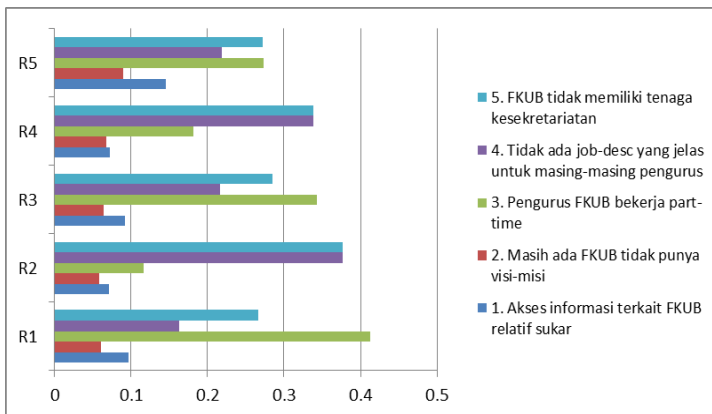
Gambar 3.5 ANP 3



Gambar 3.6. ANP 4



Gambar 3.7. ANP 5

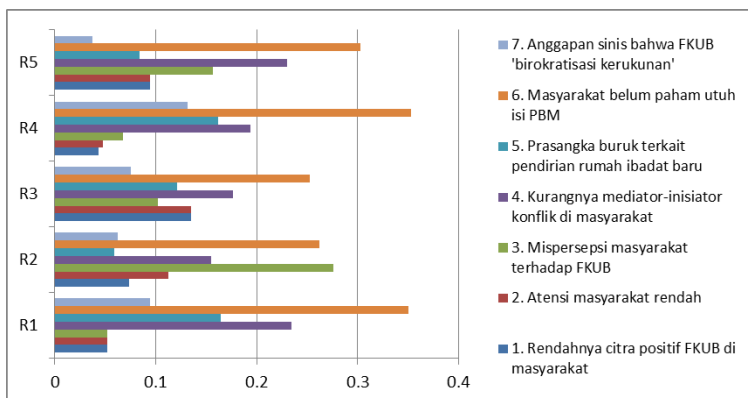


Gambar 3.8. ANP 6

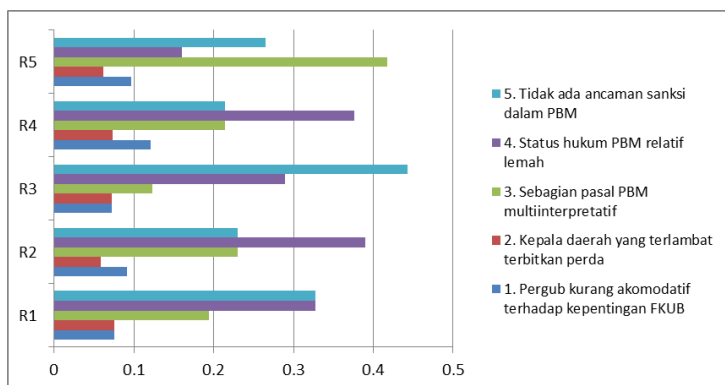
Dalam masalah INTERNAL, hal-hal penting menurut responden pakar (pengurus FKUB) yang perlu diperhatikan adalah: ‘

- Manajemen konflik yang lemah (SDM),
- Tidak adanya sistem kontrol atas jalannya FKUB (Sistem),

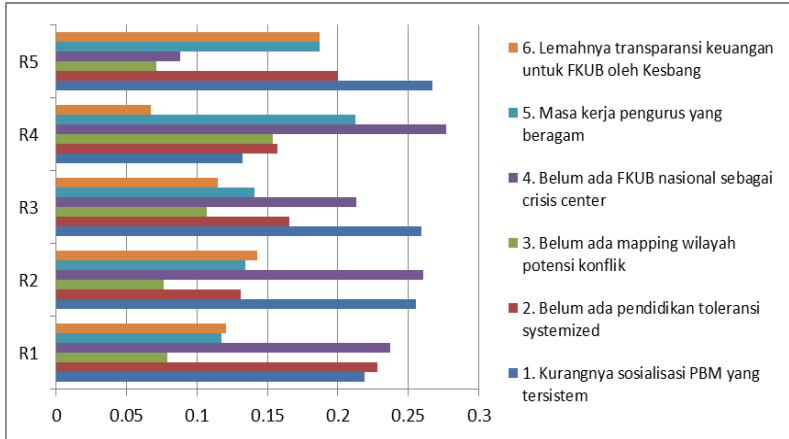
- c. Minimnya dana operasional (Kelembagaan),
- d. Minimnya intensitas dialog/penyaluran aspirasi/sosialisasi terhadap masyarakat (Relasional),
- e. Adanya perbedaan pandangan sesama pengurus (Kultural), dan
- f. FKUB tidak memiliki tenaga kesekretariatan (Teknis).



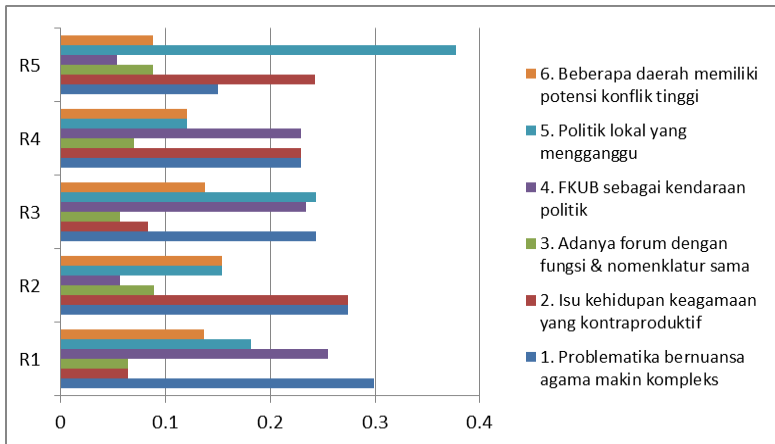
Gambar 3.9. ANP 7



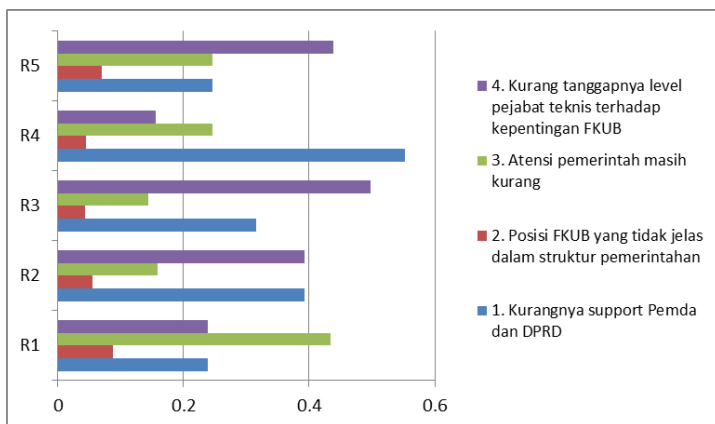
Gambar 4.0 ANP 8



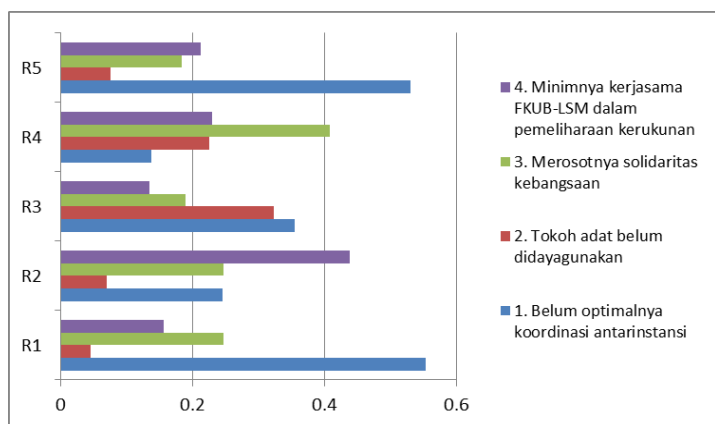
Gambar 4.1. ANP 9



Gambar 4.2. ANP 10



Gambar 4.3. ANP 11



Gambar 4.4. ANP 12

Sementara itu dalam masalah eksternal, hal-hal penting yang perlu diperhatikan menurut responden pakar (pengurus FKUB) adalah:

- a. Masyarakat belum memahami utuh isi PBM (Komunal),

- b. Status hukum PBM relatif lemah (Regulasi),
- c. Kurangnya sosialisasi PBM yang tersistem (Sistem),
- d. Problematika bernuansa agama semakin kompleks (Sosiopolitik),
- e. Kurangnya support Pemda dan DPRD (Pemerintah), dan
- f. Belum optimalnya koordinasi antarinstansi (Relasional).

Masing-masing masalah di atas merupakan masalah utama dari masing-masing cluster baik internal maupun eksternal. Adapun masalah lain dengan bobot lebih rendah di bawahnya merupakan prioritas selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh pihak yang berkepentingan.

Masalah dengan bobot terpenting merupakan prioritas utama yang harus menjadi agenda jangka pendek. Sementara itu masalah dengan bobot lebih rendah dapat diselesaikan selanjutnya.

Simpulan

Dalam riset terkait pengembangan FKUB di Jawa Barat ini, berdasarkan hasil depth interview, masalah internal relatif lebih penting dibandingkan dengan masalah eksternal. Masalah internal dibagi ke dalam 6 cluster utama yaitu: cluster Sumber Daya Manusia, Sistem, Struktural/ Kelembagaan, Relasional, Kultural dan cluster Teknis. Sementara masalah eksternal dibagi ke dalam 6 cluster yang berbeda, yakni: cluster Komunal, Regulasi, Sistem, Sosiopolitik, Pemerintah dan cluster Relasional.

Dalam masalah internal, hal-hal penting menurut responden pakar (pengurus FKUB) yang perlu diperhatikan

adalah: Manajemen konflik yang lemah (SDM), Tidak adanya sistem kontrol terhadap jalannya FKUB (Sistem), Minimnya dana operasional (Kelembagaan), Minimnya intensitas dialog/penyaluran aspirasi/sosialisasi terhadap masyarakat (Relasional), Adanya perbedaan pandangan sesama pengurus (Kultural), dan FKUB tidak memiliki tenaga kesekretariatan (Teknis).

Sementara itu dalam masalah EKSTERNAL, hal-hal penting menurut responden pakar (pengurus FKUB) yang perlu diperhatikan adalah: Masyarakat belum memahami utuh isi PBM (Komunal), Status hukum PBM relatif lemah (Regulasi), Kurangnya sosialisasi PBM yang tersistem (Sistem), Problematika bernuansa agama semakin kompleks (Sosiopolitik), Kurangnya support Pemda dan DPRD (Pemerintah), dan Belum optimalnya koordinasi antarinstansi (Relasional).

Rekomendasi

Adapun beberapa rekomendasi penting kaitannya dengan masalah Internal FKUB yang perlu diperhatikan oleh pihak terkait (termasuk Kemenag) adalah:

- a. Perlunya pelatihan-pelatihan Manajemen dan penanganan konflik kepada para pengurus FKUB (SDM),
- b. Perlunya sistem kontrol terhadap jalannya FKUB (Sistem),
- c. Penguatan lembaga FKUB melalui penambahan dana operasional (Kelembagaan),

- d. Peningkatan intensitas dialog/penyaluran aspirasi/sosialisasi terhadap masyarakat (Relasional),
- e. Pentingnya sikap toleransi dan sikap saling menghormati atas perbedaan pandangan sesama pengurus (Kultural), dan
- f. FKUB perlu memiliki tenaga kesekretariatan (Teknis).

Sementara itu, beberapa rekomendasi penting kaitannya dengan masalah *eksternal* FKUB yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Mengoptimalkan dan mengefektifkan sosialisasi kepada aparaturnya sampai kelurahan/desa, sekolah, dan komunitas-komunitas masyarakat/agama/adat dengan dukungan dana dari pemerintah pusat dan daerah (Komunal & Sistem),
- b. Meningkatkan status hukum PBM No: 9 dan 8 tahun 2006 menjadi Perpres atau Undang-Undang (Regulasi),
- c. Mensosialisasi kerukunan oleh FKUB pusat untuk klarifikasi berbagai berita yang kurang tepat, serta Memperkuat peran media dan jurnalisisme damai melalui kerjasama humas Kementerian Agama dengan media (Sosiopolitik),
- d. Perlunya support Pemda dan DPRD yang lebih terhadap kebutuhan FKUB (Pemerintah), dan
- e. Optimalisasi koordinasi aparaturnya negara (Kepolisian, pengadilan, dinas tata kota, dan lain-lain) (Relasional).

Daftar Pustaka

- Abduh, Sjuhada dan Ibnu Hasan Mukhtar. 2010. *Peranan FKUB dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 di Provinsi Kalimantan Barat*. Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag RI.
- Ahmad, Haidlor Ali. 2010. *Peranan FKUB dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 di Provinsi Sulawesi Tengah*. Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag RI.
- Ascarya, 2005, *Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia.
- Asry M. Yusuf dan Reza Perwira. 2010. *Peranan FKUB dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 di Provinsi Sumatera Utara*. Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag RI.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. 2008. *Buku Tanya Jawab Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat*.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. 2014. *Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia 2013*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.

- Basyuni, Muhammad Maftuh. 2013. *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006*. Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag RI.
- Focus Group Discussion (FGD) tentang Peta Masalah Pelayanan Negara Terhadap Umat Beragama. Diselenggarakan oleh Puslitbang Kementerian Agama RI pada Sabtu, 20 Sep 2014 di Auditorium HM Rasyidi, Gedung Kemenag Thamrin, Jakarta.
- Khalikin, Ahsanul. 2010. *Peranan FKUB dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 di Jakarta Pusat*. Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag RI.
- Kustini. 2010. *Peranan FKUB dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 di Jakarta Timur*. Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag RI.
- Kustini. 2010. "Optimalisasi Peran FKUB DKI Jakarta menuju Kehidupan yang Harmoni" *Jurnal Harmoni Puslitbang Kemenag* ed Januari - Maret 2010.
- Kustini (ed). 2009. *Efektivitas Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah*. Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag RI.
- Mudzhar, Atho. 2013. *Merayakan Kebhinnekaan Membangun Kerukunan*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat
- Mufid, Ahmad Syafii. 2010. *Kompetensi Pimpinan dan Anggota FKUB Menuju Jakarta Damai*, point-point presentasi

disajikan pada Orientasi Visi dan Misi MUI Provinsi DKI Jakarta bulan Januari 2010 di Jakarta.

Nuh, Nuhriison M. dan Akmal Salim Ruhana. 2010. *Peranan FKUB dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 di Provinsi Jawa Timur*. Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag RI.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat*.

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbang Diklat Kementerian Agama RI. 2013. *Modul Penguatan Kapasitas FKUB tentang Konstitusi & Mediasi Konflik*. Jakarta: Puslitbang Kemenag RI.

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbang Diklat Kementerian Agama RI. 2014. *Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*. Mimeo.

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbang Diklat Kementerian Agama RI. 2014a. *Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia 2013*. Jakarta: Puslitbang Kemenag RI.

Ruhana, Akmal Salim. 2009. "FKUB sebagai Forum Kerjasama Antarumat Beragama". *Jurnal Harmoni* Vol. VIII No. 30 April-Juni 2009.

Rusydiana, Aam Slamet. 2014. *"Customer Satisfaction Index (CSI) dan Importance Performance Analysis (IPA) pada*

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jawa Barat". Mimeo.

Rusydiana, Aam Slamet & Abrista Devi. 2013. "Challenges in Developing Baitul Maal wat Tamwiil (BMT) in Indonesia Using Analytic Network Process (ANP)". *Business and Management Quarterly Review* 4(2), 51-62 (2013).

Saaty, Thomas L and Vargas, Louis G. 2006, *Decision Making with the Analitic Network Process. Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks*. Springer. RWS Publication, Pittsburgh.

Suhanah. 2010. *Peranan FKUB dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 di Provinsi Bali*. Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag RI.

REKONSTRUKSI SPIRIT HARMONI BERBASIS MASJID (Studi Kasus KPM Tematik Posdaya di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)

Dr. Mukhibat

Abstrak

Fenomena sosial dengan berbagai isu problematik seperti, pendidikan dan paham agama, sosial, ekonomi, kesehatan, telah memperlihatkan dampak global dalam berbagai lini kehidupan. Dengan mencermati isu-isu tersebut Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Ponorogo telah merevitalisasi program pengabdian masyarakatnya dalam bentuk Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Tematik Posdaya berbasis Masjid. KPM tematik Posdaya berbasis Masjid di STAIN Ponorogo menggunakan pendekatan PAR (Participatory Action Research) dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) mapping, menggambarkan keadaan wilayah secara umum dan secara khusus terkait dengan peta sosial keagamaan, 2) transector untuk menemukan modal sosial masyarakat sebagai integrative climate dalam bentuk civic association, 3) diagram venn, identifikasi apa permasalahan masyarakat, 3) timeline, rekonstruksi peristiwa.

Kegiatan sosial kemasyarakatan yang dipusatkan dari masjid telah menyadarkan masyarakat bahwa agama yang dianutnya terdapat hikmah-hikmah (wisdom) sebagai modal dalam merangkai harmonisasi kehidupan dan kewajiban untuk menyelesaikan berbagai problematika kehidupan. Perbedaan yang ada selama ini telah menjadi energi positif bagi masyarakat dalam membina

kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan bersama. Dialog aksi telah memperkaya dialog teologis, hal ini telah terbukti dengan berfungsinya masjid dalam dimensi yang sangat luas tidak hanya fungsi ibadah dan dakwah saja tetapi juga memiliki fungsi edukasi, ekonomi, sosial, budaya, komunikasi dan informasi, dan jejaring sosial.

Keyword: KPM, harmoni, dialog aksi, masjid

Pendahuluan

Pada umumnya masyarakat muslim Indonesia berharap bahwa kehadiran PTAI dapat memenuhi dua harapan sekaligus. *Pertama*, harapan terkait dengan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan “keagamaan” Islam. Harapan ini mempunyai dasar pemikiran, motivasi dan tujuan kehadiran PTAI sebagai lembaga dakwah. *Kedua*, harapan terkait dengan eksistensinya sebagai lembaga “keilmuan”. Sebagai lembaga keilmuan ia dituntut untuk dapat memenuhi tugas-tugas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan Islam serta pengabdian masyarakat.

Kehadiran PTAI sebagai lembaga keagamaan dengan cita-cita dakwah masih sangat menarik untuk dikaji kembali. Hal ini karena dakwah saat ini sedang berhadapan dengan tantangan dunia modern. Perguruan tinggi Islam sekarang ditantang untuk mampu berperan secara optimal dalam membawa masyarakat ke era globalisasi yang ditandai dengan semakin banyaknya umat Islam berupaya menyatakan identitas keagamaan mereka secara terbuka di ruang publik. Simbol-simbol Islam hadir semakin mencolok, bahkan dalam beberapa dasawarsa terakhir, Islam malah mempertunjukkan

vitalitasnya sebagai sistem simbolik dan kolektif identitas yang mempengaruhi gerak sosial dan politik di Tanah Air.

Tren perkembangan global tersebut menurut Noorhaidi Hasan⁵⁹ akan berpengaruh terhadap format dan arah dakwah ormas, gerakan, dan lembaga pendidikan Islam di Indonesia masa kini. Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan contoh negara di mana pertarungan memperebutkan pusat medan wacana (*center of the discursive field*) berlangsung sangat intens. Berbagai macam ormas dan gerakan keagamaan dari yang bercorak radikal, militan, moderat progresif sampai liberal berupaya mengekspresikan identitas dan kepentingan masing-masing melalui aktivitas diskursif yang dinamis. Dari sinilah kemudian bahaya-bahaya redusir atas paham-paham tasamuh, persaudaraan, kerjasama, keselamatan dan rahmat menjadi semakin nyata adanya. Prinsip-prinsip sesama umat Islam adalah saudara acapkali tersingkir oleh egoisme kelompok.

Dengan demikian, trend di atas dan pluralitas masyarakat Indonesia di berbagai bidang memberikan peluang dan tantangan bagi dakwah.⁶⁰ Bagaimana dengan peran PTAI dalam merevitalisasi cita-cita dakwahnya. Dakwah dalam konteks PTAI tidak hanya dimaknai sebagai sarana produksi pengetahuan yang mempunyai fungsi penting dalam membentuk watak dan perilaku muslim, tetapi harus mendorong lahirnya individu yang berkepribadian istimewa (*tahdhib*).⁶¹ Hal ini sesuai fungsi kehadiran PTAI

59 Noorhaidi Hasan, "Dakwah, Aktivitas Diskursif dan Tantangan Globalisasi" dalam Kemenag RI, Gerakan Dakwah Islam dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), xiv.

60 Baca, Suisyanto, dkk, Islam Dakwah & Kesejahteraan Sosial, (Yogyakarta: IISEP-CIDA, Fak. Dakwah UIN Yogyakarta, 2005).

61 Muhammad Qasim Zaman, The Ulama in Contemporary Islam, (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2002), 23.

sebagai salah satu lembaga pendidikan yang mentransfer nilai dan pengetahuan (*transfer of values and knowledge*), memiliki *social function* dan sangat berperan dalam mewujudkan kehidupan yang penuh kedamaian dan harmonis bagi masyarakat.⁶²

Berdasarkan hal-hal di atas, PTAI termasuk STAIN Ponorogo telah membangun iklim kampus yang bertumpu pada tiga pilar utama, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengembangan/pengabdian masyarakat⁶³ atau yang lebih dikenal dengan Tri Darma Perguruan Tinggi. Adapun salah satu darma yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah darma pengabdian masyarakat yang dikemas dalam berbagai program salah satunya adalah KPM dalam bentuk Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) berbasis Masjid. Program ini di STAIN Ponorogo mengemban misi dakwah kultural adalah dakwah yang bersifat *button up* dengan melakukan pemberdayaan kehidupan beragama berdasarkan nilai-nilai spesifik yang dimiliki oleh masyarakat. Masjid sebagai lembaga dakwah yang memiliki tugas

62 Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang saat ini jumlahnya lebih dari 500 institusi dan tersebar di seluruh penjuru tanah air mempunyai peran yang sangat signifikan dalam rangka harmonisasi kehidupan beragama di Indonesia. Peran tersebut dapat dilihat pada; Pertama: Visi PTAI dan Departemen Agama yang mendorong terciptanya toleransi kehidupan beragama, serta kehidupan yang harmonis antar umat yang berbeda agama. Kedua, Alumni-Alumni PTAI menjadi katalisator dalam pemahaman Islam yang inklusif di tengah-tengah masyarakat. Pemahaman Islam yang inklusif, ramah, toleran dan cinta damai sangat dibutuhkan dalam membangun tatanan kehidupan beragama di Indonesia. Ketiga, kontribusi kelembagaan PTAI khususnya dalam penelitian dan pengabdian masyarakat terbukti secara aktif telah memberikan tawaran konsep dan aksi dalamantisipasi maupun penanganan konflik sosial yang terjadi di Indonesia.

63 Mudjia Rahardjo (ed), *Quo Vadis Pendidikan Islam, Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial, dan Keagamaan*, (Malang: UIN Malang Press, 2006), 75

membangun kesadaran kolektif para jamaahnya, lembaga ini tidak hanya memiliki kewajiban untuk menyampaikan pesan ilahiyah melalui khotbah (*bil-lisan*) sebagai tugas kependetaan, tetapi juga dengan tindakan (*bil-khal*) sebagai tugas kenabian.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan Kepala P3M STAIN Ponorogo,⁶⁵ KPM dalam bentuk Posdaya berbasis Masjid tahun 2014 di STAIN Ponorogo merupakan inovasi baru berdakwah. KPM tahun 2014 ini merupakan tahun ketiga dengan mengambil lokasi di Kecamatan Pulung Ponorogo.⁶⁶ Kecamatan Pulung terletak 25 km sebelah Timur Kota Ponorogo dengan jumlah penduduk 45.950 jiwa yang terdiri dari 22.978 laki-laki dan 22.972 perempuan dan terdiri dari 18 Desa.⁶⁷ luas wilayah Kecamatan pulung adalah 127,55 km 2, dengan batas-batasnya yaitu sebelah Utara adalah Kecamatan Ngebel, sebelah timur Kecamatan Pudak, sebelah Selatan Kecamatan Sooko dan Sawoo serta sebelah Barat adalah Kecamatan iman. dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Pulung semua berstatus desa.

Sebenarnya komposisi penduduk berdasarkan pemeluk agama cukup homogen artinya mayoritas beragama Islam, namun dari segi aliran keagamaan cukup beragam, yakni ada NU, Muhammadiyah, LDII, Jamaah Tabligh, MTA,

64 Dakwah dapat dilakukan dengan berbagai hal dan bidang. “Salah satunya melalui metode pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai dakwah yang dilakukan melalui tindakan di dalam kehidupan masyarakat.

65 Layyin Mahfiana, Wawancara tanggal 16 Juni 2014.

66 Tema KPM tahu akademik 2014 adalah “Memberdayakan Keluarga, Membangun Kemandirian Masyarakat dan Mengoptimalkan Fungsi Masjid Menuju Kehidupan Harmonis”. Baca Tim P3M STAIN Ponorogo, Buku Pedoman Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Posdaya, Berbasis Masjid dengan Pendekatan Participatory Action Research (PAR), (Ponorogo: STAIN Po Press, 2014), 3.

67 Data statistik Kabupaten Ponorogo Jawa Timur Tahun 2013.

Salafi. Munculnya berbagai faham keagamaan tersebut sangat berpotensi munculnya konflik yang akan mengusik keharmonisan kehidupan keagamaan di Kecamatan Pulung, yakni munculnya gesekan-gesekan yang mengarah pada disharmoni. Dugaan tersebut sangatlah beralasan kalau dikaitkan dengan sebuah desa yakni dekat dengan Desa Pulung tepatnya di Jatiningish Desa Klepu terdapat tempat ziarah umat Katolik yakni Gua Maria Fatima yang menjadi salah satu dari empat tempat ziarah keuskupan Surabaya. Munculnya isu kristenisasi pada tahun 2008-2011 telah memunculkan gesekan yang mengarah pada konflik walau dalam skala yang tidak besar, namun sempat membuat kehidupan keagamaan cukup terganggu. Kehadiran KKN STAIN Ponorogo tahun 2011 di desa itu cukup bisa meredam emosi beberapa tokoh agama pada waktu itu, yang sebelumnya bersitegang dengan pihak umat Kristen, walau beberapa program kegiatannya diberi nama bantuan kemanusiaan murni.

Belajar dari masalah di atas, Pos Pemberdayaan Masyarakat (Posdaya) berbasis masjid STAIN Ponorogo, selain merupakan tempat belajar bersama antara masyarakat, dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan potensi, pengalaman, ilmu pengetahuan, tetapi diarahkan pada pemahaman ajaran agama inklusif. Modal sosial (*social capital*) yang dimiliki oleh jamaah masjid akan disinergikan sebagai kekuatan bersama dalam membangun masyarakat yang harmoni sehingga muncul spirit keagamaan yang *rahmatat lil alamin*. Selain itu, dimungkinkan adalah perubahan materi ceramah/khutbah dari doktrin teologis menjadi doktrin pemberdayaan. Atas dasar seluruh pemikiran tersebut, model pelaksanaan KPM STAIN Ponorogo ini menggunakan

pendekatan *Participatory Action Research*. Prinsip dasar dari pendekatan ini adalah ada proses apa yang sering disebut "*learning by doing*". Seluruh perencanaan dan program Posdaya berbasis masjid dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat.

Terlepas masih adanya variasi respon-adaptasi ormas dan massa, potret *best practice* dialog antar umat beragama melalui program Posdaya tersebut sangat perlu dieksplorasi keberadaannya agar temuannya bisa dipublikasikan, dan sehingga terdapat kontribusi baru bagi pengembangan model format merangkai harmonisasi dalam membangun kerukunan antar umat beragama berbasis masjid. Sarana harmonisasi tidak mesti melalui aspek normatif, tetapi juga melalui KPM Posdaya. Contoh membangun spirit harmonisasi antar umat beragama dengan *setting* KPM Posdaya berbasis masjid masih jarang dilakukan. Oleh sebab itulah, penelitian ini sangat penting untuk memperkaya model merangkai spirit harmonisasi intern maupun antar umat beragama.

Rumusan

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mempunyai permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pendekatan dan metode KPM Tematik Posdaya berbasis masjid dalam menghidupkan modal sosial masyarakat untuk membangun spirit harmoni di Kecamatan Pulung Ponorogo? Dan Bagaimana respon-adaptasi massa agama, masyarakat terhadap program KPM Posdaya Tematik berbasis Masjid dalam merangkai idealisme harmonisasi relasi masyarakat di Kecamatan Pulung Ponorogo?

Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan pendekatan dan metode KPM Tematik Posdaya berbasis masjid dalam membentuk harmoni di Kecamatan Pulung Ponorogo. Tujuan berikutnya Menjelaskan penerimaan massa agama, ormas keagamaan dalam memanfaatkan Posdaya berbasis masjid untuk membangun kerukunan umat beragama. Penerimaan yang berbeda menunjukkan respon yang berbeda. Semakin tinggi partisipasi dalam pembangunan menunjukkan semakin tinggi adaptasi memanfaatkan program Posdaya untuk membina spirit harmonisasi kehidupan keagamaan.

Signifikansi

Bagi P3M STAIN Ponorogo, kegiatan ini berguna memperkuat dan memperkaya strategi untuk membina dan memberdayakan masyarakat dalam menjalin harmonisasi kehidupan keagamaan melalui berbagai program KPM ke depan. Selain itu, hasil evaluasi ini dapat memberikan umpan balik (*feedback*) strategi serta bentuk dukungan yang pernah diberikan. Untuk kedepannya, penelitian ini berguna meningkatkan akuntabilitas, kualitas perencanaan dan implementasi program KPM Posdaya berbasis masjid dalam konteks membina dan menjalin kehidupan yang harmonis dan kerukunan umat beragama.

Bagi Kemenag dan PTAI lain di Indonesia, dapat menjadi pengalaman lapangan (*best practices*) dan pelajaran berharga (*lesson learned*) yang dapat diaplikasikan di daerah-daerah lain. Selain itu, pelajaran ini bisa digunakan untuk memperbarui kebijakan pembinaan dialog dan harmonisasi kerukunan umat beragama yang selama ini ada.

Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan Putri Sari Damaiyanti pada Tahun 2010 yang diterbitkan Fakultas Psikologi Universitas Air Langga. Dia mengungkapkan bahwa modal sosial telah menjadi salah satu pilar bagi Masyarakat Balun Lamongan dalam membangun harmonisasi kerukunan antar umat beragama. Dia berhasil menemukan bahwa modal sosial berhasil meningkatkan kohesi sosial bagi masyarakat. Penelitian ini menjadi pintu pembuka bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih ekspansif bagaimana dampak pembangunan modal sosial tersebut terhadap pembinaan kerukunan umat beragama.

Kajian dengan latar daerah yang hampir sama juga dilakukan oleh Syamsul Arifin, dkk. (2002) dengan judul *Pluralisme Keagamaan di Pedesaan: Studi Tentang Pola Interaksi Sosial Tiga Kelompok Agama, (Islam, Kristen, Budha) di Mojorejo Batu*. Penelitian ini menemukan pola interaksi sosial antara tiga kelompok agama. Setidaknya terdapat dua faktor utama, kenapa integrasi sosial tetap terjadi meskipun terdapat perbedaan agama, yaitu: *Pertama*, pemahaman agama, *Kedua*, kepemimpinan yang akomodatif. Dari dua pola interaksi tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya pluralitas agama

tidak begitu besar pengaruhnya bagi interaksi sosial antar sesama warga.

Selain dua penelitian di atas, terdapat penelitian yang memfokuskan pada pemberdayaan masjid diantaranya Umar R Soeroer “Pemberdayaan Umat Melalui Pengembangan Manajemen Masjid pada Masjid al Falah Bendungan Hilir Jakarta Pusat” dalam *Tradisi Lokal dan Kerukunan umat Beragama*, Harmoni Vol.VII, Nomor 27 Juli-September 2008. Asnawati, “Pemberdayaan Umat Melalui Pengembangan Manajemen Masjid pada Masjid Agung dan al-Mahmudiyah Palembang” dalam *Tradisi Lokal dan Kerukunan umat Beragama*, Harmoni Vol.VII, Nomor 27 Juli-September 2008.

Berbeda dengan beberapa penelitian di atas, penelitian ini lebih difokuskan pada upaya menelaah secara mendalam tentang sistem KPM dengan bentuk Posdaya berbasis masjid dalam menghidupkan modal sosial masyarakat dalam membangun spirit harmoni kehidupan sosio-religius di Kecamatan. Pulung Ponorogo. Selain itu penelitian ini menganalisis kearifan lokal masyarakat di Kecamatan Pulung Ponorogo yang memunculkan adanya rasa kepemilikan masjid sebagai tempat membangun kesejahteraan lahir maupun batin dan melakukan pemberdayaan kehidupan beragama berdasarkan nilai-nilai spesifik yang dimiliki oleh sasaran KPM STAIN Ponorogo tahun 2014.

Kerangka Teori

1. Rekonstruksi Spirit Harmoni Hubungan Umat Beragama

Islam sangat mementingkan keharmonian dalam hubungan antar manusia. Keharmonian tersebut diharapkan tumbuh dalam ikatan atau lingkup yang lebih Kecamatanil,

seperti keluarga, perkumpulan, dan komunitas. Keharmonian juga diharapkan tumbuh dalam lingkup ikatan yang lebih besar, seperti, suku bangsa, bangsa dan ummah. Dengan demikian, keharmonian diharapkan berkembang secara luas dalam berbagai bentuk ikatan dan berlangsung terus menerus.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia harmoni merupakan penyamaan rasa, aksi, gagasan dan minat; keselarasan; dan keserasian. Jadi harmoni merupakan sebuah penyamaan rasa, aksi gagasan dan minat untuk menimbulkan sebuah keselarasan agar menciptakan sebuah keindahan dalam mencapai tujuan yang di bentuk secara bersama-sama. Dalam konteks penelitian ini harmoni dimaksudkan sebagai bentuk keserasian, kekompakan, dan persamaan sebagai manusia yang mempunyai kebutuhan dasar akan kedamaian, kerukunan, keserasian dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan beragama.

Kenapa harmoni? karena harmoni merupakan sebuah keidealan dalam membentuk suatu keadaan dalam mewujudkan cita-cita bersama, unsur yang dibangun dalam kata harmoni sudah sangat jelas, disana ada suatu penyamaan rasa, dimana penyamaan rasa ini penting untuk dibangun dalam hidup, apabila ingin membangun atau memperbaiki kehidupan beragama dan bermasyarakat. Harmoni (kerukunan) umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶⁸ Dalam konteks kehidupan beragama dan bermasyarakat hal ini harus

68 Haidlor Ali Ahmad, "Umat Beragama di Kabupaten Kediri: Antara Harmoni dan Konflik" dalam *Harmoni*, Vol. X. Nomor. 2 April-Juni 2011, 293.

senantiasa di bangun untuk menjalankan sebuah kehidupan yang penuh kedamaian, toleransi, harmonis, apalagi dalam konteks kenegaraan hal ini harus benar-benar disadari untuk memperbaiki dan membangun bangsa ini secara bersama dan harmonis.

Harmonisasi kehidupan beragama dan bermasyarakat didasarkan pada pemahaman bahwa, setiap agama membawa misi sebagai pembawa kedamaian dan keselarasan hidup bukan saja antar manusia, tetapi juga antar sesama makhluk Tuhan penghuni semesta ini. Persoalannya dalam aras historis, misi agama tidak selalu artikulatif. Dalam perjalanan sejarahnya, selain sebagai alat pemersatu sosial, agama juga dapat menjadi unsur konflik. Agama memiliki faktor integrasi dan disintegrasi.⁶⁹ Faktor integrasi, antara lain, agama mengajarkan persaudaraan atas dasar iman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Agama mengajarkan kedamaian dan kerukunan di antara manusia dan sesama makhluk. Faktor disintegrasi, bila agama dipahami secara sempit dan kaku yang dapat menimbulkan prasangka negatif atau sikap memandang rendah pemeluk agama lain.

Dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, keragaman agama maupun budaya terkadang menghasilkan interaksi sosial yang padu dan mengagumkan, namun tidak jarang juga mengakibatkan perseteruan. Di satu sisi, keragaman dapat diterima oleh masyarakat sebagai sebuah keniscayaan yang disikapi dengan arif, namun di sisi lain, pluralitas ternyata menimbulkan masalah yang cukup kompleks.

69 Muhammad M. Basyuni, *Kebijakan dan Strategi Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Balitbang dan Diklat Depag RI, 2007), 4-5.

Kerukunan⁷⁰ umat beragama adalah cita-cita yang diidealkan di mana kehidupan ini penuh dengan toleransi, penghargaan terhadap pluralisme dan pemikiran yang inklusif. Pengertian tentang kerukunan merujuk pada pemahaman “berada dalam keadaan selaras”, “tenang dan tentram”, “tanpa perselisihan dan pertentangan”, “bersatu dalam maksud untuk saling membantu”. Pengertian keadaan rukun dapat dipahami juga sebagai suatu keberadaan semua pihak yang berada dalam keadaan damai satu sama lain, suka bekerjasama, saling menerima dalam suasana tenang dan sepakat.⁷¹

Lawan kerukunan adalah disharmoni antar umat beragama. Disharmoni ini terjadi karena dua faktor. Yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seringkali terjadi karena adanya perbedaan penafsiran terhadap ajaran agama. Faktor eksternal terjadi karena beberapa faktor, yakni faktor pendidikan, politik, kesejahteraan masyarakat dan lemahnya modal sosial. Kesejahteraan masyarakat menjadi faktor yang juga sangat menentukan bagi keharmonisan sosial. Orang yang lemah tentunya dekat dengan kemiskinan. Dalam keadaan miskin inilah, orang mudah terprovokasi

70 Kata rukun dapat mengacu pada dua pengertian, yaitu sebagai keadaan dan sebagai tindakan. Dalam pengertian yang pertama, rukun berarti dalam keadaan selaras, tenang, tentram, tanpa perselisihan dan pertentangan. Di sisi lain, rukun mengacu pada cara bertindak untuk menghilangkan tanda-tanda ketegangan dalam masyarakat atau antara pribadi-pribadi sehingga hubungan sosial tetap kelihatan selaras dan baik. Unsur-unsur yang mungkin menimbulkan perselisihan dan keresahan, diupayakan untuk disingkirkan. Penjelasan di atas mendeskripsikan bahwa kerukunan memiliki korelasi antara kondisi sosial dan individual, baca, Hari Poerwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 222.

71 Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijakan Hidup Jawa* (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2001), 39.

untuk melakukan tindakan anarkis sehingga kehilangan *trust*, *solidarity*, *social cohesion* di antara sesama.

Dialog di sini tidak hanya untuk mengharmoniskan pemahaman masing-masing pemeluk agama, tetapi juga untuk mendesain program berupa dialog karya untuk memecahkan masalah kemanusiaan bersama, seperti upaya meningkatkan kesejahteraan hidup bersama.⁷² Kegiatan gotong royong membantu untuk meningkatkan kerja sama antara pemeluk-pemeluknya, hingga dengan demikian secara bersama-sama dapat menegakkan kemanusiaan, keadilan, perdamaian, kesejahteraan dan persaudaraan. Dialog model ini disebut dengan dialog aksi.⁷³ Pada model ini, dialog lebih fokus kepada upaya pemecahan problem-problem kemanusiaan yang lebih konkret seperti kesejahteraan manusia, kemiskinan dunia yang terus membengkak yang berakibat pada meletusnya penyakit sosial yang akut, perubahan iklim, dan terorisme.

Dialog⁷⁴ akan mengatasi rivalitas, penindasan, kebencian, menciptakan harmoni dan menjauhkan sikap

72 Mukti Ali, "Dialog dan Kerjasama Agama dalam Menanggulangi Kemiskinan" dalam Weinata Sairin (ed.), *Dialog Antar Umat Beragama: Membangun Pilar-pilar Keindonesiaan yang Kukuh*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), 14.

73 Paul Knitter, *One earth Many Religions, Multifaith Dialogue & Global Responsibility*, with Preface by Hans Kung (Maryknoll, New York: Orbis Books, 1995), 26-27.

74 Kata Dialog dalam "Kamus Filsafat" Inggris: *dialectic*; dari kata Yunani: *dialektos* (pidato, pembicaraan, perdebatan. Seni atau ilmu dialektika berawal dari penarikan perbedaan-perbedaan yang ketat. Dialektika kiranya dimulai oleh Zeno, Socrates, dan Plato. Peranan dialektika, interpretasi mengenai hakikatnya, dan penghargaan atas kegunaannya sangat bervariasi sepanjang sejarah filsafat. Ini dikarenakan perbedaan atau pendapat setiap filosof. Lihat, Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 161.

hidup yang saling menghancurkan. Dialog aksi ini akan tampak dalam kerja sama pemeluk agama yang berbeda dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial untuk meningkatkan kualitas umat manusia dan membebaskan rakyat dari berbagai bentuk penderitaan, serta meningkatkan keadilan dan perdamaian. Dialog semacam ini bisa menjadi alternatif mengatasi masalah pembinaan kerukunan umat beragama yang ada selama ini.

Dialog antar umat beragama merupakan suatu bentuk komunikasi dan bagian penting untuk terbentuknya masyarakat komunikatif, apalagi terhadap masyarakat yang plural dengan agama yang plural. Untuk itu, perlu dibentuk forum komunikasi, ruang publik yang demokratis, bebas dari dominasi dan hegemoni satu pihak, di mana pelaku-pelaku kesadaran yang terbuka, matang, dan kritis dapat berperan dan mengambil bagian dalam komunikasi yang interaktif. Dalam masyarakat plural, pluralitas agama maupun dalam kehidupan modern yang semakin plural, kehidupan secara kelompok dapat menjadi eksklusif dan orang mengambil jalan sesuai dengan pribadinya yang cenderung individualistik dan egois.⁷⁵ Dalam menghadapi pluralisme seperti ini, pemikiran rekonstruksi pandangan moral yang bersifat universal praksis diperlukan dalam bentuk berupa klaim-klaim normatif universal yang tidak berat sebelah, seimbang di antara struktur-struktur interaksi sosial.

75 Menurut Zimmermann, Habermas melintasi Karl Marx karena pemikirannya mengenai "skema sosialisasi kepribadian" yang tidak ada dalam Marx. Skema yang ada pada karya-karya awal Habermas itu merupakan konsep politik tentang "suatu diskusi yang bebas dominasi". Rolf Zimmermann, "Emancipation and Rationality: Foundational Problems in the Theories of Marx and Habermas", dalam *Ratio*, XXXVI, 1984), 2.

Dialog antar umat beragama dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kerja sama antara pemeluk-pemeluknya. Dialog dan kerjasama adalah dua hal yang bertalian satu sama lain. Tidak ada kerjasama yang tanpa didahului oleh dialog. Dan dialog yang tidak berlanjut pada kerja sama merupakan dialog setengah hati, bahkan verbalisme. Di Indonesia, rintisan yang dilakukan oleh berbagai lembaga dialog, mulai mengarah kepada aksi aksi kolaboratif yang melibatkan berbagai kalangan umat beragama.

Dalam konteks ini, dialog antar agama bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti dialog kehidupan, dialog kerja sosial, dialog antar monastik, dialog untuk do'a bersama (*istighosah*), dan dialog diskusi teologis.⁷⁶ Dialog kehidupan terjadi pada tingkat kehidupan sehari-hari (*basic human community*), seperti yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, tanpa pembahasan secara formal, di mana setiap orang memperkaya dirinya dengan mengamati dan mencontoh praktik dan nilai dari berbagai macam agama.

Dialog kehidupan (*basic human community*) seperti di atas, menurut Hans Kung⁷⁷ dimaksudkan bahwa setiap orang beragama harus membuktikan keimanannya masing-masing. Terlepas dari semua perbedaan yang ada, orang Kristen dan Islam harus bertanggung jawab terhadap Tuhan dan melayani masyarakat manusia dengan penuh penghormatan satu sama lain. Di mana masing-masing umat beragama yang terlibat dalam dialog bersedia meletakkan iman pada posisi yang setara dan melakukan aksi bersama untuk mencapai

76 Ali Mukti, "Dialog dan Kerjasama Agama dalam Menanggulangi Kemiskinan" dalam Weinata Sairin (ed.), *Dialog Antar Umat Beragama: Membangun Pilar-pilar Keindonesiaan yang Kukuh*, 16.

77 Hans Kung, "Sebuah Model Dialog Kristen-Islam" dalam *Jurnal Paramadina* (Jakarta, Paramadina Juli-Desember, 1998), 32.

kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Dialog seperti hanya dapat dilakukan dengan pola pendampingan dengan pendekatan *andragogis partisipatoris*.⁷⁸

Pendekatan andragogi dipopulerkan oleh Malcolm Knowles pada tahun 1986.⁷⁹ Istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani yaitu *andr* yang berarti orang dewasa dan *agos* berarti memimpin dan membimbing. Knowles menyatakan bahwa andragogi adalah *the art of helping adult learn*,⁸⁰ yaitu seni dan ilmu yang berkaitan dengan cara-cara membantu orang dewasa belajar. Jadi andragogi adalah suatu ilmu dan seni dalam membantu orang dewasa belajar.

2. Kuliah Pengabdian Masyarakat (PM) Tematik Posdaya Berbasis Masjid

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu komponen kegiatan akademik yang merupakan bagian dari *Tri Dharma Perguruan Tinggi*, di samping pendidikan dan penelitian. Dengan dilaksanakannya dharma pengabdian kepada masyarakat di samping kedua dharma yang lain, diharapkan selalu ada interrelasi

antara perguruan tinggi dengan masyarakat, untuk mengantisipasi terjadinya isolasi perguruan tinggi dari masyarakat sekitarnya.

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) di Perguruan Tinggi memiliki peran penting dalam pengabdian

78 Lathifatul Azizah el Mahdi, "Dialog Aksi Antrumat Beragama: Strategi Membangun Perdamaian dan Kesejahteraan Bangsa: dalam Harmoni, Volume VIII, nomor 30, April-Juni 2009, 41.

79 Malcolm Knowles, *Modern Practice of Edult Education from Paedagogy to Andragogy*, (Chicago: Fiolet Publishing Company, 1979).

80 Malcolm Knowles, *Modern Practice of Edult Education from Paedagogy to Andragogy*, 3

dan pemberdayaan masyarakat untuk menunjang akselerasi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Secara organisatoris LPM adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai wadah bagi sivitas akademika dalam menyalurkan pemikiran, penelitian dan karya ilmiah yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan akademik dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Karena itu LPM dapat memainkan peran utamanya melalui pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.

STAIN Ponorogo sebagai salah satu lembaga perguruan tinggi Islam mempunyai kewajiban untuk mengamalkan *Tri Dharma Perguruan Tinggi*. Sebagai perguruan tinggi yang bercorak agama, dharma ketiga diharapkan menjadi *trademark* lembaga yang bercirikan keterpaduan antara peran-peran sosial keagamaan dengan berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu, melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Ponorogo secara berkelanjutan mengadakan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sinergitas tersebut.

Masyarakat adalah laboratorium besar dan luas tempat mahasiswa melakukan percobaan dan menemukan pengalaman baru untuk bekal kelak dikemudian hari. Oleh sebab itu, agar program KPM STAIN Ponorogo mempunyai relevansi dengan kebutuhan masyarakat akan hidup sejahtera dan harmonis, secara induktif KPM didesain mempertimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat dan berusaha memecahkan problem-problem sosial keagamaan

bersama masyarakat.⁸¹ Dengan demikian sinergitas antara peran masjid sebagai pusat pemberdayaan umat dengan fungsi-fungsi keluarga yang harus dijalankan, serta ditopang oleh kehadiran dosen dan mahasiswa dapat mempercepat tercapainya harapan dimaksud. Hal ini menegaskan bahwa kekuatan PT termasuk PTAI terletak pada sejauh mana ia mampu berkomunikasi, berintegrasi dengan masyarakat pamakai dan berapa besar kontribusinya kepada dunia sekitarnya.

Berdasarkan tata pikir di atas, maka dapatlah digambarkan bahwa PTAI memiliki peran strategis yang harus dimainkan dengan baik. Peran dimaksud antara lain:⁸² mendidik para intelektual bangsa berakhlak mulia, merupakan *think tank* umat Islam dan masyarakat sekitarnya, sebagai *agent of developmnet*, mencetak tokoh dan pemain bangsa masa depan, menjadi contoh dari perilaku Islami, mengembangkan lembaga-lembaga yang ada di Kemenag RI, dan pencipta model program dalam berbagai keahlian.

Sesuai dengan Statuta STAIN Ponorogo no. 208 Tahun 2003 dan Buku Pedoman Akademik Tahun 2014 SK tentang SKS yang harus ditempuh mahasiswa dimana salah satu pembagiannya adalah 4 SKS dalam bentuk pengabdian pada masyarakat yang dirancang, dimonitor dan dievaluasi. Pengabdian kepada masyarakat ini diwujudkan dalam bentuk pengembangan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya)

81 P3M STAIN Ponorogo, Buku Pedoman Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Posdaya Berbasis Masjid dengan Pendekatan Participatory Action Research (PAR), 4.

82 Mudjia Rahardjo, (ed), Quo Vadis Pendidikan Islam, Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial, dan Keagamaan, (Malang: UIN Malang Press, 2006), 90.

Berbasis “Masjid”.⁸³ Mengapa harus berbentuk Posdaya berbasis masjid? Masyarakat jamaah masjid mempunyai modal sosial yang diperlukan sebagai dasar untuk membina jamaahnya. Ini penting untuk mengetahui kebutuhan (*needs*) dan potensi jamaah yang sesungguhnya, termasuk kondisi sosial-ekonomi, politik, dan budaya.⁸⁴

Posdaya adalah forum silaturahmi, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan sekaligus bias dikembangkan menjadi wadah koordinasi kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu. Dalam hal-hal tertentu bisa juga menjadi wadah pelayanan keluarga secara terpadu, yaitu pelayanan pengembangan keluarga secara berkelanjutan, dalam berbagai bidang, utamanya agama, pendidikan, kesehatan, wirausaha dan lingkungan hidup, sehingga keluarga secara harmonis bisa tumbuh mandiri di desanya.

Berikut argumen tentang mengapa Posdaya harus berbasis masjid? Adalah sebagai berikut:

1. Masjid merupakan pusat pendidikan seumur hidup bagi jama'ah dari usia anak-anak hingga lansia menggunakan masjid sebagai tempat belajar bersama tanpa batas usia.

83 P3M STAIN Ponorogo, Buku Pedoman Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Berbasis Masjid, (Ponorogo, Tim P3M STAIN Ponorogo, 2014), 5.

84 Agus Rasidi, Manajemen Masjid dan Masjid Online, 16 September 2014, www.arroyyan.Com.

2. Masjid memiliki kekuatan modal sosial yang kuat seperti keikhlasan, kejujuran, gotong royong, tenggang rasa, tanggung jawab, disiplin, kasih sayang, dan sebagainya.
3. Sumber dana masyarakat mudah digali, sebab jama'ah member infaq/shadaqah untuk amal jariyah di masjid tanpa paksaan, digerakkan oleh hati yang ikhlas.
4. Mobilisasi umat efektif, sebab masjid mudah menyampaikan informasi kepada jama'ah sangat mudah.
5. Bebas dari aktivitas politik yang dijamin oleh undang-undang, sehingga masjid merupakan tempat yang hingga kini dan seterusnya harus tetap dijaga dari afiliasi politik praktis apaun agar umat Islam tidak terpecah belah.
6. Intensitas relasi sosial melalui waktu shalat memudahkan para jama'ah berkumpul dan saling tukar pengalaman, ilmu, dan musyawarah untuk memecahkan masalah umat.
7. Membebaskan masyarakat dari radikalisme agama dan menebarkan Islam rahmatan lil alamin, dari masjid untuk bangsa dan Negara.

Selain di atas, masjid merupakan instrumen pemberdayaan umat yang memiliki peranan sangat strategis dalam upaya peningkatan kualitas masyarakat. Namun hal itu harus didukung oleh manajemen pengelolaan masjid yang baik dan terpadu. Masjid dilihat dari fungsinya tidak hanya sebagai tempat atau sarana bagi umat muslim untuk melaksanakan ibadah shalat, namun masjid juga berfungsi sebagai pusat *empowering* (pemberdayaan) berbagai aspek kehidupan masyarakat sebagaimana telah dicontohkan oleh

Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Singkatnya, tugas masjid adalah sebagai pusat ibadah dan kebudayaan Islam, yang tidak boleh dilakukan di dalam masjid adalah menyangkut kepentingan pribadi dan hal-hal yang dilarang dalam Islam.⁸⁵

Sebagian besar masjid kini bergeser dari peran-peran historis dalam konteks perubahan sosial kemasyarakatan menuju bentuk penyelenggara kegiatan ibadah murni berupa shalat lima waktu, maka peran-peran yang bersifat sosial mengecil dan hanya beberapa masjid tertentu yang mencoba membangun sinergi dengan masyarakat dalam memberdayakan potensi lokal yang ada. Pada perkembangannya, masjid lebih berfokus semata-mata sebagai penyelenggara ritual keagamaan. Padahal masjid memiliki posisi sentral dalam menggerakkan masyarakat dalam isu-isu yang terkait dengan pembangunan bangsa. Selain konsep peran, kredibilitas masjid hingga saat ini masih memiliki *trust* (kepercayaan) sebagai lembaga sentral bagi kehidupan keagamaan masyarakat di sekitarnya.

STAIN sebagai Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) merupakan salah satu institusi yang memiliki peran dan fungsi sebagai pengembangan keislaman, dakwah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyebaran dan informasi produk IPTEK. Oleh karena itulah, dalam perspektif pengembangan Posdaya berbasis Masjid, tidak lain adalah memperkuat kembali sejarah peran masjid sebagai penopang perubahan sosial dan kembali menempatkannya dalam percepatan pencapaian indikator tujuan pembangunan millenium atau Millenium Development Goals (MDGs).

85 Gazalba, Sidi, *Mesjid: Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta, Pustaka Antara, 1989), 117-125.

MDGs berkorelasi dengan indeks pembangunan manusia, maka masjid sebagai lembaga sosial terlibat dalam penyelenggaraan aktifitas sosial kemasyarakatan, selain fungsi religiusitasnya. Masjid juga dapat ber*metamorfosis* dengan berbagai kepentingan masyarakat seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, teknologi tepat guna yang berbasis kebutuhan. Pengalaman-pengalaman masjid dalam pemberdayaan masyarakat juga semakin tumbuh seiring dengan gerak pemahaman agama secara progresif untuk menjawab masalah kemanusiaan yang berkembang saat ini. Masjid dengan potensi historis dapat menjadi pemeran langsung dan mediator dalam pencapaian MDGs serta meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Hubungannya dengan mahasiswa, Pengabdian kepada Masyarakat Tematik Posdaya Berbasis Masjid yang berperan untuk pembentukan dan pengembangan Posdaya adalah bentuk manifestasi dari kegiatan mahasiswa yang dilaksanakan dalam rangka penyebaran informasi dan implementasi produk IPTEK serta menyelesaikan pendidikan tinggi melalui proses pembelajaran dengan cara tinggal, bergaul serta beradaptasi dengan masyarakat khususnya di lingkungan masjid.

Dari sudut masyarakat penerima manfaat, pengabdian kepada masyarakat ini membantu membentuk, mengisi dan mengembangkan Posdaya pada masyarakat secara sistematis. Posdaya yang dibentuk itu merupakan forum wadah keluarga dan masyarakat melalui media masjid, untuk bersama-sama membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi keluarga melalui kegiatan wirausaha, pendidikan dan keterampilan, peningkatan kesehatan serta dukungan pelestarian

lingkungan sebagai upaya memperbaiki kualitas sumber daya manusia.⁸⁶

KPM STAIN Ponorogo dilaksanakan dengan pendekatan PAR dengan kegiatan dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat yang didampingi oleh mahasiswa KPM STAIN untuk menemukan berbagai alternatif solusi atas persoalan yang telah teridentifikasi terutama berkaitan dengan terjadinya disharmoni.⁸⁷ Pertanyaannya adalah kenapa harus dengan Posdaya? Harmoni harus dibangun pertama kali dalam keluarga dengan komunikasi efektif dan kedekatan kemudian dikembangkan ke luar rumah. Masjid merupakan sentra aktivitas keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang memiliki multifungsi dan sarana mengembangkan modal sosial sebagai bentuk *da'wah bil hal*.⁸⁸

KPM merupakan perubahan dari Kuliah Kerja Nyata (KKN). Perubahan nama tersebut seiring dengan perubahan paradigma yang selama ini KKN berpola pragmatis menuju analitis. Perubahan ini sengaja dilakukan agar jiwa kritisisme mahasiswa dalam melihat realitas sosial benar-benar menjadi nilai unggul tersendiri. Mahasiswa diposisikan sebagai *agent* perubahan di masyarakat melalui pendekatan partisipatif, yaitu belajar dan bekerja sama masyarakat untuk melakukan

86 LPM UIN Malang, Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tematik Posdaya Berbasis Masjid, (Malang: PT Citra Kharisme Bunda, 2011), 7.

87 Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Masyarakat Membangun Harmoni: Resolusi Konflik Dan Bina Damai Etnorelijius Di Indonesia, (Jakarta: Kemenag RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013), xxxviii.

88 LPM UIN Malang, Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tematik: Posdaya Berbasis Masjid, (Malang: PT Citra Kharisma Bunda, 2011), 5.

transformasi sosial.⁸⁹ Adapun ciri yang menonjol dari KPM model PAR di STAIN Ponorogo adalah: 1) berorientasi pelayanan masyarakat, 2) bersifat *top down*,⁹⁰ 3) *problem solver*, 4) berbasis realitas.⁹¹ Hal ini dilakukan karena agar pelayanan keagamaan, dialog kerukunan umat beragama dinilai perlu dilakukan sampai ke tingkat masyarakat akar rumput (*grassroots*) karena sebagian besar masalah dalam kehidupan beragama muncul dari bawah.

KPM STAIN Ponorogo tahun 2014 di Kecamatan. Pulung Ponorogo bertujuan memanfaatkan program Posdaya berbasis masjid untuk memupuk modal sosial masyarakat dan membuka ruang dialog umat beragama, yang pada akhirnya ruang dialog tersebut mendorong menguatnya kerukunan umat beragama. Modal sosial mempunyai dua arahan pembangunan, yakni ekonomi dan sosial. Pembangunan modal sosial mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan produktif masyarakat dalam konteks ekonomi. Kemudian modal sosial juga mendorong semakin menguatnya kerukunan umat beragama dalam konteks pembangunan sosial.

Oleh sebab itulah, dalam konteks ini, sangat tepat untuk melihat kaitan program Posdaya dengan kerukunan

89 Tim P3M STAIN Ponorogo, Metodologi Perubahan Sosial, Berbasis Participatory Action Research (PAR), (Ponorogo: P3M STAIN Ponorogo, 2009), 2.

90 Disebut juga dengan dakwah kultural adalah dakwah yang bersifat button up dengan melakukan pemberdayaan kehidupan beragama berdasarkan nilai-nilai spesifik yang dimiliki oleh sasaran dakwah. Hal ini berbeda dengan dakwah struktural yakni dakwah yang menjadikan kekuasaan, birokrasi, kekuatan politik sebagai alat untuk memperjuangkan Islam. Karenanya dakwah struktural lebih bersifat top down.

91 P3M STAIN Ponorogo, Buku Pedoman Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Posdaya Berbasis Masjid dengan Pendekatan Participatory Action Research (PAR), 2.

umat beragama. Program Posdaya berbasis masjid diasumsikan mendorong pemberdayaan masyarakat, kemudian pembangunan modal sosial. Ketika pembangunan modal sosial berhasil, maka ruang dialog antar umat beragama semakin terbuka lebar, yang pada akhirnya kerukunan umat beragama akan menguat secara signifikan.

Pembangunan modal sosial menjadi faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya program Posdaya untuk membentuk harmoni kehidupan umat beragama. KPM Posdaya harus menumbuhkan rasa saling percaya (*trust*) dan solidaritas (*solidarity*), kerja bersama (*collective action*) dan kerjasama (*cooperation*), kerekatan sosial (*social cohesion*) dan sikap inklusif, serta peningkatan pendapatan (*income*) dan penghargaan harkat-martabat bagi masyarakat berbeda faham agama dan lintas iman di Kecamatan. Pulung. Jika elemen-elemen modal sosial berhasil dibangun, secara otomatis akan membuka ruang dialog antar dan intern umat beragama. Kemudian dampak sosial seperti ini harus mendapat respon dan adaptasi oleh masyarakat dan ormas keagamaan (semisal NU, Muhammadiyah, MTA, Jamaah Tablig, Salafi, dan LDII) untuk mempererat persaudaraan sejati sesama manusia. Ketika respon baik dan adaptasinya juga baik, maka masyarakat dengan sendirinya telah memanfaatkan program Posdaya berbasis masjid untuk memperkuat kerukunan kehidupan beragama.

3. Pengembangan Modal Sosial Masyarakat Jamaah Masjid

a. Modal Sosial

Modal sosial merupakan sumberdaya sosial yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumberdaya baru dalam masyarakat. Oleh karena itu modal

sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, keharmonisan, mobilitas ide, saling kepercayaan dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama. Sehingga modal sosial yang lemah akan meredupkan semangat gotong royong, memperparah kemiskinan, meningkatkan pengangguran, kriminalitas, dan menghalangi setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, keadaan demikian sangat berpotensi munculnya konflik.

Konsep modal sosial (*social capital*) menjadi salah satu komponen penting untuk menunjang model pembangunan manusia, karena dalam model ini manusia ditempatkan sebagai subjek penting yang menentukan arah penyelenggaraan pembangunan. Partisipasi dan kapasitas mengorganisasikan diri menjadi penting agar masyarakat dapat berperan dalam model pembangunan manusia. Luas jangkauan konsep yang dikembangkan tentang modal sosial bervariasi antar ahli. Konsep yang paling sempit dikemukakan oleh Putnam yang memandang modal sosial sebagai seperangkat hubungan yang horizontal (*horizontal associations*) antar orang. Menurutnya lagi, modal sosial adalah kemampuan warga untuk mengatasi masalah publik dalam iklim demokratis.⁹² Perhatian yang mencakup vertikal disampaikan Coleman yang mendefinisikan modal sosial sebagai *a variety of different entities, with two elements in common: they all consist of some aspect of social structure, and they facilitate certain actions of actors – whether personal or corporate actors – within the structure.*⁹³ Dalam konsep ini, Coleman berusaha

92 Robert D Putnam, "Bowling alone: America's Declining Social Capital" *Journal of Democracy*,

93 J. S., Coleman, *Foundations of Social Theory*, (Cambridge: Harvard University Press, 1988), 42.

menjelaskan bahwa modal sosial adalah kemampuan masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok organisasi. Konsep ini memasukkan hubungan-hubungan horizontal dan vertikal sekaligus, serta perilaku di dalam dan antara seluruh pihak dalam sistem sosial. Meski Coleman lebih tegas mengusung modal sosial, tetapi dia tidak memberikan pengertian modal sosial secara tegas. Demikian Coleman menulis: Modal sosial ditetapkan oleh fungsinya.

Modal sosial bukan merupakan sebuah entitas (*entity*) tunggal tetapi berbagai macam entitas yang berbeda, dengan dua elemen bersama: terdiri dari beberapa aspek struktur sosial, dan memfasilitasi tindakan pelaku-pelaku tertentu dalam struktur itu. Sebagaimana bentuk modal lain, modal sosial adalah produktif, membuat mungkin pencapaian tujuan tertentu yang di dalam ketiadaannya akan tidak mungkin. Sebagaimana modal fisik dan modal manusia, modal sosial sama sekali tidak *fungible* tetapi mungkin *specific* untuk aktivitas tertentu. Tidak seperti bentuk modal lain, modal sosial melekat dalam struktur hubungan antara para pelaku dan diantara para pelaku.⁹⁴

Definisi di atas dapat difahami bahwa modal sosial adalah kumpulan tindakan, hasil dan hubungan yang berbeda sebagai modal sosial. Modal sosial baginya adalah *inherently functional*, dan modal sosial adalah apa saja yang memungkinkan orang atau institusi bertindak. Modal sosial, karena itu, bukan merupakan sebuah mekanisme, sesuatu,

94 J. S., Coleman, *Foundations of Social Theory*, 98.

atau sebuah hasil, tetapi merupakan beberapa atau semua dari mereka (mekanisme, sesuatu dan hasil) secara simultan.

Modal sosial yang dimaksud tidak di artikan dengan materi, tetapi merupakan modal sosial yang terdapat pada kehidupan sosial individu. Misalnya pada kelompok anak jalanan, institusi keluarga, organisasi, dan semua hal yang dapat mengarah pada kerjasama. Modal sosial adalah salah satu konsep baru yang digunakan untuk mengukur kualitas hubungan dalam komunitas, organisasi, dan masyarakat. Modal sosial adalah kemampuan masyarakat dalam suatu kelompok untuk berkerjasama membangun suatu jaringan guna mencapai suatu tujuan bersama. Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola interelasi yang timbal balik dan saling menguntungkan, dan dibangun diatas kepercayaan yang di topang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat. Kekuatan tersebut akan maksimal jika didukung oleh semangat proaktif membuat jalinan hubungan diatas prinsip-prinsip timbal balik, saling menguntungkan dan dibangun diatas kepercayaan.⁹⁵

Eva Cox mendefinisikan modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang di topang oleh jaringan, norma-norma dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisiensi dan efektifitas koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama. Francis Fukuyama menekankan pada dimensi yang lebih luas yaitu segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, dan di dalamnya

95 Handayani Niken, *Modal Sosial Dan Keberlangsungan Usaha (Studi Deskriptif Tentang Keterkaitan Hubungan Modal Sosial Dengan Keberlangsungan Usaha Pengusaha Batik Di Kampung Kauman, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta)*, (Surakarta: Fakultas ISIPOL, Universitas Sebelas Maret, 2007), 41.

diikat nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi.⁹⁶

Modal sosial dapat diartikan sebagai sumber (*resource*) yang timbul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas. Namun demikian, pengukuran modal sosial jarang melibatkan pengukuran terhadap interaksi itu sendiri. Melainkan, hasil dari interaksi tersebut, seperti terciptanya atau terpeliharanya kepercayaan antar warga masyarakat. Sebuah interaksi dapat terjadi dalam skala individual maupun institusional. Secara individual, interaksi terjadi manakala relasi intim antara individu terbentuk satu sama lain yang kemudian melahirkan ikatan emosional. Secara institusional, interaksi dapat lahir pada saat visi dan tujuan satu organisasi memiliki kesamaan dengan visi dan tujuan organisasi lainnya, yang juga dapat dikatakan akan memunculkan nilai-nilai dan norma-norma bersama bersandar pada norma-norma dan nilai-nilai bersama, asosiasi antar manusia tersebut menghasilkan kepercayaan (*trust*).

Dengan demikian modal sosial dalam masyarakat hendaknya dipahami bahwa di dalam suatu komunitas terdapat keragaman (agama, budaya, kepentingan, status sosial, pendidikan, pendapatan, keahlian, gender) dari anggotanya, sehingga perlu adanya pemahaman yang mendalam terhadap keragaman tersebut. Sementara itu pemahaman nilai-nilai, norma menjadi hal yang penting. Unsur-unsur penting dalam modal sosial antara lain; rasa memiliki diantara anggota, jaringan kerjasama,

96 M. Mawardi J, Peranan Social Capital dalam Pemberdayaan Masyarakat, (Lampung: Fakultas IAIN Raden Intan, 2007), 6.

rasa kepercayaan dan jaminan keamanan para anggota, saling memberi satu sama lain, saling berpartisipasi, dan bersikap proaktif.

b. Bentuk Modal Sosial

Konsep modal sosial (*social capital*) menjadi salah satu komponen penting untuk menunjang model pembangunan manusia, karena dalam model ini manusia ditempatkan sebagai subjek penting yang menentukan arah penyelenggaraan pembangunan. Partisipasi dan kapasitas mengorganisasikan diri menjadi penting agar masyarakat dapat berperan dalam model pembangunan manusia. Dalam modal sosial ada bentuk-bentuk yang menjadi komponen penting, yang menyertai modal sosial, yaitu *trust* (kepercayaan), *belief* (percaya), *norms* (norma-norma), *rules* (aturan-aturan) dan *networks* (jaringan).

a. *Trust* (Rasa Percaya)

Modal sosial wujudnya memang tidak jelas, tidak seperti halnya modal ekonomi yang wujudnya jelas yaitu uang. Kunci dari modal sosial adalah *trust*. Jadi modal sosial yang dimiliki oleh orang-orang yang saling mempercayai dan dipercaya. Modal sosial akan bertahan bila aktor-aktor di dalamnya mampu mempertahankan keuntungan dalam jaringan sosial atau struktur sosial lainnya. Modal sosial dapat dimiliki oleh individu lewat interaksinya dengan individu yang lainnya.

Trust atau rasa percaya (mempercayai) adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam

suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya.⁹⁷ Dalam pandangan Fukuyama trust didefinisikan sebagai “the expectation that arises within a community of regular, honest, and cooperative behavior, based on commonly share norms, on the part of other members of that community”.⁹⁸ Sementara Ostrom dan Ahn (2003), menggambarkan trustworthiness sebagai nilai yang tertanam dalam diri (intrinsic values) dan motivasi dalam diri (intrinsic motivation) seseorang untuk selalu bertindak secara kooperatif, selalu bekerja sama. Pendek kata, istilah “trust” di sini berhubungan dengan kejujuran dan kerjasama yang ada di antara orang-orang dalam sebuah komunitas.

Primordiality maupun *civility* dapat memunculkan apa yang disebut sebagai *trust*, yaitu kepercayaan kepada pihak lain sepanjang lingkaran di mana *trust* itu ada, muncul tanpa jaminan apapun. *Trust* itu oleh Deutsch dikatakan sebagai: Expectation of occurrence of an event where this expectation leads to behaviour which the individual perceives to have positive motivational consequences if the expectation is confirmed, and negative motivational consequences if it is not.⁹⁹

97 Robert D Putnam, “Bowling alone: America’s Declining Social Capital” *Journal of Democracy*, Tahun 1995, 1-8

98 Francis Fukuyama, *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, (New York: the Free Press, 1995), 26.

99 Bayu Faliyanto, *Dinamika Terbentuknya Trust (Suatu Studi pada Nasabah BCA Cabang Depok)*, Skripsi Sarjana Strata 1, FISIP-UI, 1999, 16.

c. *Belief* (Percayaan)

Menurut Coleman¹⁰⁰ sebuah komunitas manusia selalu perlu kepercayaan bersama (*shared beliefs*) sebagai “bahan bakar” penting bagi tindakan kolektif. Secara khusus *beliefs* ini sangat erat berkaitan dengan alur informasi dalam sebuah jaringan. Coleman mengatakan bahwa segala hal yang dipercaya oleh sebuah komunitas selalu berkaitan dengan segala informasi yang masuk ke, dan keluar dari, komunitas itu. Lalu, menurut Adler dan Kwon, nilai *shared belief* dalam modal sosial ini menciptakan semacam kenyamanan bagi para anggota komunitas untuk saling bertukar pikiran (*ide*) dan secara bersama-sama memahami dunia sekeliling mereka. Berdasarkan *beliefs* ini pulalah sebuah komunitas membangun semacam “dunia *ide*” bersama (Lesser, 2000).

d. *Norms* (Norma-Norma)

Norma secara umum difahami sebagai sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat dalam suatu entitas sosial tertentu. Aturan-aturan ini biasanya ter-institusionalisasi, tidak tertulis tapi dipahami sebagai penentu pola tingkah laku yang baik dalam konteks hubungan sosial sehingga ada sanksi sosial yang diberikan jika melanggar. Norma sosial akan menentukan kuatnya hubungan antar individu karena merangsang kohesifitas sosial yang berdampak positif bagi perkembangan masyarakat. Oleh karenanya norma sosial disebut sebagai salah satu modal sosial.

100 J. Coleman, *Social Capital in the Creation of Human Capital*, (Cambridge: Harvard University Press, 1999), 28.

Menurut Coleman, sebuah norma selalu “specify what actions are regarded by a set of persons as proper or correct, or improper or incorrect”.¹⁰¹ Dengan kata lain, sebuah norma menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. Norma ini kemudian diekspresikan dalam bentuk bahasa formal maupun informal sebagai semacam kebijakan, sehingga semua orang yang memiliki norma ini harus menyadari keberadaan dan isi kebijakan tersebut. Maka itu, norma hanya akan muncul jika ada komunikasi dan keberadaannya bergantung pada komunikasi yang reguler.

e. Networks (Jaringan)

Sebagaimana dikatakan Putnam, pemikiran dan teori tentang modal sosial memang didasarkan pada kenyataan bahwa “jaringan antara manusia” adalah bagian terpenting dari sebuah komunitas.¹⁰² Jaringan ini sama pentingnya dengan alat kerja (disebut juga modal fisik atau *physical capital*) atau pendidikan (disebut juga *human capital*). Secara bersama-sama, berbagai modal ini akan meningkatkan produktivitas dan efektivitas tindakan bersama.

Keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan anggota kelompok dalam suatu kegiatan masyarakat. Anggota kelompok melibatkan diri dan mencari kesempatan yang dapat memperkaya hubungan-hubungan sosial dan menguntungkan kelompok. Perilaku inisiatif dalam mencari informasi berbagai pengalaman, memperkaya ide, pengetahuan, dan beragam bentuk

101 J. Coleman, *Social Capital in the Creation of Human Capital*, 242.

102 Robert D Putnam, “Bowling alone: America’s Declining Social Capital”,

inisiatif lainnya baik oleh individu maupun kelompok, merupakan wujud modal sosial yang berguna dalam membangun masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, modal sosial akan tumbuh dan semakin berkembang kalau digunakan secara bersama dan sebaliknya akan mengalami kemunduran atau penurunan bahkan suatu kepunahan dan kematian kalau tidak digunakan atau dilembagakan secara bersama. Modal sosial tidak dapat diwariskan sepenuhnya secara otomatis dari generasi ke generasi seperti pewarisan genetik dalam pengertian biologi. Pewarisan modal sosial dan nilai-nilai yang menjadi atributnya memerlukan suatu proses adaptasi, pemberdayaan, pembelajaran, pendampingan serta pengalaman dalam praktek nyata. Proses ini akan tumbuh dan berkembang dalam waktu yang panjang melalui interaksi yang berulang-ulang yang memungkinkan susana untuk saling membangun kesepahaman, kepercayaan serta nilai dan aturan main yang disepakati bersama antar pelaku kerjasama.

Metodologi

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif naturalistik*, yaitu penelitian yang mengarahkan formatnya pada keaslian data, kealamiah, ungkapan subyek (*realistik*) dan bersifat induktif.¹⁰³ Dengan tujuan menguraikan dan memberikan penjelasan (eksplanasi), memberikan pemahaman yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan mendalam (*in-deph*) tentang fenomena-fenomena sosial yang menjadi objek studi. Penelitian ini

103 Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 108.

dilakukan melalui kasus, dengan unit kasus yang digunakan adalah desa dengan komunitas (*community studies*), yakni penelitian yang memfokuskan pada masyarakat Desa Patik Kecamatan Pulung, maka penelitian ini, menggunakan pendekatan Sosio-Antroplogis, yakni penelitian yang penekanannya pada studi manusia dan masyarakat, interaksi dan fakta-fakta sosial dari keduanya, sehingga peneliti dapat menginterpretasi dan memahami pengalaman individu maupun kelompok yang hidup dalam satu jalinan keluarga, kelompok agama sebagai pelaku sosial. Pengamatan dilakukan melalui fenomena empirik yaitu dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari masyarakat petani mengenai apa yang dilihat, dirasakan, dilakukan, didefinisikan dan dipahami oleh masyarakat.

Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha memahami akan mengungkap sikap perilaku ormas dan massa keagamaan dalam merealisasikan ide dialog dan kerukunan antar umat beragama melalui pelaksanaan program Posdya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapat data mengenai hubungan program Posdaya dengan dialog dan kerukunan antar umat beragama secara intensif dan mendalam.

Sumber Data dan Informasi

Karena *community studies*, maka semua subyek, lokasi, dokumen, aktivitas dan peristiwa yang mempunyai keterkaitan dengan fokus penelitian ini merupakan sumber data penelitian ini. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari data yang langsung

diambil melalui kegiatan lapangan penelitian seperti observasi keadaan lapangan baik aspek geografis maupun demografis Kecamatan Pulung Ponorogo dan wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan Kepala P3M STAIN Ponorogo, Ketua Panitia KPM Posdaya Tematik berbasis Masjid tahun 2014, Pemerintahan desa, ormas dan massa keagamaan serta peserta KPM STAIN Ponorogo tahun 2014. Sedangkan data skunder diperoleh dengan mendokumentasikan informasi naratif dan gambar seperti buku statistik desa di Kecamatan Pulung Ponorogo dan literatur lain tentang hubungan pelaksanaan program KPM, pembangunan modal sosial.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini, berupa *participant observation* dan *indepth interview* sebagai metode pengumpulan data utama.¹⁰⁴ *Participant observation* (pengalaman terlibat), di sini peneliti bertindak sebagai subyek dan obyek penelitian, hal ini untuk melihat perilaku masyarakat dalam keadaan alami dan mencermati dinamika kehidupan secara langsung. Hasilnya berbentuk *field note* yang akan dianalisis dan diinterpretasikan. *Indept interview* (wawancara mendalam), untuk mengungkap data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, wawancara mendalam menjadi pilihan utama yang dilakukan kepada tokoh (agama, masyarakat, jamaah). Hasil wawancara ini dalam bentuk *interview transkrip*.

104 Robert C. Bogdan & Sari Knoop Biklen, *Quality Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (Boston : Allyn and Bacon, tt.), p. 2. Lihat juga Norman K.Denzim Yvonna S.Lincoln, *Handbook of Qualitative Resarch* (California: Sage Publication, 1994), 1-7.

Metode pengumpulan data yang lain adalah dokumentasi, teknik ini dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen yang memuat uraian tentang pandangan mengenai fokus masalah.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan metode analisis kualitatif Sesuai saran dari Miles & Huberman,¹⁰⁵ yang meliputi tiga tahapan yaitu: *Pertama* reduksi data untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data, *Kedua*, penyajian data dan informasi yang diperoleh sebagai dasar pengambilan kesimpulan berupa (1) teks naratif untuk menggambarkan pandangan informan, (2) matriks untuk menggambarkan data-data informan yang berupa angka-angka, dan (3) Bagan untuk melihat kronologis interaksi dan keterkaitan antara modal sosial makro dan modal sosial mikro dalam melakukan dialog aksi masyarakat di Kecamatan Pulung Ponorogo, dan *Ketiga* penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data baik dalam bentuk narasi maupun matriks dan tabulasi yang mencakup verifikasi atas semua kejadian yang ditemukan dilapangan. Hasil penyajian data kemudian dihubungkan dengan konsep dan teori yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian, sehingga dapat memberikan arti penting temuan penelitian.

105 Miles, M. B. Miles and A.M. Huberman, Analisis Data Kualitatif terj. Tjetjep (Rohadi, Jakarta: UI Press, 1992), 16-19.

Geografis dan Penduduk

Pulung adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pulung memiliki arti keberuntungan yang tidak terduga-duga. Pulung sempat terkenal karena daerah ini merupakan penghasil jeruk keprok berkualitas tinggi sebelum pada tahun 80-an virus CVPD menyerang kebun-kebun jeruk yang ada. Pulung yang mempunyai tekstur tanah yang sesuai untuk tanaman tersebut. Kecamatan Pulung terletak 25 km sebelah Timur Kota Ponorogo dengan jumlah penduduk 45.950 jiwa yang terdiri dari 22.978 laki-laki dan 22.972 perempuan dan terdiri dari 18 desa.¹⁰⁶ luas wilayah Kecamatan pulung adalah 127,55 km², dengan batas-batasnya yaitu sebelah utara adalah Kecamatan Ngebel, sebelah Timur Kecamatan Pudak, sebelah Selatan Kecamatan Sooko dan Sawo serta sebelah Barat adalah Kecamatan Siman. dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Pulung semua berstatus desa.

Pulung merupakan salah satu dari 21 Kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo terletak di wilayah Barat propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.371,78 km² yang secara administratif terbagi dalam 21 Kecamatan dan 307 desa/ kelurahan. Menurut kondisi geografisnya, Kabupaten Ponorogo terletak antara 111° 17' - 111° 52' Bujur Timur (BT) dan 7° 49' - 8° 20' Lintang Selatan (LS) dengan ketinggian antara 92 – 2.563 meter di atas permukaan laut yang dibagi menjadi 2 sub area yaitu area dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Sooko, Pudak, Ngebel dan 17 Kecamatan lainnya merupakan daerah daratan rendah.

106 Data statistik Kabupaten Ponorogo Jawa Timur Tahun 2013.

Jarak ibukota Kabupaten Ponorogo dengan ibukota Propinsi Jawa Timur kurang lebih 200 km ke arah timur laut dan jarak dengan ibukota negara 800 km ke arah barat. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

- Utara: Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk
- Timur: Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek
- Selatan: Kabupaten Pacitan
- Barat: Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri (Propinsi Jawa Tengah)

Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah 1.371,78 km² Terdiri dari:

- Pemukiman/kampung : 201,20 km²
- Persawahan : 486,35 km²
- Pertanian Tanah Kering : 296,22 km²
- Hutan : 332,95 km²
- Kolam, Danau, Waduk : 1,99 km²
- Tanah tandus/rusak/alang-alang : 155,63 km²
- Lain - lain : 28,57 km²

Secara administratif wilayah Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi 21 Kecamatan, 307 desa/kelurahan, 947 dusun/lingkungan. Untuk menjalankan roda pemerintahan didukung oleh segenap pegawai ditingkat kabupaten sampai desa/kelurahan. Kabupaten Ponorogo juga memiliki kandungan bahan tambang. Berdasarkan wilayah Kecamatan

jenis bahan tambang adalah: Kecamatan Ngrayun memiliki kandungan mangaan, oker dan tras (17.792 m², Kecamatan Slahung memiliki kandungan seng, mangaan, batu gamping (6.273 m²), kaolin bentonit (437 m²), zeolit (797 m²), gypsum (26.000 ton), tras (1.305 m²). Kecamatan Bungkal memiliki kandungan seng, Kecamatan Sambit memiliki kandungan tras, Kecamatan Sawoo memiliki kandungan batu gamping, Kecamatan Sooko memiliki kandungan tras, emas. Kecamatan Pulung memiliki kandungan emas, mangaan, tras dan sirtu. Kecamatan Sampung memiliki kandungan batu gamping dan tras. Kecamatan Jenangan memiliki kandungan sirtu. Kecamatan Ngebel memiliki kandungan emas dan tras. Sedangkan 10 Kecamatan lainnya belum ada penelitian sehingga belum diketahui sumber daya alam berupa bahan tambang.

Lokus penelitian ini adalah Desa Patik, salah satu dari 18 Desa di Kecamatan Pulung. Desa ini terletak pada 7°5'56.57"-7°52'47.23" LS dan 111°37'16.72"- 111°38'16.52" BT. Secara geografis sebelah utara dibatasi oleh sungai "Kali Munggun" sebelah selatan dibatasi oleh sungai "Kali Kidul" dusun "Sekandang" (desa Pulung"), sedangkan batas Timur adalah dusun "Tuk Suren" (desa "Singgahan"), dan sebelah barat berbatasan dengan dusun "Bedagan" (desa "Pulung"). Wilayah desa "Patik" sebagian besar berupa sawah irigasi dan sebagian Kecamatanil berupa ladang tadah hujan yang berada di sekitar pekarangan rumah tempat tinggal. Sebagai wilayah yang berada di barat daya kaki lereng "Gunung Wilis" dengan kemiringan rata-rata 25 derajat dan ketinggian kurang lebih 280 meter dpl, memiliki suhu udara rata-rata 24 derajat Celcius dan suhu pada malam hari rata-rata 18 derajat Celcius. Kecamatan Pulung termasuk bersuhu dingin, masyarakatnya unik pernah suatu saat seorang pendatang dari luar Jawa

dipilih menjadi sebagai kepala desa di salah satu di desa Kecamatan Pulung yakni di Desa Patik.¹⁰⁷ Sejak dulu kala, sifat dan sikap terbuka yang dimiliki oleh penduduk di desa ini memang sudah demikian adanya. Semangat untuk meraih perubahan dan kemajuan menjadi dasar bagi setiap gerak langkah mereka.

Pemilihan Kecamatan Pulung sebagai lokus penelitian, dikarenakan bahwa program-program KPM Posdaya Tematik berbasis Masjid secara khusus dirancang bagaimana keharmonisasi bisa muncul di daerah tersebut, dengan cara masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, agama, pendidikan, sosial, dan kesehatan. Logika seperti ini menjadikan berbagai program KPM menjadi media dialog umat beragama di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Disimak dari kemampuan membangun wilayahnya, tercatat seluruh desa sebanyak 18 desa di Kecamatan Pulung. Termasuk desa swasembada, artinya mampu menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri. Menurut hasil proyeksi penduduk Kecamatan Pulung sensus tahun 2013 menurut hasil registrasi pada model dengan menggunakan pendekatan *de jure* dan *de facto*. *De Jure* berarti seseorang dicacah berdasarkan tempat tinggal resmi/ tetap. Sedangkan *de facto* artinya seseorang dicacah berdasarkan dimana mereka ditemukan petugas pencacah lapangan. Untuk menopang hidup kesehariannya, sebagian besar penduduk setempat berkiprah disektor pertanian, perdagangan, dan buruh (tani, pabrik, sektor pasar tradisional).

107 Bapak Ali Nurudin kepala Desa Patik, wawancara, tanggal 17 September 2014 tempat balai desa Patik.

Tabel 1: Jumlah penduduk saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun					Jumlah KK Tahun					Tingkat Pertumbuhan Tahun					Kepadatan Penduduk Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kecamatan Ngrayun	66.001	70.697	73.500	76.414	79.443	16.362	17.000	17.674	18.375	19.103	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	368	383	398	414	430
2	Kecamatan Salarung	86.663	107.492	133.298	165.298	204.981	17.475	21.671	26.873	33.324	41.325	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	960	1190	1476	1830	2269
3	Kecamatan Bungkal	70.859	94.190	125.203	166.428	221.225	13.327	17.715	23.548	31.301	41.607	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	1312	1744	2318	3081	4096
4	Kecamatan Sambit	53.649	60.457	68.129	76.775	86.517	11.902	13.412	15.114	17.032	19.194	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	897	1010	1139	1283	1446
5	Kecamatan Sawoo	84.557	97.172	111.670	128.330	147.476	18.395	21.139	24.293	27.917	32.082	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	678	779	895	1029	1183
6	Kecamatan Soolo	31.378	35.308	39.730	44.706	50.306	6.971	7.844	8.827	9.933	11.177	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	567	638	718	808	909
7	Kecamatan Puduk	15.275	19.603	25.156	32.284	41.430	2.976	3.819	4.901	6.289	8.071	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	312	401	514	660	847
8	Kecamatan Pujung	91.164	116.878	149.844	192.109	246.295	17.777	22.791	29.220	37.461	48.027	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	715	916	1175	1506	1931
9	Kecamatan Mirak	71.086	97.120	132.687	181.280	247.669	13.008	17.772	24.280	33.172	45.320	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	1911	2611	3567	4873	6658
10	Kecamatan Sman	92.414	131.227	168.343	264.607	375.742	16.270	23.103	32.807	46.586	66.152	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	2435	3458	4910	6973	9901
11	Kecamatan Jels	36.979	38.382	39.837	41.347	42.915	8.907	9.245	9.595	9.959	10.337	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	1445	1500	1555	1610	1665
12	Kecamatan Bakong	75.578	93.740	116.265	144.203	178.865	15.234	18.895	23.435	29.066	36.051	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	1327	1646	2041	2532	3140
13	Kecamatan Kauman	107.541	164.052	250.258	381.763	582.370	17.624	26.885	41.013	62.564	95.441	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	2937	4481	6836	10428	15907
14	Kecamatan Jambon	68.121	80.235	94.503	111.308	131.101	14.459	17.030	20.059	23.626	27.827	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	1185	1396	1644	1936	2281
15	Kecamatan Badegan	43.540	48.495	54.013	60.160	67.006	9.773	10.885	12.124	13.503	15.040	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	822	926	1032	1149	1280
16	Kecamatan Sangung	63.142	77.280	94.583	115.760	141.679	12.898	15.796	19.320	23.646	28.940	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	783	959	1173	1436	1758
17	Kecamatan Sukorejo	140.073	217.113	336.525	521.614	808.502	22.592	35.018	54.278	84.131	130.404	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	2351	3644	5648	8755	13570
18	Kecamatan Ponrogo	254.606	460.859	834.193	1.509.960	2.733.156	35.165	63.652	115.215	208.548	377.490	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	11412	20657	37391	67681	122508
19	Kecamatan Babadan	84.639	93.049	102.296	112.459	123.633	19.247	21.160	23.262	25.574	28.115	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1927	2118	2329	2560	2814
20	Kecamatan Jenangan	169.007	279.091	463.303	769.185	1.277.018	25.311	42.022	69.765	115.826	192.296	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	2828	4695	7794	12941	21484
21	Kecamatan Ngebel	40.757	54.614	73.182	98.064	131.406	7.604	10.189	13.653	18.296	24.516	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	685	918	1230	1648	2209
		1.748.131	2.347.023	3.304.517	5.194.054	7.918.724	323.267	437.033	609.256	876.129	1.298.513										

Sumber: Kecamatan Dalam Angka 2013, Kecamatan Dalam Angka dan diolah

Salah satu desa yang menjadi lokus penelitian adalah desa Patik. Secara khusus Desa Patik dihuni oleh sekitar 600 KK dengan jumlah penduduk 2608 jiwa yang terdiri dari 1434 pendudukan perempuan dan 1174 penduduk laki-laki¹⁰⁸ dengan Kepala Desa Bapak Ali Nurudin dan bapak Eko Siswanto sebagai sekretaris desa. Bapak Ali Nurudin dilantik sebagai kepala Desa Patik pada hari Senin 12 Maret 2012 bertempat di Pendopo Agung Kabupaten Ponorogo, bersama dengan dilantik 13 (tiga belas) Kepala Desa di Kabupaten Ponorogo oleh Bupati Ponorogo H. Amin. SH.¹⁰⁹ Desa Patik ini mayoritas adalah wilayah yang terdiri daerah pertanian dengan keadaan geografis di kelilingi oleh persawahan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Dusun Patik berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan dusun Mungging
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dusun Jangglengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan desa Bekiring
- Sebelah Barat berbatasan dengan dusun Tunjungan Kulon

Kehidupan Sosial

Kondisi sosial Kecamatan Pulung yang homogen merupakan kekayaan besar bangsa Indonesia yang jika dimanfaatkan dengan baik dapat menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia yang berkeadaban. Namun, tidak menentu kemungkinan di sisi lain

¹⁰⁸ Data Statistik Desa Patik tahun 2013

¹⁰⁹ Bapak Ali Nurudin kepala Desa Patik, wawancara, tanggal 17 September 2014 tempat balai desa Patik.

dapat menjadi potensi besar bagi munculnya gesekan sosial yang berujung pada konflik horisontal antar elemen masyarakat.

Keadaan sosial masyarakat Kecamatan Pulung sangat nampak dilihat dari keadaan sosial kemasyarakatannya, terbukti dari terjalinnya hubungan masyarakat yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat pada umumnya. Adat istiadat di Kecamatan Pulung masih sangat kental dengan nuansa gotong royong dan kekeluargaan, hal ini dapat terlihat saat acara hajatan semisal *bece'an*, *aqiqah*, *sunatan*, *dzikir fida'*, *yasinan*, *berjanji*, *sambatan*, bersih desa serta hajatan, kerjabakti dan yang lainnya. Maka ketika salah satu warga desa mempunyai hajatan, maka seluruh masyarakat akan ikut bahu membahu untuk membantu warga yang mempunyai hajatan tersebut walaupun meninggalkan pekerjaan, korban uang, tenaga, dan pikiran.

Salah satu faktor penunjang keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tersediannya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemenya pasal 31 ayat 2, maka melalui jalur pendidikan, pemerintah khususnya pemerintah daerah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk Kab. Ponorogo. Peningkatan SDM sekarang ini lebih di fokuskan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, terutama penduduk kelompok usia sekolah.

Tabel 2: Fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten/Kota

Nama Kecamatan	Jumlah Sarana Pendidikan							
	Umum dan Agama				Agama			
	SD	SLTP	SMA	SMK	MI	MTs	MA	
Kecamatan. Ponorogo	34	11	7	11	5	7	9	
Kecamatan. Jetis	22	4	2	2	5	5	4	
Kecamatan. Kauman	25	4	1	2	3	3	3	
Kecamatan. Mlarak	22	5	1	2	4	4	3	
Kecamatan. Siman	26	1	1	-	9	3	3	
Kecamatan. Babadan	31	7	3	4	10	5	2	
Kecamatan. Puduk	8	1	-	-	-	-	-	
Kecamatan. Badegan	20	2	-	1	3	3	-	
Kecamatan. Bungkal	28	4	1	-	1	4	3	
Kecamatan. Sooko	22	2	1	-	1	1	-	
Kecamatan. Balong	28	3	2	1	2	3	3	
Kecamatan. Jambon	23	2	1	-	4	2	3	
Kecamatan. Jenangan	33	5	1	3	10	6	5	
Kecamatan. Ngebel	18	3	-	-	-	1	1	

Kecamatan. Sukorejo	36	2	-	-	6	3	1
Kecamatan. Sambit	24	3	1	1	5	2	1
Kecamatan. Sampung	33	4	1	-	3	2	1
Kecamatan. Slahung	40	5	1	2	4	6	3
Kecamatan. Sawoo	40	6	-	1	1	6	1
Kecamatan. Pulung	39	5	1	1	6	2	1
Kecamatan. Ngrayun	49	10	2	1	1	7	2
Jumlah	601	98	27	32	83	75	49

Sumber : Ponorogo Dalam Angka 2013

Kehidupan Keagamaan

Kerukunan umat beragama merupakan salah satu pilar penting bagi suksesnya pembangunan nasional secara menyeluruh. Mengingat signifikansi dari terciptanya kondisi kehidupan umat beragama yang harmonis dan rukun, maka segala hal yang dapat menjadi potensi laten yang dapat memicu gesekan bahkan konflik yang didasarkan pada agama, harus segera ditanggulangi. Pembacaan tentang potret kehidupan antar umat beragama di setiap daerah termasuk di Kecamatan Pulung menjadi penting karena menjadi bagian integral dari upaya penanggulangan potensi konflik di tengah masyarakat.

Masyarakat Kecamatan Pulung Ponorogo mayoritas memeluk agama Islam. Sehingga dalam kehidupan keagamaan, kegiatan keagamaan umat Islam terlihat lebih semarak dibanding dengan umat lain, baik yang berkaitan dengan kegiatan peribadatan maupun kegiatan sosial keagamaan. Keadaan sosial keagamaan masyarakat secara global adalah sangat erat atau masih kental dalam persaudaraan kemasyarakatannya. Secara khusus, kehidupan keagamaan masyarakat Kecamatan Pulung nampak, manakala kegiatan-kegiatan yang bernuansa ubudiyah (vertikal) secara massal banyak dilakukan masyarakat, seperti shalat berjamaah, menghadiri majlis taklim, *yasinan*, *tahlilan*, *takziyah*, *istighozah*, *manakiban*, peringatan hari-hari besar Islam yang dilengkapi dengan berbagai jenis perlombaan, suasana silaturahmi antar warga yang intens, kehidupan yang aman tenteram, merupakan ciri kehidupan yang agamis dan Islami.

Sarana ibadah bagi kaum muslimin di Kecamatan Pulung semakin tercukupi pada kurun waktu 15 tahun terakhir, yakni sekarang terdapat 57 buah masjid dan seratus

enam puluh delapan musholla.¹¹⁰ Dari segi kuantitas dan kualitas rumah ibadah tersebut cukup baik. Artinya jumlah secara proporsional cenderung berbanding lurus mengikuti jumlah pemeluk agamanya, sehingga kalau umat Islam memiliki rumah ibadat paling banyak di antara umat lain adalah sangatlah beralasan.

Namun umat Islam di Kecamatan Pulung masih banyak yang melaksanakan kegiatan ibadah di rumah masing-masing. Hal ini dapat dipahami bahwa kualitas beragama mereka masih belum menggembirakan. Bahkan banyak didapati sebagian lapisan kaum tua (pria maupun wanita), yang masa kecilnya/masa mudanya tidak mendapatkan pengalaman hidup beragama dengan baik, termasuk kegiatan-kegiatan yang bersifat ritual. Kehidupan mereka akhirnya dipandu oleh kebiasaan-kebiasaan, naluri, adat istiadat yang mereka warisi dari nenek moyangnya dengan tidak mempersoalkan semuanya itu bertentangan dengan ajaran agama atau tidak. Dalam kondisi yang seperti ini, lapisan kaum tua akan "sangat" lamban untuk menerima dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ritual keagamaan.

Sarana ibadah yang sudah tersedia di beberapa desa, baru dapat berfungsi secara minimal. Mengapa? Jawabannya adalah, sarana fisik masjid walaupun sudah memadai ternyata sarana tersebut belum dapat berfungsi secara maksimal? Kendalanya terletak pada sektor Sumber Daya Manusia (SDM), baik pihak pengurus Ta'mir Masjid, Jamaah maupun masyarakatnya. Kelemahan sarana ibadah di desa tersebut umumnya kurang terawat, baik menyangkut usaha pemeliharaan kebersihan, keamanan barang, perawatan barang inventaris, maupun penggunaan barang secara

110 Ririn Wahyu Febrianti, fieldnotes, tanggal 8 Agustus 2014

maksimal. Sarana ibadah nampak kurang terawat, tidak sebagaimana mereka "pada umumnya" merawat rumahnya sendiri. Maka tidaklah heran kalau salah satu kegiatan KPM 2014 adalah kerja bakti membersihkan rumah ibadah tersebut.¹¹¹ Potret kehidupan keagamaan yang demikian, menjadi dasar program KPM tematik Posdaya berbasis masjid STAIN Ponorogo tahun 2014 salah satunya adalah menumbuhkan kepedulian masyarakat sekitar untuk memelihara sarana ibadah tersebut, gemar memakmurkan masjid, memanfaatkannya bagi pembinaan anak-anak, remaja, orang tua dan lain-lain.

Salah satu persoalan yang ada di Kecamatan Pulung adalah berkurangnya pemimpin agama pada tingkat lokal. Pemimpin agama yang dimaksud disini adalah orang yang mampu membimbing masyarakat dalam hidup beragama sehari-hari yang menyatu dengan yang dibimbing, yang mampu menjabarkan butir-butir ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, memimpin kegiatan kegiatan ritual agama. Berkurangnya pemimpin agama ini tidak saja disebabkan minimnya proses kaderisasi, yakni kurangnya kaum muda yang tekun mempelajari/mendalami ajaran agama maupun lingkungan yang kurang kondusif bagi munculnya suasana hidup yang agamis, akan tetapi banyaknya alumni madrasah atau pesantren yang ketika selesai belajarnya kemudian merantau bekerja di Jakarta, Surabaya dan luar negeri.¹¹²

111 Laporan KPM kelompok 25 Desa Patik Kecamatan Pulung Ponorogo tahun 2014 hal. 9.

112 Muh Tawar imam masjid Baitul Ridho, wawancara, hari Jumat tanggal 5 September 2014.

Keadaan demikian terjadi pada hampir terjadi pada organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, LDII, Jamaah Tablig, dan MTA. Kelompok organisasi keagamaan ini semua mengeluhkan tentang sulitnya kaderisasi ustadz atau guru ngaji. Di wilayah Kecamatan Pulung yang mata pencaharian penduduknya bersifat homogen (petani/peternak, buruh tani, pedagang), dan waktunya banyak disita untuk kegiatan-kegiatan operasional mencari sumber hidup, menjadikan generasi tua juga menjadi kurang semangat dalam mengajarkan nilai-nilai agama. Sehingga masyarakat di Kecamatan Pulung kurang mendapat sentuhan/siraman ruhani, hidupnya hanya akan berkisar bekerja, istirahat, makan, tidur dan bekerja lagi. Problem kaderisasi tokoh agama ini juga menjadi dasar dari program KPM STAIN Ponorogo, yakni dengan tema kaderisasi ustadz TPQ dan guru ngaji.¹¹³

Sementara yang berkaitan dengan masyarakat non muslim, yakni Katolik yang berjumlah sangat sedikit di Desa Patik hanya dua belas orang. Jumlah yang sedikit ini menyebabkan mereka bekum mempunyai rumah ibadat sendiri. Kegiatan ritual ibadah mereka dilaksanakan di Desa Pulung Merdika sekitar 3 km dari Desa Patik dan gereja tersebut satu-satunya gereja di Kecamatan Pulung. Keadaan demikian, menjadikan kegiatan umat Katolik di desa tersebut tidak mewarnai kehidupan keagamaan di Desa Patik Kecamatan Pulung Ponorogo.

Hubungan antar penduduk yang berbeda agama dan antarumat beragama selama ini relatif kondusif. Sekalipun pernah ada kasus gesekan/ketegangan yang berasal dari desa Klepu Sooko pada tahun 2011, yakni isu kristenisasi. Namun

113 Laporan KPM kelompok 25 Desa Patik Kecamatan Pulung Ponorogo tahun 2014 hal.5.

segera dapat dicairkan berkat peran aktif para pejabat setempat, tokoh agama dan masyarakat dan KKN STAIN Ponorogo. Sekalipun demikian, perbedaan apapun perlu senantiasa diwaspadahi karena sedikit banyak rentan timbulnya konflik. Walaupun konflik yang muncul semata-mata bukan karena faktor agama, namun sensitifitas atau rasa keagamaan dapat dijadikan alat pemercepat timbulnya suatu konflik.

Potensi konflik yang berupa gesekan/ketegangan juga datang dari kalangan internal umat Islam, seperti kasus pengelolaan mushalla dusun Krajan antara LDII dengan jamaah sekitar musholla. ketiak warga LDII mencoba untuk memakmurkan musholla "*Al-Husaini*" justru warga lainnya curiga dan tidak setuju. Terhadap masalah ini kepala desa Patik turun tangan untuk meredakan suasana, akhirnya kepala desa menghimbau kepada warga LDII untuk tidak mencoba mengajak atau berdakwah kepada yang sudah mempunyai keyakinan ajaran agama.¹¹⁴ Begitu juga dengan datangnya Jaulah atau Jamaah Tabligh dari Temboro Magetan. Masyarakat sekitar menolak kedatangan jamaah ini dengan alasan mengganggu kegiatan rutin penduduk dan merasa risih karena selalu didatangi oleh jamaah tabligh untuk diajak sholat berjamaah ke masjid. Selain itu, sempat muncul salah faham di antara para penduduk setempat, yakni jaulah dianggap akan mengambil alih masjid bebarapa masjid pada beberapa desa Kecamatan Pulung.

Namun secara umum dalam relasi agama, sosial, budaya, dan politik masyarakat Pulung tampak jelas

114 Ali Nurudin kepala desa Patik, wawancara, tanggal 17 September 2014 tempat balai desa Patik. Hal ini dibenarkan oleh bapak Budi Harmanto sebagai kepala Dusun Krajan.

komitmen pada upaya untuk mewujudkan *equality* pada semua ranah. Semua kelompok masyarakat memiliki hak yang sama, dan semua kelompok masyarakat sama-sama eksis dan sejajar sebagai mitra satu dengan lainnya, tanpa mempersoalkan perbedaan keyakinan kultur maupun perbedaan agama. Kecamatan Pulung merupakan potret indah akan kerukunan umat beragama. Di Kecamatan Pulung tidak tampak arogansi penganut agama atau etnik tertentu yang merasa dominan, tak terlihat militansi berlebih, tak ada intrik untuk saling menegasi. Kerukunan bukan sekadar ko-eksistensi pasif atau sebuah kerukunan yang artifisial, melainkan kerukunan yang aktif dalam keragaman. Hidup dalam keragaman diaktualkan dengan ko-eksistensi aktif dalam persahabatan dan persaudaraan yang intim. Desa-desa di Kecamatan Pulung adalah potret Indonesia mini yang ideal dalam kebhinekaan, itulah setidaknya yang rerekam selama program KPM STAIN Ponorogo yang berlangsung selama satu bulan penuh.

Namun demikian, keragaman dalam segala segi kehidupan di Kecamatan Pulung merupakan realitas yang tidak mungkin untuk dihindari. Di dalam keragaman tersimpan potensi yang dapat memperkaya warna hidup. Masing-masing pihak baik individu maupun komunitas dapat menunjukkan eksistensi dirinya dalam interaksi sosial yang harmonis. Namun yang juga harus diperhatikan adalah keragaman juga tersimpan potensi destruktif yang meresahkan. Spirit homogenitas, nafsu politik, nafsu menguasai, dan keinginan menjadi lebih dibandingkan yang lain menjadi faktor yang dapat menghilangkan kekayaan khazanah kehidupan di Kecamatan Pulung yang sarat keragaman.

Dalam skala nasional, Indonesia sesungguhnya sangat kaya pengalaman berkaitan dengan keragaman. Ada masa ketika keragaman menjadi kebanggaan bersama. Ada juga masa ketika keragaman menjadi petaka. Segenap pengalaman ini seyogyanya menjadi bahan pemikiran bersama untuk mengembangkan model-model penyelesaian yang tepat terhadap setiap konflik dan memikirkan langkah-langkah strategis dan sistematis untuk membangun kesadaran, pemahaman, dan sikap positif terhadap realitas kehidupan yang beragam.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pendekatan dan Metode KPM Tematik Posdaya Berbasis Masjid

Konsep pemberdayaan (*empowering*) dalam pendidikan luar sekolah di Indonesia pertama kali dikembangkan oleh Kindervater.¹¹⁵ Ia memandang bahwa pemberdayaan sebagai proses pemberian kekuatan atau daya dalam bentuk pendidikan yang bertujuan membangkitkan kesadaran, pengertian, dan kepekaan individu atau kelompok masyarakat terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan politik sehingga pada akhirnya ia memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat. Secara historis, konsep pemberdayaan telah mengalami perkembangan. Ide pemberdayaan mulai diperbincangkan ketika terjadi suatu aksi sosial (*social action*).

115 S. Kindervater, *Nonformal Education as an Empwering Process*, (Massachusett: Center for International Education University of Massachusett, 1979), 13.

Program pengembangan dan pemberdayaan kepada masyarakat berbasis masjid yang dilakukan secara bersama oleh STAIN Ponorogo adalah hal baru, dan bernilai sangat strategis. Selama ini, pengembangan masyarakat selalu menjadikan kantor desa atau lembaga-lembaga teknis lainnya sebagai basis. Kebijakan itu tidak keliru, tetapi berdasarkan pengalaman selama ini ternyata terasa kurang strategis. Pengembangan masyarakat berbasis kantor desa seolah-olah harus bersifat dinas dan formal, sehingga menjadikan kegiatannya terasa formal pula.

Gagasan yang awalnya diperkenalkan oleh Yayasan Danamandiri untuk mengambil strategi baru, dengan menjadikan masjid sebagai basis adalah merupakan ide yang sangat cerdas. Masyarakat, terutama komunitas muslim selalu menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan, terutama pada kegiatan-kegiatan yang bersifat ritual, misalnya shalat berjama'ah, pengajian rutin dan lain-lain. Oleh karena itu, dengan menjadikan masjid sebagai basis, maka kegiatan itu akan relevan dengan kultur yang selama itu hidup dan berkembang.

Masjid merupakan salah satu lembaga yang dimiliki oleh umat Islam bagi bagi komunitas muslim di mana pun, masjid selalu menjadi magnet atau daya tarik tersendiri yang sangat kuat, hingga selalu didatangi sebagai tempat untuk menjalankan kegiatan ritual sehari-hari. Datang ke masjid merupakan panggilan teologis dan spiritual. Lebih dari itu, masjid juga bisa dipandang sebagai institusi sosial, tempat di mana interaksi sosial sesama komunitas muslim dikembangkan dan diperkokoh. Masjid bisa menjadi perekat kuat untuk merajut harmoni di antara sesama muslim. Selain itu, masjid mempunyai potensi besar untuk memecahkan

berbagai permasalahan bangsa. Hal tersebut karena masjid memiliki fungsi ideal sebagai pusat ibadah dan kebudayaan umat Islam serta mempunyai jumlah kurang lebih 900.000 yang tersebar diseluruh Indonesia.

Sayang, akhir-akhir ini peran seperti itu terasa sekali semakin mengecil hingga akhirnya masjid hanya dimanfaatkan sebagai tempat menjalankan kegiatan ritual belaka. Padahal dalam Islam, kegiatan ritual tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, kegiatan ritual harus selalu menyatu dengan semua aktivitas kehidupan sehari-hari. Tidak boleh terjadi pemisahan antara dua jenis kegiatan dimaksud. Kegiatan ekonomi, sosial, politik, hukum dan lain-lain harus bernuansa spiritual. Itulah sebabnya dalam Islam semua kegiatan sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dimaknai sebagai ibadah. Pengabdian kepada masyarakat tak terkecuali juga dipandang sebagai ibadah.

Atas dasar itu, maka kerjasama antara STAIN Ponorogo dengan Yayasan Damandiri dalam mengembangkan masyarakat dengan mengambil basis di masjid memiliki dasar historis yang kokoh. Selain itu, menggerakkan masyarakat melalui masjid selain memiliki landasan historis yang jelas dan kokoh juga relevan dengan beberapa pertimbangan sebagaimana diuraikan di depan.

Pengabdian Masyarakat Tematik Posdaya Berbasis Masjid STAIN Ponorogo ini diikuti oleh mahasiswa dan dosen untuk melakukan kerja bersama dengan berbagai pihak terkait secara gotong royong dalam pencapaian delapan tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs) tahun 2015 melalui pendekatan keagamaan. Delapan tujuan dimaksud diwujudkan dalam empat konsentrasi program kegiatan yaitu;

Pertama, pengentasan kemiskinan melalui pembinaan kewirausahaan dan pengembangan ekonomi produktif melalui kelompok; *Kedua*, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana; *Ketiga*, pendidikan melalui bina balita, pendidikan anak usia dini (PAUD), ketuntasan wajib belajar sembilan tahun, termasuk pembinaan TPQ dan Madrasah Diniyah; *Keempat*, menciptakan kehidupan keagamaan yang inklusif dan harmonis. Melalui empat program kegiatan ini diharapkan dapat mengantarkan setiap keluarga jamaah masjid untuk hidup sejahtera mandiri, dalam nuansa *sakinah*, *mawawddah* dan *rahmah*.

Oleh sebab itulah, dalam konteks ini, sangat tepat untuk melihat kaitan program Posdaya dalam membangun dialog aksi umat beragama. Program Posdaya berbasis masjid diasumsikan mendorong pemberdayaan masyarakat, kemudian pembangunan modal sosial. Ketika pembangunan modal sosial berhasil, maka ruang dialog antar umat beragama semakin terbuka lebar, yang pada akhirnya kerukunan umat beragama akan menguat secara signifikan.

KPM STAIN Ponorogo dilakukan bersama masyarakat dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) berbasis masjid melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Langkah-langkah untuk melaksanakan Pengabdian Masyarakat berbasis Masjid untuk pembentukan dan pengembangan Posdaya pada hakekatnya merujuk kepada Buku Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Posdaya yang telah dikeluarkan oleh Yayasan Damandiri (Suyono dan Haryanto, 2009) menyangkut proses dan pengisian program lembaga Posdaya tersebut. Mengingat luasnya materi dan bidang garapan yang dicakup, maka dalam kegiatan

pengabdian masyarakat tematik Posdaya para mahasiswa dengan dikoordinasikan para dosen pembimbing lapangan perlu membentuk suatu tim dengan latar belakang ilmu dan jurusan yang berbeda-beda sesuai bidang garapan yang dirancang.¹¹⁶

Sesuai dengan yang telah menjadi komitmen tim KPM STAIN Ponorogo, maka dalam keseluruhan kegiatan pemberdayaan ini mempergunakan model *Participatory Action Research* (PAR). Model PAR ini tidak memisahkan antara teori, praktik, dan transformasi sosial, serta komitmen untuk membangun ilmu pengetahuan rakyat (*people knowledge*) yang berbasis lokalitas, yang merupakan suatu cara strategis untuk lepas dari ketergantungan global. Model ini dipergunakan atas pertimbangan pentingnya “belajar sambil bekerja” dan “kerjasama aktif” antara peneliti (pihak luar) dan anggota masyarakat dengan menekankan pada proses belajar sebagai aspek dari proses riset.¹¹⁷ PAR yang disebut sebagai model penelitian bertujuan memberikan kontribusi praktis dalam penyelesaian masalah masyarakat jangka pendek dan tujuan jangka panjang¹¹⁸ dipandang sebagai pilihan paling sesuai untuk prinsip-prinsip penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat yang secara eksplisit menekankan pentingnya cara-cara partisipatif dan dicapainya efek jangka panjang yang diharapkan.¹¹⁹

116 M. Harir Muzaki, ketua panitia KPM STAIN Ponorogo tahun 2014, wawancara, tanggal 6 September 2014 di ruang P3M STAIN Ponorogo

117 Thomas Gilmore, et.al, “Action Based Modes of Inquiry and the Host-Researcher Relationship” Consultation, (Fall, 1986),161

118 Ibid.

119Ditpertaiss. Panduan Program Pemberdayaan Mutu Madrasah/Pesantren Dampingan Perguruan Tinggi Agama Islam, (Jakarta: Ditpertaiss. 2003), 14-15

Sustainability dan keharusan realistisnya program ini, sebagaimana juga menjadi tuntutan utama,¹²⁰ jelas meniscayakan dipainya terlebih dahulu pemahaman lokasi dengan cara belajar dari, untuk dan bersama dengan jamaah dan masyarakat untuk mengetahui, menganalisa dan, mengevaluasi hambatan dan kesempatan melalui disiplin dan keahlian untuk menyusun informasi dan mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan. Program PAR ini mengakui bahwa masyarakat memiliki kreatifitas dan kemampuan melakukan investigasi, analisa dan perencanaan. Sehingga peran tim KPM STAIN Ponorogo (*outsider*) adalah semata menjadi katalis dan fasilitator serta pemberi advokasi kepada yang lemah. Sehingga program KPM ini jauh dari hal-hal yang bersifat eksploitasi dan eksplorasi terhadap masyarakat yang dalam model penelitian selain PAR hanya sebagai obyek (*maf'ul*).

Sejak awal dan seterusnya, metodologi *Participatory Action Research* (PAR) selalu diusahakan untuk digunakan secara konsisten karena berbagai alasan: *Pertama*, metodologi PAR menghargai manusia dengan memperlakukannya sebagai orang-orang yang telah mempunyai pengetahuan dan pengalaman, tetapi mungkin masih terpenggal-penggal dan belum sistematis. *Kedua*, metodologi PAR memiliki seperangkat metode untuk membangkitkan kesadaran manusia atau komunitas untuk "melek" akan permasalahan mereka sendiri serta mencari alternatif pemecahannya. Dalam konteks ini, bisa disebut metode, *mapping*¹²¹ *transek*¹²²

120 Ibid.

121 TIM P3M STAIN Ponorogo, Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berbasis Participatory Action Research (PAR) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, (Ponorogo: P3M STAIN Ponorogo, 2014), 11.

(penelusuran wilayah) untuk mendapatkan gambaran konkrit kondisi yang dihadapi masyarakat, pohon masalah¹²³, analisis matrik rangking¹²⁴ dan sebagainya. *Ketiga*, metodologi PAR menciptakan kebersamaan antara *insider* dan *outsider* serta intern *insider* sendiri. Mereka yang merasa mengerti tidak dibenarkan mendominasi jalannya proses. Tetapi menjadi fasilitator yang menciptakan suasana belajar bersama agar komunitas yang bersangkutan mengalami kemajuan secara bersama-sama. Sehingga pendekatan PAR menjadikan pengetahuan dan pengalaman rakyat menjadi gagasan yang sistematis yang dirasakan sebagai milik mereka sendiri, bukan dari "atas". Selanjutnya dengan PAR gagasan tersebut diterjemahkan ke dalam aksi sekaligus untuk menguji kebenaran gagasan tersebut. Uji gagasan seperti ini selalu diulang-ulang secara ajeg dalam pendekatan PAR sehingga gagasan tersebut menjadi lebih benar, lebih penting dan bernilai sepanjang masa. *Keempat*, dengan metodologi PAR, masyarakat diajak mandiri tidak tergantung pada bantuan

122 Abdullah Faishol dkk, Metode dan Teknik Kuliah Kerja Nyata Transformatif: Implementasi Participatory Action Research (PAR) & Participatory Rural Aprisial (PRA) untuk Aksi Perubahan Sosial, (Surakarta: P3M STAIN Surakarta, 2013), 106.

123 Metode ini digunakan untuk menggambarkan adanya hubungan antara berbagai masalah satu dengan yang lain dalam frame "sebab-akibat". Tujuan teknik ini adalah sebagai media untuk mendiskusikan hubungan satu tema dengan tema yang lain, sehingga akan diketahui bahwa suatu masalah disebabkan oleh masalah lain. TIM P3M STAIN Ponorogo, Buku Pedoman..... 11.

124 Adalah sebuah bentuk rangking untuk melihat kebutuhan mendesak masyarakat terhadap suatu persoalan yang dihadapi. Teknik ini dilakukan dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk melakukan penyeleksian dalam bentuk skala prioritas dalam melaksanakan kegiatan yang masuk dalam daftar "keinginan" yang mereka temukan dalam teknik pohon masalah. Ibid.

dari luar dan bertanggung jawab atas gagasan yang muncul dari mereka sendiri. *Kelima*, pendekatan PAR menutup kekurangan model-model penelitian pada umumnya yang "bekerja di atas meja" yang belum atau bahkan tidak mampu menggambarkan problem riil yang dihadapi suatu komunitas masyarakat, sehingga hasilnya jauh dari apa yang diharapkan masyarakat. Dengan melibatkan diri bersama masyarakat dalam menggali dan menemukan alternatif pemecahan, pendekatan PAR menjadi lebih fokus, tepat sasaran dan lebih bermanfaat.

Instrumen-instrumen di atas tersebut membantu jamaah dan masyarakat mengungkapkan pendapatnya mengenai desa dan potensinya. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan yang akan dilaksanakan nanti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga tujuan dan manfaat pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat secara maksimal, dan terdapat pemerataan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

1. Alur Kegiatan KPM Posdaya Berbasis Masjid

Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) STAIN Ponorogo 2014 dilaksanakan dengan berbasis masjid melalui pendekatan *Participatory Action Research (PAR)*, yang mana peserta KPM atau mahasiswa berperan sebagai fasilitator dalam menggali dan menemukan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat. Karena itulah, kegiatan-kegiatan yang telah berjalanpun tidak terlepas dari partisipasi dan peran masyarakat. Adapun yang menjadi fokus KPM Posdaya berbasis masjid adalah:

- a. Melakukan revitalisasi fungsi masjid dalam peran sosial dan keagamaan dalam mendorong percepatan

pembangunan berbasis religius. Masjid bukan hanya tempat beribadah *mahdloh* tetapi juga dijadikan sebagai pusat pemberdayaan umat.

- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masjid terutama membenahan manajemen masjid dikelola secara professional, agar peran masjid sebagai pusat peradaban Islam bekerja secara professional.
- c. Menyegarkan modal sosial jama'ah masjid sebagai kekuatan dalam membangun komitmen untuk mengembangkan Posdaya.
- d. Meningkatkan kapasitas SDM kader posdaya masjid agar mampu menjadi fasilitator yang baik dan efektif dalam mendampingi jama'ah.
- e. Melestarikan eksistensi masjid melalui peran generasi muda agar estafet kepemimpinan takmir berjalan dengan baik, yang dapat mengantarkan masjid menjadi makmur dan jama'ahnya menjadi sejahtera.
- f. Membangun jejaring pihak-pihak terkait agar posdaya yang dikembangkan mendapatkan dukungan dari berbagai stakeholder. Kekuatan jejaring ini akan menentukan eksistensi Posdaya.

Berdasarkan hal-hal di atas, KPM dengan pendekatan PAR dimulai dengan penggalan data secara observasi dan wawancara yang berkaitan dengan kerjasama dalam masalah keagamaan, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang menjadi masalah utama dalam kegiatan KPM. Dari hasil observasi dan wawancara kemudian dilakukan pengolahan data, penetapan masalah untuk selanjutnya dianalisis dan mencari jalan keluarnya bersama dengan jamaah dan masyarakat. Tim KPM melakukan analisis

secara lebih mendalam mengenai permasalahan-permasalahan yang dianggap prioritas dalam bentuk tahap *matrix ranking*. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat relevansi dan kemampuan penyelesaian masalah baik dari masyarakat maupun mahasiswa peserta KPM.

Setelah melihat tabel yang dibuat oleh mahasiswa peserta KPM tentang relevansi dan kemampuan penyelesaian masalah-masalah menurunnya kesadaran pendidikan terutama pendidikan agama, tim KPM menemukan beberapa masalah yang sekiranya merupakan masalah yang relevan dan dapat di pecahkan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat beserta mahasiswa peserta KPM.

Secara berurutan berikut ini adalah masalah yang mendapatkan skor tertinggi sebagai masalah yang relevan dan dapat dipecahkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh mahasiswa peserta KPM STAIN Ponorogo adalah: 1) Kurangnya kader ustadz TPQ, 2) kesadaran kesehatan ibu dan anak masih rendah, 3) minimnya pengembangan sektor perekonomian desa atau *home industri*, 4) kesadaran kerja bakti sosial mulai menipis, 5) rasa kepemilikan tempat ibadah mulai berkurang.

Untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang ditemukan bersama masyarakat, dengan menggunakan pendekatan pembelajaran *andragogy* tim KPM melakukan langkah-langkah KPM dengan model PAR di Kecamatan Pulung Ponorogo sebagai berikut:

a. Pemetaan (*Mapping*)

Mapping merupakan proses menggambarkan kondisi wilayah secara detail, oleh karena itu untuk menghindari

kekeliruan informasi, posisi, dan kondisi penduduk tim KPM mengadakan musyawarah bersama-sama dengan jamaah masjid dan masyarakat yang bertempat di rumah tokoh desa. *Mapping* ini menggambarkan kondisi wilayah (desa, dusun, RT, RW) bersama masyarakat. Teknik *mapping* digunakan dalam rangka memfasilitasi jamaah atau masyarakat dalam menggambarkan keadaan wilayah secara umum, kemudian ditarik ke keadaan wilayah secara khusus terkait dengan peta sosial keagamaan (topikal). Penjelasan dari masyarakat melalui penggambaran di atas kertas putih peta atau sketsa keadaan umum desa dan keadaan sosial keagamaan, sehingga tim KPM dapat mengetahui kondisi daerah secara detil.

Berdasarkan *mapping* wilayah dapat dideskripsikan bahwa Kecamatan Pulung merupakan wilayah hutan, persawahan dan perkebunan yang terdiri dari sengon, kelapa, mangga, pisang, durian, bothe, rumput gajah, jahe gajah, dan palawija. Kecamatan Pulung terdiri dari delapan belas desa yang tersebar di Kecamatan Pulung. Hasil dari *mapping* yang telah dilakukan dengan masyarakat lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran pada laporan KPM Tahun 2014 tentang *mapping* (pemetaan) Kecamatan Pulung.¹²⁵

b. Penelusuran Desa (*Transector*)

Setelah mendapatkan gambaran kondisi wilayah Kecamatan Pulung, maka selanjutnya adalah kegiatan *transector*. *Transector* adalah penelusuran wilayah dengan cara menelusuri wilayah dalam rangka menggali informasi tentang kondisi riil yang ada pada masyarakat sembari

125 Laporan KPM Tahun 2014

memetakan unsur manfaat, hambatan, tantangan serta upaya apa yang pernah dilakukan untuk memperbaiki keadaan. Tim KPM menelusuri desa yang menjadi lokasi KPM untuk mengamati secara langsung lingkungan keadaan sosial keagamaan, sumber daya alam, perubahan-perubahan keadaan dan potensi-potensi, serta masalah yang terjadi di masyarakat. *Transector* ini untuk mengenali berbagai modal sosial yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat mau dan mampu mengembangkan modal sosial tersebut dalam melakukan kerja sama, interaksi, komunikasi kegiatan dialog kehidupan yang lain.

Berdasarkan *transector* di atas telah ditemukan modal sosial masyarakat sebagai *integrative climate (bridging social capital)* (iklim masyarakat yang kondusif dan integratif) yang merupakan prasarat terciptanya hubungan yang harmonis. Iklim yang kondusif dan integratif di Kecamatan Pulung terbentuk karena ada saluran komunikasi yang efektif. Dan bentuk nyata dari adanya iklim yang kondusif dan integratif ini adanya *social capital* yang menjelma dalam bentuk *civic association*.¹²⁶ Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, di ada beberapa lokasi tempat KPM bentuk *civic association* yang ditemukan diantaranya adalah; interaksi, kerjasama, komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, keagamaan, kesehatan, dan pendidikan.

126 Civic association adalah tercermin dalam adat istiadat di Kecamatan Pulung yang masih sangat kental dengan nuansa gotong royong dan kekeluargaan, seperti bece'an, aqiqah, sunatan, dzikir fida', yasinan, berjanji, sambutan, bersih desa serta hajatan, kerjabakti dan yang lainnya. Maka ketika salah satu warga desa mempunyai hajatan, maka seluruh masyarakat akan ikut bahu membahu untuk membantu warga yang mempunyai hajatan tersebut walaupun meninggalkan pekerjaan, korban uang, tenaga, dan pikiran (baca bab II).

c. **Bagan Hubungan Kelembagaan** (*Venn Diagram*)

Diagram Venn merupakan teknik yang bermanfaat untuk melihat hubungan masyarakat dengan berbagai lembaga yang terdapat di Kecamatan Pulung. Hal ini bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang mempunyai pengaruh paling besar di wilayah tersebut. Dalam *diagram venn* yang dibuat, besar kecilnya bentuk lingkaran menunjukkan besar atau kecilnya komunitas. Sedangkan jarak dekat atau jauhnya lingkaran satu dengan yang lainnya menunjukkan besar atau Kecamatanilnya pengaruh suatu komunitas terhadap masyarakat.

Diagram venn ini dalam KPM STAIN Ponorogo digunakan untuk melihat pola relasi sosial jamaah masjid dan masyarakat dengan berbagai lembaga atau institusi desa yang ada.¹²⁷ Komunikasi dan interaksi antar institusi masyarakat desa akan terdeteksi, sehingga dapat diketahui efektif tidak saluran komunikasi yang ada dalam menjalin kerjasama atau aksi sosial. Selain itu *diagram venn* juga digunakan untuk mengidentifikasi apa permasalahan masyarakat, siapa-siapa yang terlibat, mengapa permasalahan tersebut muncul, di mana lokus permasalahan muncul (menunjuk peran dominan), serta bagaimana bentuk dan pola peran dimainkan.

d. Alur Sejarah (*Timeline*)

Alur sejarah (*timeline*) adalah penelusuran alur sejarah suatu masyarakat dengan menggali kejadian-kejadian penting yang pernah dialami pada alur waktu tertentu. Untuk membuat alur sejarah, tim KPM STAIN Ponorogo

127 Tim P3M STAIN Ponorogo, Posdaya Berbasis Masjid Melalui PAR, (Ponorogo: Tim P3M STAIN Ponorogo, 2014), 7.

mencari informasi-informasi penting yang pernah terjadi atau dialami oleh masyarakat yang menjadi konsentrasi kegiatan KPM. Hasil yang diharapkan dalam penelusuran sejarah adalah rekonstruksi serta peristiwa yang pernah terjadi di tempat KPM.¹²⁸

Bagaimana langkah-langkah tersebut dijalankan, berikut ini akan dideskripsikan proses KPM tematik Posdaya berbasis Masjid di STAIN Ponorogo.

1. Perencanaan Lapangan (*Participatory Planning*)

Dari permasalahan-permasalahan yang telah digali melalui teknik PAR maupun matrik ranking, maka tim KPM menemukan permasalahan yang dianggap paling relevan dan berpotensi untuk dicarikan solusinya bersama masyarakat dan mahasiswa KPM. Maka tim KPM menyusun sebuah perencanaan lapangan. Adapun perencanaan lapangan tersebut yaitu sosialisasi dengan warga untuk mengadakan pengkaderan ustadz/guru TPQ yang ditekankan para remaja agar peduli ilmu agama, tim KPM juga melakukan perbaikan sistem pembelajarannya serta pendekatan kepada orang tuanya, tokoh agama, takmir masjid dan musholla.¹²⁹

128 Pada tahun 2011 di Kecamatan Pulung muncul gesekan antara umat Kristen dan Muslim karena dampak dari kegiatan kristenisasi yang terjadi di Desa Klepu Kecamatan Soko. Tahun 2013 di Desa Patik terjadi ketegangan antara LDII dengan NU, kemudian penduduk setempat dengan jamaah Tablig/jaulah, di Desa Pesugihan antara kelompok Salafi dengan penduduk sekitar, sehingga kelompok Salafi sekarang ibadahnya bertempat di rumah sebagai warga. Istighosah yang digagas oleh kepala Desa Patik juga merupakan kompromi yang agak dipaksakan oleh pemerintahan desa agar antara NU dan Muhammadiyah agar bersatu lagi. (baca laporan KPM STAIN Ponorog tahun 2014).

129 Laporan KPM STAIN Ponorogo tahun 2014

Selain itu, tim KPM juga melakukan sosialisasi tentang masalah ekonomi yakni pengembangan peternakan berupa sapi perah. Berdasarkan pengakuan sebagian warga yang telah lebih dahulu mempunyai usaha sapi perah ini, menurutnya cukup menjanjikan keuntungan yang besar,¹³⁰ berdasarkan hal ini maka usaha pengembangan menemukan relevansinya bagi peningkatan kesejahteraan jamaah dan masyarakat. Maka tim KPM merencanakan pengembangan bersama-sama dengan masyarakat sehingga bisa menjadi usaha jamaah atau masyarakat yang terutama bagi jamaah yang belum mempunyai usaha tetap. Kesehatan dan kerja bakti juga menjadi prioritas sosialisasi tim KPM, mengingat terhadap dua hal ini kesadaran masyarakat belum menggembirakan. Kerja bakti di sini terutama membersihkan dan perbaikan masjid. Tujuannya adalah mengembalikan modal sosial berupa gotong royong atau kerja sama yang akhir-akhir ini mulai memudar, baik disebabkan oleh rasa kepemilikan sarana ibadah yang berkurang maupun karena adanya konflik internal tokoh agama yang berpengaruh terhadap jamaah yang lain.¹³¹

Kaderisasi ustadz/guru agama menjadi program yang mendapatkan prioritas. Hal ini disebabkan kurangnya motivasi orang tua kepada anaknya agar belajar agama. Kondisi yang demikian mendorong tim KPM memiliki inisiatif untuk memberikan motivasi kepada orang tua atau

130 Budi Harmanto (kepala dusun Krajan desa Patik), wawancara, tanggal 15 September 2014.

131 Konflik ini dipicu oleh salah faham antara keluarga yang mewakafkan tanahnya, yang merasa tidak dilibatkan dalam berbagai pemakmuran masjid, mendengar hal ini sebagian masyarakat yang mencoba peduli dengan pemakmuran masjid akhirnya juga mulai kehilangan semangat, akhirnya yang terjadi adalah masjid seperti terlantar karena kepengurusan masjid tidak berjalan, wawancara dengan Achsin Ferdiansah (pesera KPM) kelompok 25 tanggal 8 Agustus 2014.

wali santri dan bekerja sama dengan takmir masjid. Untuk pemberian motivasi ini dilaksanakan selama 1 hari dengan narasumber dari Dosen STAIN Ponorogo.

Kaderisasi ustadz/guru agama ini dalam jangka panjang untuk mengatasi kurangnya pemimpin agama dan berkurangnya kaum muda yang tekun mempelajari/mendalami ajaran agama. Berkurangnya kader guru agama dan pada gilirannya akan berkurangnya tokoh agama lokal akan telah menjadikan lingkungan pedesaan menjadi kurang kondusif bagi munculnya suasana hidup yang agamis. Sebagai akibat dari masyarakat yang sekarang banyak mentolerir berlangsungnya berbagai bentuk kemaksiatan di kalangan kaum muda sehingga menjadi faktor penyebab utama minimnya "pemimpin agama".

Pengkaderan ustadz atau pemimpin agama ini dengan membekali ilmu agama, diharapkan kelak akan mampu menjawab berbagai tantangan zaman, apalagi apabila dilengkapi dengan berbagai ilmu bantu sesuai dengan perkembangan masyarakat yang maju dengan pesat. Hal ini sangatlah tepat, mengingat tempat KPM adalah daerah pedesaan yang mata pencaharian penduduknya bersifat homogen (petani/peternak, nelayan, buruh tani), dan waktunya banyak disita untuk kegiatan-kegiatan operasional mencari sumber hidup, nuansa kehidupan beragama tidak akan nampak manakala tidak tersedia pemimpin agama di tingkat lokal. Masyarakat desa tidak akan mendapat sentuhan/siraman ruhani, hidupnya hanya akan berkisar bekerja, istirahat, makan, tidur dan bekerja lagi.

Hal sama juga dilakukan untuk masalah-masalah yang lain seperti perekonomian, kesehatan dan pendidikan, berdasarkan *transector* tim KPM melihat masyarakat mempunyai modal sosial yang besar,¹³² sehingga tim KPM merasa sangat yakin dapat membantu mencari solusi bersama-sama dengan jamaah masjid. Konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ditawarkan pada masyarakat bersumber dari norma-norma keagamaan. Dalam hal ini norma agama dijadikan sebagai acuan utama dalam melakukan praktik sosial-ekonomi pada masyarakat.

Asumsinya adalah jamaah masjid dan masyarakat Kecamatan Pulung bukanlah jamaah sufistik yang acuh terhadap urusan ekonomi. Meski jamaah masjid ini lebih dikenal sebagai jamaah agama, tetapi mereka bisa digerakkan agar mempunyai kesadaran ekonomi yang berpusat pada masjid. Jamaah ini harus menyadari bahwa ekonomi adalah basis yang sangat penting bagi perkembangan suatu jamaah. Tanpa ekonomi yang kuat tentu mereka akan goyah sebagai jamaah yang utuh. Program ini juga membenarkan tesis dari Weber dengan sebutan “etika protestan” (*protestant ethic, die protestantische Ethic*) bahwa orang-orang beragama (dalam hal ini agama Protestan) simetris dengan kedudukannya dalam bidang ekonomi. Terdapat korelasi positif antara orang beragama dan yang memiliki Kecamatanukupan ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa semakin taat seseorang dalam melaksanakan perintah agama, maka semakin sejahtera pula kehidupan ekonominya.

132 Laporan KPM STAIN Ponorogo Tahun 2014.

2. Proses Aksi

Menindak lanjuti perencanaan lapangan tersebut, tim KMP kemudian mengadakan kegiatan musyawarah dengan tokoh agama dan masyarakat. Kegiatan keagamaan menjadi *mainstream* dari seluruh kegiatan Pengabdian Masyarakat Tematik Posdaya Berbasis Masjid. Kegiatan rutin keagamaan maupun sosial ekonomi yang telah dilakukan oleh jamaah masjid diupayakan lebih berkualitas dan efektif, dengan mengembangkan fungsi-fungsi masjid di bidang sosial keagamaan yang belum dilaksanakan. Bersamaan dengan kegiatan keagamaan, Posdaya berbasis masjid mendapatkan porsi yang sama dalam memperluas fungsi masjid untuk kesejahteraan masyarakat. Momen KPM mempermudah koordinasi antar *stakeholders*, sehingga dalam waktu 1 bulan diharapkan mampu mencapai target minimal yang ditetapkan.

Dari gagasan-gagasan tersebut tim KPM mewujudkan dengan membimbing para remaja yang sekiranya dianggap mampu untuk menjadi pendidik/ustadz di TPA. Adapun realisasinya dari pembimbingnya yaitu ketika masih awal, mereka disuruh mengikuti membantu menyimak anak-anak yang mengaji dengan menggunakan *Iqro'*. Agar mereka tertarik ke TPA, tim KPM membuat beberapa materi penunjang, seperti pendidikan akhlak, *fiqih*, doa sehari-hari, serta pembelajaran ilmu *tajwid*. Selain itu, tim KPM juga membuat kegiatan kesenian seperti hadroh. Setelah mereka mulai nyaman di TPA, mereka diminta untuk menyampaikan materi di depan anak-anak agar mereka mempunyai bekal mental setelah KPM selesai. Karena keterbatasan waktu yang ada, maka pelatihan guru ngaji tersebut diselenggarakan selama beberapa hari saja

dengan tutor dari salah satu Imam atau tokoh agama di daerah setempat.

Selain di atas, tim KPM juga menerapkan beberapa metode pembelajaran yang bervariasi kepada anak-anak TPA agar mereka tidak jenuh dengan pembelajaran sebelumnya sehingga anak-anak terus mempunyai motivasi mengaji, seperti permainan yang berkaitan dengan materi yang dipelajari, dan agar santri lebih memahami terhadap materi yang disampaikan, disertai dengan praktek, seperti praktek shalat dan wudhu.

Agar orang tua mempunyai perhatian terhadap pendidikan TPA, tim KPM berusaha mendekatinya dengan cara mengunjungi kerumahnya sehingga terjadi dialog, diskusi dengan orang tuanya, disela-sela obrolan sering menyinggung masalah TPA dan juga berusaha menjalin komunikasi lebih akrab melalui tegur sapa ketika bertemu di jalan atau ditempat lain. Peran komunikasi tersebut adalah terbangunnya kesefahaman antara majelis-majelis agama terkait isu tentang masalah perlunya pengkaderan ustadz atau guru agama. Komunikasi seperti ini ternyata telah melahirkan kesadaran dari banyak orang tua sadar bahwa pendidikan agama sangat penting anak-anak yang mengaji di TPA bertambah banyak.

Berkaitan dengan masalah perekonomian jamaah, terutama *home industri* usaha sapi perah tim KPM melakukan *motivation trainning* dengan mendatangkan nara sumber dari dinas peternakan Ponorogo, sekaligus menjejaringkan modal bagi pengembangan usaha sapi perah tersebut. Kegiatan ini dilakukan selama dua hari dan usaha keras dari tim KPM jamaah dan masyarakat yang berbeda faham ajaran agama dan bahkan berbeda agama

sangat antusias dalam mengikuti acara tersebut. Selain itu beberapa warga yang telah mempunyai usaha sapai perah tersebut juga dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada warga yang lain. Antusiasme warga tersebut dikarenakan nara sumber yang profesional dan mampu membangkitkan suasana serta semangat masyarakat yang mengikutinya. Tidak hanya itu, materi dan cara penyampaian yang menarik juga menjadikan masyarakat semakin fokus dan paham terhadap materi yang disampaikan.

Dengan demikian KPM STAIN Ponorogo telah menjadi lembaga yang mengembangkan satu bentuk dialog kehidupan dan dialog aksi (dialog dan kerjasama), dimana jamaah atau masyarakat telah memulai perbincangan dengan keberanian meletakkan iman pada posisi yang setara dan melakukan aksi bersama, untuk pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, pembangunan.¹³³ Bersama tim KPM masyarakat penganut agama telah bergandengan tangan dan bekerjasama (*civic association*), sehingga faham dan keyakinan agama tidak lagi menjadi kekayaan pribadi, institusi, atau golongan, tetapi kekayaan bersama.

Tim KPM STAIN Ponorogo dengan pendekatan dan teknik PAR seperti di atas, secara tidak langsung telah menciptakan syarat untuk mencapai dialog intern dan antar umat beragama, yakni dengan dipenuhinya prasyarat dialog, seperti pelaku dialog yang mencapai kesadaran moral mandiri, memegang prinsip etika bersama, memerhatikan setiap pola tindakan yang dilakukan,

133 Lathifatul Izzah el Mahdi, " Dialog Aksi Antarumat Beragama: Strategi Membangun Perdamaian dan Kesejahteraan Bangsa" dalam Harmoni, Volume VIII, Nomor 30, April-Juni 2009, 41.

menciptakan kondisi dan situasi pembicaraan ideal dengan mengatasi segala macam hambatan, dan kemungkinan distorsi yang terjadi dalam komunikasi yang selama ini kerap terjadi di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

2. Hasil Dan Dampak KPM Tematik Posdaya Berbasis Masjid

a. Hasil

KPM STAIN Ponorogo 2014 telah menyelesaikan serentetan kegiatan yang telah diprogram oleh panitia KPM yaitu melakukan kegiatan PAR dari satu tahapan ketahapan yang lain. Adapun salah satu program yang berhasil diselesaikan adalah terlaksananya program inti dari Tim KPM sebagaimana telah: 1) Penguatan modal sosial (ekonomi dan kesehatan), 2) pengkaderan tenaga pengajar di TPA serta memberi kesadaran kepada orang tua bahwa pendidikan agama itu penting. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan selama KPM berlangsung. Hal ini dikarenakan adalah semua yang dilaksanakan menyentuh persoalan dasar masyarakat baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan agama.

Dengan kegiatan tersebut para remaja dapat termotivasi untuk mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar di TPA dan menguasai teknik-teknik dasar pembelajaran ilmu agama yang praktis dan efektif. Khususnya para pengajar TPA diharapkan dapat memahami bagaimana mengelola dan mengembangkan lembaga pendidikan dengan manajemen organisasi yang baik. Selain itu, orang tua juga diharapkan peduli terhadap pendidikan agama sehingga mereka mempedulikan putra putrinya sejak dini dengan dimasukkan ke TPA yang ada.

Serta para santri termotivasi dengan adanya metode pembelajaran yang bervariasi sehingga siswa dapat menguasai materi dengan sempurna dan cepat. Selain itu pengkaderan ustadz TPA juga melatih para pemuda dan pemudi untuk lebih melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan melatih bersosialisasi dengan tidak bersikap individualis.

Kegiatan warga masyarakat Pulung bersama tim KPM STAIN Ponorogo dalam perekonomian, pertanian, kesehatan dan sosial keagamaan bersama sama merupakan saluran komunikasi yang efektif, karena tercipta suatu hubungan dialogis antara umat beragama dan antar umat beragama. Melalui kegiatan tersebut komunikasi antara mereka terjalin secara intens tanpa memandang perbedaan keyakinan yang paling penting adalah tolong menolong dalam kebersamaan melakukan pekerjaan. Dan ini merupakan kekuatan untuk menyatukan mereka sehingga tercipta keharmonisan di Kecamatan Pulung Ponorogo.

b. Dampak

Dampak yang dihasilkan dari dilaksanakannya pengkaderan dan pembinaan tenaga pengajar TPA antara lain:

1. Tumbuhnya motivasi para remaja masjid dan musholla untuk menyumbangkan tenaga sebagai pengajar TPA di Kecamatan Pulung. Hal ini terlihat dari adanya partisipasi remaja untuk menjadi tenaga pengajar.
2. Bertambahnya pengetahuan tentang metode dan cara-cara yang praktis dalam memberikan pembelajaran ilmu agama.

3. Bertambahnya pengetahuan tentang cara pengelolaan kelas.
4. Tumbuhnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya ke TPA. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah anak yang ikut mengaji di TPA.
5. Tumbuhnya motivasi anak untuk belajar di TPA. Hal ini terbukti dengan mereka aktif masuk setiap hari ke TPA tersebut.

Dengan dampak perubahan yang telah terjadi tersebut di atas, diharapkan akan terlaksana secara berkelanjutan sehingga terjadi peningkatan mutu pendidikan TPA, serta terciptanya suasana yang kondusif dalam kegiatan belajar mengajar di TPA. Wadah/lembaga yang menangani kegiatan keagamaan secara teratur telah bertambah dan berkembang, terutama yang menyangkut dengan kegiatan pendidikan agama bagi anak-anak. Dengan semakin bertambahnya perhatian bagi tumbuh dan berkembangnya ruhani anak-anak, telah didapati generasi muda yang peduli terhadap kehidupan beragama.

Hal yang sama terjadi pada kegiatan penyuluhan kesehatan dan pendidikan, masyarakat seakan terhipnotis oleh pesona dari mahasiswa KPM STAIN Ponorogo, sehingga mereka sangat termotivasi untuk secara bersama-sama menjalankan program yang berkaitan dengan kesehatan seperti Posyandu maupun pendidikan dalam bentuk bimbingan belajar bagi putra-putrinya. Dari berbagai kegiatan di atas dapat digambarkan bahwa masyarakat telah terjadi pertemuan hati dan pikiran antar umat beragama maupun antar pemeluk berbagai agama, komunikasi antara orang-orang yang percaya pada kegiatan yang mereka lakukan

bersama-sama tim KPM sebagai jalan bersama untuk mencapai kebenaran dan kerjasama menyangkut kepentingan bersama. Telah terjadi dialog yakni perjumpaan antarpemeluk agama tanpa merasa rendah dan merasa tinggi, serta tanpa agenda atau tujuan yang dirahasiakan.

Dialog aksi tersebut mempunyai tujuan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, mendukung dan mensukseskan pembangunan nasional, memerangi kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. Dialog mendukung terwujudnya kesejahteraan semua penduduk, menghilangkan kesenjangan dan menegakkan kemanusiaan dan keadilan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah dalam pelaksanaan program atau dialog aksi tidak bisa dilakukan hanya sekali, namun dilakukan dalam beberapa tahapan dan berkelanjutan. Dukungan media dan sarana sangat penting untuk memperlancar dialog aksi. Seluruh elemen masyarakat tanpa memandang jenis kelamin dan agama, suku, dan golongan juga harus dilibatkan. Tanpa sengaja dalam pelaksanaan program KPM tersebut terjadi interaksi dan dialog antar elemen masyarakat, sehingga dialog aksi dan dialog kehidupan umat beragama teraplikasikan dalam sehari-hari serta menjadi nilai bersama yang dipegangi dalam kehidupan sehari-hari.

Mencermati hasil dan dampak dari program-program KPM tematik Posdaya berbasis masjid di atas, dapat dijelaskan bahwa secara nyata bahwa KPM STAIN Ponorogo program pemakmuran masjid sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berjalannya fungsi-fungsi masjid, seperti fungsi ibadah, dakwah, edukasi, ekonomi, sosial dan budaya, serta komunikasi dan informasi, yang berjalan dalam kegiatan yang beragam. 1) Fungsi ibadah, sesuai dengan namanya

masjid adalah tempat sujud, maka fungsi utamanya adalah sebagai tempat ibadah shalat, mewujudkan kedisiplinan ibadah, sholat wajib dengan tertib. 2) Fungsi dakwah, masjid merupakan jantungnya kehidupan umat Islam yang selalu berdenyut untuk menyebarkan dakwah Islam yang *rahmatan lil alamiin*, oleh karena itu masjid di Kecamatan Pulung selalu mengadakan kultum dan kajian agama. 3) Fungsi edukatif, masjid berfungsi juga sebagai tempat untuk belajar dan mengajar khususnya ilmu agama. Untuk itu hampir semua masjid di Kecamatan pulung yang jumlahnya sekitar 59 masjid mengadakan beberapa kegiatan edukatif seperti, pengajian, kultum, madrasah diniyah, TPQ/A. Dengan pendidikan agama anak-anak sejak dini dididik dasar-dasar agama Islam, biar kelak ketika dewasa sudah mempunyai bekal agama yang kuat.

4) Fungsi sosial dan budaya, tim KPM STAIN Ponorogo dalam bidang sosial budaya telah melakukan pemberdayaan masjid melalui: a) melakukan riset dan pemetaan ekonomi dan sosial budaya masyarakat sekitar masjid, b) mengembangkan seni budaya Islami, c) menyediakan layanan bimbingan konsultasi selama KPM berlangsung, d) mendakan karnaval santriwan dan santriwati TPQ. 5) pemetaan sosial budaya, menghidupkan modal sosial jamaah masjid merupakan merupakan program utama PKM STAIN Ponorogo. Agar program ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, masjid telah melakukan penggalan masalah dan potensi masyarakat yang tinggal di sekitar masjid melalui sebuah kegiatan pemetaan sosial budaya. Adapun tujuan pemetaan sosial budaya ini adalah: a) memperoleh data empiris mengenai kehidupan sosial budaya masyarakat sekitar masjid, b) memberikan gambaran yang jelas tentang

kondisi ekonomi dan dan keberagaman masyarakat sekitar masjid sasaran.

Namun demikian program KPM STAIN Ponorogo tidaklah steril dari hambatan dan kendala. Hambatan berasal dari jamaah masjid sendiri terutama tokoh-tokoh tua, sebagian jamaah masjid tidak menginginkan adanya perubahan yang telah menjadi tradisi masjid dan kegiatan yang sifatnya bukan keagamaan, tidak boleh dilaksanakan di masjid, seperti musyawarah pemetaan potensi desa, penyuluhan kesehatan.

Respon-Adaptasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Program KPM Tematik Posdaya Berbasis Masjid.

1. Respon-Adaptasi Masyarakat

Kedatangan para mahasiswa KPM STAIN Ponorogo di Kecamatan Pulung Ponorogo mendapat sambutan positif dari masyarakat. Tanggapan masyarakat terhadap adanya program KPM STAIN Ponorogo tahun 2014 dapat dilihat dari sikap para tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Dimana mereka memberikan dukungan terhadap program-program yang direncanakan dan direalisasikan bersama peserta KPM, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Samud tokoh desa Patik, sebagai berikut:

“sangat keberatan jika peserta KPM meninggalkan Dusun Krajan. Karena, dengan adanya peserta KPM kegiatan Posyandu, kerjabakti, TPA dapat berjalan dengan baik dan kami mengucapkan rasa terima kasihnya karena telah membantu kegiatan yang ada di Dusun Krajan Desa Patik. Selain itu berbagai kegiatan masyarakat kalau dipusatkan atau direncanakan dari masjid menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

Memang diakui ada beberapa warga yang tidak beragama Islam, akan tetapi karena ini bukan persoalan ajaran agama, bagi mereka tidak masalah. Menurutnya lagi kebutuhan dasar manusia tidak bisa dibatasi oleh agama masing-masing warga”.¹³⁴

Para tokoh masyarakat pun banyak memberi kesempatan kepada para peserta KPM untuk mengisi kegiatan yang berada di tempat KPM, seperti Khutbah Jum’at yang bisa menarik simpati masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan masyarakat akan tetapi direncanakan di masjid, mengisi materi kepada anak-anak TPA, dan tidak kalah pentingnya peserta KPM juga sering berkunjung dan membaur dalam berbagai institusi sosial yang ada di masyarakat. Dari hubungan timbal balik yang baik ini, terciptalah *trust* dan tali persaudaraan yang kuat sehingga masyarakat merasa menjadi satu keluarga hingga waktu satu bulan yang ada menjadi terasa begitu cepat dan kurang bagi mereka warga masyarakat Pulung Ponorogo.

Dalam kesehariannya, para peserta KPM selalu berbaur dengan masyarakat, mulai dari membantu di lembaga formal sampai membantu pekerjaan rumah tangga, dan peserta KPM juga diminta bantuan dalam berbagai kegiatan seperti perlombaan PHBN, penyuluhan kesehatan, ekonomi, pendidikan dan keagamaan (imam tahlil, imam shalat lima waktu), dan lain sebagainya.

Pelaksanaan pengkaderan dan pembinaan terhadap tenaga pendidik TPA dan pemberian motivasi terhadap orang tua untuk memperdulikan pendidikan agama

134 Bapak Samud (tokoh Desa Patik), wawancara, tanggal 2 Oktober 2014.

terhadap anak-anaknya, masyarakat memberikan tanggapan yang sangat positif. Hal ini terbukti mereka sangat mendukung dengan adanya acara tersebut. Respon positif tersebut ternyata telah berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Tawar:

“Pengkaderan dan pembinaan guru TPA telah memberikan motivasi terhadap orang tua yang belum sadar akan pentingnya pendidikan agama, maka kami atas nama tokoh agama sangat berterima kasih dan berharap agar para peserta KPM STAIN Ponorogo tahun 2014 bersedia untuk menjadi pendidik di TPA seterusnya meskipun hanya satu minggu sekali dan juga mau bersilaturahmi setelah KPM selesai sehingga tali persaudaraan dan kekeluargaan yang telah terjalin selama satu bulan ini tidak putus”.¹³⁵

Secara umum masyarakat Kecamatan Pulung sangat mendukung program dari peserta KPM STAIN Ponorogo, terlebih lagi KPM ini berbasis masjid dengan pendekatan PAR (*Participatory Action Research*) dan *focus group discussion* (FGD) yang menurut mereka sangat menguntungkan bagi masyarakat secara umum terlebih lagi dari sisi pendidikan agama dan kerukunan warga masyarakat. Mereka pun dapat mengetahui potensi dan masalah yang selama ini tidak mengetahui jalan mana yang harus ditempuh untuk mengatasinya, karena kegiatan tersebut diorganisir dan dipimpin oleh masyarakat sendiri.

135 Bapak Tawar (tokoh agama Desa Patik), wawancara, tanggal 2 Oktober 2014.

Selain di atas, nilai budaya yang berlaku di masyarakat Pulung juga telah berpengaruh terhadap persepsi mereka tentang pendidikan, terutama dalam memandang nilai anak. Nilai yang di maksud di sini adalah hal-hal yang di anggap baik dan diyakininya. Nilai juga dipandang sebagai kaidah hidup seseorang sehingga sesuatu yang di anggap baik akan selalu dihargai, dipelihara, dan di agungkan dalam mengambil keputusan. Nilai yang merupakan kaidah hidup seseorang akan tercermin melalui pola pikir, aspirasi, persepsi, dan bertindak.¹³⁶ Nilai-nilai tersebut, yang menjadikan pemerintah desa dan semua unsur masyarakat tokoh masyarakat, tokoh agama, duduk bersama untuk membicarakan tentang kepentingan pendidikan agama bagi anak anak mereka.

Nilai-nilai budaya tersebut, juga memunculkan keinginan yang kuat dari anggota kelompok jamaah dan masyarakat di Kecamatanamaran Pulung untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan anggota kelompok dalam suatu kegiatan KPM. Anggota jamaah dan masyarakat telah melibatkan diri dan mencari kesempatan yang dapat memperkaya hubungan-hubungan sosial yang menguntungkan semua masyarakat. Perilaku inisiatif masyarakat Kecamatan Pulung ini dalam mencari informasi berbagai pengalaman, memperkaya ide, pengetahuan, dan beragam bentuk inisiatif lainnya merupakan wujud modal sosial yang berguna dalam pengembangan program KPM STAIN Ponorogo.

Pola kegiatan seperti di atas yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dengan memanfaatkan

136 Kaswardi, Mandat Masyarakat yang dijalankan oleh Sistem Sekolah, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), 7.

kearifan-kearifan lokal masyarakat merupakan alternatif merangkai spirit harmoni yang patut dipertimbangkan. Melalui kesediaan berbagai aktor lokal yang terlibat dalam berbagai program sosial keagamaan, ekonomi dan pendidikan dan memanfaatkan kebijaksanaan setempat diharapkan potensi konflik akan dapat diarahkan menjadi energi positif bagi masyarakat. Kearifan lokal, menurut John Haba sebagaimana dikutip oleh Irwan Abdullah,¹³⁷ “mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat yang dikenal, dipercayai dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di antara warga masyarakat”.

Dialog aksi melalui pendidikan, perkonomian, sosial keagamaan, pendampingan yang tetap memperhatikan kearifan lokal dengan sendirinya akan dan mengoptimalkan potensi lokal, menumbuhkan kembangkan institusi lokal sebagai subyek (pelaku) dalam melakukan perubahan sosial (*social transformation*), mendorong proses interaksi untuk mengembangkan wawasan, sikap, dan ketrampilan masyarakat, pranata, karakteristik, dan tokoh-tokoh lokal.

Apa yang terjadi di masyarakat Kecamatan Pulung tersebut di atas, dalam pandangan teori fungsionalisme-struktural, bahwa telah terjadi penguatan hubungan sosial. Masyarakat dengan sendirinya menyadari bahwa hubungan sosial dan solidaritas dapat diperkuat dengan sendirinya, sehingga potensi perpecahan atau konflik dapat dicegah. Menurut paradigma ini, konsep kohesi sosial,

¹³⁷ Irwan Abdullah, dkk (ed.), *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 27.

kerukunan antarumat beragama, keharmonisan adalah usaha sistematis untuk mengarahkan proses interaksi sosial menuju kerukunan yang intens, baik dalam bentuk kerjasama, akulturasi, akomodasi, maupun asimilasi budaya. Teori ini memandang bahwa masyarakat membutuhkan kondisi kohesif sehingga kehidupan sosial sangat bergantung pada solidaritas yang didasarkan pada resiprositas dan kerjasama. Dengan demikian, konflik dalam masyarakat harus dilihat sebagai deviasi dari watak sosial.¹³⁸

2. Partisipasi Masyarakat dalam Program KPM STAIN Ponorogo

Partisipasi masyarakat Kecamatan Pulung berbanding lurus dengan respon mereka terhadap program-program KPM STAIN Ponorogo hal tersebut telah diuraikan di bagian depan (baca hasil dan dampak). Partisipasi masyarakat terhadap KPM STAIN Ponorogo sangatlah tinggi. Selain karena program-programnya sesuai dengan kebutuhan dasar mereka, metode dan pendekatan *andragogy* yang diterapkan dalam KPM ternyata sangat sesuai dengan karakteristik masyarakat.

Pendekatan *andragogy* mempunyai tujuan esensial pengembangan masyarakat adalah tercapainya peningkatan kualitas manusia, maka perubahan yang diharapkan terjadi dalam program KPM adalah perubahan kualitas diri (*insaniah*).¹³⁹ Program-program pengembangan masyarakat telah menyentuh aspek-aspek penting kualitas

¹³⁸ Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 169.

¹³⁹ Suisyanto, Islam Dakwah & Kesejahteraan Sosial, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Yogyakarta: 2005), 41.

manusia, berpusat pada masalah yang sedang dihadapi masyarakat. Dengan pendekatan ini telah memunculkan kesepakatan sosial bahwa upaya pengembangan masyarakat adalah kegiatan yang berusaha melepaskan dari masalah-masalah yang dihadapi masyarakat menuju kepada kehidupan baru yang harmonis dan penuh kedamaian.

Partisipasi jamaah masjid dan masyarakat yang tinggi dalam berbagai program KPM menunjukkan telah terjadi dialog aksi di antara mereka. Dialog aksi bagi masyarakat Pulung bukan hanya sebuah pilihan, tetapi telah menjadi kebutuhan hidup yang menentukan masa depan mereka. Menurut Knitter, inilah dialog dalam arti sebenarnya: suatu perjumpaan di mana semua pihak berbicara tanpa takut, namun juga dan sama pentingnya, mendengarkan tanpa rasa takut.¹⁴⁰ Dialog yang tidak saja pada tataran teologis tetapi juga merekomendasikan kesejahteraan manusia pada semua tingkatan dan dalam semua dimensi.

Partisipasi yang tinggi dari masyarakat Pulung juga didasarkan bahwa berbagai kegiatan yang dilakukan bersama tim KPM karena lebih menekankan pada problem-problem kemanusiaan yang mereka hadapi dan lebih konkret seperti kesejahteraan manusia, kemiskinan, pendidikan, yang terus terjadi di masyarakat secara global. Dialog seperti ini menurut Knitter, dialog akan menambah kredibilitas moralnya, karena tidak hanya dilakukan pada tingkat intelektual dan spiritual, dan selalu

140 Paul Knitter, *One earth Many Religions, Multifaith Dialogue & Global Responsibility*, with Preface by Hans Kung (Maryknoll, New York: Orbis Books, 1995), 83.

menyentuh masalah permasalahan sosial masyarakat.¹⁴¹ Dengan demikian tim KPM STAIN Ponorogo dengan berbagai program nyata bersama masyarakat sebenarnya telah membangun kesadaran dan merumuskan bersama dengan masyarakat akan kebenaran ajaran agama dalam perspektif pemeluk agama lain dan bagaimana kewajiban yang harus dijalankan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Hal di atas dapat dijelaskan bahwa pengembangan masyarakat yang berangkat dari *real needs* (kebutuhan riil) masyarakat hasilnya akan segera dapat dinikmati oleh masyarakat. Masyarakat didorong berperan aktif dengan segala potensi yang dimilikinya. Masyarakat dengan sendirinya akan terkondisikan dan merasa aman dengan sikap keterbukaan dan keberanian dalam mengungkapkan berbagai pengalaman-pengalamannya sekalipun pengalaman yang pahit. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka tim KPM berusaha menghindari setiap munculnya perdebatan-perdebatan yang melelahkan dan apalagi terjadi saling menjatuhkan satu sama lain. Perbedaan pandangan, pikiran dan sikap yang terjadi pada masyarakat memang suatu realitas yang tidak bisa dihindari, akan tetapi semua itu dipandang oleh tim KPM STAIN Ponorogo sebagai modal dalam membangun kebersamaan secara dialogis.

Kegiatan sosial kemasyarakatan yang dipusatkan dari masjid telah menyadarkan masyarakat bahwa agama yang dianutnya terdapat hikmah-hikmah (*wisdom*) ketuhanan dan kemanusiaan yang mirip, atau bahkan sama antara

141 Paul Knitter, *One earth Many Religions, Multifaith Dialogue & Global Responsibility*, 151.

satu sama lain, maka kearifan terdalem pada masing-masing tidak hanya dapat memerkaya dan mempersubur satu sama lain, tetapi juga dapat dan akan terus memberi kehangatan makna bagi mereka dan bahkan bagi masa depan anak-anaknya. Dengan kata lain, hikmah dan kearifan yang dikandung oleh ajaran agama diyakini akan terus relevan dan aktual, apalagi jika digali dan diperkaya dengan cara dialog aksi yang selama ini dilakukan bersama tim KPM. Berdasarkan keyakinan yang demikian hanya dengan kekayaan *wisdom* itu manusia-manusia sepanjang waktu dapat terus memberi makna di dalam hidupnya, dapat menjadi manusia yang otentik, dan dengan sendirinya terhindar dari keterasingan (alienasi) yang sering menghinggapi manusia sekarang ini. Lebih dari itu, dialog aksi dapat menjadi “air yang hangat” yang dapat melembutkan pergaulan dan hubungan antar agama yang dirasa semakin “mengeras.”

Kerjasama, interaksi dan partisipasi mereka dalam kegiatan KPM, disadari sebagai bentuk dialog yang merupakan salah satu cara penting untuk membudayakan hidup rukun dan harmonis di antara mereka. Ajaran agama mereka yang selama ini dianutnya ternyata memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyelesaikan berbagai problematika kehidupan. Semangat bersama mengenai perlunya upaya dalam membangun kerukunan antar umat beragama di Kecamatan Pulung telah mengalami peningkatan cukup signifikan. Fenomena ini membuktikan bahwa respon jamaah dan masyarakat terhadap masalah kerukunan beragama untuk menuju hari depan yang lebih baik bagi kelangsungan hidup bermasyarakat telah menjadi nilai hidup mereka yang akan diwariskan pada anak cucu mereka.

Tidak sampai di situ saja, masyarakat Pulung juga semakin antusias menjalankan sholat berjamaah, perbedaan faham ajaran agama antara LDII, Salafi, NU, Muhammadiyah, Kristen yang selama mewarnai dalam kehidupan beragama juga tidak kelihatan lagi. Mereka masing-masing telah bersedia meletakkan iman pada posisi yang setara dan melakukan aksi bersama untuk mencapai kehidupan yang sejahtera lahir dan batin bagi daerah tempat tinggalnya. Perbedaan yang berpotensi konflik tersebut benar-benar telah menjadi energi positif bagi masyarakat dalam membina kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan bersama melalui berbagai program-program KPM STAIN Ponorogo.

Meski demikian, Knitter meyakini dialog etis atau dialog aksi yang terjadi pada masyarakat Pulung tersebut berhubungan erat dengan dialog teologis, atau dialog etis akan memperkaya dialog teologis. Dalam pengalaman Knitter, dialog etis akan membentuk persahabatan baru di antara umat beragama, suatu persahabatan yang diukir dan dipererat karena berbagi pengalaman, karena tindakan nyata penuh kasih bagi kesejahteraan sesama. Dari dalam persahabatan itu akan muncul kemampuan baru untuk menghormati *keliyahan* rekan rekan agama lain, menjadi sabar dengannya, dan mungkin belajar dan diperkaya olehnya. Karena persahabatan itu, dialog teologis-mistis dapat berkembang. Dalam bahasa Knitter “dialog etis akan mengasuh teologi.” Ada hubungan yang kuat antara dialog etis dan teologis untuk saling menghimbau, saling menghidupkan, saling menantang, dan saling mentransformasikan. Di dalam dialog etis, umat beragama bertindak, bekerja sama sekaligus berdoa bersama-sama untuk “menyelamatkan” bumi dan para penghuninya dari

berbagai penderitaan dan krisis yang sedang melanda dunia saat ini.¹⁴²

Dengan demikian dialog umat beragama bukan sekadar usaha menyelesaikan konflik yang ada, melainkan usaha untuk membangun suatu “masyarakat yang saling bergaul,” suatu “masyarakat penuh kasih dan bernalar” melintasi berbagai halangan ras, etnis, dan agama; umat belajar memahami perbedaan-perbedaan yang ada bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai sesuatu yang “wajar” dan “normal.” Knitter, percaya bahwa dialog merupakan ikhtiar untuk membantu umat dalam memahami dan menerima yang lain dalam “keberlainan” mereka. Dialog adalah usaha membuat orang-orang merasa nyaman berada “di rumah” dengan kemajemukan, membangun rasa saling menghargai dalam keanekaragaman, dan mengusahakan agar berbagai hubungan itu dapat mempersatukan mereka saat seluruh umat terancam oleh kekuatan-kekuatan yang memisahkan.

Dialog aksi yang terjadi di Kecamatan Pulung, ini tidak perlu, bahkan tidak boleh bagi masyarakat untuk meninggalkan agama dan kepercayaannya seperti yang terjadi di Desa Klepu Kecamatan Soko Ponorogo. Bahkan sebaliknya, agamanya sendiri harus dipegang teguh disertai sikap penghargaan kepada agama dan kepercayaan orang lain. Dialog aksi terjadi dengan sangat menghargai orang lain, bersedia mendengarkan pendapat orang lain, jujur, terbuka, dan bersedia untuk bekerjasama dengan orang lain. Dialog dengan melibatkan seluruh elemen

142 Paul Knitter, *Introducing to Theologies of Religions*, (Maryknoll, New York: Orbis Books, 2003), 246.

masyarakat, laki-laki dan perempuan tidak memandang agama, status sosial, suku, ras, dan golongan dalam setiap proses pembangunan dan perubahan sosial di masyarakat akan lebih bisa diterima dan fahami oleh masyarakat. Dialog seperti ini telah memunculkan jaminan dan dihormatinya iman dan indentitasnya pihak lain, serta terbukanya peluang untuk membuktikan keagungan agamanya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, memahami dan membangun kesadaran terhadap realitas keragaman seharusnya tidak hanya dilakukan ketika konflik terjadi. Justru jauh lebih penting adalah bagaimana kesadaran dan penghargaan terhadap keragaman ini menjadi agenda bersama yang terus menerus diperjuangkan tanpa melihat apakah kondisinya sedang damai atau konflik. Dengan cara semacam ini, kerukunan, harmoni, toleransi, dan saling menghargai akan menjadi kenyataan. Dalam kerangka pandang semacam inilah, salah satu elemen penting yang dapat memberi kontribusi bagi terciptanya kerukunan hidup antarumat beragama.

Dengan demikian dialog umat beragama bukan sekadar usaha menyelesaikan konflik yang ada, melainkan usaha untuk membangun suatu “masyarakat yang saling bergaul,” suatu “masyarakat penuh kasih dan bernalar” melintasi berbagai halangan ras, etnis, dan agama; umat belajar memahami perbedaan-perbedaan yang ada bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai sesuatu yang “wajar” dan “normal.” Knitter, percaya bahwa dialog merupakan ikhtiar untuk membantu umat dalam memahami dan menerima yang lain dalam “keberlainan” mereka. Dialog adalah usaha membuat orang-orang merasa nyaman

berada “di rumah” dengan kemajemukan, membangun rasa saling menghargai dalam keanekaragaman.

Kondisi umum Kecamatan Pulung yang sangat kondusif, berdasarkan observasi ditopang oleh berbagai faktor yang dipandang menguntungkan bagi upaya perwujudan kerukunan antara lain; 1) komitmen yang tinggi, partisipasi, saling pengertian, dan peran sentral para tokoh agama selaku simbol pemersatu. 2) Dukungan politis pemerintahan yang besar dengan otonominya selaku penanggungjawab utama dalam upaya perwujudan wilayah setempat.¹⁴³ Ajaran keagamaan dan kearifan budaya lokal yang sarat dengan nilai dan pesan-pesan kerukunan. Tingkat pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial warga setempat, dari waktu ke waktu makin meningkat.

KPM Tematik Posdaya berbasis Masjid telah mengembangkan kerukunan dan resolusi konflik dan berperan mewujudkan terpeliharanya sikap saling menghormati eksistensi dan identitas budaya dan tradisi-tradisi yang ada di antara masyarakat Pulung sehingga terciptanya kerukunan hidup dan harmonisasi keidupan. Kerjasama lintas komunitas dan antarumat beragama menjadi bagian penting dari keberhasilan program KPM STAIN Ponorogo. Hal ini ditunjukkan melalui kerjasama untuk saling menjaga lingkungan untuk menjamin terlaksananya kegiatan keagamaan yang membutuhkan kekhitmadan dan ketenangan, seperti saat pelaksanaan kegiatan warga NU, Muhammadiyah, Salafi bagi kaum muslim dan peringatan hari raya Natal bagi umat Kristen.

143 Haniatul Mar'ah, fieldnotes, tanggal 6 Agustus 2014.

Simpulan

Fenomena sosial dengan berbagai isu problematik yang terkait dengan pendidikan dan paham agama, kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, kondisi ekonomi, kesehatan, dan lain-lain telah memperlihatkan dampak global dalam berbagai lini kehidupan. Dengan mencermati isu-isu tersebut Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Ponorogo sejak tahun 2011 telah merevitalisasi program pengabdian masyarakatnya dalam bentuk Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Tematik Posdaya berbasis Masjid.

1. KPM tematik Posdaya berbasis Masjid di STAIN Ponorogo menggunakan pendekatan PAR (*Participatory Action Research*) dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Pemetaan (*Mapping*), teknik ini digunakan untuk memfasilitasi jamaah atau masyarakat dalam menggambarkan keadaan wilayah secara umum dan secara khusus terkait dengan peta sosial keagamaan (topikal). 2) Penelusuran Desa (*transector*) teknik ini telah menemukan modal sosial masyarakat sebagai *integrative climate (bridging social capital)* dalam bentuk *civic association* yakni interaksi, kerjasama, komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, keagamaan, kesehatan, dan pendidikan. 3) Bagan Hubungan Kelembagaan (*Venn Diagram*), teknik ini untuk mengidentifikasi apa permasalahan masyarakat, siapa-siapa yang terlibat, mengapa permasalahan tersebut muncul, di mana lokus permasalahan muncul (menunjuk peran dominan), serta bagaimana bentuk dan pola peran dimainkan. 3) Alur Sejarah (*Timeline*), adalah penelusuran sejarah rangka rekonstruksi serta peristiwa yang pernah terjadi di tempat KPM.

2. Respon dan adaptasi yang tinggi telah memunculkan partisipasi yang tinggi pula jamaah dan masyarakat terhadap program-program KPM STAIN Ponorogo, seperti program pengkaderan ustadz/guru agama, pendidikan agama, perekonomian, kesehatan dan kerja bakti. Kegiatan sosial kemasyarakatan yang dipusatkan dari masjid telah menyadarkan masyarakat bahwa agama yang dianutnya terdapat hikmah-hikmah (*wisdom*) sebagai modal dalam merangkai keharmonisan dalam kehidupan memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyelesaikan berbagai problematika kehidupan. Perbedaan yang ada selama ini telah menjadi energi positif bagi masyarakat dalam membina kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan bersama.

Dialog aksi yang mereka lakukan telah benar-benar memperkaya dialog teologis mereka, hal ini telah terbukti dengan berfungsinya masjid dalam dimensi yang sangat luas, tidak hanya fungsi ibadah dan dakwah, tetapi juga fungsi edukasi, ekonomi, sosial dan budaya, serta komunikasi dan informasi, dan jejaring sosial. Lebih dari itu, dialog aksi telah dapat menjadi “air yang hangat” yang dapat melembutkan pergaulan dan hubungan antar agama.

Rekomendasi

1. Untuk menjaga kelanggengan dialog kehidupan dan dialog aksi di Kecamatan Pulung perlu adanya revitalisasi modal sosial dengan melakukan *institutional development* wadah kerukunan. Untuk ini, perlu dikembangkan pengembangan wadah kerukunan yang merupakan forum komunikasi kelompok-kelompok yang secara murni menghendaki

kerukunan. Untuk itu, wadah ini harus memiliki kejelasan orientasi (visi dan misi) yang dapat diprogramkan seperti program dalam Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) STAIN Porogo.

2. Peningkatan efektivitas fungsi lembaga-lembaga keagamaan dan pranata kearifan budaya lokal.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan Abdullah, dkk (ed.), *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ahmad, Ali Haidlor, *Dinamika kehidupan Keagamaan di Era Reformasi*, Jakarta: Kemenag RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010.
- , "Umat Beragama di Kabupaten Kediri: Antara Harmoni dan Konflik" dalam *Harmoni*, Vol. X. Nomor. 2 April-Juni 2011.
- Ali, Mukti, "Dialog dan Kerjasama Agama dalam Menanggulangi Kemiskinan" dalam Sairin, Weinata (ed.), *Dialog Antar Umat Beragama: Membangun Pilar-pilar Keindonesiaan yang Kukuh*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994.
- Arifin, Anwar, *Dakwah Kontemporer, Sebuah Studi Komunikasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Basyuni, Muhammad M., *Kebijakan dan Strategi Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Balitbang dan Diklat Depag RI, 2007.
- Basyuni, Muhammad M., *Kebijakan dan Strategi Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Balitbang dan Diklat Depag RI, 2007.

- Bogdan, Robert C. & Sari Knoop Biklen, *Quality Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Boston : Allyn and Bacon, tt.
- Coleman, J, S, *Sosial Capital in the Creation of Human Capital*, Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Coleman, J.S., *Foundations of Social Theory*, Cambridge: Harvard University Press, 1988.
- Dean, Thomas, ed. *Religious Pluralism and Truth Essays on Cross-Cultural Philosophy of Religion*. State University of New York, 1985.
- Ditpertaits, *Panduan Program Pemberdayaan Mutu Madrasah/Pesantren Dampingan Perguruan Tinggi Agama Islam*, Jakarta: Kemenag RI, Ditpertaits, 2003.
- El Mahdi, Lathifatul Azizah,, "Dialog Aksi Antrummat Beragama: Strategi Membangun Perdamaian dan Kesejahteraan Bangsa: dalam *Harmoni*, Volume VIII, nomor 30, April-Juni 2009, 41.
- Falianto, Bayu Falianto, *Dinamika Terbentuknya Trust (Suatu Studi pada Nasabah BCA Cabang Depok)*, Skripsi Sarjana Strata 1, FISIP-UI, 1999.
- Fukuyama, Francis, *Trust: The Sosial Virtues and the Creation of Prosperity*, New York: the Free Press, 1995.
- Gazalba, Sidi, *Mesjid: Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta, Pustaka Antara, 1989.
- Gidden, Anthony, *Sosiology*, Cambridge: Polity Press, 1993

- Hasan, Noorhaidi, “Dakwah, Aktivitas Diskursif dan Tantangan Globalisasi” dalam Kemenag RI, *Gerakan Dakwah Islam dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.
- Hick, John, *Problem of Religious Pluralism*, London: The Macmillan Press, 1985.
- Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Kaswardi, *Mandat Masyarakat yang dijalankan oleh Sistem Sekolah*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2006.
- Kementerian Agama RI, *Peran Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Kemenag RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013.
- Kementerian Agama RI, *Peranan Forum Kerukuan Umat Beragama*, Jakarta: Kemenag RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010.
- Knitter, Paul, *One earth Many Religions, Multifaith Dialogue & Global Responsibility*, with Preface by Hans Kung, Maryknoll, New York: Orbis Books, 1995.
- Knowles, Malcolm, *Modern Practice of Edult Education from Paedagogy to Andragogy*, Chicago: Fiolet Publishing Company, 1979.

- Kung, Hans Kung, "Sebuah Model Dialog Kristen-Islam" dalam Jurnal *Paramadina*, Jakarta, Paramadina Juli-Desember, 1998.
- Laporan KPM STAIN Ponorogo di Kecamatan Pulung Ponorogo tahun 2014.
- Lincoln, Norman K. Denzin Yvonna S., *Handbook of Qualitative Research*, California: Sage Publication, 1994.
- LPM UIN Malang, *Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tematik Posdaya Berbasis Masjid*, Malang: PT Citra Kharisme Bunda, 2011.
- Mawardi M., *Peranan Social capital dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Lampung: Fakultas IAIN Raden Intan, 2007.
- Miles, M. B. and A.M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif* terj. Tjetjep Rohadi, Jakarta: UI Press, 1992.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Muhyidin, Asep & Safei, Agus Ahmad, *Metode Pengembangan Dakwah*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Niken, Handayani,, *Modal Sosial Dan Keberlangsungan Usaha (Studi Deskriptif Tentang Keterkaitan Hubungan Modal Sosial Dengan Keberlangsungan Usaha Pengusaha Batik Di Kampong Kauman, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta)*, Surakarta: Fakultas ISIPOL, Universitas Sebelas Maret, 2007.

- P3M STAIN Ponorogo, *Buku Pedoman Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Posdaya Berbasis Masjid dengan Pendekatan Participatory Action Research (PAR)*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2014.
- Putnam, Robert D, "Bowling alone: America's Declining Social Capital" *Journal of Democracy*.
- Poerwanto, Hari, *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Qasim Zaman, Muhammad, *The Ulama in Contemporary Islam*, (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2002.
- Rahardjo, Mudjia (ed), *Quo Vadis Pendidikan Islam, Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial, dan Keagamaan*, Malang: UIN Malang Press, 2006.
- Rahardjo, Mudjia, (ed), *Quo Vadis Pendidikan Islam, Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial, dan Keagamaan*, Malang: UIN Malang Press, 2006.
- Rasidi, Agus, *Manajemen Masjid dan Masjid Online*, 16 September 2014, www.arroyyan.Com.
- Suisyanto, (ed) *Islam Dakwah & Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Yogyakarta: 2005.
- Suisyanto, dkk, *Islam Dakwah & Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: IISEP-CIDA, Fak. Dakwah UIN Yogyakarta, 2005.

- Suseno, Franz Magnis, *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2001.
- Tim P3M STAIN Ponorogo, *Metodologi Perubahan Sosial, Berbasis Participatory Action Research (PAR)*, Ponorogo: P3M STAIN Ponorogo, 2009.
- Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Masyarakat Membangun Harmoni: Resolusi Konflik Dan Bina Damai Etnorelijius Di Indonesia*, Jakarta: kemenag RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013.
- Suisyanto, dkk, *Islam Dakwah & Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: IISEP-CIDA, Fak. Dakwah UIN Yogyakarta, 2005.
- Zaman, Muhammad Qasim, *The Ulama in Contemporary Islam*, Pricenton and Oxford: Pricenton University Press, 2002.

DHARMA WACANA, PEDHARMA WACANA DAN AJEG BALI DI BALI PASCA REFORMASI

I Made Arsana Dwiputra

Abstrak

Penelitian ini mendalami dinamika bentuk penyuluhan/bimbingan/penyiaran dalam agama Hindu di Bali pasca reformasi, yang dikenal dengan nama Dharma Wacana. Setting waktu pasca reformasi dikemukakan dengan alasan dalam setting waktu tersebut Dharma Wacana mendapatkan popularitas dan mampu menjangkau audience yang lebih luas dibandingkan padanannya di era Orde Baru yaitu mimbar rohani yang sepi pemirsa dan minim apresiasi. Dharma Wacana menuai sukses setelah mengalami reinkarnasi, kelahiran kembali di era pasca reformasi lewat reproduksi wacana politis dan kemasan serta penyampaian yang berbeda dengan mimbar rohani di era Orde Baru.

Namun dinamika Dharma Wacana pasca reformasi juga mendapatkan tantangan dari munculnya fenomena identitas politik (etnis, agama) yang disebut Ajeg Bali. Sebagai usaha untuk menjaga, memperkuat (mengAjegkan), adat, budaya (Bali), dan agama Hindu, Ajeg Bali mendapat respon luas elit dan masyarakat Bali dan terutama sponsor utamanya yaitu kelompok media Bali Post (Bali TV) dan pemiliknya yaitu Satria Naradha. Bisa disebut Ajeg Bali telah mendominasi ruang dan wacana publik di Bali dan Dharma Wacana tidak terlepas dari dominasi ini.

Fenomena Ajeg Bali ini disatu sisi menawarkan upaya memperkuat identitas 'kedalam' dari masyarakat Bali-Hindu, namun

disisi lain meliyankan secara pejoratif yang lain, yang non Bali-Hindu. Dua wajah Ajeg Bali inilah yang memantik kecenderungan Dharma Wacana untuk menjadi media meningkatkan pengetahuan agama disatu sisi dan cenderung menjadi eksklusif disisi lain.

Dalam konteks kehidupan beragama yang beragam dan dinamis serta munculnya tantangan menguatnya identitas etnis dan agama inilah Dharma Wacana dan Pedharma Wacana berkumandang dan berjalan. Mampukah beranjak dari perspektif inwardlooking yang mendorong sikap dan pemahaman agama yang eksklusif menuju perspektif yang outward looking dan memantik pemahaman dan sikap beragama yang inklusif dan pluralis, sehingga Dharma Wacana bisa berkontribusi menciptakan kehidupan beragama yang toleran dan harmonis di Bali.

Kata Kunci: Dharma Wacana, Ajeg Bali, inward looking, outward looking, eksklusif, inklusif, dan pluralis.

Pendahuluan

Angin reformasi yang berhembus hingga ke Bali, telah membawa angin segar dalam kehidupan beragama pemeluk Hindu di Bali. Sejak berkumandang beberapa tahun lalu, gerakan reformasi yang diinisiasi mahasiswa dan masyarakat sipil Indonesia telah ikut berkontribusi pada perubahan yang dinamis dalam Agama Hindu. Perubahan ini terutama menyangkut aspek penyuluhan/bimbingan/penyiaran Agama Hindu. Satu bentuk penyuluhan/bimbingan/penyiaran agama Hindu tersebut dikenal dengan terminologi yang populer saat ini di kalangan umat Hindu di Bali dan Indonesia yaitu *Dharma Wacana*.

Secara etimologis Dharma berarti kebajikan dan Wacana berarti pengetahuan dan berbicara. Sebuah proses berbagi pengetahuan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai pengetahuan tentang kebajikan. Jadi *Dharma Wacana* bisa disebut sebagai metode dan proses transfer pengetahuan tentang kebajikan (Setia 1993, Wiratmadja 1995). Proses transfer ilmu pengetahuan ini umumnya dilakukan oleh guru kepada murid atau dalam konsep Siwaisme di Bali dikenal sebagai hubungan Siwa (*sulinggih*, *pandita*) dengan *sisya* (murid, umat, krama) (Palguna 1999).

Secara formal *Dharma Wacana* tertuang dalam *Bhisama* (keputusan) *Mahasabha* (pertemuan agung) Parisadha Hindu Dharma Indonesia yang diadakan 24-27 Februari 1986¹⁴⁴. *Dharma Wacana* ditetapkan sebagai satu dari enam pola pembinaan Agama Hindu (Sad Dharma), yang terdiri dari *Dharma Wacana*, *Dharma Gita*, *Dharma Tula*, *Dharma Yatra*, *Dharma Sadhana*, *Dharma Santi* (Subagia 2007). Namun walaupun sudah secara resmi menjadi *bhisama* (keputusan) Parisadha Hindu Dharma Indonesia, *Dharma Wacana* relatif tidak tersosialisasikan dengan baik dan implementasinya tidak terlihat di lapangan¹⁴⁵. *Dharma Wacana* nyaris tidak terdengar dan kiranya lebih banyak hanya menjadi wacana di

144 Hasil fotocopy risalah bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia dalam Mahasabha pada 24-27 Februari 1986. Informasi ini juga penulis dapatkan dari wawancara dengan Ida Pandita Mpu Jaya Acharyananda di rumah beliau di Griya Mumbul Sari, Lebih/Serongga, Gianyar pada Selasa 21 Oktober 2014. Ida Pandita Mpu Jaya Acharyananda saat ini menjabat sebagai Dharma Adhyaksa (orang kedua dalam Sabha Pandita (semacam forum rohaniawan)) dalam kepengurusan Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat.

145 Dari serangkaian wawancara yang penulis lakukan, semua narasumber menyatakan baru mendengar istilah Dharma Wacana pasca Reformasi saat ditayangkan televisi lokal; Bali TV. Pengalaman dan sejauh bacaan penulis terhadap media yang beredar, istilah Dharma Wacana baru terdengar belakangan setelah Bali TV menayangkannya.

tingkat elit agamawan Hindu¹⁴⁶. Istilah *Dharma Wacana* sendiri relatif tidak pernah terdengar ataupun disinggung dan menjadi perbincangan misalnya dalam *upakara* (ritual) di Pura Pura dimana umat berkumpul.

Popularitas *Dharma Wacana* yang hampir menyentuh seluruh lapisan masyarakat Hindu di Bali dan kemudian menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia yang terdapat pemeluk Hindunya terjadi pasca reformasi. Hal ini terjadi setelah Bali TV membuat dan menayangkan sebuah program penyuluhan/bimbingan/penyiaran agama Hindu yang diberi nama *Dharma Wacana*. Bali TV sendiri lahir dari rahim reformasi yang membuka keran kebebasan mendirikan media baru termasuk media televisi lokal.

Bali TV inilah yang mempopulerkan *Dharma Wacana* yang ditayangkan setiap hari di Bali TV sehingga akrab ditelinga masyarakat Bali-Hindu. Menghadirkan narasumber (*Pedharma Wacana*) yang ahli di bidangnya dan dengan gaya penyampaian yang akrab membuat program acara *Dharma Wacana* menyita perhatian pemirsanya¹⁴⁷. Saat ini hampir semua televisi lokal¹⁴⁸ di Bali menayangkan acara *Dharma*

146 Hal ini diamini oleh dua sulinggih dan peDharma Wacana terkenal di Bali yaitu Ida Pandita Mpu Jaya Acharyananda dan Ida Pedanda Gede Made Gunung yang penulis wawancarai secara terpisah. Wawancara dengan Ida Pandita Mpu Jaya Acharyananda di rumah beliau Griya (rumah untuk kasta Brahmana atau Sulinggih dari kasta Sudra) Mumbul Sari, Lebih-Serongga, Gianyar pada Selasa 21 Oktober 2014. Wawancara dengan Ida Pedanda Gede Made Gunung di rumah beliau di griya Purnawati, Blahbatuh, Gianyar pada Minggu 26 Oktober 2014.

147 Ini bisa dilihat dari maraknya undangan penyelenggaraan Dharma Wacana oleh instansi pemerintah, swasta, masyarakat umum. Wawancara dengan Gede Eka Pery Purnama pada Senin 22 September 2014.

148 Selain Bali TV dalam catatan penulis ada tiga (3) televisi lokal lain yang mengudara di Bali, diantaranya Dewata TV yang bekerjasama dengan Kompas TV, BMC yang bekerjasama dengan MNC groups, dan Alam (A) TV. Selain televisi lokal

Wacana dan kiranya setiap pemirsa televisi lokal di Bali kenal dengan istilah *Dharma Wacana*.

Dharma Wacana walaupun secara formal sudah ditetapkan sebagai satu dari enam pola pembinaan agama Hindu sejak masa Orde Baru, tetapi pada era pasca reformasi lah *Dharma Wacana* ber-*Reinkarnasi* (terlahir kembali) dan menjadi fenomena menarik dan mewarnai semaraknya penyuluhan/bimbingan/penyiaran agama Hindu. Artinya popularitas *Dharma Wacana* dan dampaknya bagi pengetahuan umat Hindu salah satunya terdorong oleh reformasi.

Bila diperhatikan lebih seksama bentuk penyuluhan/bimbingan/penyiaran Agama Hindu telah ada sebelum reformasi bergulir. Di masa Orde Baru Mimbar Rohani Hindu bisa disebut padanan dari *Dharma Wacana*. Dengan durasi dua jam penayangan dan disiarkan seminggu sekali oleh TVRI sebagai satu-satunya lembaga penyiaran kala itu, Mimbar Rohani Hindu menjadi bagian dari program yang digagas dan diluncurkan oleh departemen Agama untuk penyuluhan/bimbingan/penyiaran agama di Indonesia. Selain untuk Agama Hindu juga terdapat Mimbar Rohani Islam, Protestan, Katolik, dan Budha.

Walau keduanya bisa disebut sebagai bentuk penyuluhan/bimbingan/penyiaran Agama Hindu, terdapat perubahan dan perbedaan antara Mimbar Rohani Hindu dan *Dharma Wacana*. Selain di tingkat terminologi juga menyangkut dimensi politis reproduksi wacana, kemasan, dan cara penyampaian. Dengan kemasan yang berbeda dan menarik tersebut, telah membuat umat Hindu berpaling

ini, televisi yang skalanya sudah nasional juga membuka siaran khusus (suplemen) Bali seperti Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), Indosiar dan baru-baru ini Metro TV.

kepada *Dharma Wacana* yang muncul pasca reformasi di Bali TV dibandingkan Mimbar Rohani Agama Hindu yang minim pemirsa dan penggemar di TVRI.

Dalam Mimbar Rohani Agama Hindu (termasuk juga agama-agama lainnya di Indonesia) terlihat kuatnya dominasi Negara (*state*) berserta aparatusnya. Mulai dari lembaga Negara yaitu Departemen Agama yaitu lewat Dirjen Bimas Hindu-Budha, lembaga-lembaga perwakilan agama dalam konteks Hindu yaitu Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan lembaga penyiaran yaitu Televisi Republik Indonesia (TVRI). Mimbar Rohani Agama Hindu (dan agama lainnya di Indonesia) adalah domain atau setidaknya dominasi wacana Negara (*state*) atas dan masyarakat sipil hanya sebagai pelengkap.

Sementara *Dharma Wacana* memperlihatkan besarnya partisipasi warga baik dalam proses awal mengadakan *Dharma Wacana* maupun dalam proses reproduksi pengetahuan agama saat acara berlangsung¹⁴⁹. Pihak pengundang yang menentukan tema setelah berdiskusi dengan *Pedharma Wacana*, sementara pihak televisi (BaliTV) hanya merekam dan menyiarkan acara *Dharma Wacana*¹⁵⁰. Tidak ada dominasi pemerintah lewat aparatusnya yaitu Dirjen Bimas Hindu¹⁵¹ dan PHDI. Sementara itu ada beberapa lembaga penyiaran yang menayangkan *Dharma Wacana* di

149 Selama ini proses *Dharma Wacana* yang disiarkan Bali TV dimulai dari undangan oleh penyelenggara baik itu instansi pemerintah, swasta, masyarakat desa adat, sekolah, ataupun pribadi. Wawancara dengan I Gede Eka Pery Purnama, produser *Dharma Wacana* Bali TV (ibid).

150 Menurut I Gede Eka Pery Purnama, proses syuting acara *Dharma Wacana* biasanya tanpa script dan mengalir tanpa proses cut dan syut ulang untuk sebuah adegan (ibid).

151 Dirjen Binmas Hindu dan Budha dipisah pada medio tahun 2006

televisi lokal di Bali, sehingga tidak hanya satu lembaga penyiaran yang mendominasi slot penyiaran *Dharma Wacana*. Hal ini berbeda dengan Mimbar Rohani Hindu di era Orde Baru yang didominasi Televisi Republik Indonesia (TVRI).

Mimbar Rohani Hindu kiranya mengikuti pola sentralistik dan elitis Orde Baru dalam bidang keagamaan, hal terlihat dari dominannya kekuasaan Departemen Agama lewat Dirjen Bimas Hindu- Budha dan PHDI. Pembicara dalam Mimbar Rohani Agama Hindu adalah tokoh Hindu (agamaan) yang tinggal di Jakarta dan merupakan pejabat di Bimas Hindu-Budha ataupun menampilkan pembicara dari pengurus PHDI yang tinggal di Jakarta. *Dharma Wacana* menampilkan tokoh Hindu yang mempunyai pengetahuan luas baik dari agamawan maupun rohaniawan yang tinggal di Bali. Latarbelakang *Pedharma Wacana* juga beragam, ada yang menjadi pengurus di lembaga PHDI namun ada juga *Pedharma Wacana* lain yang datang dari kalangan pendidik dan bukan pengurus PHDI¹⁵².

Jika kemasan acara Mimbar Rohani Hindu terlihat monoton karena dilakukan di studio, maka *Dharma Wacana* terlihat lebih semarak karena dilakukan di lokasi acara yang berganti-ganti dengan suasana yang berbeda-beda. Kadang ruangan besar perkantoran, *ballroom* hotel, *wantilan* (raung besar terbuka) di desa atau pura keluarga besar (panti, maksaan). Dalam proses syuting gambar, lembaga penyiaran Bali TV yang mendatangi lokasi acara *Dharma Wacana* yang dibuat instansi tertentu atau warga masyarakat.

152 Namun hingga kini belum ada *peDharma Wacana* perempuan yang tampil di televisi maupun off air, padahal ada cukup banyak sulinggih, pandita (rohaniawan) perempuan.

Dengan penampilan dan orasi yang menarik dan dipenuhi humor membuat *Dharma Wacana* mendapatkan perhatian lebih dari dan memikat hati pemirsanya dibandingkan Mimbar Agama Hindu yang cenderung kaku dan formal¹⁵³. Model dialog langsung di lokasi yang dilakukan *Pedharma Wacana* dengan umat Hindu di lokasi juga membuat suasana menjadi lebih hidup dibandingkan Mimbar Rohani Hindu yang biasanya monolog ataupun hanya tanya jawab pembawa cara televisi dengan *Pedharma Wacana*¹⁵⁴.

Kini Mimbar Rohani Agama Hindu masih tetap tayang di televisi dan disiarkan oleh TVRI daerah Bali. Namun seperti berbagai acara TVRI daerah Bali lainnya relatif minim pemirsa bahkan ditinggalkan penggemarnya. Sementara *Dharma Wacana* menjadi salah satu program acara favorit di Bali TV yang disiarkan setiap hari.

Perubahan dan semakin populernya *Dharma Wacana* telah mendapat apresiasi publik dan elit-elit di Bali. Hal ini terlihat dari undangan untuk memberikan *Dharma Wacana* kepada para *sulinggih*, *pandita* (rohaniawan) yang terus berdatangan tidak hanya dari seputar Bali tetapi juga wilayah

153 Wawancara dengan narasumber yang menyaksikan baik Mimbar Rohani Agama Hindu dan *Dharma Wacana*, diantaranya Made Endang, ibu rumah tangga pada tanggal 7 Oktober 2014, Made Suardika, seorang pekerja swasta perhotelan pada 25 September 2014. Wawancara dengan I Ketut Ginarta, penyuluh lapangan dinas Agama Kota Denpasar pada 9 Oktober 2014.

154 I Made Wiadnyana dan Ni Ketut Febri yang mengaku pernah mengikuti langsung *Dharma Wacana* yang diadakan kantor tempat mereka bekerja mengaku jauh lebih senang bisa bertatap muka dan berdialog langsung dengan *peDharma Wacana*. Apalagi seorang *peDharma Wacana* terkenal yang menjadi idolanya juga mempunyai website pribadi sebagai tempat dimana mereka bisa bertanya tentang agama dan soal kehidupan sehari-hari. Wawancara dengan Made Wiadnyana pada 16 September 2014, wawancara dengan Ketut Febri pada 3 Oktober 2014.

lain di Indonesia yang ada pemeluk Hindunya¹⁵⁵. Instansi pemerintah dan swasta, masyarakat umum, khususnya yang sedang melaksanakan *upakara* (ritual) di pura desa, pura panti atau pemaksaan (klan), pura keluarga (kecil) menjadi pihak pelaksana *Dharma Wacana* dan pengundang *Pedharma Wacana*¹⁵⁶. *Dharma Wacana* juga diselenggarakan berkaitan dengan acara ulang tahun sebuah instansi atau perusahaan atau organisasi yang biasanya diawali dengan persembahyangan bersama¹⁵⁷.

Dharma Wacana di Bali TV juga ikut mempopulerkan pen-*Dharma Wacana* nya sendiri yaitu para *sulinggih*¹⁵⁸ dan kalangan awam yang mempunyai pengetahuan dalam soal Agama dan *Upakara* (ritual) Hindu¹⁵⁹. Banyak kalangan *sulinggih* yang kemudian muncul ke permukaan dan sering juga menjadi rujukan bukan hanya soal Agama dan *upakara*

155 Ida Pandita Mpu Jaya Acharyananda, mengaku pada bulan 2014 sempat keliling Sulawesi dan Papua untuk memimpin ritual sambil memberikan *Dharma Wacana*. Sepasang suami istri umat Hindu yang tinggal di Papua juga sedang menghadap Mpu Jaya saat penulis sedang wawancara. Sementara Ida Pedanda Gede Made Gunung mengaku baru sebulan sebelumnya (September 2014) pulang dari memimpin ritual dan memberikan *Dharma Wacana* di Melbourne, Australia diundang oleh komunitas Hindu-Bali setempat. Ini belum menyebut nama *sulinggih*, pandita lainnya yang juga sering diundang untuk muput (memimpin sebuah *upakara* (ritual)) ke berbagai tempat di Indonesia dan luar negeri yang terdapat pemeluk Hindunya.

156 Pihak pengundang bekerjasama dengan Bali TV yang akan meliput kegiatan *Dharma Wacana* dan sekaligus membantu menghubungi pe*Dharma Wacana*. Wawancara dengan Gede Eka Peri Purnama, produser program acara *Dharma Wacana* di Bali TV pada 20 Oktober 2014.

157 Wawancara dengan Gede Pery (ibid)

158 *Sulinggih* adalah sebutan untuk pemimpin upacara atau orang suci dalam Hindu yang juga dikenal dengan sebutan *Pedanda*, *Sri Mpu*, *Bhagawan*, dan berbagai sebutan lainnya.

159 Kalangan awam yang dimaksud disini adalah tokoh-tokoh Agama dan Adat yang memiliki pengetahuan tentang Agama, adat dan tata upacara suci dalam Hindu.

(ritual) suci Hindu namun meluas ke berbagai persoalan lain seperti politik misalnya. Bahkan seorang *sulinggih* yang sangat populer di Bali hingga saat ini sempat diundang untuk bertemu George Bush Jr yang saat itu adalah Presiden Amerika Serikat saat dia berkunjung ke Bali. Ini belum menyebut ratusan *sulinggih* lain yang juga terkenal dan bahkan menjadi semacam penasehat politik bagi tokoh-tokoh politik nasional dan lokal. Pasca reformasi di Bali juga bisa disebut ditandai dengan meningkatnya jumlah orang yang menjadi *sulinggih*. Bila di masa sebelumnya di Bali rujukan akan para *sulinggih* terbatas, maka pasca reformasi pilihan itu lebih banyak¹⁶⁰.

Sementara fenomena menarik juga dihembuskan angin reformasi, dan ini terjadi tidak hanya di Bali namun di semua wilayah di Indonesia. Fenomena tersebut adalah menguatnya sentimen identitas etnis dan agama. Fenomena ini mendorong penarikan secara tegas garis demarkasi identitas dan menjadi penanda baru kelompok yang diperlawankan secara diametral dengan kelompok lain. Fenomena tersebut di Bali dikenal sebagai wacana dan gerakan *Ajeg* Bali. Secara sederhana *Ajeg* Bali yang berasal dari kata *Ajeg* yang berarti tegak, stabil, kuat, diterjemahkan sebagai upaya menegakkan, menguatkan (meng-*Ajeg*-kan) adat, budaya (Bali) dan agama Hindu (Palermo and Allen 2005).

160 Fenomena munculnya banyak *sulinggih* ini sangat terkait dengan apa yang bisa disebut sebagai menguat dan meledaknya demokratisasi religius di Bali yang muncul pasca Reformasi. Fenomena demokratisasi religius ini terkait dengan pengetahuan keagamaan dan konflik kasta di Bali. Bila di masa sebelumnya pengetahuan tentang pengetahuan Agama (tatra) 'didominasi' oleh *sulinggih* dari kasta atas yaitu Brahmana, pasca Reformasi hal ini mendapat tantangan dari kasta bawah yaitu Sudra. Saat ini di Bali kemunculan banyak *sulinggih* baru didominasi oleh *sulinggih* dari kasta bawah.

Dalam konteks menguatnya sentimen identitas politik *Ajeng Bali* inilah *Dharma Wacana* terbingkai dan berkumandang. Dalam perkembangan lebih jauh terlihat bahwa *Dharma Wacana* menjadi semacam identitas penanda baru umat Hindu. Identitas yang berbeda “dengan yang lain” (*liyan*). Identitas milik umat Hindu yang berbeda dengan khotbah dalam Islam, Kristen Protestan, Katolik ataupun Budha¹⁶¹. Pada tingkat penamaan program sudah terlihat bagaimana positioning program acara *Dharma Wacana* ini diantara program sejenis yang diperuntukkan Agama lain.

Dalam penentuan tema-tema juga terlihat bagaimana kuatnya perspektif *inward looking* (melihat ke dalam) dalam *Dharma Wacana* ini. Sebagai bentuk penyuluhan/bimbingan/penyiaran agama Hindu, *Dharma Wacana* cenderung hanya mengupas penguatan pemahaman keagamaan (Hindu) *an sich* tanpa mengaitkan dengan konteks hubungan antar umat berbeda agama. Mengingat secara demografis Bali walaupun mayoritas penduduknya adalah Hindu, namun kini semakin heterogen. Tantangan kehidupan beragama di Bali juga semakin kompleks sehingga memerlukan pandangan keagamaan yang semakin kaya dan beragam perspektif

161 Pembedaan dan ketidakmauan untuk dipersamakan dengan khotbah juga dikonfirmasi oleh Ida Pedanda Gede Made Gunung, Ida Pandita Mpu Jaya Acharyananda, dua sulinggih yang terkenal sebagai peDharma Wacana di Bali TV. Keduanya menyatakan bahwa Dharma Wacana mungkin sebagai media penyampai pesan dianggap sama namun esensinya berbeda. Mereka mencontohkan kalau sudah mengobarkan permusuhan, menghasut sudah bukan Dharma Wacana, sambil menyinggung bahwa khotbah sering melakukan hate speech. Terkesan ada stereotype bahwa khotbah identik dengan mengobarkan jihad dalam pendapat kedua sulinggih diatas. Wawancara pada 21 Oktober 2014 dengan Ida Pandita Mpu Jaya Acharyananda dan pada 26 Oktober dengan Ida Pedanda Gede Made Gunung.

pula¹⁶². Sementara perspektif *inward looking* (melihat kedalam) ini berpeluang memupuk superioritas diri dan menganggap yang lain inferior. Lebih jauh perspektif *inward looking* cenderung akan memunculkan pemahaman dan sikap keagamaan yang eksklusif, menganggap ajaran agama sendiri paling benar seraya menyalahkan bahkan meniadakan yang lain.

Wacana-wacana seperti Bali terancam, tercemar, oleh arus migrasi oleh karena itu perlu dijaga dari pendatang yang merusak dan mencuri muncul dalam baik dalam pertanyaan maupun pemaparan pada *Dharma Wacana*. Begitu juga dengan wacana penguatan ekonomi umat Hindu (Bali) melawan penetrasi orang luar juga mengemuka. Namun bukan persaingan yang sehat yang dikemukakan namun jargon-jargon ethno-religiosentris seperti ekonomi Bali dikuasai oleh orang non Bali-Hindu, harus kita rebut. Orang Bali Hindu harus jadi tuan rumah di kampung sendiri, jangan orang luar yang menguasai ekonomi Bali.

Apa yang disinggung dalam *Dharma Wacana* tentang egosentrisme atas nama agama dan etnis (Hindu) berbanding lurus dengan implementasi wacana dan gerakan *Ajeg* Bali yang berkembang di Bali. *Ajeg* Bali sendiri mempunyai beberapa makna dan mengandung agenda yang beragam (Palermo and Allen, *ibid*). Tergantung dari siapa yang memaknai dan mempunyai kuasa untuk merebut makna dan mengimplementasikan sebagaimana disebutkan dalam bunga rampai buku Bali menuju Jagadhita: Aneka Perspektif (Pustaka Bali Post 2004). Karena wacana dominan sang kuasa

162 Hal ini diamini oleh dua peDharma Wacana terkenal yang biasa muncul dalam Dharma Wacana di Bali TV yaitu Ida Pedanda Gede Made Gunung dan Ida Pandita Mpu Jaya Acharyananda (*ibid*).

yang lebih menguasai domain publik, artinya implementasi *Ajeg* Bali tentu lebih mewakili wacana dominan sang kuasa baik kuasa politik, kuasa agama dan kuasa modal.

Wacana dan gerakan *Ajeg* Bali diantaranya memicu sentimen anti-pendatang dan anti-orang luar terlebih didorong oleh peristiwa yang menghentakkan dunia yaitu peristiwa peledakan bom di Kuta, Bali (Burhanudin 2008). Sentimen anti pendatang ini salah satunya dipicu oleh persaingan ekonomi antara pendatang dan warga lokal, sebuah isu yang terjadi di semua tempat di Indonesia dan semakin menguat pasca reformasi. Isu kecemburuan ekonomi ini berjaln berkelindan dengan isu “penghancuran Bali” dan “penyebaran agama” (baca: Islamisasi) yang kemudian eskalasinya meluas saat terjadinya peledakan bom di Kuta, Bali. Tertangkapnya para pelaku peledakan bom di Kuta, Bali dan kemudian terungkapnya identitas dan kaitan mereka dengan kelompok yang dikategorikan sebagai teroris semakin mengentalkan sentimen anti pendatang di Bali.

Ajeg Bali sebagai wacana dan gerakan diarahkan pada dua aras yaitu ke dalam sebagai upaya menguatkan ikatan identitas etnis, agama (Hindu) dan budaya (Bali) dan keluar sebagai upaya membendung masuknya pengaruh dari luar Bali. Bila ‘yang dalam’ selalu diasumsikan (dan dianggap pasti) akan mempertahankan etnis, agama (Hindu), budaya (Bali) sebaliknya ‘yang luar’ seringkali dipersepsikan dan dituduh akan merusak etnis, agama (Hindu), budaya (Bali) tersebut¹⁶³.

163 “Yang dalam” seringkali disebut dengan istilah lain seperti asli, lokal yang itu identik dengan etnis (Bali) dan Agama (Hindu). Sementara ‘yang luar’ sering disebut dengan istilah pendatang yang berarti non Bali dan non Hindu. Perbedaan ini menjadi problematis bila dihadapkan pada fakta bahwa ada orang yang secara etnis

Wacana dan gerakan *Ajeg* Bali memunculkan ketakutan akan tercemar dan hilangnya etnis, agama (Hindu), budaya (Bali). Lebih jauh asumsi bahwa kerusakan atau degradasi terhadap etnis, agama (Hindu), dan budaya (Bali) selalu datang dari luar (Tamatea 2011). Atas nama asumsi kerusakan atau degradasi terhadap etnis, agama (Hindu), dan budaya (Bali) yang dilakukan oleh 'yang luar' maka 'yang dalam' merasa wajib mempertahankan dan mengamankan. Maka asumsi ketakutan akan kerusakan dan kehilangan tersebut kemudian memunculkan semangat dan keperluan menjaganya, bahkan dengan berbagai cara sekalipun. Pada titik inilah, wacana dan gerakan *Ajeg* Bali menjadi eksklusif dan mendorong berkembangnya perilaku intoleran yang mengancam hubungan antar umat beragama di Bali.

Namun upaya-upaya kritis untuk menempatkan *Ajeg* Bali dalam proporsinya yaitu melestarikan agama, adat, budaya Bali disatu sisi, namun tidak menutupnya dari perubahan sosial dan tidak mendiskriminasi agama, adat, budaya non Bali tetap berlangsung. Suara-suara kritis ini datang dari beragam kalangan, mulai dari akademisi, tokoh agama, adat, budaya serta aktivis LSM dan mahasiswa. Mereka mengumandangkan dan menyebarkan nilai-nilai penghormatan dan harmoni dalam pergaulan antaragama di Bali dengan beragaman medium.

Salah satu bentuknya adalah advokasi terhadap keberagaman yang banyak dilaksanakan lewat even-even kebudayaan dan kesenian. Even-even semacam Gema

adalah Bali namun memeluk Agama non Hindu. Ada pula warga yang berdasarkan sejarah memang bukan Bali namun telah sekian generasi tinggal di Bali bahkan dalam percakapan sehari-harinya menggunakan bahasa Bali Alus (sebuah tingkatan bahasa yang digunakan untuk berbicara dengan orang dari status sosial tinggi). Persoalan ini akan diulas lebih lanjut dalam pembahasan selanjutnya

Perdamaian, dialog antar umat beragama seringkali berlangsung di Bali tidak hanya yang berskala lokal tetapi juga internasional. Dalam setiap even budaya Bali tahunan yaitu Pesta Kesenian Bali (PKB) selalu mengundang misi kesenian dari berbagai daerah di tanah air bahkan misi kesenian internasional. Selain menjadi even pariwisata bagi Bali, Pesta Kesenian Bali (PKB) juga menjadi semacam *encounter* dan *engagement* kekayaan dan keberagaman budaya tidak hanya di wilayah Bali tetapi juga wilayah lain di Indonesia bahkan luar negeri.

Bila berbicara tentang penghormatan akan keberagaman, tentunya tidak bisa dilepaskan dari *sloka* (ayat) dalam agama Hindu yang mengandung makna-makna tersebut. Agama Hindu yang juga seringkali disebut sebagai *Dharma* (kebajikan) mempunyai banyak *tatwa* yang berbentuk *Mahavakya* (semboyan utama) yang mengajarkan pemeluknya untuk selalu bersikap santun dan toleran serta menawarkan pemahaman agama yang moderat. *Mahavakya* tersebut mengajarkan pemeluk Hindu untuk hidup rukun, toleran bukan hanya dengan orang yang seagama namun berbeda agama bahkan sesama mahluk hidup¹⁶⁴. Dari sekian banyak *Mahavakya* dalam *tatwa* Hindu, ada tiga yang seringkali dikutip dan dikenal tidak hanya oleh umat Hindu sendiri tetapi juga umat beragama lain yang terkait dengan pentingnya untuk selalu menghormati, menjaga kerukunan dan keberagaman. *Pertama*, adalah *Wasudeva Kuthumbhakam* yang bermakna bahwa kita semua bersaudara dan diajarkan kepada umat Hindu untuk selalu memupuk persaudaraan

164 Sebuah puja (mantram, doa) yang berbunyi Sarwa prani hitang karah bermakna semoga semua mahluk ciptaan Tuhan (terlepas dari apa agama dan warna kulitnya) memperoleh keselamatan.

dengan siapapun. *Kedua, Tat Twam Asi* yang secara sederhana diartikan sebagai aku adalah engkau, ajaran untuk kesalingpengertian dan rasa saling memiliki. *Ketiga*, merupakan semboyan bangsa Indonesia yang telah demikian dikenal dan dikutip dari salah satu kitab dalam Hindu yaitu *Suthasoma* yang maknanya adalah penghormatan akan keberagaman tanpa membuat kita pecah tercerai berai. *Mahavakya* itu adalah *Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa* yang tertulis dalam selempar pita dijepit oleh kaki Burung Garuda, lambang Negara Indonesia.

Dalam dimensi praksis, Bali selama berabad-abad menjadi contoh bagaimana kerukunan umat beragama berlangsung. Konsep *menyama braya* (bersaudara lintas batas) telah lama terinternalisasi pada kantong-kantong masyarakat yang 'bersilang identitas' seperti Muslim Pegayaman di Bali Utara, Muslim Saren Jawa di Karangasem, Muslim Kepaon di Denpasar, Muslim Loloan di Jembrana. Selain bentuk-bentuk toleransi semacam penghormatan saat hari besar keagamaan, proses internalisasi itu telah berlangsung misalnya dalam hal bahasa dan nama. Sebagai Muslim mereka memakai basa Bali (bahkan *basa alus*), mereka memakai nama Bali berjejer dengan Muslim. Bahkan untuk kasus di Saren Jawa Karangasem, komunitas setempat memiliki Quran dalam Bahasa Arab yang berisi *basa Bali* dibawahnya.

Ajaran Hindu dan praksis penghormatan dan tradisi hidup dalam keberagaman yang ada di Bali memperlihatkan bahwa umat Hindu di Bali telah memiliki pemahaman dan menjalankan sikap beragama yang inklusif bahkan pluralis. Terkait *Dharma Wacana* sebagai bentuk penyuluhan/bimbingan/penyiaran agama Hindu, tentunya bisa merujuk pada ajaran dan praksis keberagaman ini. Ajaran

dan praksis yang hidup dan menghidupi umat berbeda agama yang telah hidup di Bali selama sekian dasawarsa dalam harmoni dan toleransi.

Kiranya kumandang dinamika *Dharma Wacana* berjalan diantara dua *tension* (tegangan) yang saling berkoeksistensi. Dinamika yang didorong oleh angin reformasi yang membawa pengentalan identitas politik etnis dan agama yang berpotensi mendiskriminasi dan meliyankan yang lain di satu sisi dan ajaran agama Hindu serta tradisi yang telah hidup selama berabad-abad yang memperlihatkan fenomena yang berlawanan disisi lain yaitu penghormatan dan hidup dalam keberagaman. Dinamika tersebut menjadi sebuah tantangan besar yang perlu untuk dijawab para *stakeholders* yang terlibat dalam perancangan dan pelaksanaan *Dharma Wacana*. Tendensi *Dharma Wacana* yang terlalu dominan menggunakan perspektif *inward looking* (hanya melihat kedalam) yang mungkin bisa jatuh pada sikap menganggap diri paling hebat sekaligus secara pejoratif merendahkan yang lain. Tendensi ini dipengaruhi oleh kuatnya kumandang wacana dan gerakan *Ajag Bali* yang salah satu dimensinya menyuburkan semangat anti pluralisme dan anti toleransi.

Dinamika tantangan yang dihadapi *Dharma Wacana* tersebut bisa dianalogikan bagaikan *Sang Atma* (jiwa manusia) yang berjalan melewati sebilah jembatan bambu (*titi ugal agil*) yang dibawahnya bergolak kawah candradimuka dalam mitologi Hindu (Bali) dalam perjalanannya menuju Surga untuk bersatu dengan *Sang Paramatma* (*Sang Pencipta*). Apakah *Dharma Wacana* akan jatuh dalam *awidya* (kegelapan) layaknya jatuh ke kawah candradimuka, ikut menebarkan rasa permusuhan, iri, dengki atau enam sifat buruk dalam diri manusia yang dikenal sebagai *Sad Ripu* terhadap umat sendiri

dan umat beragama lain? Ataupun *Dharma Wacana* mampu tampil ke depan menjadi terang bagi *awidya* dalam diri, saudara ataupun umat lain berbeda agama? Dan tampil menjadi bentuk penyuluhan/bimbingan/penyiaran Agama Hindu yang moderat, santun, dan toleran. *Dharma Wacana* yang membawa *shanti* (kedamaian) tidak hanya bagi manusia berbeda agama dan keyakinan namun juga bagi semua makhluk hidup sebagaimana disebutkan dalam ajaran Hindu sebagai *Sarve Santu Niramayah*?

Rumusan

Lewat elaborasi akan program *Dharma Wacana* di Bali TV yang populer dan mendapat apresiasi luas umat Hindu tidak saja di Bali tetapi di seluruh Indonesia dimana Umat Hindu bermukim, penelitian ini ingin mencari jawaban atas:

- a. Bagaimana sejarah muncul nya *Dharma Wacana* dan pe-
Dharma Wacana hingga populer di Bali TV yang kemudian mendapat sambutan luas masyarakat Hindu di Bali?
- b. Bagaimana tantangan *Ajag Bali* sebagai wacana dan gerakan dominan di Bali terhadap *Dharma Wacana*? Mengapa *Ajag Bali* bisa mendorong *Dharma Wacana* menjadi eksklusif?
- c. Inisiatif-inisiatif apakah yang dilakukan *Pedharma Wacana* untuk mengubah tantangan *Ajag Bali* tersebut sehingga bisa mendorong *Dharma Wacana* beranjak dari perspektif *inward looking* yang cenderung eksklusif menuju perspektif *outward looking* yang inklusif dan pluralis?

Penelitian ini ingin diarahkan pada tiga level tujuan yaitu:

- a. Mengetahui bagaimana sejarah munculnya *Dharma Wacana* hingga populer saat ini serta mengetahui bagaimana munculnya sosok *Pedharma Wacana* sebagai panutan umat Hindu.
- b. Memeriksa dan mengidentifikasi pengaruh *Ajeg Bali* terhadap *Dharma Wacana*? Mengetahui bagaimana *Ajeg Bali* bisa menghambat munculnya *Dharma Wacana* dan *Pedharma Wacana* yang inklusif dan pluralis.
- c. Mengidentifikasi inisiatif-inisiatif yang dilakukan *Pedharma Wacana* untuk mendorong munculnya *Dharma Wacana* yang inklusif dan pluralis.

Kegunaan

Penelitian ini akan menyumbangkan gagasan yang berdimensi reflektif dan praksis yang mengarah pada:

- a. Masukan dan kritik kepada pemangku kepentingan yaitu pemerintah, lembaga penyiaran dan kalangan agamawan.
- b. Acuan dan referensi dalam merancang program penyuluhan/bimbingan/penyiaran Agama Hindu yang moderat, santun, dan toleran ditengah semangat dan antusiasnya kehidupan beragama di kalangan umat Hindu disatu sisi dan menguatnya fanatisme sempit, radikalisme keagamaan pada aras lain di Indonesia.
- c. Penelitian ini bisa menyumbang gagasan dalam ranah akademik dengan menjadi rujukan bagi penelitian tentang tema penyuluhan/bimbingan/penyiaran

Agama dan khususnya *Dharma Wacana* dalam Agama Hindu. Diharapkan nantinya akan semakin banyak penelitian dengan tema sejenis dilakukan di kemudian hari.

Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoritik

Sejauh ini penulis baru menemukan 2 (dua) studi yang mengkaji fenomena *Dharma Wacana* dalam Agama Hindu. Studi pertama adalah mengulas tentang *Dharma Wacana* seorang tokoh agamawan dan pemberi *Dharma Wacana* Bali terkenal, Ida Pedanda Gede Made Gunung. Studi tersebut dilakukan oleh Ni Ketut Ayu Ratmika dari program studi sastra Bali fakultas sastra Universitas Udayana, Bali. Ayu Ratmika menuliskan papernya yang berjudul *Campur Kode dan Alih Kode pemakaian Bahasa Bali dalam Dharma Wacana Ida Pedanda Gede Made Gunung*. Studi tersebut lebih menyoroti aspek (teknis) bahasa yang digunakan oleh Ida Pedanda Gede Made Gunung dalam setia *Dharma Wacana*-nya.

Studi kedua dilakukan oleh Ni Putu Rikha Wahyuni dari jurusan pendidikan sejarah, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali. Dalam papernya yang berjudul *Analisis isi Dharma Wacana Agama Hindu melalui Bali TV dalam perspektif pendidikan karakter (studi kasus Pedharma Wacana Ida Pandita Mpu Jaya Acaryananda)*, Rikha menyoroti peranan *Dharma Wacana* dalam pendidikan karakter. Dalam penelitiannya Rikha menyimpulkan bahwa *Dharma Wacana* Ida Pandita Mpu Jaya Acaryananda di Bali TV mampu menumbuhkan karakter seperti tanggungjawab, ketulusan, tekun, dan integritas dalam diri Umat Hindu.

Dalam pandangan penulis, kedua penelitian diatas bisa dikategorikan menggunakan perspektif *inward looking* (melihat kedalam) dalam menyoroti fenomena *Dharma Wacana* dalam Agama Hindu. Penelitian pertama oleh Ayu Ratmika yang lebih menyoroti aspek teknis kebahasaan tidak menyinggung konteks sosio-kultural-politis dari *Dharma Wacana*. Sementara penelitian kedua oleh Rikha memang menyajikan konteks sosio-kultural dari *Dharma Wacana*, namun tidak menyinggung konteks yang lebih luas yaitu pergaulan antar umat berbeda agama dan kepercayaan. Artinya kedua penelitian diatas hanya melihat *Dharma Wacana* dalam konteks fungsi dan manfaat bagi umat Hindu semata atau dalam bahasa lain *Dharma Wacana* dari, oleh, dan untuk umat Hindu.

Sementara dalam pembacaan tentang referensi, penulis tidak menemukan penelitian yang fokus mengulas *Dharma Wacana* sebagai bentuk penyuluhan/bimbingan/penyiaran Agama Hindu yang mampu mendorong kehidupan harmonis antar umat berbeda agama dan penganut kepercayaan. Penulis menemukan beberapa analisis tentang *Dharma Wacana* dalam kaitannya dengan konteks pergaulan antar umat berbeda agama dan kepercayaan. Namun analisis-analisis tersebut tidak menjadikan *Dharma Wacana* sebagai tema sentral, dan hanya sedikit menyinggung tentang *Dharma Wacana* dan tokoh-tokoh yang menjadi pen-*Dharma Wacana*-nya. Tema *Dharma Wacana* hanya disinggung sekilas dalam subbab di studi tersebut.

Dari studi-studi tersebut *Dharma Wacana* terutama diletakkan dalam frame penelitian tentang menguatnya sentimen identitas lokal pasca reformasi yang di Bali dikenal sebagai *Ajeng Bali*. Artinya *Dharma Wacana* diasumsikan

sebagai ‘bagian’ dari gerakan dan wacana *Ajeg* Bali. Asumsi tersebut tidak berlebihan mengingat dalam setiap even *Dharma Wacana* selalu disinggung tema *Ajeg* Bali. Ungkapan-ungkapan seperti kita harus ikut serta meng-*Ajeg*-kan Bali, ataupun Bali yang *Ajeg* akan membawa kedamaian serta kesejahteraan selalu terlontar dari pe-*Dharma Wacana* dan pemirsa.

Tema *Ajeg* Bali sebagai tema sentral dalam setiap *Dharma Wacana* dinyatakan dalam studi Sejarawan Universitas Udayana, I Nyoman Wijaya. Dalam papernya yang berjudul *Melawan Ajeg Bali: Seabad Praktek Hegemoni Intelektual Organik di Bali*, Wijaya menyatakan bahwa *Dharma Wacana* dari Ida Pedanda Gede Made Gunung selalu mempromosikan *Ajeg* Bali. Wijaya menenggarai ajakan Ida Pedanda Gede Made Gunung untuk meng-*Ajeg*-kan Bali didasari atas kekhawatiran semakin kuatnya penetrasi ekonomi dan budaya penduduk pendatang (Wijaya 2012).

Sebuah hipotesa menarik terkait soal *Dharma Wacana* dalam kaitannya dengan *Ajeg* Bali dan pengaruhnya terhadap kehidupan beragama yang beragam di Bali dibuat oleh Scott Adam Johnsen, seorang akademisi dari Amerika Serikat. Dalam sebuah sub bab studi yang merupakan disertasinya doctoralnya di University of Virginia, Amerika Serikat, Johnsen membahas bagaimana besarnya pengaruh *Dharma Wacana* dalam pembentukan identitas lokal bernama *Ajeg* Bali. Johnsen memakai sampel *Dharma Wacana* yang disampaikan oleh Ida Pedanda Gede Made Gunung di Bali TV yang menjadi media penyampai pesan (*Ajeg* Bali) kepada pemirsanya. Lebih jauh Johnsen mengulas bagaimana kemudian identitas politik *Ajeg* Bali menjadi penanda dan

sekaligus pembeda Orang Bali-Hindu dalam pergaulannya dengan agama dan etnis lain (Johnsen 2007).

Dalam kajian ilmu sosial humaniora, studi tentang wacana dan gerakan *Ajeg* Bali masuk dalam ranah kajian politik identitas. Politik identitas menempatkan perbedaan (*difference*) sebagai basis kategori politiknya. Disatu sisi menjanjikan toleransi, kebebasan bermain (*free play*), namun juga bisa mendorong intoleransi dan kekerasan disisi lain (Heller dalam Abdilah S, 2002). Dalam konteks *Ajeg* Bali, identitas etnis, agama dan budaya dipahami sebagai kata benda. Identitas dipahami layaknya benda atau barang mati yang tidak berubah. Dia dipajang, diperlihatkan, dibanggakan 'hanya' layaknya aksesoris bahkan kadang secara berlebihan sehingga seringkali menciptakan konflik bila ada yang mempertanyakan secara kritis apalagi 'menyenggolnya'. Identitas juga dipahami selayaknya hak milik yang bisa diprivatisasi dan disertifikatkan. Sejurus dengan logika seperti itu identitas juga dipahami bisa hilang dicuri sehingga perlu upaya menjaganya layaknya penjaga keamanan ataupun dukun penjaga serangan ilmu hitam.

Namun dalam realitasnya, identitas selalu bersifat *fluid*, fleksibel dan terlalu memaksakan untuk dikekang dalam sebuah frame pemaknaan yang baku. Akan muncul nuansa totaliterisme bahasa dan makna saat identitas dimaknai sebagai kata benda, bukan lebih dimaknai sebagai kata kerja atau proses menjadi. Bukan *identity* sebagaimana padanannya disebut sebagai identitas dalam Bahasa Indonesia tetapi *identification* atau yang secara sederhana diterjemahkan menjadi identifikasi. Sebuah proses yang terus berlangsung, sesuai konteks desa (tempat), *kala* (waktu), dan *patra* (keadaan) dalam konsepsi Orang Bali.

Sementara kajian terkini dalam studi media tidak lagi menempatkan media sebagai alat yang netral, namun selalu menjadi arena pertarungan kepentingan dan dominasi kekuasaan. Meminjam dari *cultural studies*, kajian tentang media saat ini banyak membongkar praktik dominasi ideologi dalam media lewat pisau analisis wacana. Dalam kajian analisis wacana ini ilusi tentang media yang netral dibongkar dan bagaimana media ditelanjangi sebagai alat bagi kelompok dominan untuk mendistorsi realitas sesuai kepentingan mereka (Eriyanto 2001). Meminjam analisis wacana, dalam studi ini Bali TV sebagai media penyampai *Dharma Wacana* tidak akan dilihat sebagai alat yang netral namun membawa “misi” dominasi ideologi *Ajeg* Bali. Bali TV lewat program *Dharma Wacana* nya yang mengusung tema sentral *Ajeg* Bali telah menjadi alat kelompok dominan (Bali-Hindu) untuk mendiskriminasi kelompok non Bali-Hindu.

Selaras dengan hal tersebut konsep penghormatan akan keberagaman perlu menjadi perhatian Bali TV dan program *Dharma Wacana*. Politik identitas *Ajeg* Bali yang selama ini menjadi pedoman utama dalam *Dharma Wacana* perlu mendapat pembacaan kritis karena tendensinya untuk mendiskriminasi dan mengingkari keberagaman yang ada di Bali. Politik identitas yang bisa jadi akan mendistorsi keharmonisan kehidupan beragama yang selama ini sudah berlangsung di Bali.

Konsepsi Nurcholish Madjid (alm) akan model beragama umat akan menjadi tawaran penulis dalam penelitian ini. Tiga model beragama yang dikemukakan Madjid sangat berguna dalam melihat fenomena *Ajeg* Bali dan pergaulan umat beragama di Bali. Tiga model itu adalah beragama secara eksklusif, inklusif dan pluralis. Model yang

pertama berguna untuk melihat munculnya kecenderungan beragama saat ini di Bali yang didorong oleh wacana dan gerakan *Ajeg* Bali. Model beragama yang menganggap diri paling benar dan menyalahkan yang lain. Madjid juga mendefinisikan model beragama eksklusif sebagai sebuah bentuk *orthodoxy*.

Analisa Madjid tentang beragama secara eksklusif ini sejalan dengan analisis Geertz tentang Agama Hindu di Bali yang kebanyakan dianut oleh kalangan atas (elit) yang lebih mementingkan pemahaman akan teks secara ketat. Model beragama secara eksklusif berlawanan dengan dua model berikutnya yang disampaikan Madjid yaitu model beragama inklusif dan pluralis yang sejalan dengan konsep Geertz tentang *orthopraxy* yang dipraktekkan oleh kebanyakan masyarakat bawah di Bali akan agamanya (Geertz 1992). Model beragama yang inklusif dan pluralis yang terbuka saling menghormati keragaman teologis akan menjadi pisau analisis yang berguna dalam mendorong tercapainya penyiaran/bimbingan/penyuluhan Agama Hindu yang moderat, santun, dan toleran. (Nurcholish Madjid dalam George B. Groze and Benjamin B. Hubbard 1998).

Prosedur

Penelitian ini menggabungkan jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dan akan dilengkapi dengan analisis media (analisis isi) sederhana. Analisis isi akan membantu dalam mengungkap *stereotype-stereotype* yang dibangun dan muncul dalam *Dharma Wacana* dan disampaikan oleh *Pedharma Wacana* wacana. Lebih jauh analisis isi media akan bisa diungkap apakah media menjadi representasi

kepentingan kelompok dominan ataukah relatif bisa mengakomodir kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat. Sementara analisis kualitatif, akan berusaha mengungkap world view dari informan yang diwawancarai. Data yang dihasilkan adalah data deskriptif, gambaran yang sistematis, faktual serta akurat mengenai kenyataan-kenyataan, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diamati (Moleong: 2001). Dalam pandangan penulis kedua metode ini sangat baik dan saling melengkapi serta memperkaya analisa dalam melihat fenomena *Dharma Wacana* Agama Hindu di Bali dan usaha untuk mendorong agar *Dharma Wacana* tidak hanya *inward looking* tetapi juga *outward looking*.

Lokasi dan Waktu

Penelitian ini mengambil tempat di Bali khususnya Denpasar dan Gianyar. Lokasi lain juga dilakukan penelitian sejauh terkait dan mendukung data penelitian, misalnya karena narasumber sedang ada di luar Bali. Data dari luar Bali menarik untuk dimasukkan dalam penelitian ini mengingat ada tambahan isu yang dibahas yang hal tersebut jarang muncul bila *Dharma Wacana* diadakan di Bali. Bali TV mampu menjangkau seluruh wilayah di Bali tentunya pemirsa *Dharma Wacana* adalah seluruh penonton Bali TV di Bali bahkan luar Bali. Namun untuk keperluan pengambilan data difokuskan di wilayah Denpasar dan Gianyar. Kedua wilayah ini juga dipilih berdasarkan tingkat keberagaman agama penduduknya dan kedua wilayah ini dianggap sebagai pusat adat, budaya (Bali), dan agama Hindu (MacRae and Darma Putra 2007). Sementara pengumpulan data dan penulisan

laporan akan dilakukan selama sekitar 2 bulan, dari 15 September-31 Oktober 2014.

Informan

Sebagai penelitian kualitatif, keseluruhan data primer diarahkan kepada narasumber utama yaitu pe-*Dharma Wacana* yang akan diambil sampel dua tokoh *sulinggih* terkenal yang biasa menyampaikan *Dharma Wacana* di Bali TV. Pihak media sendiri yang juga akan dijadikan informan utama akan diambil dari produser *Dharma Wacana* di Bali TV. Sedangkan masyarakat dan juga tokoh- tokoh agama dijadikan sebagai informan pelengkap untuk mendapatkan data sekunder. Untuk data sekunder ini informan tidak hanya diambil dari narasumber yang berlatarbelakang Hindu-Bali tetapi juga beragama lain. Latarbelakang yang berbeda ini cukup menarik untuk melihat response dari narasumber yang bukan Hindu-Bali. Pengambilan sampel juga dilakukan pada narasumber yang berpindah agama, baik dari Hindu ke agama lain ataupun dari agama lain ke Hindu. Perpindahan agama ini biasanya mengikuti suami dan narasumber yang dipilih tersebut tinggal di Bali.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui analisis sederhana terhadap isi *Dharma Wacana* terutama rekaman dari *Dharma Wacana* yang berlangsung. Wawancara mendalam (*depth interview*) dilakukan kepada dua orang *Pedharma Wacana* terkenal yang selalu tampil di Bali TV. Tema-tema wawancara terdiri atas materi *Dharma Wacana*,

referensi yang digunakan, dan pandangan *Pedharma Wacana* terhadap keberagaman dan pemeluk Agama lain. Sedangkan tema wawancara untuk informan tokoh agamawan dan masyarakat adalah pandangan mereka terhadap isi *Dharma Wacana*, pandangan terhadap umat beragama lain dan hubungan beragama secara luas di Bali. Berbagai dokumen dan laporan seperti berita media massa juga akan dijadikan pelengkap data sekunder dalam penelitian ini.

Analisa Data

Reduksi data merupakan proses awal dari analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Dalam reduksi data akan bersandar pada relevansi data dengan subyek penelitian. Proses selanjutnya adalah pengkategorian data yang disesuaikan dengan variable-variabel dalam penelitian. Dari sinilah kemudian dilakukan penyusunan dan pengolahan data lewat analisis wacana dan pendekatan deksriptif analitis. Hasil analisa wacana data dan analisis deskriptif yang berbentuk laporan diharapkan akan menyumbang saran tidak hanya berdimensi teoritis tetapi juga praktis bagi kebijakan Departemen Agama lewat Dirjen Bimas Hindu berkaitan dengan upaya mendorong penyuluhan/bimbingan/penyiaran Agama Hindu yang moderat, santun, dan toleran.

Waktu

Penelitian ini penulis harapkan akan terealisasikan selama selama sekitar 2 bulan (September-Oktober 2014). Tahapan-tahapan penelitian akan dibagi sebagai berikut:

1. Pembuatan rancangan desain penelitian serta persiapan untuk menghubungi informan dan narasumber terkait akan dialokasikan waktu selama seminggu.
2. Rentang waktu seminggu berikutnya akan dilakukan collecting data dan pengumpulan referensi.
3. Tahapan ketiga akan dilakukan kegiatan wawancara mendalam dengan informan kunci dan informan tambahan di Bali serta observasi lapangan saat pelaksanaan *Dharma Wacana*. Kegiatan pada tahap ketiga ini akan memakan waktu tiga minggu.
4. Tahapan keempat adalah analisa data dan penulisan awal laporan. Kegiatan ini akan memerlukan waktu selama dua minggu.
5. Tahapan kelima atau tahapan terakhir adalah proses final editing dan refleksi teoritik yang membutuhkan waktu satu minggu. Waktu ini kiranya cukup untuk menghasilkan laporan akhir ke Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta.

Reformasi, Bali TV, Bom Bali dan Ajeg Bali

Dharma Wacana yang berkembang dan populer di kalangan umat Hindu di Bali dan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari empat konteks yang membingkai sekaligus menjadi latar kemunculannya yaitu reformasi, Bali TV, Bom Bali, dan Ajeg Bali. Namun sebagai determinan utama, wacana dan gerakan Ajeg Bali memberikan tantangan besar bagi *Dharma Wacana* dan agama Hindu. Tantangan dan kontribusi tersebut terkait dengan hubungan antar umat berbeda agama

di Bali yang disatu sisi berpeluang menyuburkan sentimen agama (dan etnis), berpotensi menyulut perilaku intoleran bahkan bukan tidak mungkin kekerasan komunal. Di sisi lain bisa memupuk serta menyuburkan toleransi dan kehidupan beragama yang rukun dan harmonis di Bali.

Reformasi di Bali

Reformasi yang bergelora di Jakarta juga menggema di Bali walau suaranya terdengar lambat-lambat. Semua aktivitas berjalan normal saat Presiden Soeharto menyatakan mundur sebagai presiden Indonesia di televisi. Kantor-kantor, pusat bisnis, sekolah-sekolah tetap buka seperti biasa. Iringan-iringan demonstran yang dimotori kelompok mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat hanya terkonsentrasi di universitas Udayana, Denpasar, Bali. Rombongan demonstran yang relatif berjumlah banyak untuk ukuran demonstrasi di Bali ini berjalan beriringan menuju gedung DPRD Bali dikawasan Renon yang berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer dari kampus universitas Udayana di jalan Jenderal Sudirman, Denpasar. Seperti reformasi yang bergema di daerah lain di Indonesia yang terdengar sayup-sayup, reformasi di Bali tidak banyak mengubah konstelasi politik lokal Bali. Kelompok politik lama yang ada di partai, elit masyarakat tidak diganggu gugat, masih eksis dan mengkonsolidasikan diri untuk kemudian tampil merebut kekuasaan kembali pasca reformasi. reformasi yang diperjuangkan elemen masyarakat sipil seperti mahasiswa, aktivis lembaga swadaya masyarakat, telah dibajak elit-elit Orba (Erb and Sulistiyanto 2009). Hasilnya dalam penegakan hukum di Bali di awal reformasi,

hanya ada segelintir elit lokal yang masuk bui namun masih banyak yang lain yang tidak tersentuh¹⁶⁵.

Namun ada satu kebijakan pemerintahan di era awal reformasi yang harus diapresiasi yaitu kebebasan pers. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan singkat yang dipimpin Presiden Baharudin Jusuf Habibie lewat keputusan Menteri Penerangannya yaitu Yunus Yosfiah yang mencabut pengendalian terhadap surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP). Dampaknya adalah berseminya aura kebebasan pers di Indonesia yang terlihat dari menjamurnya media yang terbit bukan hanya media nasional tetapi juga media di daerah. Tidak ada lagi sensor, tidak ada lagi ketakutan untuk berbicara, menuliskan pendapat di muka publik.

Aura pers yang relatif terbuka inilah yang menyebar di Bali dan mendorong lahirnya Bali TV sebagai televisi lokal pertama di Bali dan Nusa Tenggara. Bali TV sendiri merupakan anak perusahaan dari kelompok media Bali Post yang merupakan kelompok media terbesar di Bali dan Nusa Tenggara. Sebagai televisi lokal, Bali TV mengedepankan konten-konten lokal dalam program-program siarannya. Sesuai dengan misinya pula Bali TV ingin melestarikan adat, budaya, agama Hindu (Bali) yang mereka sebut sebagai ruhnya kehidupan masyarakat Bali. Dalam usahanya tersebut Bali TV berkontribusi lewat penciptaan dan penayangan

165 Di level pimpinan hanya Ida Bagus Oka (alm) mantan Gubernur yang di masa akhir pemerintahan Presiden Soeharto menjabat Menteri Kependudukan dan Kepala BKKBN yang dipenjara karena terlibat korupsi saat menjabat Gubernur Bali. Sementara pimpinan lain lolos dari jeratan hukum bahkan mereka kembali di era pasca Reformasi menjadi pemimpin (institusi publik) di Bali hingga kini.

program acara *Dharma Wacana* sebagai usaha untuk memperkuat pengetahuan umat Hindu akan agamanya¹⁶⁶.

Munculnya Bali TV

Televisi lokal adalah salah satu bentuk media ‘baru’ yang muncul pasca reformasi di Indonesia. Salah satu pionir televisi lokal adalah grup usaha Bali Post yang berpusat di Bali yang induknya adalah harian terbesar di Bali dan Nusa Tenggara yaitu Bali Post. Setelah meninggalnya Ketut Nadha sang pendiri Harian Bali Post, anaknya yaitu Satria Naradha mengambil alih sekaligus meluaskan bisnisnya. Lewat bendera Kelompok Media Bali Post, Satria Naradha menjadi pelopor berdirinya televisi lokal pertama di Bali yaitu Bali TV. Dengan menggunakan tag line Matahari dari Bali untuk menegaskan mereka sebagai pencerah dari Bali¹⁶⁷, pada tanggal 26 Mei 2002 secara resmi Bali TV mengudara menyapa pemirsanya di Bali.

Bali TV sendiri adalah pengembangan bisnis terbesar Satria Naradha saat mengambil tongkat estafet kepemimpinan Bali Post grup dari ayahnya Ketut Nadha. Di bawah bendera PT. Bali Ranadha Televisi sebagai payung hukum Bali TV, Satria Naradha dan kelompok Media Bali Post menegaskan dominasinya atas bisnis media di Bali. Selain jaringan media cetak, media audio dengan jaringan radio, Satria Naradha lewat kelompok media Bali Post meluaskan jaringan bisnis

166 Tentang misi Bali TV ini tertuang dalam company profile Bali TV. Tanpa tahun terbit

167 Info tentang ini didapat dari company profile Bali TV.

televisi lokalnya dengan mendirikan berbagai televisi lokal di berbagai daerah lain di Indonesia¹⁶⁸.

Pada awal beroperasinya, walau masih dengan jam siar terbatas, Bali TV segera mendapat perhatian pemirsa TV di Bali. Selain jam siar (setengah hari mulai jam 07.00-14.00), daya jangkau siaran Bali TV di masa awal berdirinya juga sangat terbatas yaitu menjangkau wilayah Bali Selatan terutama Denpasar, Tabanan, Gianyar dan sebagian Klungkung dan Bangli¹⁶⁹. Namun dengan program-programnya yang relatif berbeda dari televisi nasional dan lebih banyak menawarkan program cara lokal, Bali TV relatif mampu menjadi salah satu media televisi utama masyarakat Bali (Susanthi 2010).

Kini Bali TV telah tayang lebih lama mulai jam 06.00–24.00 dengan program acara yang lebih banyak dan isi lebih variatif. Sebagaimana tertulis dalam *company profile* Bali TV ada enam puluh tujuh (67) program acara yang disiarkan Bali TV dalam sepekan. Dengan komposisi sembilan puluh persen (90%) materi lokal dan sepuluh persen (10%) materi universal. Sebanyak tujuh puluh sembilan persen (79%) sumber program diambil dari Bali, empat belas persen (14%) diambil dari sumber nasional dan sebanyak tujuh persen (7%) berasal dari sumber luar negeri. Diantara materi lokal tersebut adalah program acara *Dharma Wacana* yang tayang setiap hari di Bali TV.

168 Lebih jauh tentang bisnis kelompok media Bali Post bisa dilihat dari blog milik aktivis media di Bali; Anton Muhajir di <http://rumahtulisan.wordpress.com/2007/08/10/kerajaan-media-bali-post/>

169 Info tentang ini tertulis dalam booklet *company profile* Bali TV.

Bom Bali

Selain gelombang reformasi, salah satu peristiwa yang menjadi pemantik semakin populernya Bali TV adalah peristiwa Bom yang meledak di jantung pariwisata Bali yang terkenal ke seluruh dunia yaitu Kuta. Peristiwa ledakan bom itu terjadi dua kali yaitu pertama 12 November 2002. Bom yang meluluhlantakkan Legian, Kuta salah satu spot utama pariwisata Bali dan menelan korban sebanyak 202 jiwa. Sementara bom kedua meledak di Kuta dan Jimbaran pada 1 Oktober 2005 yang meninggalkan 23 korban nyawa.

Peristiwa Bom Bali ini telah menarik perhatian dunia internasional. Jutaan pasang mata menatap Bali sebuah pulau yang digambarkan sebagai salah satu sorga dunia. Para pejabat, media internasional berbondong-bondong datang dan memberi perhatian pada peristiwa Bom Bali ini. Ucapan duka cita mengalir dari seluruh dunia, ditindaklanjuti dengan berbagai bantuan mengalir entah untuk pengobatan korban luka-luka atau proses pemulihan sesudahnya seperti bantuan pengamanan untuk hotel-hotel atau training untuk aparat kepolisian.

Luasnya perhatian dan liputan tentang peristiwa Bom Bali 2002 telah ikut menaikkan popularitas Bali TV sebagai televisi lokal baru. Walau sebagai pendatang baru, Bali TV yang didukung oleh Bali Post sebagai harian terbesar di Bali mampu mengambil peran penting dalam liputan tentang peristiwa Bom Bali 2002. Sebagai media lokal, Bali TV yang didukung harian Bali Post mampu menangkap dan menyajikan sisi-sisi lain dari peristiwa Bom Bali 2002 yang mungkin luput atau tidak mampu diakses oleh media nasional

dan internasional¹⁷⁰. Ada tiga ‘lokalitas’ yang muncul dan menjadi populer setelah peristiwa Bom Bali 2002 di Kuta, yaitu Bali TV, Made Mangku Pastika¹⁷¹ dan Haji Agus Bambang Priyanto¹⁷². Bahkan Haji Bambang mendapat predikat Asian Hero 2003 dari majalah Time Asia.

Aparat kepolisian dibawah pimpinan Made Mangku Pastika sebagai ketua tim penyelidikan Bom Bali akhirnya berhasil menangkap empat orang yang diduga sebagai pelaku peledakan Bom Bali. Ketiga pelaku ini adalah Imam Samudra, Ali Imron, Muchlas, dan Amrozy yang masing-masing ditangkap dalam perjalanannya untuk melarikan diri. Iman Samudra berasal dari Serang, Banten, sementara ketiga yang lain adalah kakak adik asal Lamongan, Jawa Timur.

Penangkapan para tersangka Bom Bali telah meningkatkan ketegangan hubungan antarumat beragama di Bali. Identitas pelaku kemudian semakin menguatkan *stereotype* yang selama ini telah terbangun bahwa Islam terkait dengan terorisme tanpa secara kritis mempertanyakannya. Walaupun tidak terjadi konflik secara terbuka seperti kasus pembakaran lapak pedagang kaki lima di Kuta di tahun 1999, namun kecurigaan kepada pendatang (orang luar) semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan mulai dilakukannya

170 Keunggulan ‘yang lokal’ ini dalam peliputan Bom Bali dikemukakan oleh RA Sugihartono dalam sebuah artikelnya yang berjudul Televisi Lokal sebagai medium Pencitraan Lokalitas Daerah. Lebih jauh lihat link <http://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/acintya/article/view/17>

171 Made Mangku Pastika adalah putra Bali kelahiran Singaraja, Bali namun melewati masa kecil dan remajanya di Palembang, Sumsel. Dia adalah putra pertama Bali yang menjadi Kapolda Bali dan saat ini adalah Gubernur Bali

172 Haji Agus Bambang Priyanto atau yang lebih dikenal dengan panggilan Haji Bambang adalah tokoh masyarakat Muslim kelahiran Tuban, Kuta Bali dan merupakan salah satu orang pertama yang terjun membantu korban Bom Bali 2002 bersama remaja Masjid Tuban. Dia juga adalah pensiunan pegawai dinas perhubungan pemerintah daerah Kabupaten Badung, Bali.

operasi kartu tanda penduduk oleh Pecalang (keamanan adat desa) di seluruh Bali. Operasi kartu tanda penduduk ini gencar dilakukan di daerah-daerah yang dihuni oleh penduduk luar Bali dan lebih menysasar ke pemukimam penduduk kelas bawah. Penduduk kelas bawah dari luar Bali ini umumnya bekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima seperti bakso, pecel lele, atau buruh kasar seperti tukang angkut pasir.

Seperti dicatat oleh Ngurah Suryawan (2005) dalam penelitiannya, pecalang yang tugasnya di wilayah adat seperti menjaga *upakara* (ritual) meluas menjadi pemeriksa kartu tanda penduduk yang itu adalah domain satuan polisi pamong praja (satpol PP). Demikian pula halnya dengan pemeriksaan dan operasi penangkapan narkoba seringkali dilakukan oleh pecalang yang mengambil alih tugas aparat kepolisian. Bahkan sebuah desa di bilangan Denpasar menurut Suryawan bisa membukukan hasil pungutan sampai puluhan juta rupiah setiap bulan dari iuran penduduk luar Bali ini¹⁷³.

Ajeg Bali

Munculnya *Ajeg Bali* tidak bisa dilepaskan dari konteks reformasi dan kemudian disebarluaskan oleh Bali TV dan induknya kelompok media Bali Post. Bisa disebut bahwa Bali TV dan pemiliknya yaitu Satria Naradha adalah *proponent*

173 Aturan yang dikeluarkan pemerintah daerah kabupaten/kota di Bali ini dikenal dengan istilah KIPEM (kartu identitas penduduk musimam). Jadi siapa saja yang datang dan bermukim di Bali walau telah memiliki e-KTP tetap harus mengurus KIPEM. Salah satu perda tentang KIPEM ini dikeluarkan oleh pemerintah Kota Denpasar yaitu perda no. 2 tahun 2002 yang mengenakan biaya Rp. 200.000 untuk penduduk luar Bali dengan masa berlaku selama 3 bulan.

utama wacana dan gerakan *Ajeg* Bali. Namun demikian, secara resmi *Ajeg* Bali muncul pertama kali dalam pidato Gubernur Bali, Dewa Made Berata saat berpidato dalam ulang tahun Bali TV 26 Mei 2002 (Nordholt 2007).

Awalnya wacana dan gerakan *Ajeg* Bali relatif kurang terdengar luas sejak awal diiniasi Bali TV dan kelompok media Bali Post, begitu juga sejak diucapkan secara publik oleh Gubernur Bali saat itu Dewa Made Berata dalam pidatonya saat ulang tahun pertama Bali TV. Momentum yang menjadi pemantik populernya wacana dan gerakan *Ajeg* Bali adalah peristiwa bom yang meledak di Kuta pada 12 Oktober 2002. Peristiwa yang menghentak dunia dan mengundang simpati dari tokoh-tokoh dunia serta menelan ratusan korban jiwa.

Dalam proses pemulihan pasca Bom yang meneror Bali inilah, wacana dan gerakan *Ajeg* Bali semakin mendapatkan respon luas dari masyarakat Bali. Bahkan tokoh-tokoh nasional dan internasional ikut menyambut dan memberikan apresiasi akan wacana dan gerakan *Ajeg* Bali. Hal ini terbukti dari kunjungan para pejabat, tokoh-tokoh tersebut kepada Satria Naradha dan kelompok media Bali Post. Dalam kunjungannya tersebut mereka menandatangani prasasti *Ajeg* Bali¹⁷⁴, sebuah prasasti yang menurut pemrakarsanya diilhami oleh sumpah palapanya Gajah Mada (Dwiputra 2012).

174 Prasasti *Ajeg* Bali berbentuk sebuah nisan berbahan marmer berukuran 30 cm x 30 cm yang ditandatangani oleh setiap tokoh yang datang ke Bali dalam melakukan simakrama (beranjangsana) ke Bali TV dan Satria Naradha. Prasasti *Ajeg* Bali yang ditandatangani tokoh-tokoh nasional Indonesia ini bisa ditemukan tertempel di bagian luar dinding gedung Pers Bali K. Nadha yang menjadi kantor pusat kelompok Media Bali Post di jalan Kebo Iwa, Denpasar.

Dalam perkembangannya, wacana dan gerakan *Ajeg Bali* diinterpretasikan dan diterjemahkan menjadi beragam bentuk wacana dan gerakan. Berbagai turunan dari wacana *Ajeg Bali* ini diinisiasi dan mendapatkan support dari Kelompok Media Bali Post dan Satria Naradha sendiri tampil di depan. Setidaknya ada tiga turunan wacana *Ajeg Bali* yang diinisiasi oleh kelompok Media Bali Post berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan komponen adat di Bali. *Pertama*, adalah sektor bisnis dengan mendirikan Koperasi Krama Bali, Warung Makan Sari Warta Boga di Jalan Imam Bonjol Denpasar, dan pusat pertokoan oleh-oleh di bilangan Tuban, Kuta. Belakangan juga berdiri Warung 63 di Jalan Veteran Denpasar dan Restoran Shamkara di Sanur. *Kedua*, adalah sektor pendidikan dan budaya salah satunya lewat tuntutan dan kemudian diadopsi pemerintah terkait bulan bahasa Bali di sekolah-sekolah. Program lain adalah lomba puja tri sandhya oleh sekehe teruna-teruni (karang taruna), serta program guru dan murid *Ajeg Bali*. *Ketiga*, adalah militerisasi dengan pembentukan Pecalangan (satuan polisi adat dan Agama Hindu).

Koperasi Krama Bali (KKB) bisa disebut sebagai wadah dari gerakan ekonomi Hindu (Bali) yang dipelopori oleh kelompok media Bali Post. Hal ini tercermin dari pidato Satria Nardha saat peresmian berdirinya Koperasi Krama Bali pada 26 Mei 2005 yang juga bersamaan dengan ulang tahun ketiga Bali TV yang menyebutkan perlunya orang Bali Hindu menjadi tuan rumah di daerah sendiri. Pidato oleh Gubernur Bali saat itu, Dewa Made Berata dan Ketua DPRD Bali saat itu Cokorda Oka Ratmadi juga menegaskan hal yang sama yaitu tegak, kokohnya Agama (Hindu), adat dan budaya Bali dan semuanya adalah dari, oleh dan untuk orang Bali-Hindu (Nordholt, *ibid*).

Luasnya pemberitaan oleh kelompok media Bali Post telah melambungkan nama Koperasi Krama Bali di mata publik di Bali. Hampir semua pejabat publik di Bali memberikan support dan atensi khusus kepada Koperasi Krama Bali (KKB). Tidak ketinggalan tokoh Agama dan adat di Bali hadir dalam acara yang diliput luas oleh media di Bali tersebut. Mulai dari pimpinan institusi di Bali seperti Gubernur, Kapolda, Pangdam, Ketua DPRD Bali, kepala kejaksaan tinggi Bali. Pimpinan institusi kabupaten/kota se-Bali seperti bupati, walikota, ketua DPRD kabupaten/kota, kepala kejaksaan negeri kabupaten/kota se-Bali.

Kehadiran Ida Pedanda Gde Made Gunung menjadi magnet acara peresmian tersebut sekaligus memberikan *Dharma Wacana* untuk pertama kalinya yang disiarkan dan ditonton pemirsa. Selain lewat kehadirannya saat peresmian Koperasi Krama Bali (KKB), pimpinan tinggi institusi propinsi dan kabupaten/kota di Bali tersebut juga menjadi anggota Koperasi Krama Bali (KKB) serta menghimbau jajaran di bawahnya untuk mendaftar menjadi anggota¹⁷⁵. Di akhir acara

175 Selain iuran anggota koperasi, para pimpinan institusi tersebut juga menabung uang dalam jumlah yang cukup besar di kas Koperasi Krama Bali (KKB). Bahkan selain uang pribadi, mereka juga menyertakan dana pemda untuk ditaruh di kas Koperasi Krama Bali (KKB). Saat menaruh dana pribadi dan dana pemda di Koperasi Krama Bali (KKB) selalu dipublikasikan di media milik kelompok media Bali Post. Hanya Bupati Jembrana periode 2000-2005 dan 2005-2010, Prof. I Gde Winasa yang menolak penyertaan modal di Koperasi Krama Bali (KKB). Hal ini menyebabkan konflik berkepanjangan antara Winasa (pemda Jembrana) dengan Satria Naradha (kelompok media Bali Post). Winasa (pemda Jembrana) akhirnya membuat media sendiri (cetak dan TV Jimbarwana walau akhirnya keduanya tutup), dan bekerjasama dengan Radar Bali (anak perusahaan Jawa Post grup) dalam memberitakan kegiatan pemda Jembrana. Lebih jauh lihat, I Made Suarnawa, Media dan Politik dalam Pilkada di lima (5) kabupaten/kota di Bali. Makalah tidak diterbitkan.

peresmian Koperasi Krama Bali (KKB) semua tokoh tersebut menandatangani prasasti *Ajeg* Bali.

Dukungan tokoh-tokoh di Bali dan intensnya pemberitaan oleh kelompok media Bali Post telah membuat Koperasi Krama Bali (KKB) dalam waktu singkat berkembang menjadi salah satu koperasi besar di Bali. Ketika baru diresmikan jumlah anggota koperasi sudah mencapai 3000 orang (Muhajir 2007). Berbagai bidang usaha juga dirintis oleh Koperasi Krama Bali (KKB), satu diantaranya yang paling menonjol adalah warung bakso Babi *Ajeg* Bali yang dilengkapi dengan spanduk mencolok di depan warungnya bertuliskan binaan Koperasi Krama Bali (KKB) dan pakaian adat madya Bali untuk penjual keliling.

Sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi rakyat kecil dan mencetak wirausahawan, ide yang digagas oleh Koperasi Krama Bali mengundang perhatian masyarakat di Bali. Ini terlihat dari banyaknya orang yang mendaftar untuk berjualan bakso babi krama Bali. Namun yang menarik adalah pemilihan jenis usahanya yaitu berjualan bakso babi dan mengkhususkan merekrut sameton-nak Bali (saudara, orang Bali-Hindu). Pertanyaan yang mengusik adalah kenapa jenis usaha jualan bakso yang dipilih, bukan jenis usaha yang lain? Kenapa menjual bakso babi bukan bakso ayam atau sapi dan kenapa khusus hanya untuk sameton-nak Bali (Saudara, orang Bali-Hindu)? Memang jawaban normatif akan keluar dari penggagasnya, misalnya karena pertimbangan bisnis yang prospektif, jenis bakso babi belum ada yang jual, sampai karena babi tentu yang non Hindu akan tidak mau bergabung.

Tak pelak walaupun sah sebagai cara untuk berkompetisi, pendirian warung bakso Bali *Ajeg* Bali ini merupakan upaya 'melawan' banyaknya bakso ayam dan sapi

yang dijual oleh pedagang asal luar Bali. Seperti ditegaskan oleh inisiator utamanya yaitu Satria Naradha bahwa dia sebenarnya kagum dengan bakso ayam dan sapi yang dijual pedagang bakso asal Jawa yang ‘menjajah’ berbagai pelosok Indonesia. Naradha beralasan pemilihan bisnis bakso babi adalah cara melawan musuh yang kuat yaitu meminjam senjatanya, dimodifikasi kemudian dipakai untuk melawan balik musuh tersebut (Dwiputra ibid).

Bentuk kedua dari implementasi wacana dan gerakan *Ajeg Bali* yaitu penguatan identitas di bidang pendidikan dan budaya terutama menysasar instansi pemerintah dan sekolah-sekolah. Kegiatan yang menonjol adalah dilakukannya pemilihan guru dan murid *Ajeg Bali* yang digagas kelompok media Bali Post. Kandidat terpilih dikirim ke pesraman (tempat belajar ala Rsi di jaman dahulu, semacam pesantren) milik kelompok media Bali Post di Samsam, Tabanan, Bali. Di pesraman para kandidat terpilih dikarantina selama satu minggu dan menjalani kehidupan layaknya seorang yogi, dimana segala aktivitas yang dilakukan terkait dengan ritual (Dwiputra, ibid).

Kegiatan lain adalah himbauan untuk penggunaan basa Bali di sekolah-sekolah serta agenda kegiatan sembahyang bersama setiap pagi bagi murid-murid sekolah dalam bentuk puja tri sandhya. Persembahyangan diakhiri dengan memercikkan tirta (air suci) kepada murid-murid yang sembahyang oleh gurunya. Kegiatan ini biasanya melibatkan seluruh murid-murid yang beragama Hindu. Terkait dengan puja trisandhya juga ada lomba sembahyang (puja tri sandhya) yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah dan sekehe teruna teruni (karang taruna) di berbagai banjar di Denpasar. Lomba *puja tri sandhya* (sembahyang) ini menarik

karena merupakan kegiatan baru yang diselenggarakan¹⁷⁶. Menurut seorang juri, variabel penilaian adalah posisi fisik saat sembahyang, pengaturan nafas dan terakhir niat yang tulus dan sungguh-sungguh¹⁷⁷. Kegiatan-kegiatan seperti disebutkan diatas disatu sisi adalah kegiatan positif karena memupuk ketaatan pada agama Hindu bagi murid-murid dan para pemuda dan pemudi, walaupun dalam pelaksanaannya menimbulkan problema tersendiri misalnya terkait puja tri sandhya (sembahyang) yang dilombakan ataupun soal berbahasa Bali yang mungkin menimbulkan persoalan komunikasi bagi murid-murid yang non Bali-Hindu atau tidak lahir di Bali. Kegiatan-kegiatan yang ‘menguatkan identitas ke dalam’, juga berpeluang menimbulkan rasa superior yang berlebihan dan kemudian mengeksklusi yang berbeda (sikap eksklusif). Hal inilah kiranya yang terjadi misalnya pada kasus pelarangan pemakaian jilbab yang menimpa seorang siswa di SMA 2 Denpasar yang sempat mengemuka ke media massa¹⁷⁸.

176 Penulis berkesempatan menyaksikan dan mengikuti dari dekat lomba puja tri sandhya (sembahyang) ini pada tahun 2003 karena diselenggarakan di banjar dimana penulis tinggal di Denpasar.

177 Persoalan penilaian ini menjadi menarik karena ukurannya kemudian sangat subyektif dan obyek yang diukur juga sulit. Misalnya terkait penilaian niat seseorang, ini menjadi problem tersendiri bagi para juri.

178 Kasus pelarangan pemakaian jilbab yang menimpa seorang siswi di SMA 2 Denpasar mengemuka di media dan kemudian mendapat atensi khusus dari Komnas HAM. Akhirnya ditemukan solusi setelah kunjungan Komnas HAM ke SMA 2 Denpasar, bahwa si siswi tetap bisa memakai jilbab dan bersekolah seperti biasa. Penulis yang sempat menggali informasi terkait kasus pelarangan jilbab di SMA 2 Denpasar menemukan bahwa pelarangan secara resmi oleh sekolah tidak ada. Pelarangan yang terjadi bersifat pernyataan verbal yang stereotyping baik oleh guru maupun murid. Bagi penulis dan hasil ngobrol-ngobrol dengan beberapa siswa di SMA 2 Denpasar mengindikasikan stereotyping tersebut yang dalam pandangan penulis distimulus oleh rasa superioritas berlebihan yang salah satunya didorong oleh penguatan identitas etnis dan agama. Salah satu contoh penguatan identitas politik etnis dan agama tersebut adalah lewat bahasa (kewajiban penggunaan basa Bali di

Bentuk ketiga dari implementasi wacana dan gerakan *Ajeg Bali* dan sekaligus yang paling mengundang kontroversi hingga kini adalah pembentukan pecalangan (satuan pengaman adat) di tiap-tiap banjar di Bali. Sejarah Pecalangan sendiri masih menjadi perdebatan terutama terkait dengan waktu kelahirannya. Ada yang berpendapat bahwa pecalangan sudah hadir sejak lama misalnya mengaitkan dengan telik sandi jaman kerajaan di Bali ataupun satuan pengamanan desa yang dibentuk untuk melawan penjarahan di masa resesi ekonomi di jaman kolonial. Namun yang jelas pecalangan pertama kali muncul secara fisik ke publik saat terlibat dalam Kongres PDI-P di Bali tahun 1999 (Santikarma 2003).

Secara formal pembentukan pecalangan di seluruh wilayah di Bali dilandasi oleh payung hukum yaitu peraturan daerah propinsi Bali No. 3 tahun 2001 tentang Desa Pekraman yang diantaranya juga mengatur tentang pembentukan, fungsi, wewenang dan tugas pecalang. Dalam struktur Desa Pekraman ini pecalangan menjadi bagiannya yaitu sebagai satuan pengamanan (Pramana 2014).

Tentang tugas dan fungsi pecalangan ini tertuang dalam perda No. 3 tahun 2001 ini namun cakupannya sangat luas dan cenderung menimbulkan tafsir beragam tergantung siapa yang punya kuasa. Bahkan sebagai satuan pengaman adat, tugas dan wewenang pecalang seringkali tumpang tindih atau mengambil alih tugas aparat yang lain yaitu polisi dan satuan polisi pamong praja (satpol PP). Sebagai tenaga

sekolah). Stereotype yang mengindikasikan pandangan minor tentang pemakaian jilbab yang menimpa siswi di SMA 2 Denpasar itu juga disampaikan dalam basa Bali. Untuk info kasus pelarangan jilbab di SMA 2 Denpasar. lihat <http://www.sorotnews.com/berita/print/dpr-kritik-pelarangan-jilbab.6002.html>

pengamanan adat, tugas dan wewenang pecalangn terkait dengan segala ikhwil masalah adat misalnya menjaga *upakara* (ritual) adat, atau wilayah areal pura (Pramana, *ibid*). Namun dalam prakteknya yang terjadi pecalangn misalnya mengambil alih tugas satpol PP yaitu melakukan pemeriksaan kartu tanda penduduk (KTP) ataupun melakukan razia kehidupan malam yang itu merupakan domain polisi.

Persoalan pemeriksaan kartu tanda penduduk ini juga problematik, mengingat sudah ada proses e-KTP (walaupun distop sementara oleh Mendagri karena soal kebocoran server). Elektronik KTP adalah identitas yang berlaku secara nasional dan dipayungi oleh undang-undang kependudukan, namun dalam konteks pemeriksaan KTP oleh pecalang di Bali, e-KTP kalah oleh Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) yang dipayungi peraturan daerah yang secara hierarkhis lebih rendah dari undang-undang. Disamping itu biaya pengurusan KIPEM juga menjadi pertanyaan banyak orang yang merantau ke Bali karena jumlahnya yang besar¹⁷⁹. Sebagai contoh tentang peraturan daerah tersebut adalah peraturan daerah kota Denpasar No. 5 tahun 2002.

Pemeriksaan kartu tanda penduduk (KTP) ini juga mendapat pertanyaan karena cenderung tendensius dan diskriminatif. Pasca bom meledak di Kuta, pintu-pintu masuk ke Bali yaitu pelabuhan Gilimanuk di barat yang berbatasan

179 Salah satu keluhan akan mahalnnya biaya pengurusan KIPEM ini muncul di surat pembaca Bali Post pada Kamis 19 Desember 2002. Pembaca bernama Nyoman Darmada asal Busungbiu, Buleleng menulis bahwa untuk orang yang berasal dari luar kota Denpasar namun masih tinggal di propinsi Bali dikenakan biaya pengurusan KIPEM 100 ribu sementara orang asal luar Bali dikenakan dua kali lipat yaitu 200 ribu. KIPEM ini berlaku untuk tiga bulan dan diperpanjang setelah masa berlaku habis, bandingkan biaya KIPEM ini dengan biaya pengurusan KTP.

dengan pulau Jawa dan pelabuhan Padangbai di timur yang berbatasan dengan pulau Lombok dijaga oleh petugas kepolisian dan dinas perhubungan. Di pintu- pintu masuk ini dilakukan pemeriksaan barang dan manusia (KTP) bagi apa dan siapa saja yang akan masuk ke Bali. Namun di bandara Ngurah Rai sebagai pintu masuk Bali lewat udara tidak diberlakukan pemeriksaan KTP, dan penumpang pesawat bebas melenggang.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan kartu tanda penduduk (KTP) setiap bulan yang dilakukan oleh pecalang ini juga ditenggarai tendensius dan diskriminatif. Operasi KTP ini lebih banyak menyisir pemukiman kelas menengah ke bawah yang dihuni oleh orang-orang dari luar Bali. Bahkan sebuah banjar di Kesiman, Denpasar mengumpulkan iuran puluhan juta yang didapat dari bisnis, serta iuran pribadi orang luar Bali yang tinggal di wilayah banjar tersebut. Pengambilan iuran bulanan itu menjadi tugas pecalang banjar tersebut yang bahkan pecalangan itu sudah memiliki kantor, mobil dinas dan perlengkapan operasi lainnya seperti handy talkie (Suryawan *ibid*). Menariknya tidak pernah terdengar operasi KTP dilakukan di pemukiman elit atau tempat tinggal *expats* (Orang dari luar negeri yang tinggal di Bali).

Seorang pedagang bakso asal Jawa Timur yang diwawancarai Suryawan menceritakan bahwa selain membayar KIPEM, iuran perbulan yang dihitung perkepala juga dikenakan bagi penghuni yang ada di dalam rumah. Iuran ini belum menyebutkan sumbangan sukarela saat *upakara* (ritual) di pura, ada kegiatan karang taruna sampai kadang pecalang yang makan bakso gratis hampir setiap saat. Peluang usaha yang didapat ditambah tiadanya pilihan di kampung asal membuat pedagang bakso ini tetap mengikuti

segala pungutan yang dikenakan pada diri, keluarga dan bisnisnya (Suryawan, ibid).

Lebih jauh implementasi *Ajeg* Bali dalam bentuk pecalangan ini walau dimaksudkan untuk menjaga adat, budaya (Bali) dan agama Hindu, dalam pelaksanaannya terlihat mengabaikan dan membebani orang luar yang datang dan mencari penghidupan di Bali. Menariknya dibawah rezim pariwisata di Bali yang mengedepankan eksotisme budaya, adat, agama cenderung mengabaikan implikasi lebih jauh dari *Ajeg* Bali ini. Ada kesan bahwa pariwisata dan Bali sebagai destinasinya diterima bahkan dipuja secara taken for granted dan tanpa reserve. Hal ini misalnya tercermin dari komentar-komentar teman peneliti tentang pariwisata dan Bali. “Bali itu indah layaknya surga, kehidupan enak dan bahagia di Bali. Diam saja di rumah turis datang membawa dolar. Selain alamnya yang indah, masyarakatnya juga ramah, hidup di Bali tentram. Kalo tidak tentram, banyak maling itu mesti pelakunya orang luar Bali”. Persoalan seperti operasi KTP oleh pecalang dan berbagai bentuk diskriminasi dan stereotype yang menimpa masyarakat luar Bali yang tinggal dan hidup di Bali tentunya berpengaruh pada hubungan antar umat berbeda agama di Bali.

Walaupun selama ini belum muncul eskalasi konflik yang sifatnya terbuka dan menimbulkan kekerasan fisik, namun bukan berarti potensi kearah itu tidak mungkin apabila tidak ada upaya deteksi dan pencegahan dini. Sebagaimana banyak studi menyebutkan bahwa konflik-konflik massif seperti Ambon, Poso, Sampit dan yang lain salah satu pemantiknya adalah kekerasan verbal lewat stereotyping (pelabelan pejoratif).

Sekelumit Kisah *Dharma Wacana* Dan *Pedharma Wacana* di Bali TV

Sejarah Singkat Program Acara *Dharma Wacana* di Bali TV

“Saya sendiri tidak menyangka *Dharma Wacana* akan bisa populer seperti saat ini. Dulu banyak yang mencibir dan bahkan mengutuk saya yang mulai mencoba melakukan *Dharma Wacana* untuk kalangan terbatas. Tapi sekarang yang mencibir itu ikut-ikutan melakukan *Dharma Wacana*”. Komentar tersebut terlontar dari salah seorang *sulinggih* (rohaniawan) Hindu yang paling terkenal saat ini di kalangan umat Hindu baik di Bali ataupun di tempat lain di Indonesia bahkan dikenal juga oleh umat lain. Wajahnya setiap hari muncul di televisi lokal di Bali bahkan untuk rujukan tentang agama Hindu, sosok satu ini seringkali diminta pendapatnya.

Nama *sulinggih* tersebut adalah Ida Pedanda Gede Made Gunung atau yang terkenal dipanggil dengan sebutan Pedanda Gunung. Muncul dan populernya nama Pedanda Gunung tidak bisa dilepaskan dari populernya *Dharma Wacana* di Bali TV. Di kalangan umat Hindu bahkan umat non Hindu yang mengikuti perkembangan agama Hindu, nama Pedanda Gunung dikenal identik dengan *Dharma Wacana*. Berbicara tentang *Dharma Wacana* tentunya tidak bisa lepas dari menyebut nama Pedanda Gunung dan begitu pula sebaliknya.

Menurut Pedanda Gunung, *Dharma Wacana* telah dilakukan oleh semua *sulinggih* dan itu dilakukannya setiap saat bertemu dengan sisya (murid, masyarakat, umat Hindu). “Kalau esensinya *Dharma Wacana* itu kan berbicara, sharing pengetahuan tentang kebajikan, semua *sulinggih* bahkan semua orang sudah dan bisa melakukan. Tapi dalam tradisi

Siwaisme, bicara dan menyebarkan kebajikan tidak bisa sembarangan perlu belajar dan latihan layaknya seorang Siwa (guru). Pengetahuan yang luas dan kebijaksanaan menjadi dasar utama untuk ber*Dharma Wacana*”, ujar Pedanda Gunung¹⁸⁰. Karena hampir sebagian besar *Sulinggih* (rohaniawan) dalam Hindu (Bali) mengikuti tradisi Siwaisme maka hanya orang yang sudah medwijati¹⁸¹ yang boleh memberikan *Dharma Wacana*.

Namun Pedanda Gunung mengaku berpikir *out of the box* mengingat pengetahuan umat Hindu akan agamanya masih minim bahkan hingga kini. “Saya memberanikan diri untuk memulai memberikan *dharma wacana* walaupun saat itu saya masih walaka¹⁸². Banyak yang marah dan mencibir bahkan ada yang bilang kwalat, tapi saya berpikir untuk kebaikan apa salahnya tradisi (Siwaisme) itu diasiasi sedikit. Toh saya juga hanya *Dharma Wacana* untuk kalangan terbatas. Saya percaya ajaran Karmapala, perbuatan baik akan menghasilkan pahala (hasil) yang baik pula”, cerita Pedanda Gunung¹⁸³. Setelah resmi sebagai *sulinggih*, Pedanda Gunung mengaku bisa meneruskan *Dharma Wacananya* lebih leluasa walaupun suara-suara sumbang dan cibiran masih terus

180 Wawancara dengan Ida Pedanda Gede Made Gunung di griya (rumahnya) pada Minggu 26 Oktober 2014.

181 Dwijati berasal dari kata Dwi artinya dua dan Ja artinya lahir. Merupakan proses upakara (ritual) yang harus dilewati dalam penobatan seseorang menjadi *sulinggih*. Seseorang yang telah melewati upakara (ritual) Dwijati disebut telah terlahir kedua kali (reinkarnasi) setelah yang pertama lahir dari kandungan ibu, dan yang kedua terlahir dari “rahim” (pendidikan) sang guru (nabe) link: <http://stitidharma.org/search/dwijati>.

182 Walaka adalah status seseorang sebelum menjadi *sulinggih*.

183 Menurut Pedanda Gunung, *Dharma Wacana* dalam tradisi Siwaisme dilakukan oleh seorang *sulinggih*, di tempat khusus seperti pesraman (tempat belajar semacam pesantren) dan diberikan kepada sisya (murid) terbatas. Wawancara dengan Pedanda Gunung (ibid).

menimpa dirinya. Sampai kemudian sekitar tahun 2000, sebuah panggilan telpon berdering dari kantor Bali TV di Denpasar. Seorang perempuan yang mengaku sebagai sekretaris mengabarkan bahwa CEO Bali TV yaitu Satria Naradha ingin bertemu dan ngobrol dengan Pedanda Gunung tentang Bali TV dan program acara yang bisa menarik pemirsa televisi di Bali khususnya umat Hindu.

Dari pertemuan dan pembicaraan antara Ida Pedanda Gede Made Gunung dengan CEO Bali TV yang sekaligus pemilik kelompok media Bali Post (induk usaha Bali TV) itulah kemudian lahir program acara *Dharma Wacana* di Bali TV. Menurut Pedanda Gunung, dirinya dengan Satria Naradha (dan Bali TV, serta kelompok media Bali Post) punya kesamaan pandang dan tujuan yaitu meng*Ajegkan* Bali lewat sumbangsih kita masing masing. “Saya meng*Ajegkan* Bali lewat wejangan- wejangan ajaran agama sebagai *sulinggih* dan Satria Naradha lewat Bali TV lewat memproduksi program-program acara yang bisa menjaga dan memperkuat identitas adat, budaya (Bali), dan agama Hindu”, cerita Pedanda Gunung¹⁸⁴.

Dalam pembicaraan empat mata dengan Satria Naradha (CEO Bali TV) tersebut Pedanda Gunung mengaku juga mempunyai keprihatinan yang sama akan kondisi Bali belakangan ini. “Kerusakan alam, eksploitasi lahan besar-besaran dari sawah ke perumahan dan akomodasi hotel. Kerusakan moral, *café-café* remang-remang berjamuran, pembunuhan, pencurian, perkosaan, padeofilia. Pejabat, politisi, pengusaha sibuk korupsi, tokoh agamawan juga korupsi dan selingkuh. Masyarakat kecil terjepit kesulitan ekonomi dan kalah bersaing karena gak ada akses. Pendatang

184 Wawancara dengan Pedanda Gunung (ibid).

masuk berdatangan mengambil dan sekarang menguasai ekonomi Bali disegala sektor dan segala bidang. Tidak ada rasa bangga sebagai orang Bali-Hindu, lihat saja anak-anak mana ada yang suka dan malahan banyak yang gak bisa basa Bali. Lama kelamaan Orang Bali-Hindu akan dan sudah menjadi turis di kampung sendiri”, cerita Pedanda Gunung¹⁸⁵.

Sebagai *sulinggih* (rohaniawan) yang juga tokoh masyarakat di Bali, Pedanda Gunung mengaku permasalahan sosial, ekonomi, politik, budaya, agama di Bali sangat kompleks dan kerusakannya hampir akut. Menurut Pedanda Gunung salah satu resep memperbaiki kerusakan yang ada di Bali adalah kembali ke ajaran agama Hindu. “Masyarakat Bali-Hindu perlu diingatkan untuk mempelajari ajaran agamanya secara benar, tidak boleh lagi beragama mule keto (memang begitu dari sononya)”, kata Pedanda Gunung.

Dalam pandangan Pedanda Gunung, *Dharma Wacana* adalah satu cara untuk menambah pengetahuan agama umat Hindu dan memperkuat keimanan (Hindunya). “*Dharma Wacana* itu ibarat obor penerang *awidya* (kegelapan, kebodohan) bagi umat Hindu. Kerusakan yang terjadi di Bali ini kan ibarat *Awidya* yang membelenggu masyarakat Bali-Hindu. Bila *Dharma Wacana* bisa menjangkau lebih luas tentu *Awidya* ini akan menjadi terang bagi umat Hindu”, lanjut Pedanda Gunung.

Dharma Wacana pertama kali tayang berbarengan dengan peresmian siaran on air Bali TV pada 26 Mei 2002. Penayangan *Dharma Wacana* pertama kalinya dilakukan secara live karena saat itu Pedanda Gunung memberikan *Dharma Wacana* dalam peresmian Bali TV. Menurut Gede Eka Pery

185 ibid

Purnama, produser program acara *Dharma Wacana* di Bali TV, acara live *Dharma Wacana* saat peresmian Bali TV itu adalah satu-satunya dan setelahnya tidak pernah ada lagi acara *Dharma Wacana* yang dilakukan secara live. Satu alasannya adalah *Dharma Wacana* tidak mempunyai jadwal pasti karena tergantung permintaan penyelenggara

dan biasanya berdurasi sangat panjang. “Satu kali take gambar acara *Dharma Wacana* memakan waktu sekitar 2 jam dan itu bisa menjadi bahan penayangan empat kali karena durasi sekali tayang dipotong iklan untuk program acara *Dharma Wacana* adalah tiga puluh menit”, kata Gede Pery¹⁸⁶.

Proses syuting program acara *Dharma Wacana* di Bali TV menurut Gede Pery berlangsung sederhana. Melibatkan kru TV yang tidak banyak serta tidak memakai script dan latihan. “Saya ingat sejak pertama kali pengambilan gambar untuk program acara *Dharma Wacana* lancar dan mengalir, tanpa naskah tanpa proses roll on, action dan cut. Kita hanya mengikuti alur *Dharma Wacana* yang diberikan Pedanda Gunung, nanti diakhiri proses editing untuk menyesuaikan dengan durasi program acara *Dharma Wacana*. Beliau ber*Dharma Wacana* di lokasi kita pasang kamera langsung ambil gambar. Hingga kini proses syuting program acara *Dharma Wacana* sederhana seperti itu”, jelas Gede Pery.

Dengan intensitas penayangan setiap hari, hingga saat ini sudah dua belas tahun lamanya program acara *Dharma Wacana* ditayangkan di Bali TV dan dalam istilah Pedanda Gunung menerangi *Awidya* yang menghinggapi umat Hindu di Bali dan seluruh Indonesia yang bisa merelay siaran

186 Wawancara dengan Gede Pery Eka Purnama pada Senin 22 September 2014 di rumahnya di bilangan Denpasar.

Dharma Wacana Bali TV. Pertanyaan yang kemudian layak diajukan adalah apakah *Awidya* (kegelapan, kebodohan) masih menggelayut di kalbu umat Hindu? Semaraknya *upakara-upakara* (upacara suci, ritual) yang berlangsung diseluruh pelosok Bali dengan intensitas yang rutin menjadi indikator perubahan dan keberhasilan *Dharma Wacana* yang diklaim Pedanda Gunung. Sesuatu yang menurut Pedanda Gunung susah ditemukan atau intensitasnya rendah sebelum reformasi dan sebelum ada program acara *Dharma Wacana* di Bali TV. “Dulu *upakara-upakara* (upacara suci, ritual) juga berlangsung tetapi kelihatan sepi dan kurang antusias umat Hindu untuk menyelenggarakan. Dari pakaian yang dipakai kelihatan suram, jenis banten (sesajen) tidak selengkap saat ini. Kalau *upakara* sekarang anda perhatikan di Bali dari jauh sudah kelihatan. Ada tanda palang penutup jalan, ada pecalang yang berjaga, ada mantram suci yang diperdengarkan lewat loudspeaker, belum lagi umat yang berjalan beriringan dengan pakaian bagus, seragam berjalan menuju pura dari rumahnya”, kata Pedanda Gunung.

Selain yang berdimensi fisik dan dapat terlihat seperti ritual, Pedanda Gunung juga mencontohkan bagaimana meningkatnya pengetahuan umat Hindu akan agamanya berkat pengaruh *Dharma Wacana*. “Yang gampang dilihat dan didengar adalah ucapan-ucapan seperti *Om Swastyastu* (Salam seperti Assalamualaikum), *Astungkara* (seperti Alhamdulillah), juga puja tri sandhya yang selalu dipujakan sebelum sembahyang dan diperdengarkan di televisi atau radio tiga kali sehari. Bila dihayati betul *mantran puja tri sandhya* itu banyak mengandung filsafat kebajikan dan nasehat untuk hidup sehari-hari”, ujar Pedanda Gunung.

Lebih jauh menurut Pedanda Gunung yang menjadi indikator peningkatan pengetahuan agama umat Hindu yang didapat dari *Dharma Wacana* adalah penjelasan tentang berbagai aspek agama Hindu. Umat Hindu sekarang bisa menjelaskan berbagai pertanyaan yang dulu dianggap tidak terjawab sehingga membuat seolah-olah agama Hindu itu menyembah berhala atau kepercayaan primitif. Sebagai contoh misalnya kenapa umat Hindu seolah-olah memuja banyak dewa-dewi? Atau pun kenapa umat Hindu memberi sesaji pada patung, batu, atau kayu, apakah umat Hindu menyembah berhala? Apa makna sesaji dan *upakara* (upacara suci, ritual) yang setiap saat dilakukan umat Hindu khususnya di Bali?

Walaupun dengan *tone* yang agak berbeda, apa yang dijelaskan Pedanda Gunung diatas sejalan dengan analisa Greg Fealy tentang komodifikasi agama khususnya yang dia amati adalah Islam. Fealy menyebutnya bukan hanya terjadi proses '*consuming Islam*' tetap juga '*Islamic consumption*', bukan hanya komersialisasi agama (Islam) tetapi juga diseminasi ideologi dan pengetahuan¹⁸⁷. Namun Pedanda Gunung lebih melihat komodifikasi agama ini dalam kacamata dikotomis (positif-negatif) dan tidak menyinggung tentang kecenderungan munculnya fenomena pemahaman agama puritan, radikal yang juga ditenggarai Fealy dalam proses komodifikasi agama.

187 Lebih jauh lihat Greg Fealy, *Consuming Islam: Comodified Religion and Aspirational Pietism in Contemporary Indonesia*, in Greg Fealy and Selly White (eds.), *Expressing Islam: Religious Life and Politic in Indonesia*. Singapore: ISEAS, 2007.

Kisah Dua *Pedharma Wacana* terkenal

Muncul dan terkenalnya program acara *Dharma Wacana* khususnya di Bali TV telah ikut mempopulerkan *Pedharma Wacananya*. *Pedharma* menjadi tokoh publik baru di Bali. Sejauh ini Ada dua nama yang paling terkenal dan sering dirujuk bila berbicara tentang *Dharma Wacana* di kalangan umat Hindu, yaitu Ida Pedanda Gede Made Gunung dan Ida Pandita Mpu Jaya Acharyananda. Kedua *sulinggih* yang menjadi *Pedharma Wacana* ini mewakili dua kelompok kasta besar di Bali. Ida Pedanda Gede Made Gunung merupakan *sulinggih* kasta Brahmana dan Ida Pandita Mpu Jaya Acharyananda mewakili kasta Sudra. Kedua *Pedharma Wacana* ini adalah perintis awal *Dharma Wacana* di Bali TV dari sebanyak tiga puluh delapan *Pedharma Wacana* yang saat ini tampil di Bali TV¹⁸⁸.

Pertimbangan lain, setelah melalui pemeriksaan terhadap materi dan hasil wawancara dengan kedua *Pedharma Wacana* ini relevan dengan tema penelitian yang diangkat yaitu bagaimana dalam tantangan *Ajag Bali*, *Dharma Wacana* mampu keluar dari sikap eksklusif menuju inklusif dan pluralis.

Dalam analisis materi *Dharma Wacana* oleh kedua *Pedharma Wacana* ini, terkandung perspektif *inward looking* dan juga pemahaman ajaran dan sikap keagamaan yang eksklusif. Menariknya dalam wawancara, kedua *Pedharma Wacana* tersebut menyadari adanya perspektif *inward looking* dan pemahaman serta sikap keagamaan yang eksklusif. Kedua *Pedharma Wacana* juga menyadari perlunya menggeser

188 Informasi ini didapatkan dari hasil wawancara dengan Gede Pery, produser program acara *Dharma Wacana* di Bali TV (ibid)

perspektif *inward looking* ke perspektif *outward looking* dan mencegah pemahaman dan sikap keagamaan yang eksklusif serta mendorong pemahaman dan sikap keagamaan yang inklusif dan pluralis. Kedua pe-Dharma Wacana mengaku telah melakukannya walau mereka menyadari upaya tersebut masih terbatas khususnya dibatasi oleh permintaan dan kebutuhan audience yang lebih tertarik soal *upakara* (ritual) dan minimnya support pemerintah dalam hal ini Dirjen Bimas Hindu, Dinas agama propinsi Bali dan kabupaten. Demikian juga dengan lembaga perwakilan umat Hindu yaitu parisadha Hindu Dharma Indonesia pusat dan daerah Bali yang minim kontribusinya untuk turut langsung dalam mensupport Dharma Wacana dan menggalakkan penyuluhan/bimbingan/penyiaran agama Hindu.

Ida Pedanda Gede Made Gunung

Tidak berlebihan kiranya bila disebutkan bahwa Ida Pedanda Gede Made Gunung adalah *sulinggih* dan *Pedharma Wacana* paling populer di kalangan umat Hindu. Pedanda Gunung adalah tokoh dan publik figur penting di Bali yang selalu menjadi rujukan bila berbicara tentang agama Hindu khususnya dan Bali dalam artian luas. Undangan untuk menghadiri pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat kala itu, George W. Bush di Bali dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Asia Pasifik pada 23 Oktober 2003 menjadi bukti popularitas dan ketokohan Pedanda Gunung.

Sebelum menjadi *sulinggih*, selama puluhan tahun Ida Pedanda Gede Made Gunung yang bernama Walaka (status sebelum menjadi *sulinggih*, rohaniawan), Ida Bagus Gede Suamem berprofesi sebagai pegawai negeri kemudian guru,

berlanjut ke dosen. Di sela kesibukan profesinya Ida Bagus Suamem juga dikenal sebagai olahragawan. Sebagai pegawai negeri, Pedanda Gunung sempat bertugas sebagai penyuluh lapangan keluarga berencana

kabupaten Gianyar. Sebagai tenaga pendidik, menghabiskan karir sebagai guru sekolah dasar, dan kemudian setelah menamatkan pendidikan di institute Hindu Dharma Denpasar, Pedanda Gunung mengabdikan sebagai dosen di almamaternya. Sebagai olahragawan Pedanda Gunung adalah atlet voli kabupaten Gianyar dan pelatih karate.

Terlahir dari keluarga pedanda (*sulinggih*, rohaniawan) di griya¹⁸⁹ Gede Kemenuh Purnawati, Blahbatuh, Pedanda Gunung melanjutkan darma bakti orang tua dan leluhurnya menjadi seorang *sulinggih*. Walau saat ini telah menjadi orang suci, Pedanda Gunung mengaku melewati masa mudanya sebagai anak yang suka berkelahi. Karena alasan tersebut Pedanda Gunung memilih olahraga karate. “Dulu banyak yang bilang bahwa saya pasti jadi pedanda, *sulinggih* karena keturunan pedanda, *sulinggih* tapi saya ketawa saja. Saya pikir mana mungkin anak seperti saya jadi orang suci. Memang sempat mimpi didatangi orang suci disuruh belajar lontar tapi saya tolak. Saya hobi berkelahi dan senang pacaran, ngapain ngurusin lontar dan *tatwa*. Itu untuk orang tua, begitu pikiran saya kala itu”, kenang Pedanda Gunung.

Menurut Pedanda Gunung, apa yang dikatakan orang suci yang datang dalam mimpinya itu menjadi kenyataan. Sekuat apapun dirinya menolak ternyata jalan hidupnya berkata bahwa dirinya harus menjadi *sulinggih*. Dan setelah

189 Griya adalah nama rumah untuk keluarga kasta Brahmana atau rumah Pedanda (*sulinggih*). Griya juga menjadi sebutan rumah untuk *sulinggih* yang berasal dari kasta Sudra.

sekian tahun belajar sastra, *tatwa* lewat lontar dan belajar kepada nabe (guru, *sulinggih* senior), pada tahun 1994 Ida Bagus Gede *Suamem mediksa* (upacara penobatan) sebagai *sulinggih*. Nama walaka Ida Bagus Gede Suamem ditanggalkan dan secara resmi berganti menjadi Ida Pedanda Gede Made Gunung¹⁹⁰.

Pedanda Gunung mengaku latarbelakangnya sebagai guru dan dosen, sangat membantu ketika dirinya memberikan *Dharma Wacana*. “Sebagai mantan penyuluh lapangan tentang keluarga berencana memudahkan saya dalam menghadapi orang dan orasi di depan orang. Tidak ada rasa canggung dan khawatir karena sudah pengalaman”, ujar Pedanda Gunung. Ketika sedang belajar sastra, *tatwa* itulah Pedanda Gunung mengaku sudah mulai memberikan *Dharma Wacana* secara terbatas di griya (rumahnya) dan di rumah-rumah penduduk yang meminta dirinya untuk memimpin upacara. “Awalnya banyak yang canggung dan merasa aneh saat *upakara* (ritual) di rumah ada orang berbicara tentang ajaran agama atau tata cara banten (sesajen) dan maknanya. Tapi lama kelamaan mereka terbiasa dan merasa mendapat pemahaman baru”, ujar Pedanda Gunung.

Apa yang mulai dirintis Pedanda Gunung untuk *Dharma Wacana* dengan susah payah dan penuh cibiran dan pandangan sebelah mata telah mulai menuai hasil. Bahkan Pedanda Gunung sempat mengaku ingin berhenti dan tidak mau menjadi *sulinggih*. Namun istrinya mengingatkan hukum karmaphala. Popularitas telah diraih dan *Dharma Wacanapun*

190 Selain lewat wawancara, informasi tentang biografi Ida Pedanda Gede Made Gunung bisa diakses lewat website pribadinya di www.idapedandangunung.com

menjadi wacana publik yang dominan dalam penyiaran/bimbingan/penyuluhan agama Hindu di Bali dan tempat lain di Indonesia bahkan hingga ke mancanegara. “Karmaphala telah berjalan tanpa diminta dan tidak bisa dipaksa dan dihindari. Siapa menanam kebaikan akan menghasilkan kebaikan pula begitu sebaliknya. Tapi saya bukan berpikir hasil, ini proses ngayah (bekerja dengan tulus) dan bhakti (semacam tawakal, devotion)”, ujar Pedanda Gunung tentang populernya *Dharma Wacana*.

Ida Pandita Mpu Jaya Acharyananda

Selain nama Ida Pedanda Gede Made Gunung, nama lain yang patut disebut bila berbicara tentang *Dharma Wacana* di kalangan umat Hindu adalah Ida Pandita Mpu Jaya Acharyananda. Di kalangan pemirsa *Dharma Wacana* dan kalangan rohaniawan dan agamawan, sosok satu ini dikenal vokal, dan selalu kritis tanpa tedeng aling-aling. Dengan intonasi suara yang tegas dan tidak takut untuk menyinggung isu-isu sensitif di Bali membuat *sulinggih* satu ini mendapat tempat dihati pemirsa *Dharma Wacana*¹⁹¹.

Nama Mpu Jaya (nama pendek Ida Mpu Jaya Acharyananda) menjadi populer setelah tampil dalam *Dharma Wacana* di Bali TV. Setelah mendapatkan dan mempopulerkan Pedanda Gunung, Bali TV mengaku mencoba memberi ruang

191 Gede Pery Eka Purnama, sang produser program acara Dharma Wacana di Bali TV menuturkan bahwa seringkali pihak editor terpaksa mengedit rekaman video Dharma Wacana yang diberikan oleh Ida Mpu Jaya Acharyananda karena misalnya menyinggung isu sensitive seperti konflik kasta, privilege yang dimiliki kasta triwangsa (Brahmana, Ksatria, Waisya) misalnya dalam penggunaan sor singgih basa (hierarki bahasa) ataupun keistimewaan dalam posisi duduk saat kundangan atau disuguhi makanan. Wawancara dengan Gede Pery (ibid).

bagi *Pedharma Wacana* lain untuk tampil sekaligus memberi warna lain dalam menambah pengetahuan umat Hindu. “Setelah mencari dan menyeleksi banyak nama, tim akhirnya berkesimpulan untuk bekerjasama dengan Mpu Jaya. Alasannya Mpu Jaya memiliki pengetahuan luas dan dalam *Dharma Wacananya* banyak memunculkan ide-ide baru diselingi humor-humor segar sehingga diasumsikan akan disenangi pemirsa”, ujar Gede Pery¹⁹².

Latarbelakang Mpu Jaya sendiri, menghabiskan hampir seluruh karirnya dengan bekerja yang berkaitan dengan dunia penyuluhan dan pendidikan agama. “Saya mulai sebagai tenaga penyuluh lapangan bidang agama Hindu di Sulawesi Tenggara. Waktu itu sekitar tahun 1991, saya baru menamatkan studi sarjana di institute Hindu Dharma di Denpasar dan saat melamar di dinas agama kemudian dalam masa training ditempatkan sebagai tenaga penyuluh lapangan di Sulawesi. Walau medan dan tantangan berat di wilayah tersebut, saya tidak mudah menyerah”, kata Mpu Jaya.

Setelah hampir sepuluh tahun merantau ke Sulawesi, Mpu Jaya akhirnya pulang kampung. Mpu Jaya kemudian melanjutkan kuliah pasca sarjana di institute Hindu Dharma yang sudah berganti nama menjadi sekolah tinggi agama Hindu negeri (STAH) di Denpasar. “Setelah lulus saya mengabdikan menjadi dosen sambil melanjutkan kuliah ke jenjang doktoral juga di STAH. Saya resmi menjadi *sulinggih* di tahun 2008 dan dalam Mahasabha tahun 2011, saya menjadi

192 Wawancara dengan Gede Pery (ibid).

Dharma Adyaksa PHDI pusat (semacam Rais Aam dalam struktur PBNU, pen) bidang teologi ”, cerita Mpu Jaya¹⁹³.

Bagi Mpu Jaya yang saat walaka bernama I Wayan Miartha, *Dharma Wacana* telah berperan besar dalam meningkatkan pengetahuan umat Hindu serta mendorong apa yang ia sebut sebagai kebangkitan Hindu khususnya di Bali. Mpu Jaya mencontohkan pembangunan dan renovasi pura-pura tidak hanya di Bali tetapi hingga ke luar Bali yang terdapat tempat sucinya. Transmigran asal Bali di perantauan semakin antusias dan bangga sebagai orang Hindu demikian pula dengan pemeluk Hindu yang etnis non Bali semakin berani menunjukkan jati dirinya. “Ini perkembangan yang menggembirakan dan menurut saya ini salah satunya disumbangkan oleh *Dharma Wacana*”, ujar Mpu Jaya¹⁹⁴.

Menurut Mpu Jaya dirinya ikut aktif melahirkan dan mendorong *sulinggih-sulinggih* baru untuk menjadi *Pedharma Wacana* supaya semakin banyak yang ikut terlibat mendorong peningkatan pengetahuan umat Hindu. “Kalo saya tidak merasa tersaingi bahkan ikut membantu kalau ada yang mau diskusi, sharing pengetahuan untuk menjadi *Pedharma Wacana*. Tapi saya lebih apresiatif kalau nantinya *Dharma Wacana* dan *Pedharma Wacana* muncul di wilayah luar Bali yang terdapat pemeluk Hindunya supaya peningkatan pengetahuan agama Hindu di luar Bali juga meningkat. Nantinya otomatis pemeluk Hindu di luar Bali tidak minder dan malu mengaku sebagai pemeluk Hindu”, ujar Mpu Jaya.

193 Wawancara dengan Mpu Jaya pada 21 Oktober 2014.

194 *ibid*.

Dharma Wacana Dan Tantangan Ajeg Bali

Menurut Gde Pery, produser program acara *Dharma Wacana* di Bali TV, sejauh ini sudah terdapat sebanyak 1231 (seribu dua ratus tiga puluh satu) judul *Dharma Wacana* yang ada di file Bali TV. Judul *Dharma Wacana* tersebut terbagi kedalam 2462 (dua ribu empat ratus enam puluh dua) kaset rekaman. Sementara satu *Dharma Wacana* bisa terbagi menjadi empat episode penayangan dengan durasi masing-masing dua puluh menit lebih¹⁹⁵. Dari ribuan jumlah rekaman tersebut, mencakup materi *Dharma Wacana* yang disampaikan oleh dua *Pedharma Wacana* paling populer saat ini yaitu Ida Pedanda Gede Made Gunung dan Ida Pandita Mpu Jaya Acharyananda.

Dalam setiap *Dharma Wacana* yang disampaikan oleh *Pedharma Wacana* mengambil dari tiga topik utama (baku) yang menjadi kerangka dasar agama Hindu, yaitu *Tatwa* (filsafat), *Upakara* (upacara suci, ritual), dan *Susila* (etika). “Dari tiga kerangka dasar agama Hindu tersebut masing-masing *Pedharma Wacana* membuat turunan tema sendiri dan kemudian dikembangkan sesuai pengetahuan masing-masing. Tapi yang jelas segala tema dalam *Dharma Wacana* merujuk pada tiga kerangka dasar agama Hindu tersebut”, kata Pedanda Gunung.

Namun mengingat pelaksanaan *Dharma Wacana* diinisiasi oleh penyelenggara baik itu instansi pemerintah,

195 Hitungan ini penulis dapatkan atas bantuan Gede Pery dan stafnya yang melakukan hitungan manual terhadap koleksi kaset rekaman *Dharma Wacana*. Gede Pery mengaku Bali TV tidak mempunyai data file akumulatif untuk semua program acara. Wawancara dengan Gede Pery, produser program acara *Dharma Wacana* di Bali TV pada Senin 20 Oktober 2014.

swasta, desa adat, kelompok masyarakat dan pribadi, maka seringkali soal *upakara* yang mendapat porsi besar dalam pertanyaan saat *Dharma Wacana* berlangsung. “Undangan untuk memberikan *Dharma Wacana* biasanya diminta oleh penyelenggara yang sedang melaksanakan piodalan (upacara suci) di pura desa, pura instansi atau pura keluarga. Jadi tema *Dharma Wacana* yang utama seringkali tentang *upakara* (upacara suci, ritual). Yang dibahas berkisar tentang jenis *upakara* (ritual), banten (sesaji), urutan pelaksanaan dan makna-maknanya”, jelas Pedanda Gunung.

Menurut Mpu Jaya, tema *upakara* (ritual) menjadi topik primadona penyelenggara *Dharma Wacana* terutama sekali ibu-ibu yang selalu berurusan dengan banten (sesaji) dalam *upakara*¹⁹⁶. “Ada orang menyebut agama Hindu di Bali itu sebagai agama *upakara* (ritual). Ya ada benarnya juga tapi *upakara* itu kan salah satu bagian dari kerangka dasar agama Hindu. Mungkin kerangka yang lain yaitu *Tatwa* (Filsafat) dan *Susila* (etika) perlu ditambah. Nah itu yang saya lakukan dalam *Dharma Wacana* yang saya berikan dimanapun. Ketiga kerangka dasar agama Hindu disinggung walaupun

196 Kecenderungan agama Hindu di Bali yang sibuk dengan upakara (ritual) dan segala hal ikhwal banten (sesaji) persembahan, salah satunya menjadi bahan kritikan kelompok yang sering disebut sebagai kaum reformis dalam Hindu di Indonesia. Sindiran-sindiran seperti agama Hindu (Bali) ruwet dengan segala upakara dan banten serta menelan biaya besar seringkali muncul sambil mengetengahkan perlunya pemahaman agama yang rasional, mementingkan ajaran agama dan bhakti (devotion) kepada Tuhan. Dalam versi yang dianggap lebih ekstrem muncul pemahaman ajaran Hindu yang disebut anti ritual (lokalitas) dan mengetengahkan paham agama yang universal. Kelompok Reformis ini salah satunya disebut Sai Baba. Lebih jauh tentang debat soal pemahaman agama dalam Hindu terutama Sai Baba lihat Gde Dwitya Arif Metera, *Religious Commuters: Contemporary Balinese Religious Identification in A Northern Balinese Town*. Center for Religious and Cross Cultural Studies, Graduate School Gajah Mada University, Yogyakarta 2012. Tesis tidak diterbitkan.

permintaan audience dalam simakrama (tanya-jawab) kebanyakan bertanya soal *upakara*, sarana, proses dan maknanya”, kata Mpu Jaya.

Menurut Gede Pery, produser program acara *Dharma Wacana* di Bali TV, tema *upakara* (ritual) menjadi tema dominan dalam *Dharma Wacana* di Bali TV, sedangkan tema *tatwa* (filsafat) dan *susila* (etika) terlihat kurang dominan. Lebih lanjut Gede Pery menyinggung tentang tema (baru) lain yang juga sudah disetujui pimpinan Bali TV untuk kerjasama adalah tema penguatan ekonomi umat Hindu. “Kami sudah bekerjasama dengan sebuah bank perkreditan rakyat (BPR) di Bali yang akan menjadi sponsor untuk membuat *Dharma Wacana* secara rutin ditempat-tempat dimanapun di Bali. Jadi bank perkreditan rakyat tersebut akan membiayai syuting, konsumsi *Dharma Wacana* dan sesari (dalam bahasa sederhana bisa disebut honor) untuk *Pedharma Wacana*”, cerita Gede Pery¹⁹⁷.

Sejauh ini seperti diamini oleh dua *Pedharma Wacana* yang penulis wawancarai, Pedanda Gunung dan Mpu Jaya, tema-tema *Dharma Wacana* lebih banyak ditujukan “kedalam” untuk membuka wawasan umat Hindu dan kemudian memperkuat serta meningkatkan pengetahuan mereka akan ajaran agamanya. Dominannya tema *upakara* dalam *Dharma Wacana*, menjadi bukti bahwa perspektif *inward looking* mendominasi pemilihan tema dan pelaksanaan *Dharma Wacana*.

Ada dua judul program *Dharma Wacana* di Bali TV yang ingin penulis analisis untuk dijadikan sebagai contoh

197 Wawancara dengan Gede Pery, produser program acara *Dharma Wacana* di Bali TV pada Senin 22 September 2014 (ibid).

bagaimana kuatnya perspektif *inward looking* dalam pemilihan dan pelaksanaan *Dharma Wacana* dan cenderung membentuk pemahaman ajaran dan sikap beragama yang eksklusif. Kedua judul rekaman program acara *Dharma Wacana* ini adalah *Dharma Wacana* yang diberikan masing-masing oleh Pedanda Gunung dan Mpu Jaya. Kedua judul ini dipilih dengan alasan, pertama, merupakan *Dharma Wacana* yang disampaikan oleh dua narasumber *Pedharma Wacana* yang menjadi key informant (informan kunci) dalam penelitian ini. Kedua, lokasi dan pihak pengundang dan penyelenggara *Dharma Wacana* yang dianalisis berbeda sehingga mewakili lokasi dan pihak pengundang *Dharma Wacana* yang beragam sebagaimana disampaikan di pendahuluan.

Terakhir, dua judul rekaman program acara *Dharma Wacana* ini membahas tiga kerangka dasar agama Hindu yaitu *tatwa* (filsafat), *upakara* (ritual), dan *susila* (etika). Walaupun turunannya dalam bentuk judul *Dharma Wacana* berbeda sesuai dengan rumusan *Pedharma Wacana* namun secara esensi tetap merujuk pada tiga kerangka dasar agama Hindu tersebut. Namun apa yang menjadi tekanan analisis dalam penelitian ini isi *Dharma Wacana* yang cenderung eksklusif, seraya menyampaikan stereotype-streotype pejoratif tentang orang luar Bali (etnis dan agama tertentu).

Dharma Wacana pertama yang menjadi bahan analisis diselenggarakan oleh Desa Pekraman Pemogan, Denpasar dan berlokasi di Pura Puseh¹⁹⁸ desa setempat. *Dharma Wacana* ini

¹⁹⁸ Pura Puseh adalah pura tempat berstananya (tempat tinggal dan yang dipuja) Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara bumi dan kehidupan dalam konsep tri murti; tiga manifestasi Tuhan dalam bentuk utpeti, stiti, pralina. Dalam penjabarannya Utpeti yaitu manifestasi Tuhan sebagai pencipta dalam wujud Dewa Brahma, Stiti yaitu manifestasi Tuhan sebagai pemelihara dalam wujud Dewa Wisnu,

diselenggarakan dalam rangkaian piodalan (upacara semacam ulang tahun pura) di pura Puseh desa Pemogan yang diselenggarakan setiap enam bulan sekali. Waktu pelaksanaannya adalah hari Minggu tanggal 4 (empat) Mei 2014. *Dharma Wacana* disampaikan oleh Ida Pedanda Gede Made Gunung dan mengambil judul Upacara Yadnya sebagai media pendidikan untuk meningkatkan moralitas umat. Dalam rekaman *Dharma Wacana* tersebut sebagaimana dimiliki oleh Bali TV, durasi *Dharma Wacana* berlangsung selama enam puluh menit (60 menit) dan seratus dua puluh enam detik (126 detik).

Rekaman itu terbagi kedalam empat episode dengan rincian episode pertama dan kedua berlangsung selama dua puluh menit (20 menit) dan dua puluh tujuh detik (27 detik). Episode ketiga berlangsung selama dua puluh menit (20 menit) dan empat puluh dua detik (42 detik) serta episode ketiga berlangsung selama dua puluh menit (20 menit) dan tiga puluh detik (30 detik).

Dharma Wacana diawali oleh Pedanda Gunung dengan ucapan salam Om Swastyastu dan dilanjutkan dengan menyapa audience yang hadir di lokasi seperti prajuru (pengurus) desa pekraman, pinandita (pemangku, pemimpin upacara) dan masyarakat Desa Pekraman yang hadir. Pembukaan ini adalah model baku dalam semua *Dharma Wacana* yang diselenggarakan dan nantinya akan ditutup dengan Om Shanti..Shanti..Shanti..Om¹⁹⁹.

dan Pralina yaitu manifestasi Tuhan sebagai pengembali ke asalNYA dalam wujud Dewa Siwa.

199 Kedua istilah ini yaitu Om Swastyastu dan Om Shanti..Shanti..Shanti..Om juga bisa disebut sebagai fenomena baru mengingat sebelum Reformasi istilah ini nyaris tidak terdengar. Sebagaimana disinggung

Program acara *Dharma Wacana* sendiri disampaikan menggunakan basa Bali (bahasa Bali) yang sesekali dicampur dengan bahasa Indonesia. Dalam pembahasan penulis, semua ucapan dalam *Dharma Wacana* baik dari *Pedharma Wacana* maupun dari krama (warga) Desa Pekraman Pemogan yang bertanya telah penulis terjemahkan kedalam bahasa Indonesia.

Sesuai dengan judul dan konteks acara yaitu piodalan, poin-poin yang disampaikan dalam *Dharma Wacana* oleh Pedanda Gunung berkisar seputar *Upakara*, *Yadnya* (upacara dan persembahan suci), jenis-jenisnya, material bebantenan (sesaji), proses dan urutan *upakara*, makna bebantenan. Semua poin-poin tersebut dicari benang merahnya dengan pendidikan moralitas umat. Apa yang menjadi poin pemikiran Pedanda Gunung terkait *Upakara*, *yadnya* adalah memakai analisis simbolik. Dalam pandangan Pedanda Gunung, semua terkait *upakara*, *yadnya*, *bebantenan* adalah media dimana setiap itemnya memiliki makna yang terkait dengan kehidupan manusia sehari-hari.

Pedanda Gunung misalnya menyajikan contoh pemasangan daun kelapa yang dianyam (klangsah) di pagar pura saat penyelenggaraan piodalan. Menurut Pedanda Gunung, Klangsah asal katanya kala dan sah, yang maknanya bila masuk ke pura taruhlah, campakkanlah kala (setan) di depan pagar pura, agar masuk ke pura hatinya bersih (Tuhan) yang ada dihati umat. Lebih lanjut Pedanda Gunung menjelaskan bahwa Klangsah berfungsi untuk memagari hati yang kurang bersih sehingga ketika masuk pura hatinya

sebelumnya kedua peDharma Wacana menyebut munculnya istilah ini sebagai sukses story Dharma Wacana terkait dengan peningkatan pemahaman keagamaan umat Hindu

menjadi bersih. Pedanda Gunung juga mengingatkan audiencenya agar tidak menebang semua pohon kelapa sebagai bahan pembuatan klangсах. “Jangan semua ditebang untuk bangun rumah atau hotel seperti di daerah ini. Nanti untuk upacara nyari bahan dimana”, tanya Pedanda Gunung. Detail-detail simbol-simbol di pura saat piodalan inilah yang menjadi pembahasan Pedanda Gunung dalam *Dharma Wacananya*.

Kesimpulan yang ditarik Pedanda Gunung terkait tema *Dharma Wacana* dengan tema Upacara Yadnya sebagai media pendidikan untuk meningkatkan moralitas umat, dia rumuskan sebagai memanusiakan alam dan manusia. Manusia (umat Hindu) melakukan *upakara*, yadnya maknanya menyembah Tuhan disamping untuk memuliakan diri dan belajar menghormati alam. Pedanda Gunung juga menyinggung tentang pentingnya mengAjeḡkan Bali sebagaimana tercermin dalam ajaran *Tri Hita Karana*²⁰⁰ yaitu penghormatan pada Tuhan, sesama manusia dan penghormatan terhadap alam.

Di sela-sela pembahasan *Dharma Wacananya* tidak lupa Pedanda Gunung, juga menyinggung soal keterbatasan pemahaman dan pengetahuan umat Hindu. Misalnya Pedanda Gunung mencontohkan apa yang terjadi di Desa

200 Tri Hita Karana menjadi terminologi dan wacana penting juga di Bali pasca Reformasi. Seringkali Tri Hita Karana selalu disebut-sebut berbarengan dengan Ajeḡ Bali sebagai wacana dominan di Bali. Bahkan seperti Ajeḡ Bali yang dibuatkan prasasti, dilombakan, Tri Hita Karana juga dijadikan sebuah award oleh Bali Tourism Board, sebuah lembaga yang dibentuk pemda Bali dan berperan dalam sektor pariwisata di Bali. Tri Hita Karana sendiri berasal dari kata tri yang artinya tiga, hita artinya kebahagiaan, dan karana artinya penyebab. Kebahagiaan ini akan tercapai bila kita menjaga keharmonisan dengan Tuhan, sesama manusia dan dengan alam (Wesnawa 2010).

Pekraman Pemogan yang dekat dengan Kuta sebagai daerah turis. “Disini banyak ada bangunan villa dan turis yang menyewa rumah untuk tempat tinggal. Kalo ada turis yang nanya kenapa patung pakai pakaian, misalnya patung orang pake destar di kepala, baju dan kain di badan sampai kakinya. Tidak boleh jawabannya asal-asalan misalnya supaya tidak telanjang, malu nanti atau nak mule keto (memang begitu dari sononya). Malu kita sebagai umat Hindu kalo jawab begitu, pendidikan sudah bagus, mobil punya masak jawabnya begitu”, cerita Pedanda Gunung.

Lebih lanjut Pedanda Gunung menekankan pentingnya *Dharma Wacana* untuk memberikan pencerahan umat dan dibantu misalnya dengan penerbitan buku-buku yang bisa membantu meningkatkan pengetahuan umat. “Makanya harus sering baca buku agama Hindu dan selenggarakan *Dharma Wacana*, biar tambah pintar”, kata Pedanda Gunung seperti berpromosi sambil tertawa.

Dalam *Dharma Wacana* yang berjudul Upacara Yadnya sebagai media pendidikan untuk meningkatkan moralitas umat, terlihat sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan umat Hindu akan agamanya, khususnya umat Hindu di Desa Pekraman Pemogan. Dalam *Dharma Wacana* ini terlihat penggunaan perspektif *inward looking* dalam *Dharma Wacana* yang disampaikan oleh Pedanda Gunung. Implikasinya kemudian muncul dalam sesi tanya jawab antara Pedanda Gunung dengan karma (warga) Desa Pekraman di lokasi *Dharma Wacana*. Setelah pertanyaan pertama tentang dudonan (urutan dan aturan) proses *upakara* beserta bebantenan (sesajinya) oleh pemangku (pinandita, yang memimpin upacara di pura), kemudian muncul pertanyaan dari seorang prajuru (pengurus) pura puseh Pemogan.

Pertanyaan ini juga dia sebutkan sebagai semacam otokritik kepada diri dan masyarakat Bali secara umum. Pertanyaan pertama, terkait *upakara*, yadnya di Bali yang menjadi semacam ajang untuk pamer kekayaan. Kedua, menurut prajuru tersebut, di daerah Pemogan dan sekitarnya banyak terdapat café remang-remang yang membawa dampak negatif bagi masyarakat Desa Pekraman Pemogan. Terakhir, prajuru tersebut mengeluh soal sektor pekerjaan yang susah bagi warga Pemogan dan bagi masyarakat Bali umumnya. Prajuru tersebut juga menyinggung tentang migrasi orang luar Bali yang bekerja jadi “cewek café” yang menghalalkan segala cara dan pemulung yang terkesan kumuh tempat tinggalnya.

Sebagai Siwa (guru) pemberi *Dharma Wacana* berpengalaman, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa (masyarakat, pemirsa, krama), Pedanda Gunung selalu cekatan dan diselingi dengan humor-humor. Tentang pertanyaan dudonan proses *upakara* beserta bebantenan (sesajinya), dijawab dengan gamblang oleh Pedanda Gunung. Namun sekali lagi dia mengingatkan agar tidak perlu bermewah-mewah dalam membuat sarana dan perlengkapan *upakara* supaya tidak membebani masyarakat sendiri. Bahkan ditengah penjelasannya Pedanda Gunung juga menyinggung soal beratnya beban *upakara* dan sarana bebantenannya (sesajinya) sehingga menyebabkan banyak orang Bali (Hindu) yang pindah agama. “Ironis sebenarnya orang Hindu di Bali pindah agama lain sementara saudara kita di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi yang non Bali mau masuk Hindu juga susah. Seperti dijepit jurang kita ini”, kata Pedanda Gunung. Diakhir jawabannya Pedanda Gunung sekali lagi mengingatkan kalau *upakara* dan bebantenan itu hanya media dan sarana, yang perlu diketahui dan dipelajari adalah makna simbol-simbol itu dan pengaruhnya bagi sikap umat Hindu

sehari-hari. “*Upakara* dan bikin *bebantenan* tiap hari, rajin Tri Sandhya tapi buang sampah sembarangan, suka ngomong kotor dan kasar, lebih-lebih suka main ke *café remang-remang*. Itu sama saja, gak benar dan gak ada artinya”, kata Pedanda Gunung.

Pedanda Gunung kemudian melanjutkan jawabannya. “Menyambung ini untuk bapak *prajuru* (pengurus) Desa Pekraman tadi, tentang *café remang-remang*, ini fenomena di seluruh Bali. Saya sebagai rohaniawan sudah berulang kali meminta kepada kepala-kelapa daerah saat diundang *Dharma Wacana* untuk ditutup bukan ditertibkan lagi. Lebih banyak masalah yang dibawa daripada rejeki yang didapat dan juga rejeki itu didapat bukan didapat oleh orang Bali tapi orang luar Bali, kita cuma dapat penyakitnya. Seperti lagunya Raka Sidan²⁰¹ itu, duit habis di *café istri* dan anak tidak terurus”, kata Pedanda Gunung bersemangat.

Pedanda Gunung kemudian melanjutkan untuk menjawab pertanyaan sang *prajuru* (pengurus) Desa Pekraman Pemogan tersebut. “Kalau tentang mencari pekerjaan yang sulit, saya kurang setuju. Banyak pekerjaan yang bisa dilakukan, krama (warga) Bali saja banyak yang

201 Anak Agung Raka Sidan adalah penyanyi lagu pop Bali yang terkenal di Bali saat ini. Bait lagu yang dikutip Pedanda Gunung itu berjudul *Song Brerong* yang secara literer bisa diartikan lobang tuyul. Lagu ini semacam kritik sosial bercerita tentang seorang kepala keluarga yang doyan main ke *café remang-remang* sehingga melupakan keluarganya. Secara implisit lagu ini menangkap fenomena sosial yang berkembang saat ini di Bali yaitu munculnya banyak orang kaya baru yang berprofesi sebagai makelar tanah tapi karena tidak kuat imannya mereka tenggelam dalam kehidupan malam dan akhirnya keluarganya berantakan. Yang menarik adalah cewek *café* yang dituduh sebagai penyebab dan digambarkan sebagai *brerong* (tuyul) penghisap uang. Cewek *café* ini disebut berasal dari *dauh tukad* (barat sungai), ini adalah sebutan untuk Jawa. Sangat kuat pengaruh stereotype tentang Jawa sebagai yang merusak dalam lagu ini dan diskriminasi perempuan yaitu lewat tuduhan cewek *café* sebagai *brerong* (tuyul).

malas masih milih-milih pekerjaan”, jawab Pedanda Gunung. Lebih jauh Pedanda Gunung mencontohkan orang-orang tua Bali dahulu yang mau bekerja keras membanting tulang kerja di sawah, jadi tukang pasir, tukang batu, tukang bangunan atau berjualan di pasar. Menurut Pedanda Gunung orang Bali sekarang mau kerja yang gampang tapi cepat dan menghasilkan banyak. Menjadi makelar baik untuk sektor politik, properti, pariwisata dan budaya. “Makelar politik dan makelar tanah yang trend karena kemarin pemilu dan banyak anggota DPRD dan politisi yang jadi makelar tanah. Kalo makelar pariwisata kan banyak guide bodong tanpa ijin, kalo makelar budaya banyak prajuru (pengurus) adat yang bikin proposal perbaikan pura, *upakara* (ritual) dan mengajukannya ke DPRD dan bupati untuk dapat bantuan sosial. Ini fakta, rahasia umum hanya kita mau mengakui atau tidak”, kata Pedanda Gunung yang disambut dengan ketawa oleh hadirin.

Lebih lanjut dalam penjelasannya Pedanda Gunung menyinggung tentang migrasi penduduk pendatang asal luar Bali. “Soal penduduk pendatang ini memang susah, pemerintah dan aparatnya lemah dalam menegakkan aturan. Mereka datang menyerbu Bali dan mengambil pekerjaan orang Bali (Hindu). Sekarang lihat pedagang pecel lele masuk sampai ke pelosok-pelosok Bali, pemulung kadang menyaru jadi maling masuk ke rumah-rumah mencari rongsokan. Ini karena kita (orang Bali- Hindu) malas dan *tidak eling* (ingat) dan waspada. Bukti paling nyata ya bom di Kuta dan Jimbaran itu”, terang Pedanda Gunung. Pedanda Gunung kemudian kembali mengingatkan krama (warga) Desa Pekraman Pemogan untuk meng*Aj*egkan Bali supaya bisa menjaga dan membuat adat, budaya (Bali) dan agama Hindu lestari. “Itu kan ada program usaha kecil di koperasi krama Bali, bisa jualan bakso babi, bisa minjam kredit. Itu untuk yang

mau bekerja, mandiri. Untuk orang tua dan guru-guru juga siswa perkuat jati diri sebagai orang Bali (Hindu), belajar basa Bali, semua disini siswa bisa *tri sandhya* kan?"...yang dijawab serempak anak-anak bisaaa...yang terakhir para *prajuru* (pengurus) Desa Pekraman dan pecalang supaya selalu waspada dan menegakkan aturan kependudukan dengan benar. Jangan baru dikasi uang lebih langsung iya, disuap cewek café langsung merem", kata Pedanda Gunung yang disambut tawa hadirin.

Dharma Wacana yang kedua yang menjadi unit analisis disampaikan oleh Ida Pandita Mpu Jaya Acharyananda. *Dharma Wacana* ini diselenggarakan oleh serikat pekerja pariwisata kabupaten Badung dan mengambil tempat di gedung serikat pekerja pariwisata Bali di Denpasar. *Dharma Wacana* ini diselenggarakan dalam rangka ulang tahun serikat pekerja pariwisata kabupaten Badung yang dirayakan dengan persembahyangan bersama di pura yang ada di kantor serikat pekerja pariwisata Bali di Denpasar. Dalam *Dharma Wacana* tersebut Mpu Jaya mengetengahkan judul Bersahabat dengan Kehidupan.

Sebagaimana tercatat dalam rekaman milik Bali TV yang peneliti duplikasi, durasi *Dharma Wacana* yang disampaikan oleh Mpu Jaya ini berlangsung selama total delapan puluh dua menit (82 menit) dan tiga puluh enam detik (36 detik). Rekaman *Dharma Wacana* oleh Mpu Jaya ini juga terbagi ke dalam empat episode yang rata-rata setiap episodenya juga berlangsung selama dua puluh menit (20 menit).

Dalam *Dharma Wacana* yang berjudul Bersahabat dengan Kehidupan ini yang diselenggarakan pada Minggu 29 Juni 2014 ini, Mpu Jaya memaparkan tentang swadarma (hak

dan kewajiban) sebagai seorang pekerja pariwisata. Merujuk kepada konsep *tri hita karana* yang mengajarkan kehidupan harmonis dengan cara bhakti kepada Tuhan, bersahabat dengan manusia dan bersahabat dengan alam, swadarma seorang pekerja pariwisata harusnya mengaplikasikan konsep *tri hita karana* tersebut. Menurut Mpu Jaya bila konsep *tri hita karana* dipraktekkan dengan baik, maka kehidupan dan hubungan kerja di sektor pariwisata akan berlangsung harmonis.

Aplikasi konsep *tri hita karana* dalam hubungan kerja di sektor pariwisata ini mencerminkan turunan *tatwa* (filsafat) dari kerangka dasar agama Hindu. Bagi Mpu Jaya konsep *tri hita karana* ini bukan hanya bisa diaplikasikan oleh pekerja Bali-Hindu namun juga untuk non Bali-Hindu. “Saya kira di semua agama mengajarkan tentang menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam”, kata Mpu Jaya.

Menurut Mpu Jaya, konsep *tri hita karana* seharusnya tidak hanya diaplikasikan oleh pekerja namun juga oleh pemberi kerja. “Harus ada keseimbangan baik pemberi kerja dan pekerja untuk menghindari konflik dalam hubungan kerja pariwisata. Khusus di Bali perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata perlu menghormati adat, budaya (Bali) dan agama Hindu. Unsur penunjang utama pariwisata Bali kan ketiga hal tersebut, jadi kalau itu rusak dan hilang ya rusak dan hilang juga pariwisata Bali. Pkerjanya juga harus kerja keras jangan sedikit-sedikit minta libur, kadang saya tahu juga alasan *upakara* (upacara) adat dan agama dijadikan alasan. Ini salah besar dan dosa, nanti hukum karmaphala yang berjalan”, kata Mpu Jaya mengingatkan.

Dalam penjelasan Mpu Jaya tersebut, dia menegaskan tentang unsur *susila* (etika), satu dari tiga kerangka dasar agama Hindu yang perlu diaplikasikan dalam dunia pariwisata. “Ini menyangkut etika perusahaan dan etika pekerja pariwisata, jangan hanya menuntut tapi harus ingat kewajiban. Menghormati lingkungan adat, budaya, dan agama dimana perusahaan itu berada juga penting “, jelas Mpu Jaya.

Dalam tanya jawab ada satu pertanyaan menarik yang diajukan oleh peserta *Dharma Wacana* yang cenderung mengandung muatan yang bisa memengaruhi hubungan antarumat beragama di Bali, disamping ada niat untuk menyemangati diri sebagai orang Bali-Hindu. Pertanyaan tersebut menyangkut tuduhan akan kecenderungan perusahaan pariwisata di Bali menghindari pekerja Bali-Hindu dengan dalih sistem rekrutmen dan analisis personal pekerja Bali-Hindu. “Ada perusahaan-perusahaan pariwisata di Bali yang tidak senang dengan pekerja Bali-Hindu. Alasannya seperti kepanjangan dari Bali yaitu banyak libur. Pekerja Bali-Hindu dianggap akan banyak minta libur untuk *upakara* (upacara suci, ritual) adat dan agama. Kalo perusahaan besar mereka biasanya melakukan rekrutmen dari Jakarta, jadi perusahaan cabangnya di Bali akan beralasan itu kebijakan Jakarta, jadi kita tidak tahu. Sementara untuk pekerja Bali-Hindu sulit untuk komplain atau bertanya karena katanya keputusan Jakarta”, tanya seorang peserta *Dharma Wacana*.

Dengan senyum mengembang, Mpu Jaya mengomentari pertanyaan dari seorang peserta *Dharma Wacana* tersebut. “Sebenarnya pertanyaan tadi sudah saya jawab di depan, cuma mungkin penanya perlu penegasan dari

saya ya. Pertanyaan seperti ini sering saya dengar dan pernah ditanyakan juga saat saya memberi *Dharma Wacana* di tempat lain. Jawaban saya, dimana bumi dipijak disana langit dijunjung. Harus dihormati lokalitas dan lingkungan dimana kita berada. Usaha-usaha wisata di Bali kan juga istilahnya menjual Bali, kalo tidak karena Bali(Hindu)nya mungkin usaha mereka gak akan laku. Ini harus disadari oleh pengusaha dan perusahaan yang hidup di Bali. Pemerintah sebagai yang berwenang wajib mengingatkan hal ini. Kalau saya hanya mampu menghimbau lewat *Dharma Wacana*”, kata Mpu Jaya.

Mpu Jaya kemudian melanjutkan penjelasannya terkait pertanyaan peserta *Dharma Wacana* tadi dengan menyinggung tentang wacana dan gerakan *Ajeg* Bali. Menurut Mpu Jaya, wacana dan gerakan *Ajeg* Bali penting untuk menyatukan persepsi antar semua stakeholders di Bali termasuk di sektor pariwisata untuk menjaga dan menegakkan adat, budaya (Bali), dan agama Hindu. “Kapan lagi dan siapa lagi yang harus menjaga dan melestarikan Bali kalau bukan kita dan mulai sekarang. Walau sudah terlambat daripada tidak samasekali. Jangan menunggu kehancuran dan akhirnya kita jadi penonton di rumah sendiri”, kata Mpu Jaya mengingatkan.

Analisis isi materi dua judul *Dharma Wacana* yang disampaikan oleh dua *Pedharma Wacana* diatas memperlihatkan bagaimana *Dharma Wacana* yang berspektif *inward looking* cenderung menumbuhkan sikap dan pemahaman keagamaan eksklusif. Alih-alih meningkatkan pengetahuan akan ajaran agama Hindu dan mempertebal rasa bhakti (taqwa) kepada Tuhan, juga berpeluang menganggap ajaran sendiri paling benar dan yang lain salah atau merusak.

Tak pelak wacana dan gerakan *Ajeg* Bali yang dominan menjadi narasi besar yang membingkai *Dharma Wacana*. Ini terlihat dari pernyataan dan semacam kesimpulan kedua *Pedharma Wacana* diatas yang selalu merujuk dan bermuara kepada wacana dan gerakan *Ajeg* Bali. Wacana dan gerakan *Ajeg* Bali menjadi semacam tujuan semua upaya untuk menjaga dan menegakkan adat, budaya (Bali) dan agama Hindu. Upaya meningkatkan pemahaman umat Hindu akan agamanya dan mempertebal rasa bhakti kepada Tuhan lewat *Dharma Wacana* adalah bagian dari upaya meng-*Ajeg*-kan Bali, artinya pernyataan dan penjelasan kedua *Pedharma Wacana* diatas mengimplikasikan bahwa bila Bali sudah *Ajeg* otomatis pemahaman umat Hindu akan agamanya akan meningkat demikian pula rasa bhaktinya kepada Tuhan (Ida Sanghyang Widhi Wasa).

Sementara disisi lain ada implikasi lebih lanjut dari pengaruh *Ajeg* Bali terhadap *Dharma Wacana*. Implementasi wacana dan gerakan *Ajeg* Bali ini berbanding lurus dengan perspektif *inward looking* dalam *Dharma Wacana* yang telah mendorong sikap dan pemahaman agama yang eksklusif. Bentuknya adalah *stereotype-streotype* yang terlontar baik oleh kedua *Pedharma Wacana* dan dari pertanyaan serta pernyataan audience dalam *Dharma Wacana*. Segaris dengan implemantasi *Ajeg* Bali, *stereotype-stereotype* yang muncul dalam *Dharma Wacana* secara umum diantaranya, pertama, orang luar Bali (non-Bali, non-Hindu) datang (migrasi) ke Bali dan mengambil serta menguasai pekerjaan dan ekonomi Bali. Kedua, migrant (pendatang) ini tidak saja menguasai dan mengambil kendali ekonomi di Bali tetapi juga membawa pengaruh negatif terhadap adat, budaya (Bali), dan agama Hindu. Oleh karena itulah orang Bali-Hindu harus bangkit,

tegak, menjaga adat, budaya (Bali), dan agama Hindu dengan pecalangan.

Inisiatif Mendorong *Dharma Wacana*: Dari Yang Eksklusif Menuju Yang Inklusif Dan Yang Pluralis

Saat peneliti datang untuk wawancara ke griya Pedanda Gunung di bilangan Blahbatuh, Gianyar ternyata beliau sedang ada di pesraman (tempat belajar agama, Weda). Pedanda Gunung telah duduk bersama sekitar delapan puluhan yang berkumpul di sebuah bangunan besar terbuka dengan posisi duduk sedang beryoga. Menurut Gus Tut, anak sekaligus asisten Pedanda Gunung, kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan di pesraman Pedanda Gunung. Pesertanya juga datang dari berbagai tempat di seluruh Bali dan dengan latarbelakang agama yang beragam. “Ada yang pendeta Kristen, umat Budha, Konghucu, Muslim, Katolik. Paling tidak dua kali dalam sebulan ada kegiatan yoga yang pesertanya dari berbagai tempat di Bali. Tetapi kalau yang dari seputaran sini (Gianyar) setiap seminggu sekali pasti datang”, cerita Gus Tut.

Setelah kegiatan Yoga selesai para peserta membuat kelompok-kelompok kecil yang duduk melingkar untuk berdialog seputar persoalan-persoalan keagamaan atau sharing persoalan kehidupan sehari-hari. “Pedanda kerjasama dengan Prof. Suryani yang punya kelas yoga dan counseling. Biasanya mereka mengirim trainer yoga dan beberapa tenaga counseling. Tapi sekarang yang jadi trainer mereka sendiri, peserta yang uda pengalaman”, cerita Pedanda Gunung menyebut Luh Ketut Suryani, seorang Profesor ahli Psikiatri di universitas Udayana Bali. Dalam setiap kegiatan Pedanda

Gunung mengaku selalu terlibat terkecuali sedang di luar kota atau luar negeri. Pedanda Gunung juga memberikan *Dharma Wacana* singkat sebagai pengantar sebelum dialog dan *sharing* pengalaman.

Namun Pedanda Gunung memberi catatan bahwa kegiatan yoga dan dialog serta *sharing* pengalaman tersebut jangan dianggap mencampuradukkan ajaran agama. “Pedanda termasuk yang tersinggung dan bersuara keras saat ada larangan untuk kegiatan yoga, kalo gak salah dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) ya? Alasannya bisa merusak akidah bagi Pedanda gak masuk akal. Wong ini cuma belajar memusatkan pikiran, konsentrasi dan pelepasan stress. Trus dialog tentang isu-isu agama umum, kayak ISIS atau Bom Bali, itu kan jelas semua agama gak setuju dan gak ngajarin kekerasan, seharusnya loh”, kata Pedanda Gunung berseloroh.

Sementara saat berkunjung untuk wawancara, puluhan mobil sudah parkir di depan griya (rumah) Ida Pandita Mpu Jaya Acharyananda. Masuk kedalam puluhan orang sudah menunggu di ruang depan dari griya (rumah) yang diberi nama Griya Mumbul Sari yang terletak di daerah Serongga, Gianyar tersebut. Para tamu yang datang tersebut ada yang memakai pakaian adat Bali, pakaian biasa (baju dan celana jeans) sampai dengan anak-anak muda yang berseragam jaket almamater sebuah perguruan tinggi.

Sambil menunggu Mpu Jaya keluar dan menyambut tamu yang hadir peneliti berkesempatan berbicara dengan para tamu yang hadir sambil memperkenalkan diri. Rombongan bapak-bapak berpakaian adat Bali adalah prajuru (pengurus) sebuah desa di Denpasar yang ingin mengundang Mpu Jaya untuk memberikan *Dharma Wacana* dalam rangka

piodalan (upacara adat) di desa mereka. Sepasang ibu dan bapak paruh baya mengaku dari Surabaya dan punya urusan pribadi dengan Mpu Jaya. Sepasang suami istri yang berprofesi dokter dan mengaku tinggal di Papua juga sedang menunggu Mpu Jaya. Sementara rombongan anak-anak muda berbaju almamater berasal dari sebuah perguruan tinggi Kristen di Denpasar yang ingin mengundang Mpu Jaya untuk menjadi narasumber dalam seminar soal hubungan antar umat beragama yang diadakan kampus mereka.

Ketika keluar dari dalam griya (rumahnya) yang cukup asri, Mpu Jaya sumringah menyambut tamu-tamu yang hadir. Karena paling awal dan sudah ada janji sebelumnya, peneliti berkesempatan paling awal wawancara dengan Mpu Jaya. “Ini wawancara terbuka kan, tidak ada rahasia dan kalo ada isu sensitif soal agama yang bisa didiskusikan”, kata Mpu Jaya membuka pembicaraan. Setelah peneliti mengangguk Mpu Jaya kemudian memperkenalkan sambil menyapa tamu-tamu yang hadir. “Kebetulan bapak ini mau wawancara saya tentang *Dharma Wacana* dan hubungan antar agama di Bali, kalau ada yang mau berkomentar silakan ya”, kata Mpu Jaya yang disambut jawaban iya dari tamu-tamu yang hadir.

Dengan menyebut latarbelakang tamu-tamu yang hadir Mpu Jaya mengklaim bahwa dirinya terbiasa dengan beragam pandangan keagamaan yang ada. Mpu Jaya juga menyebut apa yang dia sampaikan dan bicarakan dengan beragam tamunya yang hadir sebagai *Dharma Wacana* untuk hubungan antar umat berbeda agama yang toleran. “Ini kan *Dharma Wacana* juga, skalanya kecil tapi ya gak ada publikasi. Tapi tiap ada kesempatan, dimana dan kapan saja, saya ber*Dharma Wacana* dan menyebarkan pemahaman agama toleran”, klaim Mpu Jaya.

Dalam pembicaraan selanjutnya Mpu Jaya menyinggung kepentingan para tamunya untuk menjelaskan *Dharma Wacana*, dialog agama dan pemahaman agamanya yang toleran. “Ini karma (warga) Desa Pekraman di Denpasar yang berbatasan dengan kampung Muslim Kepaon. Banyak yang kawin mawin dengan desa bapak-bapak ini ya pak..ada yang jadi Muslim tapi tetap banyak yang jadi Hindu ya pak..hehehe...Ini ibu dan bapak dari Surabaya, kawan lama..agamanya Katolik loh, kalau alergi atau gak toleran ngapain kami bersahabat lama. Kalo pasangan itu, bapak dan bu dokter orang Bali yang tinggal di papua. Mereka yang mengundang saya *Dharma Wacana* keliling Papua, bahkan ada orang lokal sana juga yang ikut mendengarkan *Dharma Wacana* saya. Nah kalo rombongan mahasiswa ini kegiatan rutin karena saya juga dosen sering diminta jadi narasumber soal hubungan antar agama dari perspektif Hindu”, jelas Mpu Jaya.

Selain banyak bermunculannya *sulinggih* dan *Pedharma Wacana*, di Bali pasca reformasi juga banyak bertambah pesraman-pesraman (tempat belajar agama dan Weda) serta kelas-kelas dan kelompok Yoga dan meditasi. Kegiatannya biasanya bersifat lintas agama dan melibatkan peserta dari berbagai latar belakang agama bahkan ateis dan agnostic. Tempat-tempat tersebut banyak yang menjadi semacam melting pot, tempat bertemu (*encounter*) dan nantinya mungkin engagement bagi berbagai pemahaman keagamaan, kepercayaan atau yang ateis dan agnostic tersebut seperti yang berlangsung di pesraman Pedanda Gunung. Merujuk Varsney (2001) kiranya inilah semacam civil society tempat terjadinya inter civic engagement yang berguna dalam pencegahan konflik (*conflict prevention*). “Sekarang *sulinggih*, pesraman, yoga itu kayak jamur di musim hujan, tapi bagus

bagi peningkatan pengetahuan umat Hindu dan dialog antar umat beragama. Lebih alami gak usah pake dibikin-bikin forum ini itu”, kata Mpu Jaya.

Dalam wawancara, kedua *Pedharma Wacana* yaitu Ida Pedanda Gede Made Gunung dan Ida Pandita Mpu Jaya Acharyananda menyadari bahwa perlunya umat Hindu berpikir out of the box dan melihat keluar, keluar dari zona nyaman. Apa yang dimaksud oleh frasa tersebut sudah pernah dipraktekkan oleh kedua *Pedharma Wacana* dan disaksikan sendiri implikasi dan hasilnya bagi mereka sendiri dan umat Hindu secara keseluruhan.

Model-model dan cara berpikir yang keluar dari zona nyaman itu misalnya tercermin dalam kisah Pedanda Gunung yang berpikir melawan arus dengan melakukan *Dharma Wacana* untuk kalangan terbatas walaupun belum menjadi *sulinggih* (rohaniawan) adalah satu contoh. Sementara pengalaman Mpu Jaya yang melihat dan ikut mengalami bagaimana terbukanya pemikiran umat Hindu di daerah transmigrasi (Sulawesi Tenggara) ditengah umat beragama yang beragam saat menjadi penyuluh lapangan dinas agama menjadi contoh lain.

Sebagai pendidik kedua *Pedharma Wacana* juga mengaku melakukan diseminasi ide-ide pluralisme, toleransi dalam kehidupan beragama. “Mengajar di kampus juga bisa disebut *Dharma Wacana*. Sebagai ranah akademik, kampus dan dosen juga tidak bisa membatasi pencarian pemikiran. Termasuk misalnya studi perbandingan agama, walau tetap harus diingat jangan mencampuradukkan ajaran agama”, kata Mpu Jaya. Di kampus tempatnya mengajar yang juga merupakan kampus dimana kedua *Pedharma Wacana* ini belajar juga mengajarkan ilmu perbandingan agama.

Mahasiswa diajarkan dasar- dasar dan pengetahuan umum tentang agama lain.

Dalam ranah dialog antar umat beragama baik di level lokal, nasional dan internasional, kedua *Pedharma Wacana* juga memiliki pengalaman menjadi narasumber. Bahkan Pedanda Gunung mengaku pernah diminta untuk memberikan *Dharma Wacana* di sebuah gereja di daerah Kuta Utara yang penduduknya mayoritas beragama non Hindu. “Di griya saya juga sering menerima kunjungan tokoh, umat lain baik untuk sekedar bersilaturahmi ataupun berdialog persoalan keagamaan dan isu-isu baru seperti misalnya radikalisme agama yang sedang trend sekarang”, cerita Pedanda Gunung. Kedua *Pedharma Wacana* juga mengaku terus berusaha meningkatkan pemahaman agama dan menginisiasi dialog antar umat berbeda agama walau dengan skala terbatas sesuai kemampuan mereka. “Saya yakin walau kecil dan terbatas seperti pengalaman saya merintis *Dharma Wacana*, nyala api kecil interaksi dan dialog serta kemauan saling memahami ini bila terus dipupuk dan diasah, bisa menjadi semacam cermin bagi diri (umat Hindu) sekaligus penerang dan pendorong tersebarnya *Dharma Wacana* yang inklusif dan pluralis sehingga bisa menjadikan kehidupan umat beragama yang harmonis di Bali dan Indonesia.

Penutup

Setelah relatif kurang begitu terdengar suara dan pengaruhnya di masa Orde Baru, penyuluhan/bimbingan/penyiaran agama Hindu mendapatkan popularitasnya di masa pasca reformasi lewat program acara *Dharma Wacana* di Bali TV. Di masa pasca reformasi, *Dharma Wacana* menjadi

satu media penting peningkatan pengetahuan umat Hindu akan agamanya. Antusiasme dalam penyelenggaraan *Dharma Wacana* kiranya menjadi satu indikatornya.

Setelah sekitar satu darsawarsa berlangsung, *Dharma Wacana* ternyata masih belum beranjak dari kepentingan hanya melihat kedalam (*inward looking*). Tema seperti *upakara* (ritual) yang cenderung *inward looking* lebih mendapatkan porsi pembahasan daripada soal *tatwa* (filsafat) dan susila (etika) yang merupakan tiga kerangka dasar agama Hindu. Tiga kerangka dasar agama Hindu masih cenderung hanya diarahkan untuk membuat umat lebih tahu namun unsur-unsur yang membuat umat lebih mengerti termasuk kaitannya dengan umat lain masih kurang disinggung. Sebagai contoh misalnya dalam *upakara* (ritual) dikenal adanya banten *selam* (sesaji) yang berbahan non babi dan biasanya bebek. Ataupun sebutan merasa sebagai saudara seperti nyama Hindu (saudara Hindu) dan nyama Selam (saudara Islam di daerah-daerah komunitas Muslim tua di Bali seperti Pegayaman (Buleleng), Saren Jawa (Karangasem), dan yang lain. Hal seperti ini bisa ditarik benang merahnya secara *tatwa* bahwa tradisi kita menghormati yang lain (Damayana 2011).

Menurut dua narasumber utama penelitian ini, dominannya perspektif *inward looking* dalam *Dharma Wacana* yang mereka sampaikan mengikuti selera pasar yaitu permintaan dan kepentingan penyelenggara *Dharma Wacana*. Penyelenggaraan *Dharma Wacana* lebih banyak dilakukan karena pihak penyelenggara sedang melaksanakan *upakara* (ritual) tertentu. Penyelenggara yang menyarankan topik untuk kemudian *Pedharma Wacana* menyesuaikan dan mengembangkan sesuai saran penyelenggara.

Namun hasil wawancara peneliti mendapatkan data yang berbeda dengan apa yang ditenggarai oleh kedua *Pedharma Wacana* diatas. Ada pendapat lain pemirsa *Dharma Wacana* yang menginginkan agar tema-tema yang dibahas juga sifatnya aktual. Isu seperti anak putus sekolah, bahaya narkoba, bahaya HIV AIDS, hingga kenaikan BBM yang menyulitkan rakyat kecil²⁰². “Kalo soal *banten* (sesaji) dan tata cara pembuatannya itu sudah kegiatan kami sehari-hari, kayaknya tidak perlu diajari lagi. Kan juga beda di masing-masing daerah, misalnya Badung dengan Gianyar kadang ada yang beda. Sekali-sekali tema *Dharma Wacana* bahas masalah harga-harga kebutuhan pokok kan bagus”, ujar Ibu Made Ayu²⁰³.

Sementara perkembangan *Dharma Wacana* sendiri dalam meningkatkan pengetahuan umat Hindu tidak selalu berlangsung mulus. Satu tantangan tersebut datang dari wacana dan gerakan dominan di Bali pasca reformasi yaitu *Ajeg Bali*. Dominasi *Ajeg Bali* misalnya terlihat dari paduan suara setiap pidato pejabat, tokoh masyarakat, politisi, rohaniawan, bahkan masyarakat biasa yang selalu merujuk atau keluar dengan pernyataan meng*Ajekan* Bali bila berbicara tentang bagaimana menjaga Bali. *Pedharma Wacana*

202 Wawancara dengan Ibu Made Endang, ibu rumah tangga pada tanggal 7 Oktober 2014. Ibu Made Endang adalah seorang Katolik yang menikah dan mengikuti agama suaminya yang Hindu. Ibu Endang membandingkan *Dharma Wacana* dengan khotbah di gereja yang menurutnya membahas topik- topik aktual kekinian.

203 Wawancara dengan ibu Made Ayu, seorang penjual canang (sesajen) di pasar Ketapian, Denpasar pada 15 Oktober 2014. Apa yang dikemukakan oleh ibu Made Ayu ini menegaskan tesis Geertz tentang perbedaan pemahaman agama menurut elit (Bali-Hindu) yang berorientasi pada kebenaran teks dan maknanya (orthodoxy) dan apa yang dipraktekkan dan diwarisi oleh kalangan bawah (Bali-Hindu) secara turun temurun (Orthopraxy) (Geertz 1992; 131). Apa yang dikemukakan oleh ibu Made menegaskan tentang Orthodoxy ala Geertz tersebut

juga tidak luput dari dan ikut latah menyitir *Ajag Bali* kadang tanpa sikap kritis.

Lewat sampel dua judul *Dharma Wacana* yang disampaikan oleh dua *Pedharma Wacana* terkenal di kalangan umat Hindu di Bali dan Indonesia ini, terlihat bagaimana wacana dan gerakan *Ajag Bali* berjaln berkelindan dengan perspektif *inward looking* yang mendorong munculnya pemahaman dan sikap beragama yang eksklusif. *Stereotype-stereotype* pejoratif terhadap orang luar dan non Bali-Hindu adalah bentuk lanjut dari semuanya. Dalam studi-studi tentang munculnya konflik dan kekerasan komunal (Petebang dan Sutrisno 2000, Klinken 2007), stereotyping menjadi satu dari sekian awal mulanya. *Stereotype-stereotype* yang seringkali diwarisi, disebarkan dengan sengaja dan ditelan mentah-mentah menjadi akumulatif dan berjaln berkelindan dengan berbagai persoalan lain seperti rebutan kekuasaan politik, kecemburuan ekonomi dapat dengan mudah menyulut bara konflik dan kekerasan.

Dalam konteks inilah peranan *Pedharma Wacana* sebagai elit (rohaniawan) penting dalam mencegah konflik dan menyuburkan kehidupan keagamaan yang toleran. Pentingnya integrasi elit²⁰⁴(termasuk rohaniawan) dalam mencegah terjadinya konflik diperlihatkan oleh hasil penelitian Mohammad Zulfan Tadjoeuddin (2004). Bentuk elite intergration ini disebutkan Tadjoeuddin adalah diskusi, tukar pendapat antar elit berbeda etnis dan agama yang dilakukan secara intens.

204 Lebih jauh lihat Tadjoeuddin, M.Z. (2004) Civil Society Engagement and Communal Violence: Reflections of Various Hypotheses in the Context of Indonesia. Politics Administration and Change, No. 42, July-December, pages 1- 18

Sementara masyarakat Hindu di Bali (terutama di pedesaan, desa adat-pekraman) juga masih melihat pengaruh *sulinggih* (rohaniawan), sehingga apa yang disampaikan mereka masih relatif didengar. Apa yang terjadi dalam *Dharma Wacana* dan antusiasnya masyarakat Bali (Hindu) menyelenggarakannya menjadi satu bukti. Tentang peranan elit (*sulinggih*, rohaniawan) ini kiranya relevan untuk mencegah apabila muncul konflik mengingat dalam studi Tadjoeeddin diatas, konflik dan kekerasan komunal di Indonesia terjadi di wilayah rural (pedesaan).

Walaupun tendensi *Dharma Wacana* yang dipengaruhi wacana dan gerakan *Ajeg Bali* berpotensi mendorong pemahaman dan sikap keagamaan yang eksklusif bahkan mungkin perilaku intoleran dan konflik serta kekerasan, keinginan untuk mendorong kearah sikap dan pemahaman keagamaan inklusif dan pluralis juga muncul. Sinergi antar *stakeholders* dibutuhkan supaya kumandanganya lebih *massif*.

Daftar Pustaka

- Abdilah S, U. (2002) *Politik Identitas Etnis, Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, Magelang: Yayasan INDONESIAITERA.
- Arif Metera, G. D. (2012) *Religious Commuters: Contemporary Balinese Religious Identification in A Northern Balinese Town*. Center for Religious and Cross Cultural Studies, Graduate School Gajah Mada University. Tesis tidak diterbitkan.
- Arsana Dwiputra, I. M. (2009) *Reformasi, TV Mogul dan Hak Publik akan Informasi di Bali*, Yogyakarta: Sumbang saran dalam diskusi Mahasiswa Bali Yogyakarta memperingati Hari Raya Saraswati. Makalah tidak diterbitkan.
- Arsana Dwiputra, I. M. (2012) *Ajag Bali dan Tantangan terhadap Keragaman di Bali, sebuah catatan Bali: Sumbang saran disampaikan pada acara konferensi dan workshop 'Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia: Strategi dan Tantangan' yang diselenggarakan oleh Yayasan Manikaya Kauci bersama Center For Religious and Cross-cultural Studies, 25-27 Juni 2012 di Hotel Puri Dalem, Denpasar*. Makalah tidak diterbitkan.
- Arsana Dwiputra, I. M. (2012) *Konstruksi, Kontestasi dan Ambivalensi Identitas di Bali pasca Suharto Orde Baru: Studi Kasus atas Gerakan Ajeg Bali lewat Bisnis Bakso Babi Krama Bali*. Makalah tidak diterbitkan.
- Awaluddin Yusuf, I. (2005) *Media, Kematian dan Identitas Budaya Minoritas, Representasi Etnik Tionghoa dalam Iklan Dukacita*, Yogyakarta: UII Press.

- Burhanudin, Y.M. (2008) *Bali yang hilang: pendatang, Islam dan Etnisitas di Bali*. Jogjakarta: Penerbit Kanisius.
- Company Profile Bali TV. Tanpa tahun terbit. Couteau, J. (2003) *After the Kuta Bombing: in Search of the Balinese Soul*. *Anthropologi Indonesia* 70: 41-59.
- Dharma Palguna, I.B.M. (1999) *Dharma Sunya: Memuja dan Meneliti Siwa*. Denpasar: Yayasan Dharma Sastra
- Dwikora, P. dan Supartha, W. (eds.), (2001) K. Nadha, sang Perintis, Pustaka Bali Post. Dwipayana, AA GN Ari. dan Darma Putra, I.N (eds.), (2004) *Bali menuju Jagadhita: Aneka Perspektif*, Pustaka Bali Post.
- Erb, M. and Sulistiyanto, P. (eds.) (2009) *Deepening Democracy in Indonesia? Direct Election for Local Leaders (Pilkada)*. Singapore: Institute of South East Asian Studies (ISEAS)
- Eriyanto (2001) *Analisis Wacana, Pengantar analisis teks media*, Yogyakarta: LKiS.
- Fealy, G. (2007) *Consuming Islam: Comodified Religion and Aspirational Pietism in Contemporary Indonesia*, in Greg Fealy and Selly White (eds.), *Expressing Islam: Religious Life and Politic in Indonesia*. Singapore: ISEAS.
- Geertz, C. (1992) *Tafsir Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius
- Johnsen, S. A. (2007) *From Royal House to Nation: The Construction of Hinduism and Balinese Ethnicity in Indonesia*, USA: University of Virginia, Unpublished Dissertation.
- Klinken, G. V. (2007) *Perang Kota Kecil, Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta.

- MacRae, G. and Darma Putra, I. N. (2007) *A New Theatre-State in Bali? Aristocracies, the Media and Cultural Revival in the 2005 Local Elections*. Routledge, Taylor and Francis Group, Asian Studies Review, June, Vol. 31, pp. 171-189.
- Madjid, N. (1998) *“Dialog diantara Ahli Kitab: Sebuah Pengantar”*, dalam B. Groze, George and B. Hubbard, Benjamin (eds.), *Tiga Agama Satu Tuhan: Sebuah Dialog*, terjemahan Santi Ira Astuti, Bandung: Mizan hal. XIX.
- Moleong, L. J. (1989) *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya.
- Nordholt, H. S. (2007) *Bali: An Open Fortress, 1995-2005: Regional Autonomy, Electoral Democracy and Entrenched Identities*. Singapore: NUS Press
- Petebang, E. dan Sutrisno, E. (2000) *Konflik Etnik di Sambas*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi (ISAI).
- Picard, M. (2000) *Agama, Adat, Budaya: The Dialogical Construction of ‘Kebalian’*. Bali: Dialog, Jurnal Internasional Kajian Budaya 1(1): 85-124. Picard, M. (2011) *Balinese Religion in search of Recognition, From Agama Hindu Bali to Agama Hindu (1945-1965)*, Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde Vol. 167, no. 4 (2011), pp. 482-510.
- Suara, M. *Kontestasi Media dalam Liputan Peristiwa Bom Bali 2002*. Bali: artikel tanpa tahun, tidak diterbitkan
- Suarnawa, I. M. (2006) *Media dan Politik dalam Pilkada di Lima Kabupaten/Kota di Bali*. Makalah tidak diterbitkan.

- Subagia, I.W. (2007) *Pengembangan Model Siklus Belajar berdasarkan potensi-potensi Kearifan Lokal Masyarakat Bali dalam Bidang Pendidikan*. Studi Pengembangan model Siklus Belajar Berbasis Budaya. Singaraja: Lembaga Penelitian Universitas Pendidikan Ganesha.
- Suryawan, N. (2005), *Bali, Narasi dalam Kuasa: Politik dan Kekerasan di Bali*. Jogjakarta: Penerbit Ombak.
- Tadjoeddin, M.Z. (2004) *Civil Society Engagement and Communal Violence: Reflections of Various Hypotheses in the Context of Indonesia*. *Politics Administration and Change*, No. 42, July-December, pages 1-18.
- Tamatea, L. (2011) *Ajeg Bali discourse: Globalisation, fear and Othering*. London and New York: Routledge.
- Varshney, A. (2001) *Ethnic Conflict and Civil Society, India and Beyond*. *World Politics* 53 (April), 362-98

Sumber Online

- Allen, Pamella and Palermo, Carmencita, (2005), *Ajeg Bali: Multiple Meaning, diverse agendas*. *Indonesia and Malay World*, Volume. 33, Issue 97, untuk versi online lih. [http://eprints.utas.edu.au/918/1/IMW_article. pdf](http://eprints.utas.edu.au/918/1/IMW_article.pdf).
- Ayu Ratmika, Ni Ketut. *Campur Kode dan Alih Kode pemakaian Bahasa Bali dalam Dharma Wacana Ida Pedanda Gede Made Gunung*, Bali: Jurnal online Humanis Volume XIV No. 1. Desember 2013 Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Udayana, Denpasar,Bali.

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/sastra/article/view/7102>

Damayana, I. W (2011) *Menyama Braya (Studi Perubahan Masyarakat Bali. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.*

<http://repository.library.uksw.edu/handle/123456789/733>.

Muhajir, A. (2007), Kerajaan Media Bali Post. <http://rumahtulisan.wordpress.com/2007/08/10/kerajaan-media-bali-post/>

Pramana, G. I. (2014) Memahami Bali melalui Pecalang. <http://indoprogress.com/2014/01/memahami-bali-melalui-pecalang/>

Rikha Wahyuni, Ni Putu. *Analisis isi Dharma Wacana Agama Hindu melalui Bali TV dalam perspektif pendidikan karakter (studi kasus Pedharma Wacana Ida Pandita Mpu Jaya Acaryananda)*, Bali: Jurnal Widya Winayata, Volume 1 No. 1 (2013) Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Ganesha. <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJPS/article/view/1024>

Santikarma, Degung. *The Model Militia, a New Security Force in Bali is Clocked in Tradition*. Inside Indonesia Edition 73 Januari-Maret2003. <http://www.insideindonesia.org/edition-73-jan-mar-2003/the-model-militia-2907336>

Sugihartono, R.A. (2009) *Televisi Lokal sebagai Medium Pencitraan Lokalitas Daerah*. <http://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/acintya/article/view/17>

- Suryawan, N. (2007) *Di Balik Layar Ajeg Bali*
<http://www.balebengong.net/sosial-budaya/budaya/2007/09/15/di-balik-layar-ajeg-bali.html>
- Susanthi, N. L. (2010) *Spasialisasi Kelompok Media Bali Post (KMB), Berkonsep Ajeg Bali*. <http://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/artikel/article/view/494>
- Wesnawa, I. (2010) *Penerapan Konsep Tri Hita Karana dalam Lingkungan Permukiman Perdesaan (Kasus Kabupaten Badung Propinsi Bali*. Bali: Bumi Lestari Journal of Environment.
<http://ojs.unud.ac.id/index.php/blje/article/view/133>
- Wijaya, I Nyoman (2012) *Melawan Ajeg Bali: Seabad Praktek Hegemoni Intelektual Organik di Bali*, Denpasar: Kantor Sejarahwan Profesional Tri Sadhana Putra.
<http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJPS/article/view/1024>
- <http://www.sorotnews.com/berita/print/dpr-kritik-pelarangan-jilbab.6002.html>
<http://stitidharma.org/search/dwijati>
<http://idapedandagunung.com>

INDEKS

A

Adat, 231, 295, 375
Administrasi Pernikahan, 64, 67,
124, 133
Ajeng Bali, 287, 288, 296, 297, 298,
299, 300, 303, 304, 305, 307, 308,
309, 310, 315, 322, 323, 324, 326,
327, 329, 332, 340, 347, 353, 361,
362, 370, 371, 372, 373, 376, 378

B

Buku Nikah, 96

C

Catin, 89, 90, 91, 94, 102, 117, 125

D

Dharma Wacana, 288, 289, 294,
297, 307, 313, 349, 354, 366, 368

F

Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB), 141, 144,
166, 186
fundamentalisme agama, 1

Fundamentalisme Agama, 8, 16,
17, 19, 20, 27, 34, 37, 38, 42, 45,
46, 54

H

Harmoni, 184, 185, 196, 197, 203,
210, 259, 281, 282, 286
Hindu, 2, 287, 288, 289, 290, 291,
292, 293, 294, 295, 296, 297, 298,
299, 300, 301, 302, 303, 304, 305,
306, 307, 309, 310, 311, 312, 313,
314, 315, 317, 324, 326, 327, 332,
333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
340, 341, 342, 344, 345, 346, 347,
348, 349, 350, 352, 353, 354, 355,
357, 359, 360, 361, 362, 366, 367,
368, 369, 370, 371, 372, 375, 377
HTI, 4, 53

I

Islam, 2, 4, 14, 57, 58, 60, 62, 65,
66, 75, 76, 86, 89, 103, 107, 108,
126, 127, 128, 129, 131, 134, 135,
188, 189, 190, 191, 195, 196, 202,
204, 205, 207, 208, 211, 234, 235,
238, 241, 242, 244, 245, 248, 264,
266, 270, 282, 283, 284, 285, 286,
291, 297, 321, 339, 369, 374

J

Jamaah, 191, 212, 235, 237, 238,
256

K

Kantor Urusan Agama, 57, 58,
138
Kependudukan, 57, 58, 59, 64, 66,
67, 84, 88, 94, 97, 124, 125, 132,
133, 134, 136, 138, 139, 317
Kepribadian, 6, 10, 11, 18, 19, 20,
26, 33, 37, 38, 42, 43, 45, 46
Konflik, 55, 185, 197, 210, 254,
281, 286, 375
KUA, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 137, 138

L

LDII, 191, 212, 237, 238, 253, 274

M

Masjid, 81, 187, 190, 191, 193, 196,
203, 205, 206, 207, 208, 209, 210,

211, 212, 223, 228, 235, 240, 241,
242, 243, 247, 248, 252, 253, 257,
260, 265, 277, 278, 284, 285, 321

MTA, 191, 212, 237

Muhammadiyah, 156, 191, 237,
253, 274, 277

N

NU, 78, 156, 191, 212, 237, 253,
274, 277

P

Pedharma Wacana, 288, 290, 292,
293, 294, 295, 304, 305, 306, 311,
313, 333, 340, 341, 345, 346, 347,
349, 350, 352, 361, 362, 366, 367,
368, 369, 370, 371, 377
Pelayanan, 57, 58, 67, 68, 70, 78,
79, 84, 85, 87, 94, 99, 100, 102,
109, 110, 124, 133, 135, 136, 137,
139, 184
Penghulu, 76, 77, 80, 82, 86, 93,
95, 107, 117, 118, 122, 123
Pluralisme, 195

S

Skema Keagamaan, 9, 16, 17, 18,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31,
32, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46
Spirit, 196, 239
Sulinggih, 290, 295, 334

T

Tabligh, 191, 238

Transformasi, 59, 64, 67, 68, 84,
85, 87, 102, 124, 133, 136

Y

Yoga, 363, 366

